

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi periode Tahun 2021-2026 dan memfokuskan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan Daerah dengan mengintegrasikan dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara– Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
2. Pembangunan Daerah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

RPKD merupakan Dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk Profil Kemiskinan Daerah, Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	KONDISI UMUM DAERAH;
BAB III	:	PROFIL KEMISKINAN DAERAH;
BAB IV	:	PRIORITAS PROGRAM;
BAB V	:	LOKASI PRIORITAS; dan
BAB VI	:	MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadikan acuan bagi pemangku kepentingan.
- (2) Dalam Penyusunan RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan harmonisasi penyusunan RPKD.

Pasal 5

Dalam penyusunan RPKD mengacu pada petunjuk pelaksanaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dokumen perencanaan daerah lainnya serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan RPKD, Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan RPKD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 November 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 November 2021

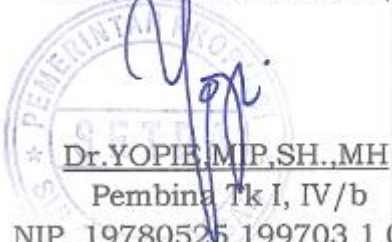
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 800

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2021-2026

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filosofi penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu, *Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.* Dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 juga ditegaskan, *Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.* Selanjutnya disebutkan, *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan bagi dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

Peran negara dalam arti luas yakni seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mendapatkan mandat untuk turut serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah termasuk penanggulangan masalah kemiskinan. Masing-masing pelaku memiliki peran signifikan, jika bersama bergerak hingga menjadi potensi besar dalam penanggulangan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan, karena hasilnya belum optimal dan membawa pengaruh buruk terhadap sektor pembangunan lain. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan pembangunan prioritas menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Isu kemiskinan dalam konteks global telah menjadi agenda internasional, yang ditandai pertemuan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 di Markas Besar PBB. Hasilnya, mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*). Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia, dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda *Millennium Development Goals (MDGs)* dalam upaya mencapai indikatornya. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini menunjukkan

pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDGs. SDGs menggunakan prinsip pembangunan: *No One will be left Behind* artinya pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada mencerdaskan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. RPJMN mengamanahkan bahwa pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah membentuk kelembagaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kelembagaan TNP2K merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaannya diketuai Wakil Presiden, yang memiliki tugas yaitu menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota. Terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan tugas, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Selanjutnya TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan di daerah, Kepala Daerah membentuk Sekretariat TKPK Provinsi/Kab/Kota. Tata kerja dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, yang dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan dokumen RPKD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan juga sebagai evaluasi keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan terutama yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir terutama dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan progres yang relatif lamban dalam penurunannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebanyak 14,90 persen, yang menurun menjadi 13,60 persen pada September 2020 atau menurun 0,325 persen pertahun. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat melalui TNP2K memberikan perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan melakukan pendampingan sejak dimulainya penyusunan dokumen RPKD, sampai pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis dan terarah, serta terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan SDGs perlu diarahkan memperkuat partisipasi penduduk dalam keseluruhan proses pembangunan. Pembangunan yang dituju tidak hanya diartikan sebatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu. Untuk itu, rangkaian terget dan indikator di dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan harus berkaitan dengan upaya peningkatan kesempatan dan kemampuan setiap penduduk. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan masyarakat dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Penggulangan Kemiskinan Daerah merupakan pengganti dari dokumen terdahulu yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dimaksudkan membentuk komitmen dan sinergitas lintas sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu, berdasarkan amanah Permendagri Nomor 53 pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD. Ini berarti bahwa dokumen akhir RPKD akan menjadi bahan untuk disinergikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun pedoman dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan dokumen RPKD memuat dan menguraikan secara utuh dan rinci tentang penanganan masalah kemiskinan, mulai dari identifikasi masalah pada setiap bidang, identifikasi akar masalah dan identifikasi wilayah prioritas. Sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua perangkat daerah

adalah penduduk miskin dan rentan miskin. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan sasaran penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yakni untuk:

- a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin,
- b. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, dan
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	Meningkatnya pemenuhan hak dasar	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	Penerapan kebijakan merdeka belajar di daerah
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	85,37	88,43	90,92	93,06	96,35	99,88	Menyelenggarakan sekolah gratis anak usia SLTA yang putus sekolah dengan alasan ekonomi
			Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	63,58	63,70	63,92	64,13	64,36	64,92	Menyelenggarakan pendidikan vokasi
			Rasio Guru per Murid SMA/MA /SMK/Paket C	77,40	77,58	77,76	77,94	78,12	78,30	Meningkatkan mutu dan pemerataan distribusi tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah
			Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK per Penduduk Usia SMA/MA/SMK	2,29	2,35	2,41	2,47	2,53	2,59	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas
			Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
			Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	Peningkatan kuantitas tenaga medis
			Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	148,01	134,17	120,33	106,49	92,65	78,81	Meningkatkan bantuan kesehatan bagi ibu hamil,
			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhn kebutuhan dasar(%)	5,97	5,28	4,35	5,21	4,95	4,84	Peningkatan kesejahteraan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
			Indeks Ketahanan Pangan	75	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	Penyediaan dan diversifikasi pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)(%)	90,62	90,82	91,02	91,22	91,42	91,62	Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal
			Laju Inflasi (%)	1,65	1,52	1,91	2,18	2,71	2,58	Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			Angka Konsumsi ikan (kg/kapita /tahun)	53,83	55,39	57,05	58,77	60,53	62,35	Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana perikanan
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	86,09	86,97	87,84	88,72	89,59	90,46	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap penyediaan air minum layak
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80,00	84,00	88,0	92,00	96,00	100	Menyediakan perumahan bagi korban bencana
		Menurunnya beban hidup masyarakat miskin	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,69	0,86	2,04	2,56	1,83	2,14	Menyediakan bantuan/jaminan sosial
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Meningkatkan jumlah sasaran penerima jaminan sosial
			Rasio Pemukiman Layak Huni	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	Meningkatkan luas kawasan pemukiman layak huni
			Rasio elektrifikasi	0,8665	0,8844	0,8985	0,9148	0,9615	0,9845	Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi
			Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (KWT)	12	20	25	30	35	40	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.		Meningkatnya perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	Angka Usia Harapan Hidup	70,0	72,0	73,3	74,7	75,3	76,0	Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial
			Persentase balita gizi buruk (%)	0,503	0,403	0,303	0,203	0,103	0,003	Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita bagi masyarakat miskin
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,61	69,74	69,87	70,00	70,26	70,39	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
	Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,37	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47	Penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	70,56	72,28	73,87	74,79	76,78	78,37	
			Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (%)	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Menfasilitasi dengan perusahaan dan melindungi hak-hak pekerja
			Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	96,75	97,12	97,48	97,84	98,19	98,55	Pelatihan kewirausahaan bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan
		Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi	Jumlah BUMDES berkembang	1750	1800	1850	1900	1950	2000	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDES
			Persentase Koperasi dan UMKM yang aktif	70,33	69,83	71,29	70,28	71,53	73,06	Menfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Masyarakat
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
		Meningkatnya pembinaan kelompok pengrajin	Cakupan bina kelompok pengrajin /Industri kecil & menengah	27,65	30,69	34,07	37,82	41,98	46,60	Meningkatkan kemitraan dan pembinaan IKM pada kewenangan provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persentase Usaha mikro kecil menjadi wirausaha	20	25	30	35	40	45	Pembinaan dan inkubasi kewirausahaan bagi IKM pada kewenangan provinsi
		Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social (Ha)	6.899	7.943	8.987	10.031	11.075	12.119	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi prioritas nasional	52	55	58	61	64	67	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
3.	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian	Produktivitas padi (ton/Ha)	4,49	4,51	4,49	4,52	4,53	4,51	Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya tanaman pangan
			Produktivitas tanaman cabe (ton/Ha)	6,28	6,24	6,45	6,73	6,71	6,97	Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya tanaman hortikultura
			Produktivitas kakao (ton/Ha)	0,69	0,69	0,70	0,70	0,74	0,81	Intensifikasi tanaman perkebunan bernilai tinggi
			Populasi ternak sapi (ribu ekor)	415,26	427,71	440,55	453,76	467,37	753,76	Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan
			Kontribusi PDRB Tanaman Pangan	2,90	2,74	2,60	2,48	2,36	2,25	Memberikan Pembinaan kepada petani dan pengolah hasil tanaman pangan
			Kontribusi PDRB Tanaman Hortikultura	4,05	4,13	4,26	4,41	4,57	4,74	Memberikan Pembinaan kepada petani dan pengolah hasil tanaman hortikultura
			Kontribusi PDRB Tanaman perkebunan	8,30	7,69	7,21	6,78	6,36	5,98	Memberikan Pembinaan kepada petani dan pengolah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										hasil tanaman perkebunan
			Kontribusi PDRB peternakan	1,63	1,60	1,58	1,58	1,57	1,57	Memberikan pembinaan kepada peternak dalam pemasaran hasil
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,58	100,58	101,58	102,58	103,58	104,58	Peningkatan Pengolahan dan pemasaran hasil olahan komoditi pertanian
			Nilai Tukar Peternak (NTP)	99,58	101,58	103,58	105,58	107,58	109,58	Perluasan pemasaran hasil olahan komoditi peternakan
		Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan tangkap (ribu Ton)	250,46	252,19	252,	253,20	253,71	254,22	Peningkatan penggunaan teknologi penangkapan ikan
			Produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	1,223	1,239	1,301	1,366	1,502	1,728	Peningkatan penggunaan teknologi budidaya
			Kontribusi PDRB perikanan	4,65	4,68	4,79	4,95	5,11	5,30	Peningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,8	109,0	109,2	109,4	109,6	109,9	Pembimbingan mutu dan keamanan serta perluasan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil kehutanan	Kontribusi PDRB Kehutanan	1,38	1,29	1,23	1,16	1,09	1,02	Memberikan Pembinaan kepada petani dan pengolah hasil hutan
		Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp.juta)	100	150	200	250	300	350	Peningkatan keterampilan usaha kreatif wisata
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata
		Meningkatnya pertumbuhan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	7,01	7,37	7,82	8,28	8,71	9,14	Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Kebijakan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		ekspor bernilai tinggi								penggunaan produk dalam negeri
		Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisi da bersubsidi sesuai ketentuan	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90	91	92	93	94	95	Peningkatan distribusi sarana produksi di sentra produksi pertanian
		Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan harga barang kebutuhan pokok	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Peningkatan distribusi pangan
		Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dan Wilayah terluar	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	50	53	56	59	62	65	Peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Terluar dan Terdepan
		Meningkatnya status desa berkembang	Persentase perkembangan desa	12,98	16,50	20,03	23,56	27,09	27,09	Peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa

Perumusan rencana kerja dan pendanaan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, RPKD disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD sebagai perwujudan cita politik kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan, dan secara substansi penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RPKD. Hingga RPKD Provinsi Sulawesi Tengah yang minimal memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi program menjadi bagian yang terintegrasi dari dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai acuan kebijakan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6).

24. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 677).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengacu ketentuan uraian minimal yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, untuk selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Perekonomian
- 2.2. Geografis
- 2.3. Demografis
- 2.4. Pemerintahan
- 2.5. Sosial Budaya
- 2.6. Kemiskinan Ekstrim

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Profil Kemiskinan Konsumsi
- 3.2. Profil Kemiskinan Non Konsumsi

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1. Prioritas Intervensi
- 4.2. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

BAB V LOKASI PRIORITAS

- 5.1. Lokasi Prioritas Program Berdasarkan ToC
- 5.2. Target Penurunan Persentase Kemiskinan

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Posisi astronomi Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22’ Lintang Utara dan 3°48’ Lintang Selatan serta 119°22’ dan 124°22’ Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III dengan luas wilayah daratan kurang lebih 61.271,58 (enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh delapan) kilometer persegi. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 13 wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:

- a. Kabupaten Donggala;

b. Kota Palu;

c. Kabupaten Banggai;

d. Kabupaten Poso;

e. Kabupaten Tolitoli;

f. Kabupaten Tojo Una-Una
- g. Kabupaten Morowali;

h. Kabupaten Buol;

i. Kabupaten Banggai Kepulauan;

j. Kabupaten Parigi Moutong;

k. Kabupaten Sigi;

l. Kabupaten Banggai Laut; dan

m.Kabupaten Morowali Utara.

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, yakni mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha. Sedang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa luas Wilayah Daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 Km².

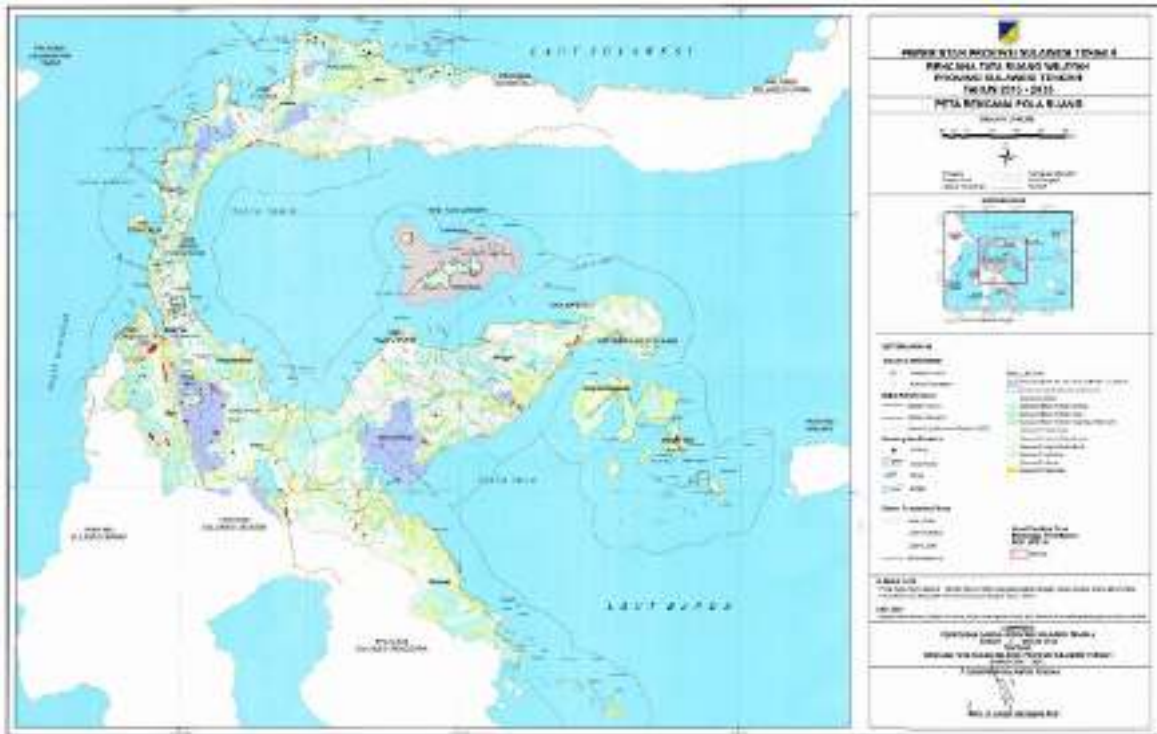
Secara rinci luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	2.488,79	4,02
2.	Banggai	Luwuk	9.672,70	15,64
3.	Morowali	Bungku	3.037,04	4,91
4.	Poso	Poso Kota	7.112,25	11,50
5.	Donggala	Banawa	4.275,08	6,91
6.	Tolitoli	Baolan	4.079,77	6,60
7.	Buol	Biau	4.043,57	6,54
8.	Parigi Moutong	Parigi	5.089,91	8,23
9.	Tojo Una-Una	Ampana	5.721,15	9,25
10.	Sigi	Bora	5.196,02	8,40
11.	Banggai Laut	Banggai	725,67	1,17
12.	Morowali Utara	Kolonodale	10.004,28	16,18
13.	Palu	Palu	395,06	0,64
Sulawesi Tengah		Palu	61.841,29	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Selanjutnya peta pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Gambar 2.1

Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.2. Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m sekitar 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m sekitar 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m sekitar 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas sekitar 25,9 persen.

Persentase luas dataran wilayah di Sulawesi Tengah pada setiap tingkatan elevasi hampir sama, namun sebagian besar lahan mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 40 derajat.

2.1.3. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini. Selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.

Pada bagian selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

2.1.4. Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung.

Tabel 2.2.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengolahan SDA
Wilayah Sungai Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah (WS Palu-Lariang)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km ²)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A. Provinsi Sulawesi Tengah				
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,30
		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07
		Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
		Sindue Tobata	260,59	1,79
		Sirenja	183,20	1,26
		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue Tombusabora	201,97	1,39
		Total Luas	3.380,73	23,21
2	Kota Palu	Mantikulore	201,43	1,38
		Palu Barat	22,99	0,16
		Palu Utara	37,01	0,25
		Tawaeli	53,02	0,36
		Ulujadi	53,22	0,37
		Palu Selatan	29,06	0,20
		Palu Timur	10,76	0,07
		Tatanga	14,18	0,10

		Total Luas	421,68	2,89
3	Kabupaten Sigi	Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,90	2,79
		Lindu	576,90	3,96
		Marawola	40,90	0,28
		Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,40
		Total Luas	5.131,34	35,22
4	Kabupaten Poso	Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
		Lore Selatan	483,08	3,32
		Lore Tengah	696,04	4,78
		Lore Timur	149,75	1,03
		Lore Utara	333,30	2,29
		Total Luas	2.561,50	17,58

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pembagian DAS di WS Palu Lariang

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)
001	Lariang	7.264,97	49,87	027	Watutela	30,18	0,21
002	Minti	326,28	2,24	028	Watutailo	15,28	0,10
003	Sulung	970,3	6,66	029	Biuluniongg a	30,05	0,21
004	Pangian	140,39	0,96	030	Taipa	88,29	0,61
005	Sawi	52,97	0,36	031	Tabeo	16,07	0,11
006	Randomaya ng	94,52	0,65	032	Taweli	104,27	0,72
007	Kasuloang	138,76	0,95	033	Lambagu	92,54	0,64
008	Bambaira	6,49	0,04	034	Labuan	158,67	1,09
009	Tampaore	16,45	0,11	035	Toaya	77,41	0,53
010	Kumboki	26,6	0,18	036	Masaengi	93,66	0,64
011	Surumana	304,08	2,09	037	Tibo	143,97	0,99
012	Bambalalombi	35,39	0,24	038	Batusuya	93,49	0,64
013	Mamara	119,86	0,82	039	Aliandu	110,49	0,76
014	Tolongano	12,86	0,09	040	Loro	29,48	0,20

015	Kangando	17,68	0,12	041	Sinapa	4,79	0,03
016	Towale	37,93	0,26	042	Sikara	6,23	0,04
017	Tomaku	10,74	0,07	043	Omba	20,77	0,14
018	Donggala	56,3	0,39	044	Tondo	26,18	0,18
019	Uwemole	6,03	0,04	045	Lente	105,83	0,73
020	Lottu	3,8	0,03	046	Tompo	95,86	0,66
021	Nggoji	19,19	0,13	047	Lende	30,01	0,21
022	Watusampu	20,64	0,14	048	Airmakuni	96,52	0,66
023	Buluri	37,17	0,26	049	Kusu	46,96	0,32
024	Owenumpu	22,86	0,16	050	Kamonji	46,32	0,32
025	Palu	3.063,96	21,03	051	Tompe	50,08	0,34
026	Lepata	77,5	0,53	052	Maruri	71,65	0,49

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor: 4/PRT/M/2015

Sedangkan wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah
(WS Parigi – Poso)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km²)	Luas Kecamatan dalam WS (Km²)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	Kabupaten Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,70
		Mori Utara	699,82	140,94	20,10
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,20
Sub Total Kabupaten Morowali Utara				193,47	2,25
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Ampibabo	279,61	279,61	100,00
		Balinggi	119,64	119,64	100,00
		Kasimbar	271,56	194,76	71,70
		Parigi	104,65	104,65	100,00
		Parigi Barat	78,72	78,72	100,00
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,10
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100,00
		Parigi Utara	29,65	29,65	100,00
		Sausu	291,61	291,61	100,00
		Sinju	111,94	111,94	100,00
		Toribulu	97,57	97,51	99,90
		Torue	575,29	399,35	69,40
Sub Total Kabupaten Parigi Moutong				2.128,77	24,72
3.	Kabupaten Poso	Danau Poso	366,95	366,95	100,00
		Lage	411,13	411,13	100,00
		Lore Piore	506,89	42,70	8,40
		Lore Selatan	510,77	80,80	15,80
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,90
		Lore Utara	484,69	31,96	6,60
		Pamona Barat	227,55	227,55	100,00
		Pamona	486,81	486,81	100,00

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km²)	(Km²)	(%)
		Pusalemba			
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,70
		Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,20
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,40
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,30
		Poso Kota	35,95	35,95	100,00
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100,00
		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100,00
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,60
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418,00	97,0
		Poso Pesisir Utara	555,24	470,02	84,70
		Sub Total Kabupaten Poso			4.195,44
4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo	422,81	422,81	100,00
		Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,20
		Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,20
Sub Total Kabupaten Tojo Una-Una			1.696,16	19,70	
Total Luas WS Parigi Poso			8.610,57		

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Pembagian DAS di WS Parigi Poso

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Tapoya	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampaloe	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52

16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambarana	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42
23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyol e	37,76	0,44

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Wilayah Danau Kawasan Lindung
Di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Donggala	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng, Tahun 2013-2033.

2.1.5. **Klimatologi**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 4 stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu di Kabupaten Banggai yakni Stasiun Bubung, Kabupaten Poso yakni Stasiun Kasiguncu, Kabupaten Toli-toli yakni Stasiun Lalos dan Kota Palu yakni Stasiun Mutiara Sis Al-Jufri. Berdasarkan aspek klimatologi, provinsi Sulawesi Tengah menghimpun informasi terkait data curah hujan, Kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari.

Adapun Data Curah Hujan (mm) menunjukkan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Berdasarkan data dari 4 stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Sulawesi Tengah, daerah dengan curah hujan tertinggi yaitu Kabupaten Poso dengan curah hujan 407,6 mm dan daerah dengan curah hujan terendah yaitu Kota Palu dengan curah hujan 14,7 mm.

Unsur Klimatologi selanjutnya adalah Kecepatan angin . Kecepatan angin adalah jarak tempuh angin atau pergerakan udara per satuan waktu dan dinyatakan dalam satuan meter meter per detik (m/s). Kabupaten Banggai merupakan daerah dengan kecepatan angin tertinggi yakni sebesar 15,43 m/detik. Sementara Kabupaten Poso merupakan daerah dengan Kecepatan angin terendah yakni 0,81 m/detik.

Suhu Udara merupakan ukuran energi kinetik rata - rata dari pergerakan molekul - molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke benda – benda lain atau menerima panas dari benda - benda lain tersebut. Daerah dengan suhu udara tertinggi adalah Kota Palu dengan suhu udara 37,4 °C. Sedangkan daerah dengan suhu udara terendah adalah Kabupaten Poso dengan suhu udara 20,2 °C.

Lama penyinaran matahari merupakan salah satu dari beberapa unsur klimatologi, dan didefinisikan sebagai kekuatan matahari yang melebihi 120 W/m2. Lama penyinaran matahari atau durasi penyinaran matahari (periodisitas) adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Adapun daerah dengan lama penyinaran matahari tertinggi adalah Kabupaten Toli-toli yakni 93,63 persen dan daerah dengan lama penyinaran matahari terendah adalah Kabupaten Banggai yakni 40,75 persen.

Berikut ini Tabel yang menyajikan data klimatologi Provinsi Sulawesi Tengah yang diamati melalui 4 stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yakni di Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-toli dan Kota Palu.

Tabel 2.7.
Unsur Klimatologi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Unsur	Satuan	Tertinggi		Terendah	
		Angka	Daerah	Angka	Daerah
Curah Hujan	mm	407,6	Kab. Poso	14,7	Kota Palu
Kecepatan Angin	m/det	15,43	Kab. Banggai	0,81	Kab. Poso
Suhu Udara	°C	37,4	Kota Palu	20,2	Kab. Poso
Penyinaran Matahari	%	93,63	Kab. Tolitoli	40,75	Kab. Banggai

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2021.

2.1.6. Pola Ruang dan Wilayah Rawan Bencana

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha. Berikut tabel yang menunjukkan pola ruang berdasarkan luas dan persentase di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.8.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.7	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan Budidaya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain	2.083.765	32	
	APL	2.083.765	32	
IV.	Perairan(Danau dan	60.304	0,72	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	6.552.672	100	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan Rawan Bencana. Oleh karena itu, data dan informasi terkait wilayah rawan bencana menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Adapun beberapa wilayah rawan bencana di Sulawesi Tengah antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso dan Kota Palu, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.

Berikut ini merupakan peta gambaran wilayah rawan bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, jumlah penduduk Sulawesi Tengah sejak periode 2016-2019 cenderung meningkat. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk dibanding tahun sebelumnya. Tingkat laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2016 yakni sebesar 1,57 persen menjadi 1,22 persen pada Tahun 2020. Berikut ini tabel yang menyajikan perkembangan penduduk di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.9.
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2020

NO.	INDIKATOR KEPENDUDUKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.921.708	2.966.304	3.010.443	3.054.023	2.985.734
	- Laki-Laki (Jiwa)	1.492.152	1.514.457	1.536.491	1.558.233	1 534.706
	- Perempuan (Jiwa)	1.429.563	1.451.868	1.473.952	1.495.790	1.451.028
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,57	1, 53	1,49	1,45	1,22
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	47	48	49	49	48,28

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2021

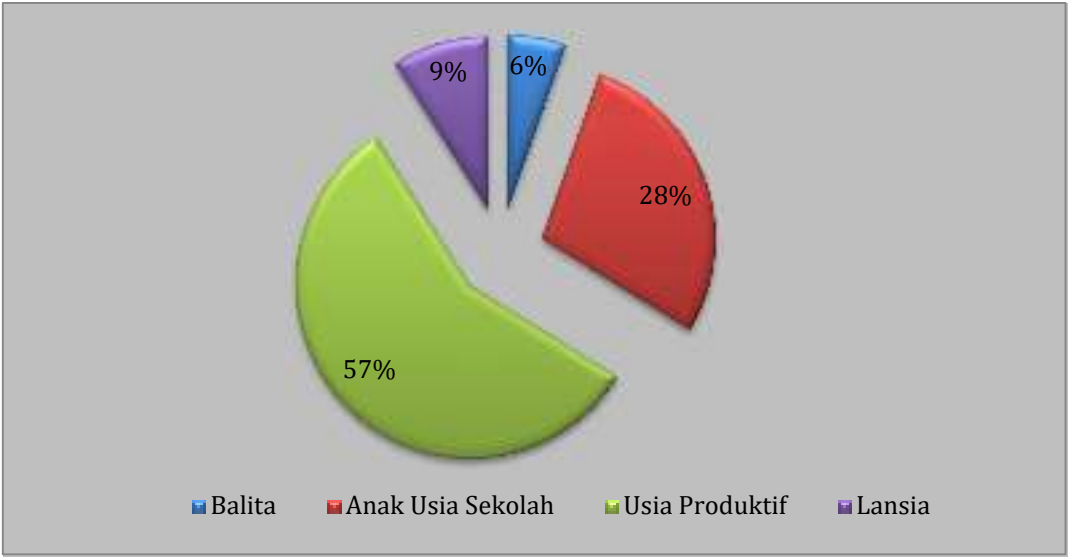
Dilihat dari spasial wilayah Tahun 2020, penduduk terbanyak berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 440.015 jiwa atau sebesar 14,74 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah. Menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu dengan domisili penduduk sebanyak 373.218 jiwa atau 12,50 persen dan Kabupaten Banggai dengan domisili penduduk sebanyak 362.275 jiwa atau 12,13 persen. Sedangkan domisili penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yakni sebanyak 70.435 jiwa (2,36 persen). Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	
		Jumlah (Jiwa)	Distribusi (%)
1	Banggai Kepulauan	120.142	4,02
2	Banggai	362.275	12,13
3	Morowali	161.727	5,42
4	Poso	244.875	8,20
5	Donggala	300.436	10,06
6	Tolitoli	225.154	7,54
7	Buol	145.254	4,86
8	Parigi Moutong	440.015	14,74
9	Tojo Una-Una	163.829	5,49
10	Sigi	257.585	8,63
11	Banggai Laut	70.435	2,36
12	Morowali Utara	120.789	4,05
13	Palu	373.218	12,50
Sulawesi Tengah		2.985.734	100

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2021 (Data diolah)

Bila ditinjau dari segi umur, penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar berada di umur produktif yakni kelompok penduduk dengan usia antara 20 tahun hingga 59 tahun atau sebesar 57 persen dari total penduduk. Kelompok usia terbesar kedua yakni sebesar 28 persen yaitu kelompok anak usia sekolah dengan rentang umur antara 5 tahun sampai dengan 19 tahun. Disusul kelompok usia lansia sebesar 9 persen dan kelompok usia balita sebesar 6 persen. Berikut ini gambar yang menunjukkan penduduk Sulawesi tengah berdasarkan kategori usia.



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2021 (Data diolah)

Gambar 2.4
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kategori Usia

Gambaran di atas menunjukkan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi dan apabila dikelola dengan baik dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat menunjang proses pembangunan di daerah. Pun juga dalam hal menyusun perencanaan yang perlu mempertimbangkan program-program yang menjawab kebutuhan kesehatan lansia dan balita serta kebutuhan pendidikan bagi 28 persen penduduk usia sekolah.

Berikut ini penjabaran jumlah penduduk Sulawesi Tengah berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.11.
Penduduk Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	83.869	78.331	162.200
5-9	134.039	125.935	259.974
10-14	146.338	137.530	283.868
15-19	156.460	147.245	303.705
20-24	146.566	133.401	279.967
25-29	124.698	118.795	243.493
30-34	119.071	113.855	232.926
35-39	120.955	116.707	237.662
40-44	114.970	110.080	225.050
45-49	101.547	97.578	199.125
50-54	84.199	79.413	163.612
55-59	64.287	60.140	124.427
60-64	48.546	46.195	94.741

65-69	32.564	29.929	62.493
70-74	19.489	19.832	39.321
>75	22.114	21.848	43.962
Tidak Tahu/Unknow	14.994	14.214	29.208
Jumlah/Total	1.534.706	1.451.028	2.985.734

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 51,4 persen penduduk Sulawesi Tengah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 48,6 persen penduduk berjenis kelamin perempuan. Terdapat 29.208 orang atau sebesar 0,98 persen penduduk yang tidak diketahui kelompok usianya karena keterbatasan pendataan. Bila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka dapat dilihat bahwa penduduk Sulawesi Tengah terdistribusi paling besar kedalam kelompok umur 15 tahun sampai dengan 19 tahun. Oleh karenanya, penting menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan penduduk Sulawesi Tengah terkait pendidikan, kesehatan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Rataan jumlah penduduk perdesa ialah nilai rata-rata yang jumlah masyarakat yang tersebar di setiap desa yang ada di Kabupaten Kota dalam suatu wilayah. Nilai tersebut didapatkan dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kelurahan dan desa yang ada. Rataan jumlah penduduk per desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah tertera pada Tabel berikut ini

Tabel 2.12.
Rataan Jumlah Penduduk per Desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi
Menurut Kabupaten Tahun 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (Org)	Jumlah Desa /Kelurahan	Rataan Penduduk per Desa
1.	Banggai Kepulauan	120.142	144	834,32
2.	Banggai	362.275	337	1075,00
3.	Morowali	161.727	133	1215,99
4.	Poso	244.875	170	1440,44
5.	Donggala	300.436	167	1799,02
6.	Tolitoli	225.154	110	2046,85
7.	Buol	145.254	115	1263,08
8.	Parigi Moutong	440.015	283	1554,82
9.	Tojo Una-Una	163.829	146	1122,12
10.	Sigi	257.585	177	1455,28
11.	Banggai Laut	70.435	66	1067,20
12.	Morowali Utara	120.789	126	958,64
13.	Palu	373.218	46	8113,43
Provinsi Sulawesi		2.985.734	2.020	1478,09

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2020.

Berdasarkan data BPS tahun 2020 tercatat dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2.985.734 jiwa dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 2.020 kelurahan/desa tercatat rata-rata jumlah penduduk yang menempati setiap kelurahan/desa sebanyak 1.478 jiwa. Kota Palu yang merupakan Ibu Kota Provinsi tercatat memiliki jumlah rataan penduduk per kelurahan/desa terbesar yakni sebesar 8.113 jiwa, dan terendah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan 834 jiwa per desa/kelurahan.

2.3. Kondisi Perekonomian

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan capaian yang positif. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2020 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Rp Milyar), 2016-2020

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35 538,28	38 822,55	41 766,13	43 205,29	42 961,69
B	Pertambangan dan Penggalian	14 165,58	17 192,25	20 252,75	25 182,74	26 456,48
C	Industri Pengolahan	14 253,53	16 541,02	18 988,14	21 650,00	54 517,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,92571	44 075,82	50,00	51,81	53,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	162,42537	176,59417	190,89	197,98	200,12
F	Konstruksi	15 501,07	16 785,47	18 300,51	21 021,92	20 027,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10 883,36	11 800,10	13 347,64	14 829,73	13 971,89
H	Transportasi dan Pergudangan	4 663,79	5 195,42	5 958,49	6 558,14	4 461,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	636,75	719,14	799,45	831,71	753,6
J	Informasi dan Komunikasi	3 823,84	4 291,04	5 075,11	5 662,80	6 059,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 840,02	3 160,99	3 332,36	3 370,56	3 688,18
L	Real Estate	2 229,21	2 435,79	2 696,30	2 798,05	2 862,50
M,N	Jasa Perusahaan	310,84387	335,08	370,77	395,11	392,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 518,03	8 290,81	9 748,57	10 750,06	10 961,01
P	Jasa Pendidikan	4 750,82	5 165,48	5 736,63	6 146,02	6 125,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 625,67	1 818,78	2 134,82	2 397,69	2 589,32
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1 090,90	1 176,59	1 283,91	1 353,04	1 358,87
Produk Domestik Regional Bruto / PDRB		120 030,01	133 951,16	150 032,47	166 402,67	197 440,78

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2020.

Berdasarkan Tabel di atas, nilai PDRB yang mengalami peningkatan adalah pertambangan, industri pengolahan, listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, jasa, lainnya serta keseluruhan PDRB. Namun terdapat lapangan usaha yang mengalami nilai penurunan pada tahun 2020 yakni sektor pertanian, konstruksi, perdagangan besar, eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi jasa perusahaan, dan jasa pendidikan.

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2016, nilai PDRB ADHB mencapai Rp. 120.030,01 milyar menjadi Rp. 197.440,78 milyar pada tahun 2020. Adapun Untuk perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.14.
PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Rp Milyar), 2016-2020

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26 929,49	28 131,33	29 340,85	29 995,99	29 593,65
B	Pertambangan dan Penggalian	12 403,30	14 272,08	17 552,45	19 971,59	22 040,21
C	Industri Pengolahan	10 958,23	12 185,03	25 136,28	29 483,94	36 464,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42,99	46,93	50,35	51,31	52,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	121,01	128,37	135,39	135,18	136,27
F	Konstruksi	10 357,68	10 736,25	11 223,76	12 833,47	11 746,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 284,65	8 614,82	9 030,40	9 256,70	8 687,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3 485,48	3 716,84	4 001,46	4 119,23	2 754,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	462,72	501,11	531,14	520,64	463,1
J	Informasi dan Komunikasi	3 470,27	3 716,04	4 063,04	4 461,45	4 843,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 070,49	2 217,47	2 253,68	2 239,53	2 459,06
L	Real Estate	1 713,90	1 803,83	1 891,75	1 895,37	1 902,49
M,N	Jasa Perusahaan	222,67	235,01	248,45	261,52	254,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5 193,49	5 532,45	6 106,29	6 453,44	6 467,25
P	Jasa Pendidikan	3 372,89	3 571,13	3 763,02	3 891,52	3 828,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 194,55	1 297,55	1 419,83	1 538,60	1 632,67
R,S, T,U	Jasa Lainnya	730,78	768,62	807,67	825,58	825,22
Produk Domestik Regional Bruto / PDRB		91 014,57	97 474,86	117 555,83	127 935,06	134 152,69

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

PDRB ADHK tahun 2016 mencapai Rp. 91.014,57 miliar meningkat menjadi Rp. 134.152,69 milyar pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa secara nominal, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meski demikian, pada Tahun 2020 terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai PDRB antara lain sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa perusahaan.

2.3.2 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB

Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau dari sisi produksi, sepanjang tahun 2016-2020 sektor pertanian secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,4 persen pertahun, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 19,2 persen pertahun serta Sektor Pertambangan dan Penggalan dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,6 persen pertahun.

Tabel 2.15.
Distribusi PDRB ADHB dan ADHK Menurut Sektor Ekonomi
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

SEKTOR EKONOMI		2016		2017		2018		2019		2020	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehu- tanan dan Peri- kanaan	29,61	29,61	28,98	28,98	24,96	27,84	23,2	23,45	21,76	22,06
B	Pertambangan dan Penggalian	11,8	11,8	12,83	14,64	12,84	14,93	13,39	15,08	13,4	16,43
C	Industri Pen- golahan	11,87	11,87	12,35	12,5	20,89	21,38	22,42	23,05	27,61	27,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13	0,11	0,11	0,1	0,10
F	Konstruksi	12,91	12,91	12,53	11,01	10,95	9,55	11,32	10,03	10,14	8,76
G	Perdagangan Besar dan Ece- ran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,07	9,07	8,81	8,84	7,99	7,68	7,87	7,24	7,08	6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,89	3,88	3,81	3,56	3,4	3,53	3,22	2,26	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	0,53	0,53	0,54	0,51	0,48	0,45	0,45	0,41	0,38	0,35
J	Informasi dan Komunikasi	3,19	3,19	3,2	3,81	3,04	3,46	3,05	3,49	3,07	3,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	2,37	2,36	2,27	1,99	1,92	1,81	1,75	1,87	1,83
L	Real Estate	1,86	1,86	1,82	1,85	1,61	1,61	1,51	1,48	1,45	1,42
M, N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20	0,2	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,26	6,26	6,19	5,68	5,83	5,19	5,79	3,04	5,55	4,82
P	Jasa Pendidikan	3,96	3,96	3,86	3,66	3,43	3,2	3,31	3,68	3,1	2,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,35	1,36	1,33	1,28	1,21	1,29	1,20	1,31	1,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,91	0,91	0,88	0,79	0,77	0,69	0,73	0,65	0,69	0,62
PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2020.

Sementara dari sisi PDRB pengeluaran pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen paling besar dalam membentuk PDRB (ADHB) yakni sebesar 39,32 persen. Disusul komponen Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yakni sebesar 34,06 persen dan komponen pengeluaran pemerintah sebesar 10,17 persen dalam membentuk PDRB di Sulawesi Tengah.

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

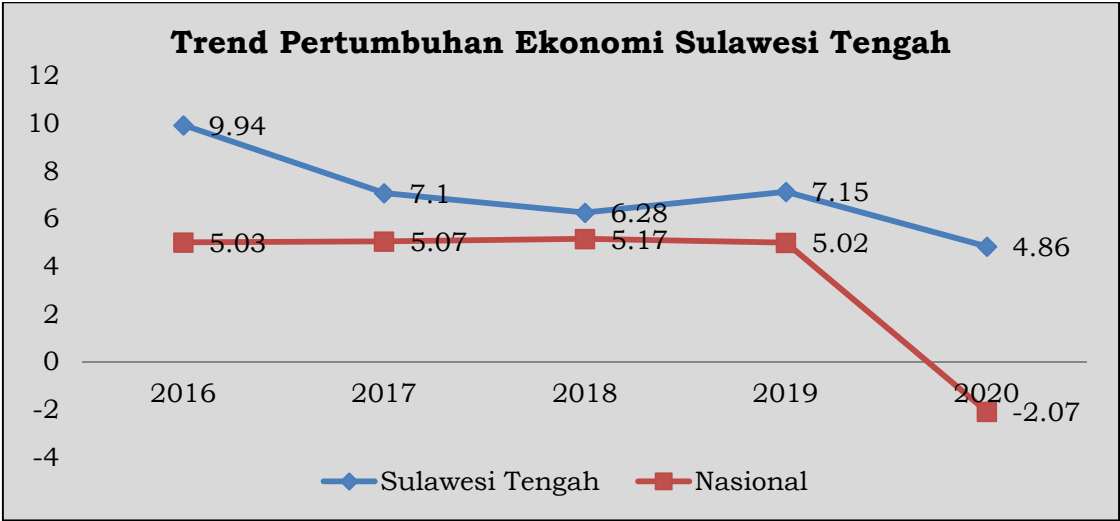
Tabel 2.16.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

PDRB DARI SISI PENGELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,90	49,60	48,70	42,76	39,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,83	1,80	1,90	1,81	1,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,29	13,10	12,00	10,66	10,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,40	41,10	38,9	38,84	34,06
5. Perubahan Inventori	3,16	1,80	3,70	-0,24	0,53
6. Ekspor Luar Negeri	9,38	31,30	50,30	-	-
7. Impor Luar Negeri	2,70	13,60	27,90	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	-21,26	-25,20	-27,60	-14,40	-23,72
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2020.

Dilihat dari pola distribusi PDRB dari sisi pengeluaran, selama periode 2016-2020 struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga. Tabel di atas juga menunjukkan nilai net ekspor antar daerah yang bernilai negatif selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan ketergantungan Provinsi terhadap daerah lain dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan rilis BPS (Sulawesi Tengah dalam Angka 2021), laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sebesar 9,94 persen menurun menjadi 4,86 persen pada tahun 2020 atau terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,84 persen sepanjang periode tahun 2016 – 2020 . Tampilan tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



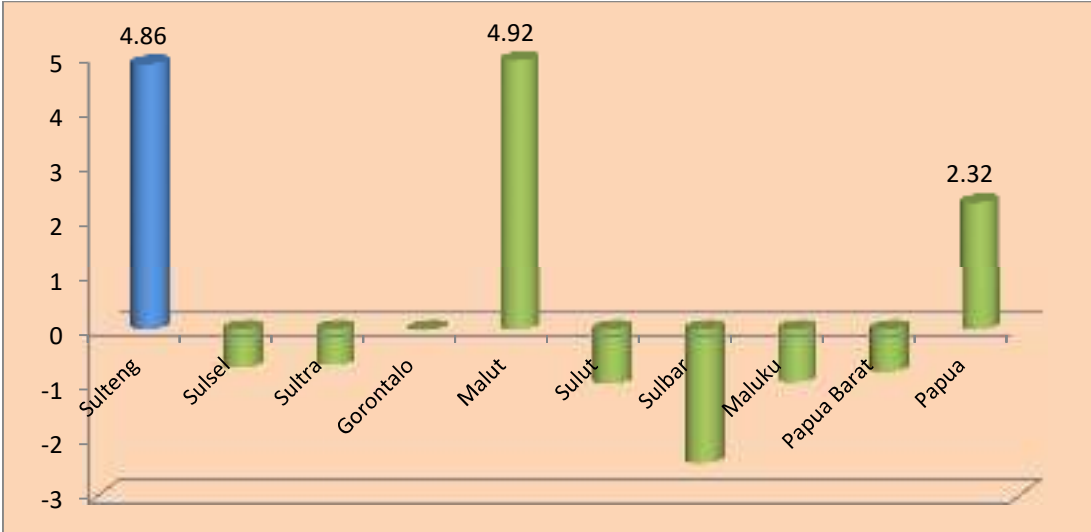
Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

Gambar 2.5
Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2020

Beberapa hal yang mendorong penurunan laju pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan oleh adanya bencana pandemi covid19 menyebabkan pembatasan aktivitas produksi dan aktivitas masyarakat. Namun demikian secara spesifik, capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2019 telah melampaui target yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-

2020 yang menargetkan sebesar 6,0-6,5 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih lebih tinggi selama tahun 2016-2020.

Saat bencana pandemi Covid19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sampai -2,07 persen, namun Sulawesi Tengah mampu bertahan di angka 4,86 persen. Demikian pula, dalam skala regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama. Selengkapnya perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi di wilayah SULAMPUA disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Perspektif Regional SULAMPUA, Tahun 2020

Dalam skala regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen menempati posisi tertinggi ke dua setelah Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 4,92 persen. Disusul provinsi Papua dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,32 persen.

Bila dijabarkan berdasarkan capaian kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, satu-satunya daerah yang tidak mengalami perlambatan ekonomi yaitu Kabupaten Morowali dengan pertumbuhan ekonomi melaju pada angka 28,93 persen. Disisi lain, semua daerah lainnya di Sulawesi Tengah mengalami perlambatan ekonomi.

Tabel 2.17.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah,

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Banggai Kepulauan	5,94	6,00	6,19	6,23	-2,98
Banggai	38,22	8,71	6,45	7,15	-4,78
Morowali	12,42	14,08	12,40	14,51	28,93
Poso	6,03	6,10	6,16	6,20	-3,89
Donggala	4,32	5,31	2,62	5,56	-4,87
Tolitoli	4,86	5,08	5,36	4,84	-3,31
Buol	3,09	4,00	4,09	4,04	-2,89
Parigi Moutong	5,04	5,26	4,62	4,24	-4,92
Tojo Una-Una	5,16	5,62	3,94	5,70	-3,21
Sigi	5,03	6,13	4,42	3,91	-1,97
Banggai Laut	7,30	6,26	6,67	6,22	-4,34
Morowali Utara	5,76	6,02	8,89	10,45	-0,22
Palu	5,50	5,53	5,06	4,58	-4,54
Sulawesi Tengah	9,94	7,10	6,28	7,15	4,82

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mengalami perlambatan terkecuali Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di Tahun 2020 yakni sebesar 28,93 persen. Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi pada Tahun 2020, pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar 23,68 persen, diikuti terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 10,36 persen serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,80 persen. Secara rinci laju pertumbuhan sektoral dan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah
Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2016-2020 (Persen)

Sektor	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,4	4,46	4,32	2,2	-1,34
B Pertambangan dan Penggalian	34,48	15,07	7,52	16,27	10,36
C Industri Pengolahan	34,96	11,2	9,77	9,79	23,68
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,08	9,17	7,29	1,9	3,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	6,08	5,47	-0,15	0,80
F Konstruksi	-2,47	3,65	4,54	14,34	-8,47
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,4	3,99	4,82	2,51	-6,15
H Transportasi dan Pergudangan	5,09	6,64	7,66	2,94	-33,12
I Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	5,87	8,3	5,99	-1,98	-11,05
J Informasi dan Komunikasi	8,97	7,08	9,34	9,81	8,56
K Jasa Keuangan dan Asuransi	17,66	7,1	1,63	-0,63	9,80
L Real Estate	3,94	5,25	4,87	0,19	0,38
M, N Jasa Perusahaan	4,65	5,54	5,72	5,26	-2,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,16	6,53	10,37	5,69	0,21
P Jasa Pendidikan	4,78	5,88	5,37	3,41	-1,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	8,62	9,42	8,37	6,11
R,S, TU Jasa Lainnya	5,71	5,18	5,08	2,22	-0,04
Produk Domestik Regional Bruto/PDRB	9,94	7,1	6,28	7,15	4,86

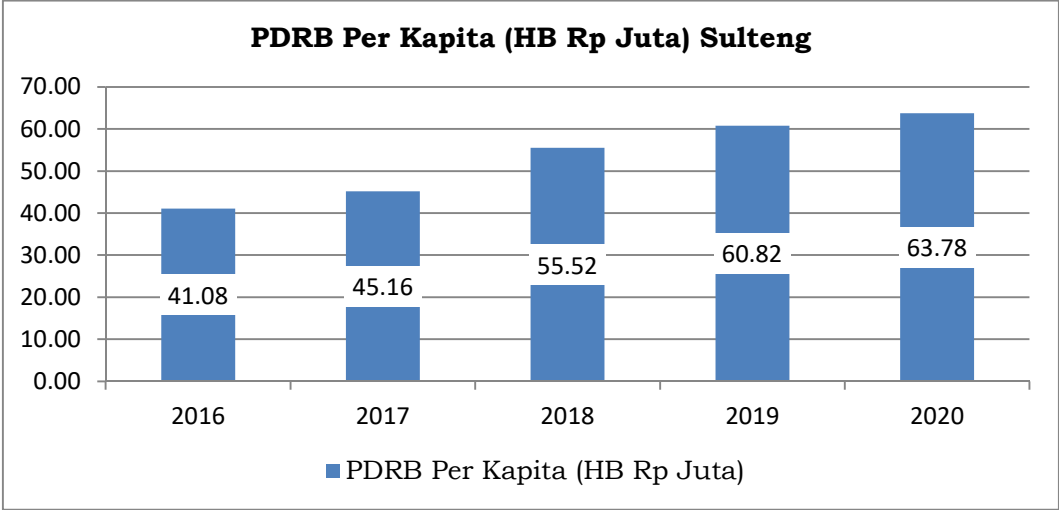
Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

2.3.3 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu

daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2016-2020 juga menunjukkan trend yang positif. Rata-rata pertumbuhan PDRB Nominal Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2020 sebesar 11,82 persen pertahun.



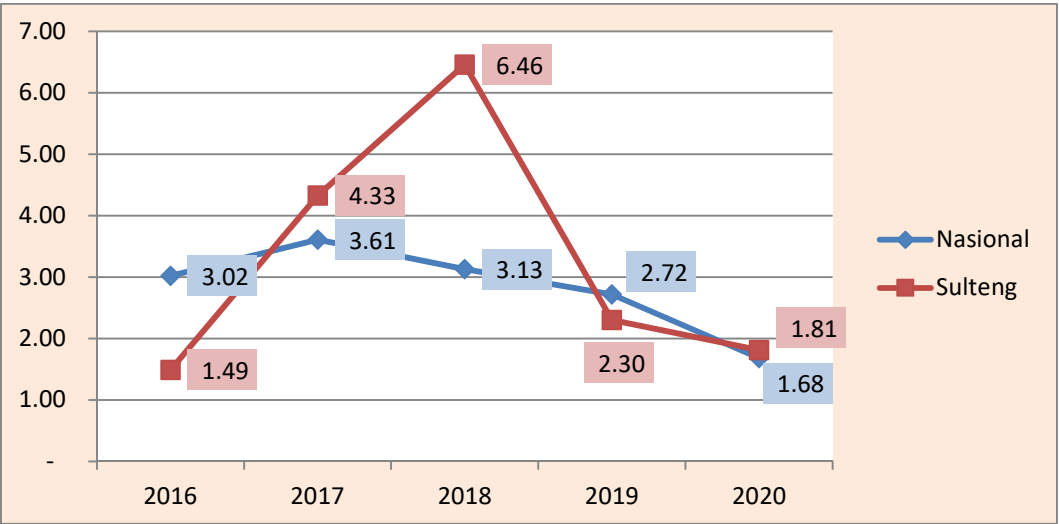
Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2021.

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB Nominal Perkapita
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2020

2.3.4 Laju Inflasi

Inflasi diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Sepanjang tahun 2016-2020 laju inflasi di Kota Palu cenderung berfluktuasi dimana laju inflasi pada tahun 2016 sebesar 1,49 menjadi 6,46 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,30 persen. Kenaikan inflasi di tahun 2018 tersebut dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM yang berdampak terutama pada harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada tahun 2019 laju inflasi dapat ditekan hingga menjadi 2,30 persen. Dan pada tahun 2020 inflasi di Ibu Kota Provinsi kembali turun menjadi 1,81 namun berada di atas inflasi nasional.

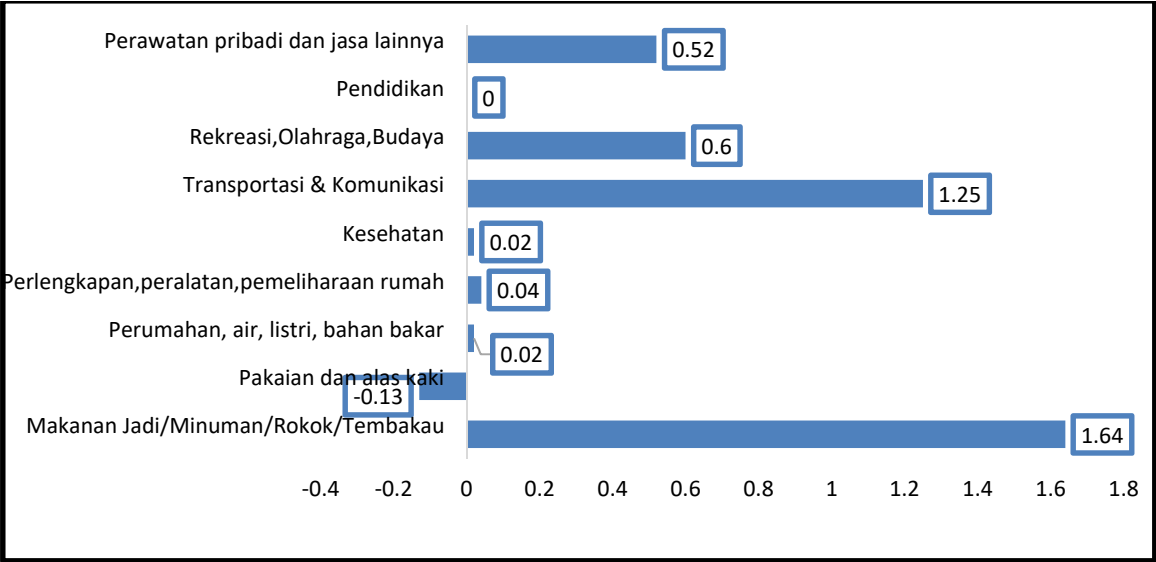


Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2021.

Gambar 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Tahunan
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nasional, Tahun 2016-2020

Dilihat dari pergerakan inflasi bulanan sepanjang tahun 2020, fluktuasi harga pada bulan Februari, April hingga Desember menunjukkan pola kenaikan inflasi yang cukup tajam yang lebih disebabkan adanya bulan Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri, memasuki tahun ajaran baru sekolah, serta perayaan hari natal dan menyongsong tahun baru.

Selama tahun 2020, inflasi Kota Palu sebesar 1,81 persen secara hirarki dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, kelompok Transportasi dan Komunikasi , kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berikut ini gambaran tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran.

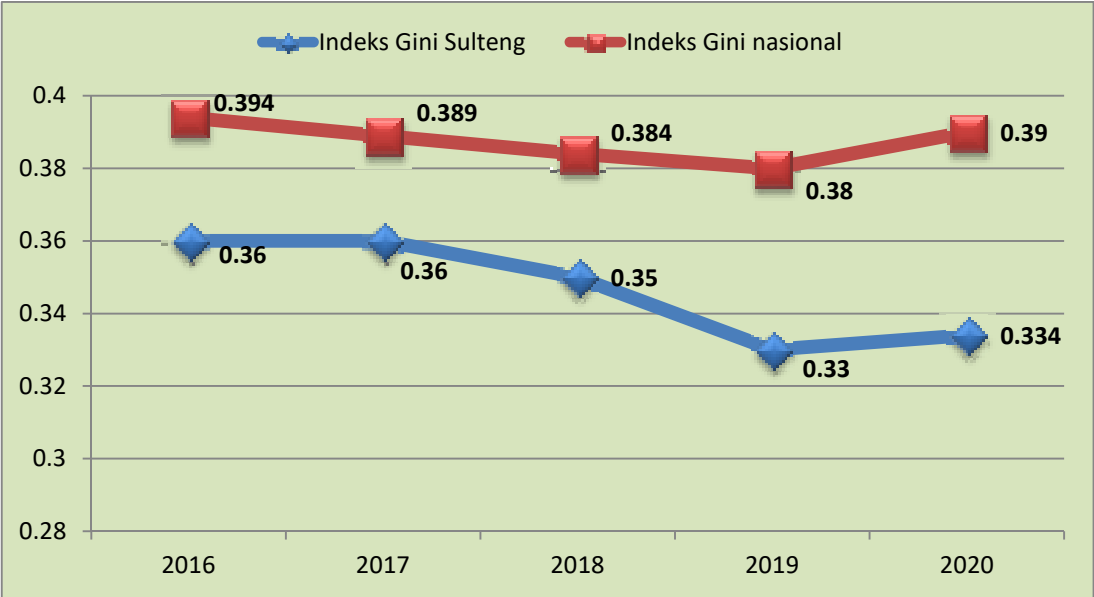


Sumber : BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.9
Inflasi Pada Kelompok Pengeluaran Di Kota Palu, Tahun 2020

2.3.5 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

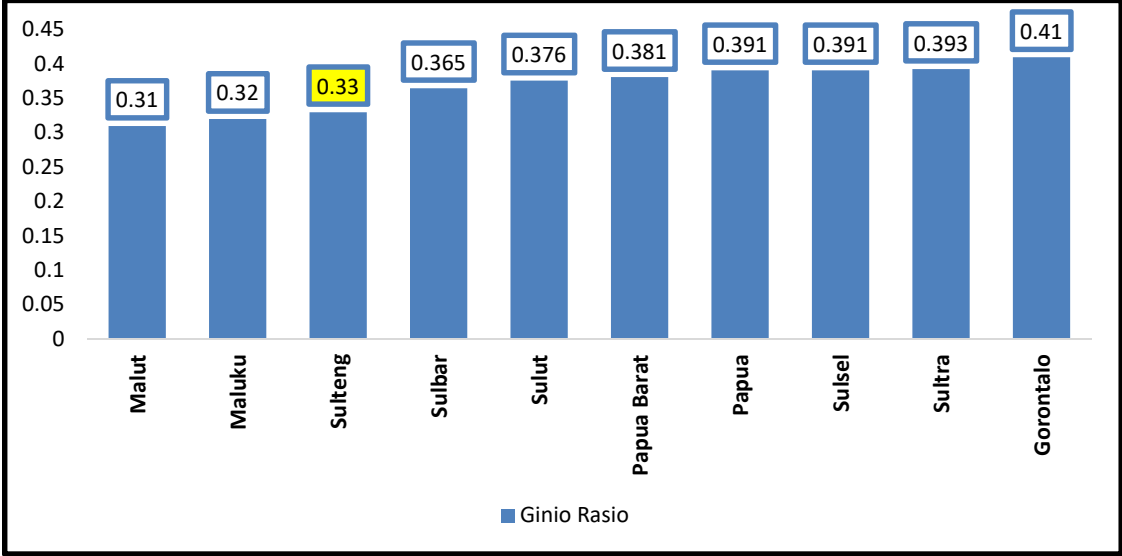
Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui distribusi pendapatan masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.



Sumber: BPS, Laporan Bulanan Sosial Ekonomi Indonesia, Januari 2021.

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2016 – 2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka indeks gini Sulawesi Tengah masih berada pada kategori dalam sedang dan berada di bawah indeks gini nasional. Bila dilihat dari perspektif regional Sulawesi, Maluku dan Papua (SULAMPUA) pada Tahun 2019, posisi capaian Indeks Gini Sulawesi Tengah menempati posisi terendah ke tiga setelah Provinsi Maluku Utara dan Maluku. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia bagian timur.



Sumber: BPS, Laporan Bulanan Sosial Ekonomi Indonesia, Januari 2020.

Gambar 2.11
Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif
Regional SULAMPUA, September 2019

Sepanjang tahun 2016-2020 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, yakni dari 0,36 poin pada tahun 2016 menjadi 0,35 poin pada tahun 2018 dan menurun sampai 0,334 pada tahun 2020. Capaian Indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode tahun 2016-2020 relatif lebih baik dibanding capaian indeks gini nasional.

2.4. Potensi Sektoral
2.4.1 Sektor Pertanian

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis.

Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya daya serap tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 49 persen pertahun. Sementara kontribusi Sektor Pertanian (secara umum) dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yakni menyumbang rata-rata sebesar 34 persen pertahun.

Tabel 2.19.
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019

No.	Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Padi (Sawah+Ladang)					
	- Luas Panen (Ha)	209.057			204.158	186.100
	- Produktivitas (Kw/Ha)	75,24			46,77	45,40
	- Produksi (Ton)	1.015.368,19			954.794	844.904.30
2.	Jagung					
	- Luas Panen (Ha)	32.502			93.551	129.765
	- Produktivitas (Kw/Ha)	40,34			41,33	43,49
	- Produksi (Ton)	131.123			386.606	564.404
3.	Kedelai					
	- Luas Panen (Ha)	7.094			21.107	5.594
	- Produktivitas (Kw/Ha)	13.270			12,59	9,54
	- Produksi (Ton)	18,71			26.573	5.336
4.	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (Ha)	2.928			2.803	2.085
	- Produktivitas (Kw/Ha)	16,88			12,24	10,53
	- Produksi (Ton)	4.942,76			3.432	2.196
5.	Kacang Hijau					
	- Luas Panen (Ha)	764			698	469
	- Produktivitas (Kw/Ha)	8,22			8,20	1,46
	- Produksi (Ton)	628			573	68
6.	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (Ha)	2.231			1.993	1.687
	- Produktivitas (Kw/Ha)	211,99			293,13	276,69
	- Produksi (Ton)	47.294,99			58.426	46,667
7.	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (Ha)	1.533			1.314	1.087
	- Produktivitas (Kw/Ha)	108,61			150,60	175.47
	- Produksi (Ton)	16.650,21			19.791	19.072

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

Secara umum, perkembangan produksi tanaman padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015-2019 cenderung meningkat, sedangkan pada Tahun 2019 produksi tanaman padi dan palawija sedikit mengalami penurunan.

Pada Tahun 2015, Produksi tertinggi yakni komoditi padi dengan produksi mencapai 1.015.368,19 ton dan luas panen 209.057 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 75,24 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 131.123 ton dan luas panen 32.502 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 40,34 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 47.294,99 ton dan luas panen 2.231 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 211,99 kw/ha. Sedangkan produksi terendah yakni komoditi kacang hijau dengan produksi 628 ton dan luas panen 764 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 8,22 kw/ha.

Potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), dan (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk Lahan Basah (LB), pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah yang mempunyai dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan dibawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Sedangkan Untuk Lahan Kering (LK), lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: (1) ketinggian kawasan di bawah 1000 m, (2) kelerengan kawasan dibawah 40%, dan (3) kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Kebijakan untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha. Sementara untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha.

Adapun sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada meliputi di:

1. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 598 Ha
2. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha
3. Kabupaten Banggai Laut seluas paling rendah 10 Ha
4. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 5.180 Ha
5. Kabupaten Morowali Utara seluas paling rendah 5834 Ha
6. Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha
7. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.600 Ha
8. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha
9. Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha
10. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha
11. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha
12. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha
13. Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha

Dengan demikian maka total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan untuk dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

2.4.2 Sektor Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti: kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti: kemiri, pala dan panili.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan

devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Sepanjang Tahun 2015-2019 Sub Sektor Perkebunan berkontribusi rata-rata sebesar 15 persen pertahun terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.20.

**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019**

No.	Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kakao					
	- Luas Panen (Ha)	288.986	285.783	283.625	283.625	282.773
	- Produksi (Ton)	146.507,06	134.323	125.473	125.473,4	127.669,3
2.	Kelapa					
	- Luas Panen (Ha)	213.587	218.144	219.899	214.994	215.543
	- Produksi (Ton)	167.172,07	187.404	193.885	189.780,1	189.661,0
3.	Kopi					
	- Luas Panen (Ha)	8.466	8.853	8.883	8.642	8.642
	- Produksi (Ton)	3.070,49	2.687	2.816	2.761,4	2.831,0
4.	Cengkeh					
	- Luas Panen (Ha)	67.545	71.454	74.450	74.740	74.740
	- Produksi (Ton)	14.691,56	5.314	15.132	15.575,1	17.897,3
5.	Lada					
	- Luas Panen (Ha)	1.790	2.848	2.827	2.808	2.830
	- Produksi (Ton)	80,35	204	223	223,1	256,3
6.	Pala					
	- Luas Panen (Ha)	12.216	18.167	19.993	20.335	20.585
	- Produksi (Ton)	200,62	389	337	337,1	378,1
7.	Jambu Mete					
	- Luas Panen (Ha)	13.976	14.309	13.607	13.744	13.710
	- Produksi (Ton)	2.189,82	2.277	2.179	2.179,0	2.146,1
8.	Karet					
	- Luas Panen (Ha)	6.203	7.812	7.794	6.068	6.072
	- Produksi (Kw/Ha)	2.243,42	3.294	3.698	-	2.610,0
9.	Vanila					
	- Luas Panen (Ha)	595	442	511	467	468
	- Produksi (Ton)	36,77	21	16	15,9	16,1
10.	Kelapa Sawit					
	- Luas Panen (Ha)	73.646	149.625	135.005	51.601	56.333
	- Produksi (Ton)	227.630,05	400.103	444.894	141.341,3	165.907,6

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

Produksi terbesar komoditi pada tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah masih didominasi oleh tanaman kakao, kelapa, cengkeh, dan kelapa sawit. Produksi tanaman kakao pada Tahun 2015 sebesar 146.507,06 ton dengan luas panen 288.986 ha menurun menjadi 134.323 ton dengan luas panen 285.783 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada Tahun 2019 produksinya menurun hingga menjadi ton dengan luas panen Ha. Produksi tanaman kelapa dari 167.172,07 ton dengan luas panen 213.587 ha pada tahun 2015 meningkat menjadi 193.885 ton dengan luas panen 219.885 ha pada tahun 2017, selanjutnya pada Tahun 2019 produksinya menurun menjadi ton dengan luas panen.

Produksi tanaman cengkeh pada tahun 2015 sebesar 14.691,56 ton dengan luas panen 67.545 ha meningkat menjadi 15.575 ton dengan luas panen 74.740,1 ha pada tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2019 produksi cengkeh meningkat menjadi 17.890,3 ton dengan luas panen 74.740 ha. Sementara produksi tanaman kelapa sawit sejak periode 2015-2019 cenderung menurun dari produksi sebesar

227.630,05 ton pada tahun 2015 menurun menjadi 165.907,6 ton dengan luas panen 56.333 ha pada tahun 2019.

2.4.3 Sektor Peternakan

Secara umum daerah Sulawesi Tengah memiliki potensi areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan, sehingga hal ini sangat mendukung bagi pengembangan potensi sektor peternakan yang juga merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan Potensial areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Sub sektor peternakan pada Tahun 2019 telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,91 persen. Jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah terdiri dari: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

Tabel 2.21.
Populasi Ternak Menurut Jenisnya
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019

JENIS TERNAK		2015	2016	2017	2018	2019
Ternak Besar						
a.	Kerbau	3.723	3.884	2.388	3.409	2.421
b.	Sapi	299.485	353.486	343.630	267.483	358.496
c.	Kuda	2.636	1.661	1.410	1.440	1.340
Ternak Kecil						
a.	Kambing	518.698	445.337	433.335	433.335	531.533
b.	Domba	7.996	7.351	7.429	7.429	7.922
c.	Babi	238.584	230.356	261.820	261.820	265.719
Ternak Unggas						
a.	Ayam Ras	9.295.578	13.852.266	11.798.788	11.798.788	12.959.955
	- Petelur	981.233	2.081.518	557.159	557.159	645.025
	- Pedaging	8.314.345	11.770.748	11.241.629	11.241.629	12.314.930
b.	Ayam Kampung	5.443.194	4.477.451	4.400.735	4.400.735	5.250.361
c.	Itik	616.200	792.469	919.726	873.446	912.818

Sumber: BPS,Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, hampir semua jenis ternak mengalami peningkatan populasi selama periode Tahun 2015-2019. Populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yakni sapi dengan jumlah populasi pada Tahun 2015 sebanyak 299.485 ekor meningkat menjadi 358.496 ekor pada tahun 2019.

Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yakni kambing dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sebanyak 518.698 ekor menurun menjadi 433.335 ekor pada tahun 2018, selanjutnya pada Tahun 2019 meningkat menjadi 531.533 ekor. Untuk kategori jenis ternak unggas populasi terbanyak yakni ayam ras pedaging dengan jumlah populasi pada tahun 2015 mencapai 8.314.345 ekor meningkat menjadi 12.314.930 ekor pada tahun 2019.

2.4.4 Sektor Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam.

Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada pengolahan barang manufaktur yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu. Titik simpul (*core*) pengembangan KEK dipusatkan di Kota Palu, sedangkan pengembangan sumber alam yang menghasilkan bahan baku olahan dalam rangka mendukung kegiatan KEK difokuskan di 12 Kabupaten sebagai daerah belakang (*hinterland*).

Selain itu, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sulawesi Tengah perlu terus digalakkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat dalam Misi ke-3 RPJMD ini. Salah satunya adalah industri bawang goreng di Kota Palu yang perlu terus dikembangkan agar meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daeran Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 menyatakan bahwa Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di daerah. Adapun Industri unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Industri pangan
- b. Industri Hulu Agro
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka berupa Kayu dan Rotan
- d. Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara
- e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.

Data BPS Tahun 2020 mencatat jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor industri sebanyak 235.260 orang. Industri Pangan menjadi kelompok yang menyerap tenaga kerja paling banyak yakni sejumlah 162.020 orang dengan rincian sebanyak 157.477 orang tenaga kerja pada kategori Industri mikro dan kecil, serta sebanyak 4.543 orang tenaga kerja pada kategori Industri besar dan sedang.

Sektor industri menjadi bidang usaha yang cukup menjanjikan mengingat nilai investasi Tahun 2020 mencapai Rp 5,85 Triliun. Adapun sektor industri (non-migas) juga berkontribusi cukup besar yakni 25,16 persen terhadap PDRB Provinsi (ADHK) Tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan 27,62 persen.

2.4.5 Sektor Kehutanan

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha. Berikut tabel yang menunjukkan pola ruang berdasarkan luas dan persentase di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.22.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.7	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan Budidaya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain	2.083.765	32	
	APL	2.083.765	32	
IV.	Perairan(Danau dan	60.304	0,72	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	6.552.672	100	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Tabel di atas menunjukkan kawasan lindung yang cukup besar yakni 35,55 persen, kawasan budidaya hutan sebesar 31,73 persen, Areal Penggunaan Lain sebesar 32 persen dan kawasan perairan (danau dan sungai) sebesar 0,72 persen.

Sub sektor kehutanan pada tahun 2015 telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3 persen. Secara umum produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Produksi Kayu Bulat pada Tahun 2015 mencapai 47.011,83 m³ meningkat menjadi 76.255,49 m³ pada Tahun 2018, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 111.091,90 m³. Produksi Kayu Gergajian pada Tahun 2015 mencapai 17.927,65 m³ meningkat menjadi 24.288,49 m³ pada Tahun 2016, selanjutnya pada Tahun 2019 produksi kayu gergajian meningkat menjadi 25.728,64 m³.

Produksi rotan pada Tahun 2015 mencapai 4.202,40 ton meningkat signifikan menjadi 4.620,00 ton pada Tahun 2017, selanjutnya produksi rotan mengalami penurunan setiap tahun hingga menjadi 1.040,00 ton pada Tahun 2019. Produksi damar pada Tahun 2015 sebesar 1.363,39 ton menurun menjadi 510,00 ton pada Tahun 2016, selanjutnya mengalami penurunan produksi setiap tahun hingga menjadi 440,00 ton pada tahun 2019. Produksi kayu rimba campuran pada Tahun 2015 sebesar 28.419,07 m³ menurun menjadi 7.910,92 m³ pada Tahun 2018, selanjutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 111.091,90 m³.

Tabel 2.23.
Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019

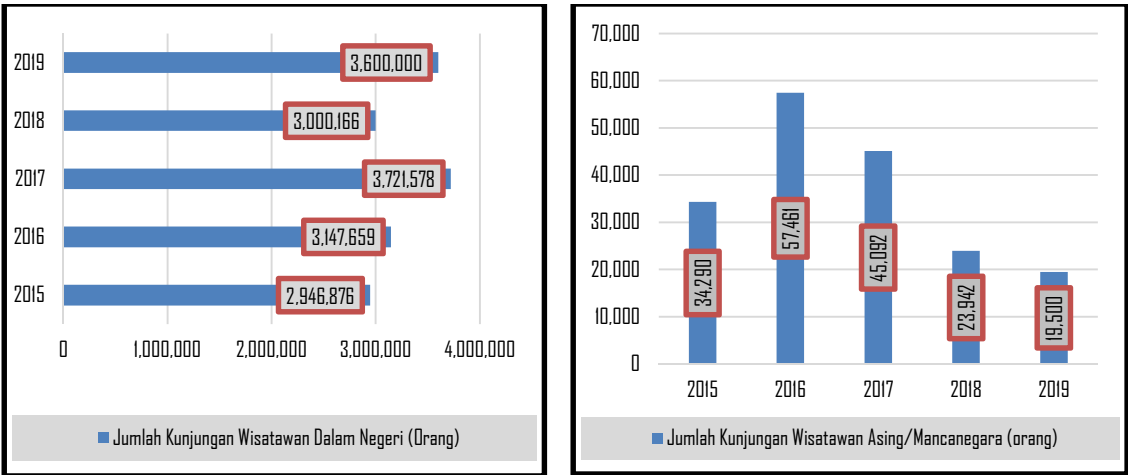
No	Jenis Hasil Hutan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kayu Bulat (m ³)	58.352,01	11.109,92	46.681,61	76.255,49	111.091,90
2	Kayu Gergajian (m ³)	17.927,65	24.288,49	17.434,06	37.658,75	25.728,64
3	Rotan (ton)	4.202,40	2.689,00	4.620,00	1.380,00	1.040,00
4	Damar (ton)	1.363,39	510,00	440,00	600,00	440,00
5	Kayu Rimba Campuran (m ³)	28.419,07	3.539,19	7.867,83	7.910,92	111.091,90

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

2.4.6 Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah. Selama periode 2015-2019 jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun asing/mancanegara di Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif.

Sedangkan pada Tahun 2018 kunjungan wisatawan mengalami penurunan disebabkan adanya gempa tsunami dan liquifaksi yang melanda 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri mencapai 3.600.000 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan asing pada Tahun 2019 mencapai 19.500 orang.



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

Gambar 2.12
Perkembangan Kunjungan Wisatawan
Di Sulawesi Tengah, Tahun 2015 – 2019

Pada gambar diatas terlihat bahwa kunjungan wisatawan di Sulawesi Tengah masih di dominasi oleh wisatawan nusantara atau wisatawan dalam negeri.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Potensi dan Obyek Wisata di Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
1.	Banggai Kepulauan	Makaliu (pulau Tikus)
		Pulau Lambangan Pouno
		Pulau Tolobundu
		Pulau Bandang Besar dan Kecil
		Pulau Lesampuang
		Pulau Delopo
		Pantai Pasir Putih
		Pulau Kembongan
		Pulau Kokungan
		Danau Kuakon
		Air terjun Paisu Mondoni Mansamat
		Danau Paisu Motono Lalong
		Danau Tendetung
		Gua Pentu
		Danau Lemelu
		Batu Masea Lumbia-lumbia
		Danau Alani
		Pemandian Air Terjun Matube Lampa
		Gua Liang
		Air terjun Kambani
		Budaya suku Sea-sea (suku asli Banggai)
		Upacara adat Tumpe atau Tumbe
2.	Kabupaten Buol	Taman Wisata Alam Kumaligon
		Goa Kolera
		Pantai Kamaligon
		Air Terjun Talokan
		Sumber Air Panas
		Air Terjun Pinamula
		Rumah Adat Buol
		Pantai Pelepas Rindu Hulubalang
		Pantai Batu Susun
		Pemandian Alam Tirtaria
		Rumah Raja Buol
		Pulau Ringgit/Pulau Lamari
		Pulau Lesman
		Pulau Boki
		Pulau Busak
		Pulau Raja
		Gunung Pogogul
		Pulau Panjang
3.	Donggala	Pantai Batusuya
		Taman Rekreasi Umum Loly Indah
		Teluk Telenggano
		Pusentasi
		Pantai Boneoge
		Toravega Cottage
		Pantai Enu

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Tanjung Karang
		Harmony Cottage
		Golden park Cottage
		Lokasi Berkemah/Camping Ground
		Pulau Pasoso
4.	Morowali	Pemancingan Putri Malu
		Air Terjun Mempueno
		Sumber Air Panas One Pute
		Pulau Rumbia
		Taman Laut Kaleroang,
		Menui Kepulauan
		Benteng Fafontofure
		Mesjid Tua Bungku
		Budaya Masyarakat Wana
		Istana Bungku
		Pulau Sombori
5.	Morowali Utara	Cagar Alam Morowali
		Situs Istana Raja Mori
		Pulau Ulu
		Pengia
		Kubur Raja Marunduh
		Teluk Tomori
		Batu Putih
		Batu Payung
		Air Terjun Menduru
		Wisata Alam Panapa
		Muara Bajoe
6.	Parigi Moutong	Pulau Kelelawar
		Tanjung Makakata
		Situs Rumah Raja Moutong
		Rumah Klerek
		Air terjun dan Tebing Likunggavali
		Pantai Bambalemo
		Pantai Indah Bomba Kaili
		Habitat Burung Maleo
		Perkebunan Ebony
		Pantai Junayasa
		Pantai Prajurit Posona
		Benda Cagar Budaya
		Situs Tanalanto
		Makam Raja Torikota
		Makam Raja Maruf(Magau Janggo)
		Makam Magau Langi Maili
		Makam Magau Nguni Pasolemba
		Makam Magau Tagunu
		Pantai Tumpapa
7.	Poso	Pantai Seribu Bintang
		Pantai wisata Tamongajo
		Lembah Napu

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Besoa dan Bada
		Situs Rumah Adat Tambi
		Megalith
		Situs Suso
		Situs Sepe
		Situs Tadulako
		Situs Megalit Pokekea
		Situs Lempe
		Deas Wuasa
		Situs Padang Padali
		Situs Megalith Tamadue
		Situs Watulumu
		Situs Watutau
		Situs Megalith Betue
		Situs Mungku Padampaa
		Situs Watunongko
		Danau Poso
		Watubaula
		Goa Tangkaboba
		Pantai Tandolala
		Siuri Cottage
		Taman Anggrek Bancea
		Padamariri
		Goa Pamona
		Air terjun wera
		Torau cottage
8.	Tolitoli	Gua Pompaila
		Air Terjun Kolasi
		Air Panas Tanigi
		Bendungan Kolondom
		Tanjung Matop
		Air Terjun Sigelang
		Pulau Lutungan
		Pantai Tende Sabang
		Tanjung Simuntu
		Pantai Lalos
		Pantai Bajugan
		Rumah Adat Etnis Tolitoli
9.	Tojo Una-una	Kepulauan Togean
		Air Terjun Tolibaz
		Pantai Tipae
		Pantai Pasir Putih Matako
		Pemandian Malatong
		Air Panas Marowo
		Pulau Pangempa
		Tanjung Api
		Sungai Bongka
		Pantai Capatana
		Pulau Kabalutan

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Pulau Malenge
		Jembatan Bakau
		Pulau Bolilanga
		Pulau Taipi
		Pulau Unauna
		Tanjung Keramat
		Pulau Kadidiri
		Pulau buka-buka
10.	Banggai	Air Panas Uwedaka
		Permandian Salodik
		Danau Makapa
		Air Terjun Hanga-Hanga
		Permandian Sandakan
		Permandian Dondo
		Air Terjun Nambo
		Permandian Ampata
		Gua Wira
		Permadian Kilo Lima
		Teluk Lalong
		Pantai Pandaan Wangi
		Pulau Dua
		Pulau Poat
		Boli Cotage Cafe
		Gereja Tua Simpangan
		Situs Totonga Bola Matindok
		Bangkiriang
		Pantai Hek Permai
		Pantai Tou
		Pantai Cemerlang
		Safana Lenyek
		Lembuyang 1 & 2
		Hutan Pinus
		Goa Kelelawar
		Pulau Balean
		Air Terjuan Tontouan
		Bukit Keles
		Air Mambual
		Pandanga
		Pantai Makakata
		Ritual Monsawe
		Danau Makapa
		Pulau Dondolang
		Pulau Jayabakti
		Sabana bukit Poh
		Jembatan kayu Lobu
		Polu Dalagan
		Batu Bintana
		Pulo Basumpelan
		Pulo Tiga

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Pantai Tamparang
		Konservasi maleo
		Pati-pati
		Danau Buton
		Danau Tower
		Bukit Lukapan
		Benteng Dale-dale
11.	Kota Palu	Niki Beach
		Museum Negeri Sulawesi Tengah
		Souraja atau Banua Oge
		Kolam Renang Milenium
		Lokasi MTQ Jabal Nur
		Taman Ria
		Dayo Mpoluku
		Teluk Palu
		Makam Dato Karama
		Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah
		Makam Pue Njidi
		Kolam Renang Graha Tirta
		Pantai Taipa
		Jazz Hotel dan Recreation Zone
		Pantai Talise
		Bumi Roviga
		Cagar Alam Poboya.
12.	Kabupaten Sigi	Situs Bangga
		Camping Ground Paneki
		Matantimali
		Pemandaaian Uwelera Porame
		Porame Paradise
		Mantikole
		Taman Wisata Kapopo
		Air Terjun Wera
		Desa Dombu
		Desa Toro
		Lobo
		Air Terjun Pawelua
		Air Panas Bora
		Gampiri
		Kulit Kayu
		Habitat Burung Maleo
		Desa Pakuli
		Danau Lindu
		Sungai Lariang
		Lembah Pipikoro
		Air Terjun Tamunggu Indah

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten dan Kota, 2016.

2.4.7 Kelautan dan Perikanan

Prospektif sektor kelautan dan perikanan telah memberikan cukup andil yang berarti bagi perekonomian masyarakat di Sulawesi Tengah. Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau. Untuk sektor perikanan, pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 persen dan persediaan air yang cukup. Adapun data potensi perairan darat yang ada, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi tambak seluas 42.095,15 Ha dengan kondisi pemanfaatan sebesar 11,3 persen dan potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan pemanfaatan sebesar 5,8 persen yang terdiri dari danau seluas 48.458 Ha, rawa seluas 12.275 Ha dan sungai 10.195 Ha.

Untuk sektor perairan laut, Sulawesi Tengah terdapat berbagai jenis ikan dan biota laut. Potensi ini terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu: (1) Selat Makassar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), dan (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil menyepakati sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2014 di Jakarta. Adapun ruang lingkup yang termasuk di dalam naskah kesepakatan bersama, meliputi:

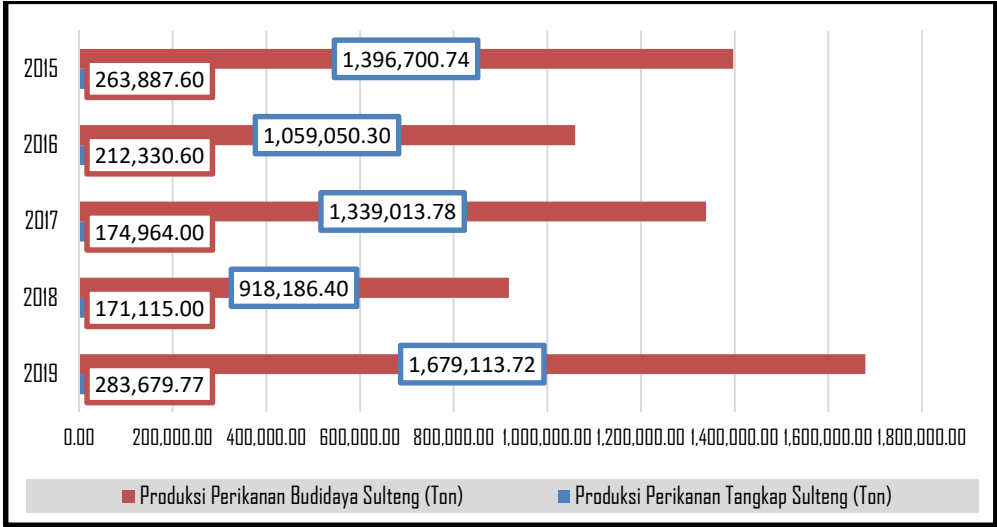
- 1. Peningkatan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 3. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Adapun rincian potensi pengembangan wilayah khususnya sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pertanian	Potensi Peternakan	Potensi Perkebunan	Potensi Perikanan Darat
a. Lahan Potensi Pertanian 672.795 Ha b. Kawasan Hutan Konversi 297.859,78 Ha	a. Potensi Areal Peternakan yang Termanfaatkan 12 0.955,5 Ha b. Potensi Areal yang belum termanfaatkan 10.000,00 Ha	a. Tanaman Kelapa 213.881ha b. Tanaman Kakao 291.445ha c. Tanaman Cengkeh 56.554 ha d. Tanaman Karet 6.201 ha e. Tanaman Jambu Mente 15.030 ha, f. Tanaman Pala 8.444 ha dan g. Tanaman Kelapa Sawit Rakyat seluas 69.686 ha, h. Tanaman Kopi 8.373 ha, i. Tanaman Kapuk 923 ha, luas	a. Tambak 42.095,15 Ha b. Budidaya Air Tawar 134.183,3 Ha c. Danau 48.458 Ha d. Rawa 12.275 Ha e. Sungai 10.195 Ha.

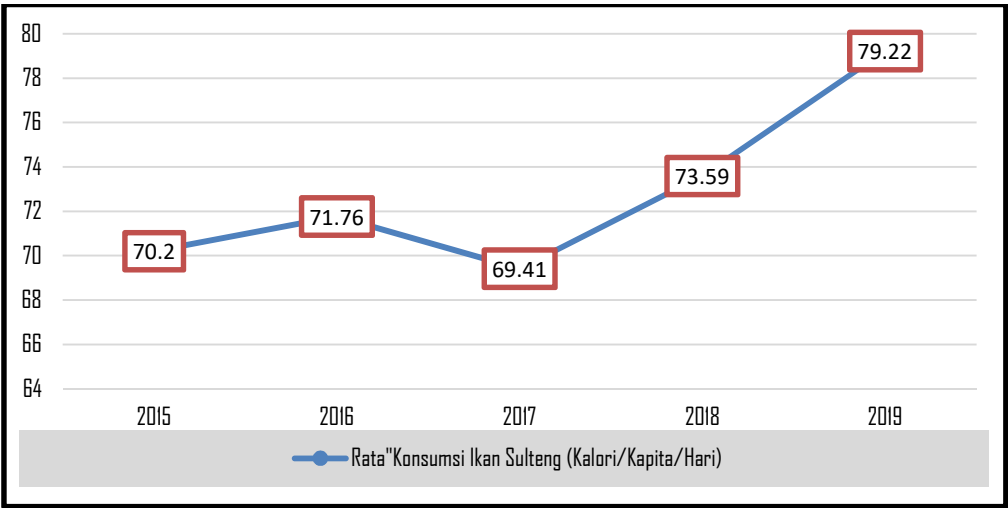
		j. Tanaman Lada 1.228 ha, k. Tanaman Sagu 5.365 ha, l. Tanaman Kemiri 4.219 ha serta m. Tanaman Nilam 336 ha.	
Total 942.206 Ha	Total130.955,5 Ha	Total 681.685 ha	Total 176.278,45 Ha



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

Gambar 2.13
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap serta Tingkat Konsumsi Ikan Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2015-2018 mengalami penurunan, yakni dari 263.887,60 ton pada Tahun 2015 menjadi 171.115,00 ton pada Tahun 2018, dengan rata-rata peningkatan produksi pertahun sebesar 12 persen. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2015 sebanyak 1.396.700,74 ton meningkat menjadi 1.679.113,72 ton pada Tahun 2019.



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.14
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap serta Tingkat Konsumsi Ikan Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019

Perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif, yakni pada tahun 2015 rata-rata konsumsi ikan mencapai 70,20 kalori/kapita/hari menurun menjadi 69,41 kalori/kapita/hari pada tahun 2017, selanjutnya tahun 2018 konsumsi ikan meningkat signifikan hingga menjadi 73,59 kalori/kapita/hari, dan pada tahun 2019 konsumsi ikan meningkat signifikan menjadi 79,22 kalori/kapita/hari.

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun, yakni dari 1.396.700,74 ton pada Tahun 2015 menjadi 1.270.421 ton pada Tahun 2019.

Sedangkan pada perikanan tangkap jumlah produksinya pada Tahun 2015 sebesar 174.794,20 ton meningkat menjadi 212.330,60 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada Tahun 2019 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan menjadi 171.116 ton. Secara rinci perkembangan produksi perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2015 – 2019 (Ton)

Jenis Usaha Perikanan	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan Budidaya	1.396.700,74	1.338.979,63	1.049.006,80	912.111,28	1.270.421
a. Tambak	113.201,97	122.650,80	104.939,86	128.481,71	123.311
b. Budidaya Rumput Laut	1.274.288,60	1.207.480,10	937.023,60	763.704,45	1.134.143
c. Kolam	8.039,99	7.727,94	4.542,64	18.014,59	11.582,00
d. Karamba	25,27	26,29	27,00	24,71	25
e. Jaring Apung dan Sawah	1.144,91	1.094,50	12.473,70	1.885,82	1.360
Perikanan Tangkap	174.794,20	212.330,60	174.964,00	171.125,00	171.116
a. Laut	174.794,20	210.140,20	174.049,30	168.550,50	168.551
b. Perairan Umum	-	2.190,40	914,70	2.564,50	2.565

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020.

2.4.8 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak dilapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO).

Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Potensi dan Sebaran Pertambangan
Di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I. Batuan Ornamen/poles			
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	<ul style="list-style-type: none">- Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan.- Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli.	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM.
2.	Marmer/pualam dan Sarpentin	<ul style="list-style-type: none">- Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso.- Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai.- Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong.- Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
II. Batuan Bahan Konstruksi			
3.	Sirtukil	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit,juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kab. Donggala dan Kota Palu diantar-pulauan ke Kalimantan Timur.
III. Mineral Non Logam lainnya			
4.	Batu gamping	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5.	Lempung	<ul style="list-style-type: none">- Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan.	Umumnya mempunyai kadar SiO3 kurang dari 75 %.

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
7.	Gypsum	- Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	- Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar MgO3
9.	Dolomit	- Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng 2016.

Selain hal tersebut diatas, Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

- Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik
- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
 - Air : 1.001,980 MW;
 - Matahari : 5.512 kWh/m²;
 - Angin : 2 – 5 m/s;
 - Biogas : 19.026 kW
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel): 260.070 ha.

Potensi energi air di Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1 dengan kapasitas 50 MW, PLTA Poso-2 dengan kapasitas 180 MW dan PLTA Poso-3 360 Mw. Untuk Poso-1 dan Poso-2 saat ini pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan namun untuk pekerjaan jaringan transmisi masih dalam taraf pengerjaan. Yang sementara dibangun (dalam tahap konstruksi) adalah PLTA Poso-3 dengan kapasitas 360 MW oleh PT. Poso Energy.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 persen. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat dibeberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20 s/d 40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

2.5. Pemerintahan

2.5.1 Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, hingga Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yang meliputi 175 Kecamatan, 175 Kelurahan dan 1.842 Desa. Tercatat Kabupaten Banggai memiliki Kelurahan dan Desa terbanyak, yakni 46 Kelurahan dan 291 Desa yang tersebar di 23 Kecamatan. Menyusul Kabupaten Parigi Moutong dengan 23 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 278 Desa.

Tabel 2.28.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Banggai Kepulauan	12	3	141
2	Banggai	23	46	291
3	Morowali	9	7	126
4	Poso	19	28	142
5	Donggala	16	9	158
6	Tolitoli	10	6	103
7	Buol	11	7	108
8	Parigi Moutong	23	5	278
9	Tojo Una-Una	12	12	134
10	Sigi	15	-	176
11	Banggai Laut	7	3	63
12	Morowali Utara	10	3	122
13	Palu	8	46	-
Sulawesi Tengah		175	175	1.842

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021.

2.5.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil pemilihan umum tahun 2019 lalu, telah menghasilkan anggota legislatif sebagai wakil rakyat untuk duduk di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pada Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terpilih, dengan jumlah laki-laki 33 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Tabel 2.29.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Parai Nasdem	6	1	7
2	Partai Golongan Karya	7	-	7
3	Partai Gerindra	4	2	6
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	1	6
5	Partai Demokrat	2	2	4
6	Partai Kebangkitan Bangsa	3	1	4
7	Partai Keadilan Sejahtera	1	3	4
8	Partai Hanura	1	1	2

9	Partai Perindo	2	2
10	Partai Amanat Nasional	2	2
11	Partai Persatuan Pembangunan	-	1
	Jumlah	33	45

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021.

Posisi Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2019-2024, pada posisi Ketua, untuk pertama kali sepanjang sejarah kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh perempuan, yakni Nilam Sari Lawira asal Partai Nasdem dari daerah pemilihan Donggala-Sigi. Menyusul Pimpinan, Wakil Ketua I Moh. Arus Abdul Karim asal Partai Golongan Karya dari daerah pemilihan Kota Palu, Wakil Ketua II Zalzulmida A. Djanggola asal Partai Gerindra dari daerah pemilihan Parigi Moutong, dan Wakil Ketua III Muharram Nurdin asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan Donggala-Sigi.

Tabel 2.30.
Anggota DPRD Periode Tahun 2019-2024
Menurut Partai dan Daerah Pemilihan

No	Nama Anggota	Partai	Daerah Pemilihan
1	Nilam Sari Lawira (Ketua DPRD)	Partai Nasdem	Donggala-Sigi
2	Yahdi Basma	Partai Nasdem	Kota Palu
3	Ibrahim Hafid	Partai Nasdem	Parigi Moutong
4	Hasan Patonggai	Partai Nasdem	Toli-Toli, Buol
5	Irianto Malinggong	Partai Nasdem	Banggai-Bangkep-Banglut
6	Imam Kurniawan Lahay	Partai Nasdem	Poso-Morut-Mrw-Touna
7	Soni Tandra	Partai Nasdem	Poso-Morut-Mrw-Touna
8	Moh. Arus Abdul Karim (Waket I)	Partai Golongan Karya	Kota Palu
9	Erwin Burase	Partai Golongan Karya	Parigi Moutong
10	Moh Faizal Lahadja	Partai Golongan Karya	Toli-Toli, Buol
11	Naser Djibran	Partai Golongan Karya	Banggai-Bangkep-Banglut
12	Yus Mangun	Partai Golongan Karya	Poso-Morut-Mrw-Touna
13	Zainal Abidin Ishak	Partai Golongan Karya	Poso-Morut-Mrw-Touna
14	Budi Luhur Larengi	Partai Golongan Karya	Donggala-Sigi
15	Alimuddin Paada	Partai Gerindra	Kota Palu
16	Zalzulmida A. Djanggola (Waket II)	Partai Gerindra	Parigi Moutong
17	Faizal Alatas	Partai Gerindra	Toli-Toli, Buol
18	Winiar Hidayat Lamakarate	Partai Gerindra	Banggai-Bangkep-Banglut
19	Ambo Dalle	Partai Gerindra	Poso-Morut-Mrw-Touna
20	Abdul Karim Aljufrie	Partai Gerindra	Donggala-Sigi
21	Elisa Bunga Allo	PDI-Perjuangan	Kota Palu
22	I Nyoman Slamet	PDI-Perjuangan	Parigi Moutong
23	Sri Indraningsi Lalusu	PDI-Perjuangan	Banggai-Bangkep-Banglut
24	Suryanto	PDI-Perjuangan	Banggai-Bangkep-Banglut
25	Husman Brant Troipalu	PDI-Perjuangan	Poso-Morut-Mrw-Touna
26	Muharram Nurdin (Waket III)	PDI-Perjuangan	Donggala-Sigi
27	Moh Hidayat Pakamundi	Partai Demokrat	Kota Palu
28	Moh Nur Dg Rahmatu	Partai Demokrat	Parigi Moutong
29	Elen Ester Palealu	Partai Demokrat	Poso-Morut-Mrw-Touna
30	Marlela	Partai Demokrat	Donggala-Sigi
31	Rahmawati M Nur	Partai Kebangkitan Bangsa	Parigi Moutong
32	Zainal M Daud	Partai Kebangkitan Bangsa	Toli-Toli, Buol
33	Aminullah BK	Partai Kebangkitan Bangsa	Poso-Morut-Mrw-Touna
34	Kaharuddin	Partai Kebangkitan Bangsa	Donggala-Sigi

35	Wiwik Jumatul Rofiah	Partai Keadilan Sejahtera	Kota Palu
36	Sri Atun Fatimah	Partai Keadilan Sejahtera	Banggai-Bangkep-Banglut
37	Fatimah Moh Amin Lasawedi	Partai Keadilan Sejahtera	Poso-Morut-Mrw-Touna
38	Moh Tahir Hi Siri	Partai Keadilan Sejahtera	Donggala-Sigi
39	Ronal Gulla	Partai Amanat Nasional	Banggai-Bangkep-Banglut
40	Muhaimin Hadi Yunus	Partai Amanat Nasional	Poso-Morut-Mrw-Touna
41	Sitti Halima Ladoali	Partai Hanura	Toli-Toli, Buol
42	Moh Ismail Junus	Partai Hanura	Banggai-Bangkep-Banglut
43	Muslih	Partai Perindo	Parigi Moutong
44	Enos Pasaua	Partai Perindo	Donggala-Sigi
45	Fairuz Husen Maskati	Partai Persatuan Pembangunan	Toli-Toli, Buol

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2021.

Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Suprpto Dg. Situru dari Partai Amanat Nasional memilih mengundurkan diri untuk mengikuti kontes-tasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lalu. Hingga terpilih Pengganti Antar Waktu (PAW) Muhaimin Hadi Yunus untuk daerah pemilihan Poso-Morowali Utara-Morowali dan Tojo Una-Una yang dilantik pada 3 Maret 2021 lalu.

Komposisi nama anggota DPRD juga mengalami perubahan, setelah kabar duka Budi Luhur Larengi dari daerah pemilihan Donggala-Sigi dinyatakan meninggal dunia pada 24 Maret 2021 lalu. Namun, sampai laporan ini disusun, belum ditetapkan PAW atas jabatan anggota DPRD yang ditinggalkan politisi Partai Golkar ini.

2.5.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik pemerintahan daerah yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk 12 Kabupaten dan 1 Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Desember 2020 tercatat 62.388 orang pegawai, yang terdiri atas laki-laki 27.239 orang dan 35.149 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak dimiliki Kabupaten Banggai, dengan 7.425 orang pegawai, yang terdiri atas laki-laki 3.396 orang dan perempuan 4.029 orang pegawai.

Tabel 2.31.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah, Desember 2020

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banggai Kepulauan	1.633	1.592	3.225
2	Banggai	3.396	4.029	7.425
3	Morowali	1.582	1.769	3.351
4	Poso	2.706	3.785	6.491
5	Donggala	2.604	3.131	5.735
6	Tolitoli	2.265	2.853	5.118
7	Buol	1.793	1.990	3.783
8	Parigi Moutong	2.888	3.486	6.374
9	Tojo Una-Una	1.742	2.513	4.225
10	Sigi	2.140	3.010	5.150
11	Banggai Laut	959	1.103	2.062
12	Morowali Utara	1.499	1.860	3.259
13	Palu	2.032	4.028	6.060
Sulawesi Tengah		27.239	35.149	62.388

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021.

Adapun jumlah PNS Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 tercatat 11.925 orang yang terdiri atas laki-laki 5.831 orang dan perempuan 6.094 orang pegawai. Pada data tersebut, menurut jabatan yang melekat pada PNS Pemerintah Daerah, nampak jabatan Eselon I tidak ada. Ini dikarenakan, pejabat yang bersangkutan yakni Sekretaris Daerah telah mengundurkan diri pada tahun 2019 lalu untuk mengikuti tahapan kontestansi pemilihan kepala daerah serentak.

Tabel 2.32.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, 2020

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	2.687	3.484	6.171
Fungsional Umum	2.495	2.151	4.646
Struktural	649	459	387
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	431	370	801
Eselon III	181	81	262
Eselon II	37	8	45
Eselon I	-	-	-
Jumlah	5.831	6.094	11.925

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021.

2.6. Sosial Budaya

2.6.1 Sosial

Pelayanan di bidang sosial difokuskan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Capaian indikator sosial disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Sosial Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	1,50	4,58	11,13	1,70	0,42
2.	Persentase Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,23	1,15	4,07	12,16	1,69
3.	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya	1,23	1,23	1,75	2,19	1,81
4.	Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana & Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	48,57	14,28	15,71	0	0

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2021 (Diolah).

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 terdapat kecenderungan penurunan penanganan bantuan sosial bagi PMKS. Tahun 2020

jumlah PMKS yang seharusnya ditangani, memperoleh bantuan sosial dan kebutuhan dasar mencapai 1.892.456 PMKS, namun yang tertangani 0,42 persen.

Selain itu, Kementerian Sosial telah meluncurkan program-program bantuan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya lewat pemberian bantuan sosial pangan. Adapun jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) dan anggaran di Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan

	Jumlah KPM	Anggaran (Rp)
	9.997	1.999.400.000
Banggai	27.835	5.567.000.000
Morowali	8.720	1.744.000.000
Poso	22.240	4.448.000.000
Donggala	25.574	5.114.800.000
Tolitoli	17.020	3.404.000.000
Buol	12.970	2.594.000.000
Parigi Moutong	36.538	7.307.600.000
Tojo Una-Una	15.751	3.150.200.000
Sigi	18.124	3.624.800.000
Banggai Laut	3.133	626.600.000
Morowali Utara	8.845	1.769.000.000
Palu	15.235	3.047.000.000
Sulawesi Tengah	221.982	44.396.400.000

Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan sebanyak 221.982 keluarga. Disisi lain, data DTKS provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 249.377 Rumah tangga. Jumlah ini tersebar pada desil 1 hingga desil 4 di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Adapun jumlah individu yang berada pada tingkat 40 persen kesejahteraan terendah adalah sebanyak 1.041.024 jiwa. Berikut ini data penduduk Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah berbasis DTKS.

Tabel 2.35.
Jumlah Penduduk Berdasarkan kesejahteraan Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	BANGGAI KEPULAUAN	11.265	11.508	13.852	10.673	47.298
2	BANGGAI	33.181	38.002	33.432	25.239	129.854
3	MOROWALI	10.483	13.123	10.157	4.223	37.986
4	POSO	41.647	24.827	24.727	8.227	99.428
5	DONGGALA	37.096	28.913	48.067	27.336	141.412
6	TOLI-TOLI	6.352	11.877	22.498	25.524	66.251
7	BUOL	11.957	13.695	17.608	16.619	59.879
8	PARIGI MOUTONG	68.063	43.195	37.792	40.915	189.965
9	TOJO UNA- UNA	28.340	19.756	13.426	2.681	64.203
10	SIGI	22.154	18.651	27.479	23.293	91.577
11	BANGGAI LAUT	4.963	4.126	4.439	3450	16.978

12	MOROWALI UTARA	12.632	12.446	9.633	4.167	38.878
13	KOTA PALU	27.948	13.164	8.566	7.637	57.315
Total		316.081	253.283	271.676	199.984	1.041.024

Sumber: <http://bdt.tnp2k.go.id>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak yang memiliki status kesejahteraan terendah ada di Desil 1 yakni sebanyak 316.081 jiwa. Desil 1 merupakan kelompok penduduk kesejahteraan paling rendah dan paling banyak terdistribusi di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 21,53 persen, disusul Kabupaten Poso sebanyak 13,18 persen serta Kabupaten Donggala sebanyak 11,74 persen.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek diantaranya ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Salah satu kondisi lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi disabilitas. Kondisi ini rentan terhadap akses pada pelayanan kesehatan yang baik, sumber lapangan pekerjaan dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara. Berikut ini Tabel penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya menurut kabupaten kota di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.36.
Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenisnya
Menurut Kabupaten Kota Di Sulawesi Tengah

	Disabilitas Netra	Disabilitas Wicara	Disabilitas Tubuh	Disabilitas Mental	Disabilitas Ganda	Jumlah
Banggai Kepulauan	92	53	138	70	79	432
Banggai	428	258	524	243	263	1.716
Morowali	105	41	128	84	83	441
Poso	202	176	487	236	206	1.307
Donggala	284	141	398	197	190	1.210
Tolitoli	187	120	302	112	144	865
Buol	204	144	259	1114	224	1.945
Parigi Moutong	372	198	565	270	279	1.684
Tojo Una- Una	138	73	254	102	111	678
Sigi	215	165	325	136	193	1.034
Banggai Laut	47	44	89	49	29	258
Morowali Utara	100	64	172	97	110	543
Palu	113	35	284	125	95	652
Sulawesi Tengah	2.487	1.512	3.925	2.835	2.006	12.765

Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2021)

Data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, terdapat total 12.765 jiwa penyandang disabilitas yang tersebar di kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak adalah Kabupaten Buol sebanyak 1.945 jiwa, disusul Kabupaten Banggai sebanyak 1.716 jiwa dan Kabupaten Parigi

Moutong Sebanyak 1.684 jiwa. Sebagai warga negara, kaum difabel juga berhak untuk dapat hidup layak dan terpenuhi hak-hak dasar sebagai manusia sekaligus warga negara Republik Indonesia.

2.6.2 Budaya

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Kota. Jangkauan yang luas dan medan yang berat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh masyarakat. Tanpa terkecuali bagi masyarakat adat yang tinggal terpencil di pelosok daerah. Komunitas adat ini perlu diberdayakan guna peningkatan kualitas hidup sebagai tujuan dari pembangunan. Di Sulawesi Tengah terdapat beberapa komunitas adat yang belum diberdayakan seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37.
Banyaknya Komunitas Adat Terpencil yang Belum Diberdayakan menurut Kabupaten dan Suku di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

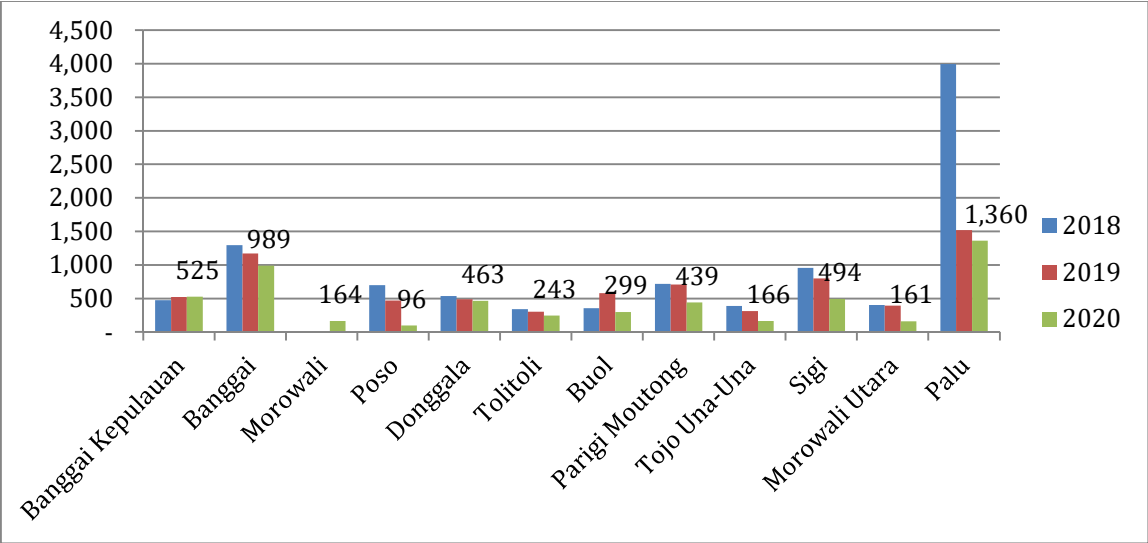
Kabupaten/Kota	Nama Suku	KK	Jiwa
Banggai Kepulauan	1. Sea-sea	231	1.155
Banggai	1. Loinan (Saluan)	1.117	5.858
Morowali	1. Wana (Taa)	392	1.960
Poso	1. Wana	94	470
Donggala	1. Tolare/ Da'a	1.051	4.204
Toli-Toli	1. Launje	1.115	5.440
	2. Pendau	371	1.805
	3. Dondo	1.877	8.870
	4. Pandau dan Dondo	165	591
	5.Hanje	100	500
	6. Bajo	145	604
Buol		1.041	4.265
Parigi Moutong	1. Lauje	2.342	11.745
Tojo Una-una	1. Wana	1.157	5.785
Sigi	1. Da'a	3.052	14.490
Banggai Laut	1. Banggai	592	2.960
	2. Banggai-Bajo	380	5.160
Morowali Utara		-	-
Palu		-	-
Sulawesi Tengah		15.222	75.862

Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2021)

Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 75.862 jiwa masyarakat adat terpencil yang belum diberdayakan. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada kelompok ini sebagai kelompok rentan yang juga berhak atas pelayanan dasar sebagai warga negara.

2.6.3 Kriminalitas

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan tindak kriminalitas masyarakat. Meski demikian, tindak kriminal selalu melekat pada pribadi pelaku yang bersangkutan. Baik miskin maupun kaya, tindak kriminal dapat dilakukan dengan berbagai modus yang melatarbelakanginya. Berikut ini gambaran jumlah kejahatan yang dilaporkan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menurut kabupaten/ kota.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2021)

Gambar 2.15
Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Menurut Kabupaten Kota

Gambar di atas menunjukkan setidaknya dalam tiga tahun terakhir, tingkat kejahatan yang dilaporkan cenderung lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Total Kejahatan yang dilapoorkan pada Tahun 2018 sebanyak 10.165 kasus. Pada Tahun 2020 angka ini turun hampir setengah dari kasus Tahun 2018 yakni tinggal sebanyak 5.399 kasus. Kota palu menjadi daerah di Sulawesi tengah dengan tingkat kejahatan yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.360 kasus disusul Kabupaten Banggai sebanyak 989 kasus. Tingkat kejahatan paling banyak cenderung terjadi di daerah perkotaan.

Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang berdampak sangat buruk bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya juga terjadi di Sulawesi Tengah. Berikut ini data terkait tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.37.
Banyaknya Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Masuk dan Diselesaikan pada Kejaksaan Tinggi dan Negeri menurut Kantor Kejaksaan Tahun 2020

Lembaga	Sisa Tahun Lalu	Laporan masuk tahun	Jumlah	Penyelesaian	Sisa Tahun Laporan
Kejati Sulawesi Tengah	12	5	17	5	12
Kejaksaan Negeri Palu		2	2	1	1
Kejaksaan Negeri Banggai	7	4	11	2	9
Kejaksaan Negeri Toli-toli	2	4	6	2	4
Kejaksaan Negeri	4	2	6	6	0

Poso						
Kejaksaan Donggala	Negeri	6	6	12	7	5
Kejaksaan Banggai Laut	Negeri	1	2	3	3	0
Kejaksaan Parigi Moutong	Negeri	2	8	10	4	6
Kejaksaan Buol	Negeri	5	1	6	4	2
Kejaksaan Tojo Una-Una	Negeri	2	2	4	1	3
Kejaksaan Morowali	Negeri	2	2	4	1	3
Jumlah		43	38	81	36	45

Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2021)

Berdasarkan data di atas, tindak pidana korupsi paling banyak dilaporkan melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 17 kasus, disusul Kejaksaan Negeri Donggala sebanyak 12 kasus, Kejaksaan Negeri Banggai sebanyak 11 kasus, serta Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebanyak 10 kasus. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan pembinaan atas para pemangku kewajiban yang diberi amanah namun melakukan tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan negara namun juga memangkas hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

2.7. Kemiskinan Ekstrem

Penghapusan angka kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus dicapai tahun 2030. Komitmen Pemerintah menangani kemiskinan, kini difokuskan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori sangat miskin, dan berharap kemiskinan ekstrem dapat ditangani pada 2024 mendatang.

Pengertian penduduk sangat miskin atau miskin ekstrem menurut Bank Dunia, merupakan **orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,91 dolar AS per/hari atau kurang dari Rp 30 ribu per/hari**. Dengan asumsi hitungan kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 14.130.

Penduduk miskin masih memiliki peluang naik kelas dan mengembangkan usahanya, hal ini berbeda dengan penduduk miskin ekstrem yang umumnya hidup serba pas-pasan, bahkan selalu kekurangan. Penduduk miskin ekstrem tidak memiliki aset produksi dan usaha yang layak untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Jangankan memiliki tabungan, justru mereka sering terperangkap jerat utang sehingga membuat posisi tawar mereka semakin rendah.

Penduduk miskin ekstrem tidak memiliki kemampuan dan peluang mengembangkan usahanya, bahkan mereka hanya berperan sebagai tenaga buruh kasar dengan upah harian yang murah. Kaum buruh tani, buruh serabutan, atau buruh nelayan merupakan kelompok penduduk miskin ekstrem yang hanya bermodal tenaga tidak memiliki keahlian.

Ciri penduduk miskin ekstrem biasanya rentan atau rapuh, mereka tidak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan tidak memiliki tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Tidak dimilikinya tabungan ditambah tanggungan utang, menjadi kombinasi tekanan sosial yang menyebabkan penduduk miskin masuk dalam perangkap kemiskinan berkelanjutan dan tidak memungkinkan untuk keluar secara mandiri.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin Indonesia terus menurun. Pada September 2015, jumlah

penduduk miskin tercatat masih 11,13 persen, lalu turun menjadi satu digit menjadi 10,19 persen pada September 2020. Dari jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 sebanyak 27,5 juta penduduk miskin, lebih dari 9 juta di antaranya masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim.

Khusus Provinsi Sulawesi Tengah, BPS mencatat angka per September 2020, jumlah penduduk miskin 403,7 ribu atau 13,06 persen. Atas jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrim termasuk di dalamnya yang tersebar di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah penduduk miskin ekstrim (jiwa) didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Kementerian Sosial. Atas DTKS dimaksud, ditetapkan prioritas wilayah tahap pertama tahun 2022 untuk penanganan kemiskinan ekstrim setiap Provinsi. Berikut wilayah penanganan kemiskinan ekstrim Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 2.38.
Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrim
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial			
		Miskin Ekstrim	25% Terbawah	Total	Program Sembako		Program Keluarga Harapan	
					Miskin Ekstrim	Total Penerima	Miskin Ekstrim	Total Penerima
		(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
1.	Tolitoli	0,61	5,00	26,24	0,53	13,43	0,55	11,65
2.	Morowali	1,21	6,53	10,91	1,08	7,65	1,02	5,98
3.	Morowali Utara	1,56	6,84	10,94	1,30	6,71	1,21	5,38
4.	Poso	3,74	19,61	27,70	3,19	16,81	3,42	17,37
5.	Tojo Una-Una	3,87	12,16	19,50	3,35	10,50	3,07	9,61
6.	Donggala	5,38	18,73	36,92	4,70	21,43	4,79	20,04
7.	Parigi Moutong	8,83	25,22	52,28	7,37	31,54	7,52	30,18

Sumber: SK No. 8 Tahun 2019 DTKS, Kemensos, dan TNP2K (Diolah Kembali).

Berdasarkan tabel di atas, diketahui wilayah penanganan kemiskinan ekstrim Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 akan difokuskan pada 7 (tujuh) Kabupaten. Nampak wilayah yang mencatatkan jumlah rumah tangga DTKS penduduk miskin ekstrim terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong sejumlah 8,83 persen, menyusul Kabupaten Donggala sejumlah 5,38 persen, dan Kabupaten Tojo Una-Una sejumlah 3,87 persen. Lalu urutan keempat terbanyak jumlah penduduk ekstrim ditempati Kabupaten Poso sejumlah 3,74 persen, menyusul urutan berikutnya ditempati Kabupaten Morowali Utara sejumlah 1,56 persen, Kabupaten Morowali sejumlah 1,21 persen, hingga Kabupaten Tolitoli sejumlah 0,61 persen.

Memastikan target 2024, angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai titik nol atau sama sekali habis, harus diakui bukan pekerjaan mudah. Selain dibutuhkan pemutakhiran data keluarga miskin ekstrem untuk mencegah intervensi program menjadi salah sasaran, yang berikutnya pemerintah daerah harus mampu melaksanakan program inovatif penanggulangan kemiskinan daerah.

Selama ini kekeliruan kerap dilakukan, berupa pandangan untuk menolong dan memberdayakan penduduk miskin melalui jalur garis lurus (linier). Ketika pemerintah mengucurkan modal atau pelatihan keterampilan, asumsi yang melandasi bahwa semua itu dapat mendorong perkembangan usaha penduduk miskin hingga memperbaiki taraf ekonomi dan naik level tingkat.

Logika mengedepankan penambahan kapasitas produksi dan memperbesar usaha penduduk miskin ekstrem ini, dalam kenyataannya justru menjadi masalah berulang. Kasus membuktikan, meminta penduduk miskin naik kelas dengan menghadapi pesaing usaha yang lebih mapan, ternyata menjadi titik balik

penduduk miskin kembali jatuh dalam kelas sosial lebih miskin. Tidak dimilikinya akses jaringan pasar membuat usaha yang ditekuni penduduk miskin rawan bangkrut karena tidak mampu bersaing di pasar.

Demikian pula dengan mengandalkan program populis seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, dan program Indonesia Pintar, menjadikan pemberdayaan penduduk miskin ekstrem tidak akan pernah terwujud. Upaya program populis ini tidak efektif jika tidak dilandasi upaya memberdayakan sekaligus melindungi penduduk miskin dari jangkauan pengaruh usaha berskala besar. Memberi kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan taraf kehidupan penduduk miskin ekstrem niscaya hanya bisa dilakukan jika posisi mereka dalam pembagian margin keuntungan diperbaiki.

Jadi beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. *Pertama*, Mengikis nilai budaya negatif yang dapat menghambat proses penanggulangan kemiskinan seperti rasa malas bekerja, apolitis, ketidakberdayaan, dan sebagainya.

Kedua, Meningkatkan kemampuan produktivitas pendapatan melalui perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, penggunaan teknologi, akses jaringan kerja, dan informasi pasar.

Ketiga, Melakukan pemberdayaan kepada populasi miskin karena masyarakat miskin mampu membangun dirinya sendiri jika diberi kebebasan untuk mengatur dan memberdayakan diri sendirinya. Pemerintah daerah hadir memberikan dukungan dan bantuan dengan memperhatikan kondisi budaya dan lokalitas populasi penduduk miskin.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan perekonomian. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama.

Menurut Adji dkk. (2020) mengutip publikasi Bank Dunia yang berjudul: *Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PBB mengajukan beberapa indikator teknis yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Ini berarti bahwa perspektif yang digunakan menentukan miskin dan tidaknya seseorang pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam penyusunan dokumen RPKD Provinsi Sulawesi Tengah, TNP2K membagi profil kemiskinan daerah menjadi dua kelompok bidang besar yakni kemiskinan bidang konsumsi dan kemiskinan bidang non konsumsi, serta beberapa sub bidang dan indikator kinerja (berisi realisasi/capaian dan target) yakni pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, ekonomi, fiskal, pendapatan dan belanja daerah, serta indikator daerah lainnya.

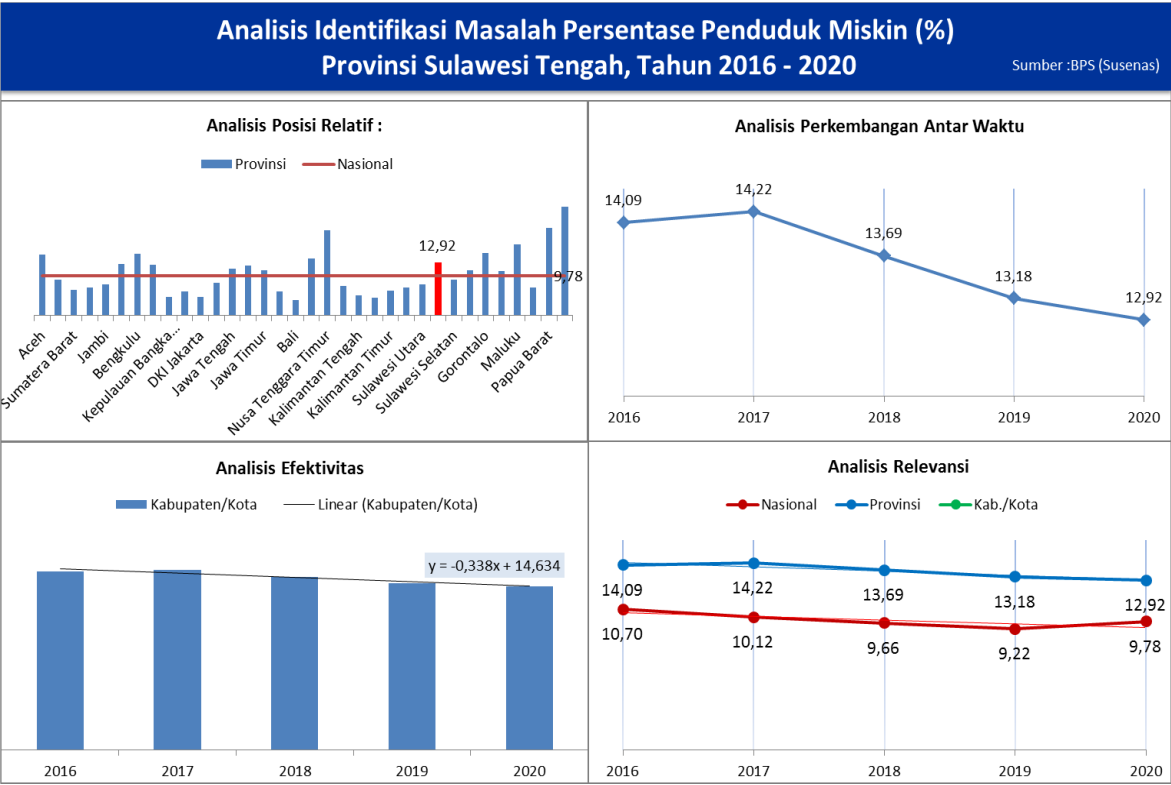
3.1 Profil Kemiskinan Bidang Konsumsi

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis tersebut didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan minimum untuk memperoleh: (i) sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori tertentu; dan (ii) pengeluaran bukan makanan minimum untuk hidup secara layak (Adji dkk, 2020).

Berdasarkan pengelompokkan tersebut maka Kemiskinan Bidang Konsumsi terkait dengan pengeluaran atau belanja makanan dan non makanan yang dilakukan oleh rumahtangga guna memenuhi kebutuhan kalori dan sosial. Beberapa Indikator penting diuraikan untuk mengkaji permasalahan kemiskinan bidang konsumsi di Sulawesi Tengah meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan baik di perdesaan dan perkotaan.

3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin menurut BPS dan Permendagri 86 tahun 2017, yang menjelaskan formulasi dan pengukuran indikator kinerja daerah, merupakan persentase perbandingan antara jumlah orang miskin dengan jumlah penduduk pada suatu daerah dan waktu tertentu. Hasil analisis permasalahan persentase penduduk miskin (%) di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 3.1
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana nilai perbedaan persentase tersebut mencapai 3 digit. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, terdapat 8 (delapan) provinsi lain yang memiliki persentase yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah terutama di kedua provinsi Pulau Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang berada di atas angka 20 persen.

Ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Tengah masuk 10 (sepuluh) besar provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar. Di tingkat regional Pulau Sulawesi yang terdiri atas enam provinsi, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah hanya lebih baik dari provinsi Gorontalo dengan persentase kemiskinan mencapai 15,22 persen. Hal yang kontras jika ditinjau dari potensi sumberdaya alam yang besar seperti potensi tambang, empat wilayah pengelolaan perikanan laut (terbanyak di Indonesia), dan potensi lahan dan komoditi pertanian yang lengkap untuk seluruh sub sektor pertanian.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 14,09 persen ke

angka 12,92 persen, yang berarti setiap tahun mengalami penurunan 0,3 persen. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal. Terjadinya gempa pada bulan September tahun 2018, juga memberikan andil dalam menahan penurunan persentase angka penduduk miskin. Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong merupakan kabupaten yang terdampak gempa dan juga menyumbang angka persentase penduduk miskin terbesar di Sulawesi Tengah.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah cukup efektif. Namun efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan relative rentan akan perubahan (tidak stabil), oleh karena dalam periode 2016-2020, terdapat satu tahun (tahun 2017) yang persentase penduduk miskin mengalami peningkatan walau tidak signifikan, lalu kembali mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Ini juga diperkuat oleh data persentase penduduk miskin pada bulan September 2020 yang menunjukkan angka peningkatan dari bulan maret 2020 menjadi 13,06 persen.

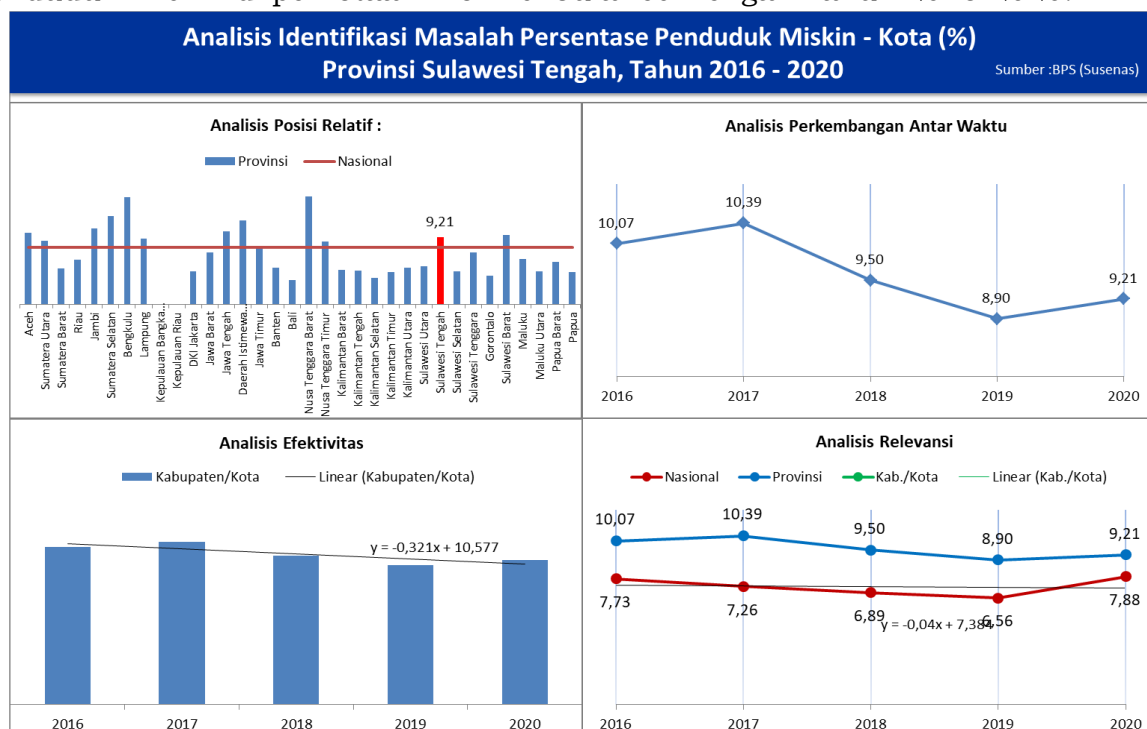
Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 10,07 persen tahun 2016 menjadi 9,22 pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,78 persen tahun 2020.

Demikian pula persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai maret 2020 dan meningkat kembali dalam jumlah yang sangat kecil pada September 2020. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemic Covid19 secara nasional, dan dampaknya bagi provinsi Sulawesi Tengah baru terasa pada September 2020, dengan adanya pembatasan kegiatan dalam mikro. Kondisi tersebut menunjukan terdapat relevansi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

3.1.2 Persentase Penduduk Miskin Kota

Gambar 3.2 di bawah ini memperlihatkan hasil analisis persentase penduduk miskin di perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.



Gambar 3.2
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Kota

Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah (9,21) masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin nasional (7,88 persen), namun persentase ini di bawah dua digit (10 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, terdapat 8 (delapan) provinsi lain yang juga memiliki persentase yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah antara lain Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan dan DIY yang berada di atas angka 10 persen.

Ini juga berarti bahwa Provinsi Sulawesi Tengah masuk 10 (sepuluh) besar provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin kota terbesar. Di tingkat regional Pulau Sulawesi, persentase penduduk miskin kota Sulawesi Tengah hanya lebih baik dari provinsi Sulawesi Barat dengan persentase kemiskinan mencapai 9,59 persen. Jika dibandingkan dengan kedua provinsi di Papua yang secara keseluruhan persentase penduduk miskinnya, namun di daerah perkotaan, kedua provinsi tersebut memiliki persentase penduduk yang sangat rendah, dan masuk dalam lima besar nasional persentase penduduk miskin kota terkecil.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin kota di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah perkotaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik. Terjadinya bencana pandemi covid19 pada tahun 2020, juga memberikan andil dalam meningkatkan persentase angka penduduk miskin kota.

Analisis Efektivitas

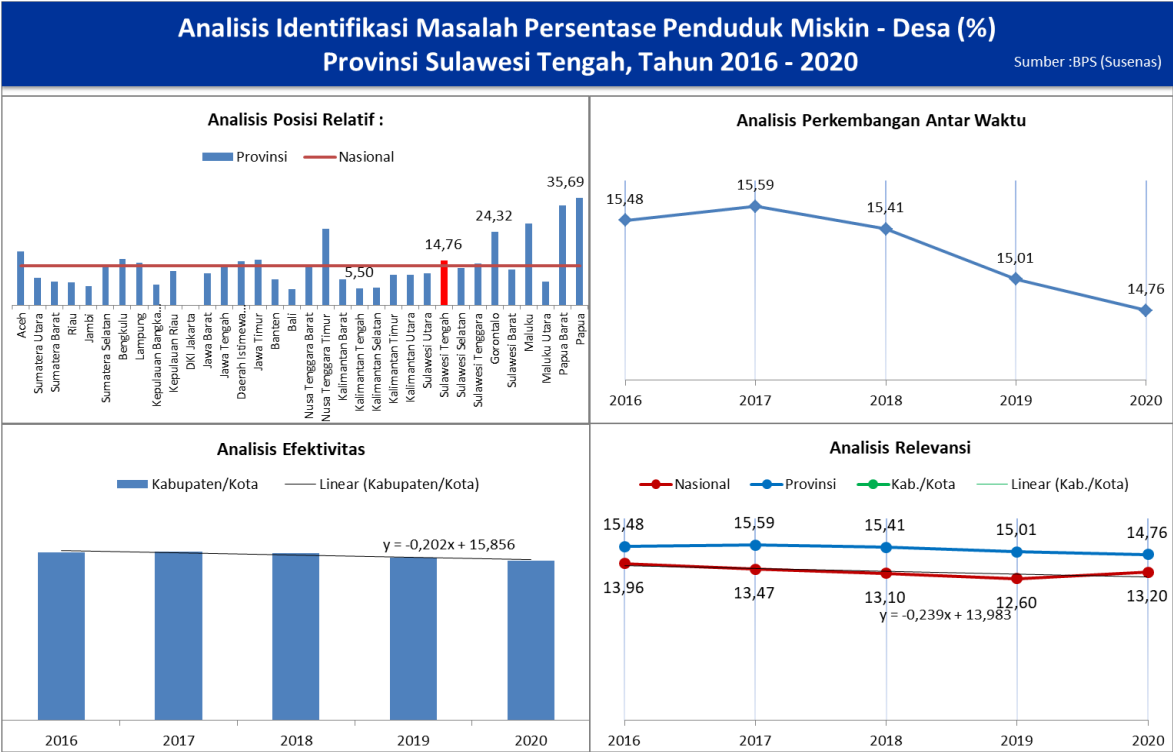
Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin kota dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan Sulawesi Tengah cukup efektif. Namun efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan relatif rentan akan bencana sehingga relatif tidak stabil. Beberapa program pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur dan program padat karya secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin kota di Sulawesi Tengah juga berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin kota secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari tahun 2016 ke tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi di tahun 2020. Demikian pula persentase penduduk miskin kota di Sulawesi Tengah sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun mengalami penurunan sampai maret 2020 dan meningkat kembali dalam jumlah yang sangat kecil pada September 2020. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemi Covid19 secara nasional, yang dampaknya sangat terasa di wilayah perkotaan bagi provinsi Sulawesi Tengah maupun secara nasional. Ini berarti bahwa terdapat relevansi kemiskinan kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nasional. Gambar 3.3 memperlihatkan data persentase penduduk miskin di perdesaan Sulawesi Tengah.

3.1.3 Persentase Penduduk Miskin Desa

Gambar 3.3 di bawah memperlihatkan data persentase penduduk miskin di perdesaan Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 sebagai berikut.



Gambar 3.3
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Desa
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin desa di Sulawesi Tengah berada (14,76 persen) di atas rata-rata persentase penduduk miskin nasional (12,6 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan ke sepuluh persentase penduduk miskin terbesar, di bawah dua provinsi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Bengkulu. Di tingkat regional Pulau Sulawesi, persentase penduduk miskin desa di Provinsi Sulawesi hanya lebih baik dari provinsi Gorontalo dengan persentase kemiskinan mencapai 24,30 persen.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa walaupun persentase penduduk desa masih sangat tinggi, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin desa di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah belum secara signifikan memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin wilayah perkotaan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah masih kurang efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi belum secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Patut diduga intervensi program dan kegiatan juga tidak tepat sasaran rumahtangga miskin. Hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa adalah lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun sampai pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 13,20 persen tahun 2020. Perbedaannya dengan persentase penduduk miskin desa di Sulawesi Tengah adalah dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2020. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumahtangga miskin di desa.

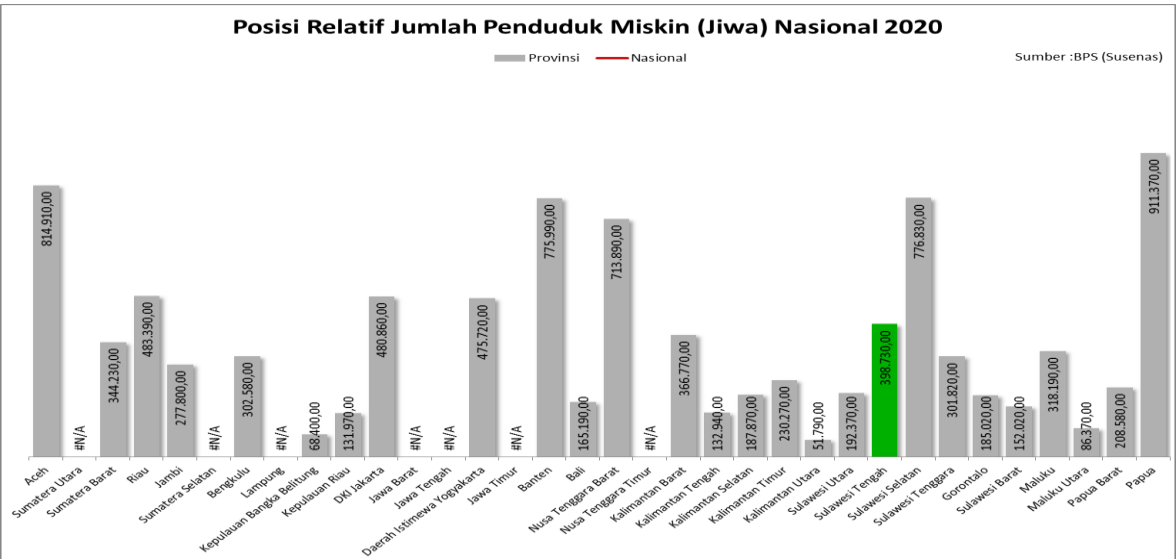
Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

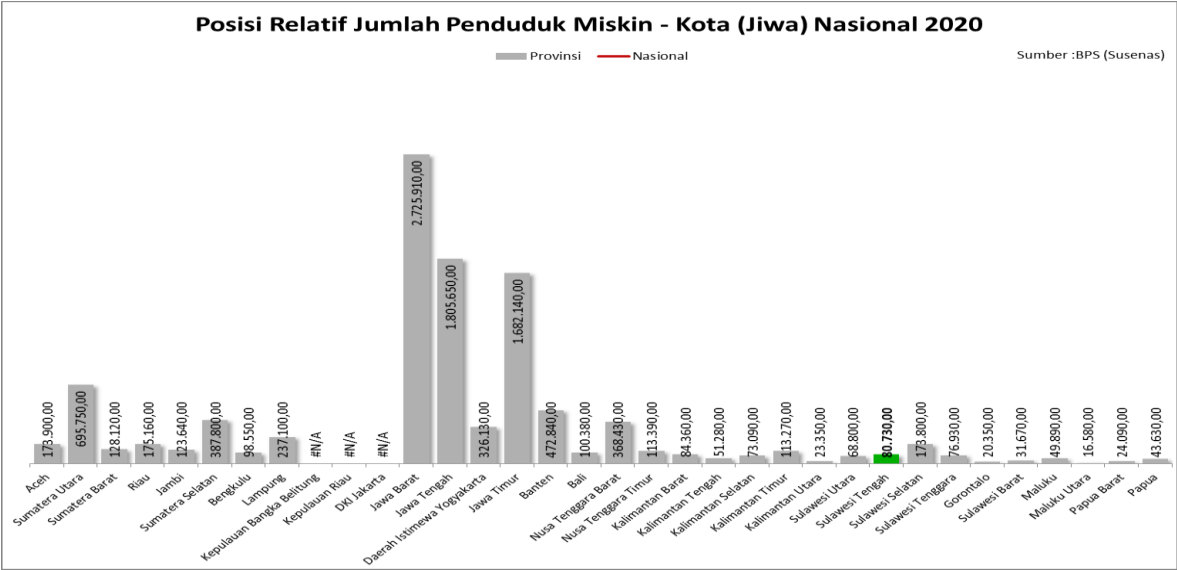
- 1. Baik di Kota dan di Perdesaan, persentase masyarakat miskin di Sulawesi Tengah umumnya masuk 10(sepuluh) besar nasional atau masuk dalam kategori tinggi.
- 2. Kemiskinan di wilayah perdesaan berkontribusi yang sangat tinggi terhadap tingginya persentase masyarakat miskin. Namun demikian, persentase penduduk miskin di perdesaan Sulawesi Tengah dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan mendekati rata-rata nasional.
- 3. Walaupun persentase kemiskinan di perkotaan Sulawesi Tengah berada di bawah dua angka, namun nilai tersebut masih di atas tingkat kemiskinan nasional di daerah perkotaan.
- 4. Tingginya persentase masyarakat miskin di perdesaan menunjukkan bahwa intervensi program dan kegiatan selama lima tahun terakhir belum secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi di daerah kantong kemiskinan perdesaan masih kecil kontribusinya dalam menurunkan biaya hidup masyarakat perdesaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

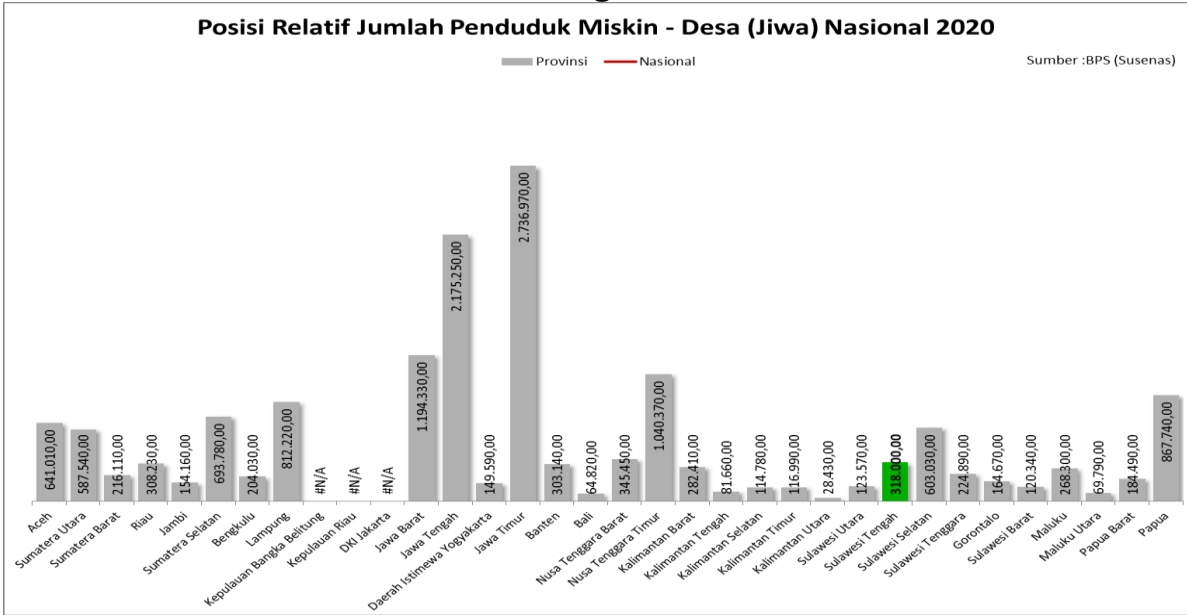
Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Hasil analisis permasalahan jumlah penduduk miskin (orang) kota dan desa di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, dan Gambar 3.6.



Gambar 3.4 Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020



Gambar 3.5
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020



Gambar 3.6
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Desa
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kota pada tahun 2020 di Sulawesi Tengah masih lebih rendah dibanding provinsi di daerah jawa dan sumatera. Namun dalam skala regional Sulawesi, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Sulawesi Tengah masih berada di bawah Sulawesi Selatan, namun lebih tinggi dibanding dengan keempat provinsi lain di Sulawesi. Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan, namun penduduk miskin di perkotaannya relative kecil jumlahnya.

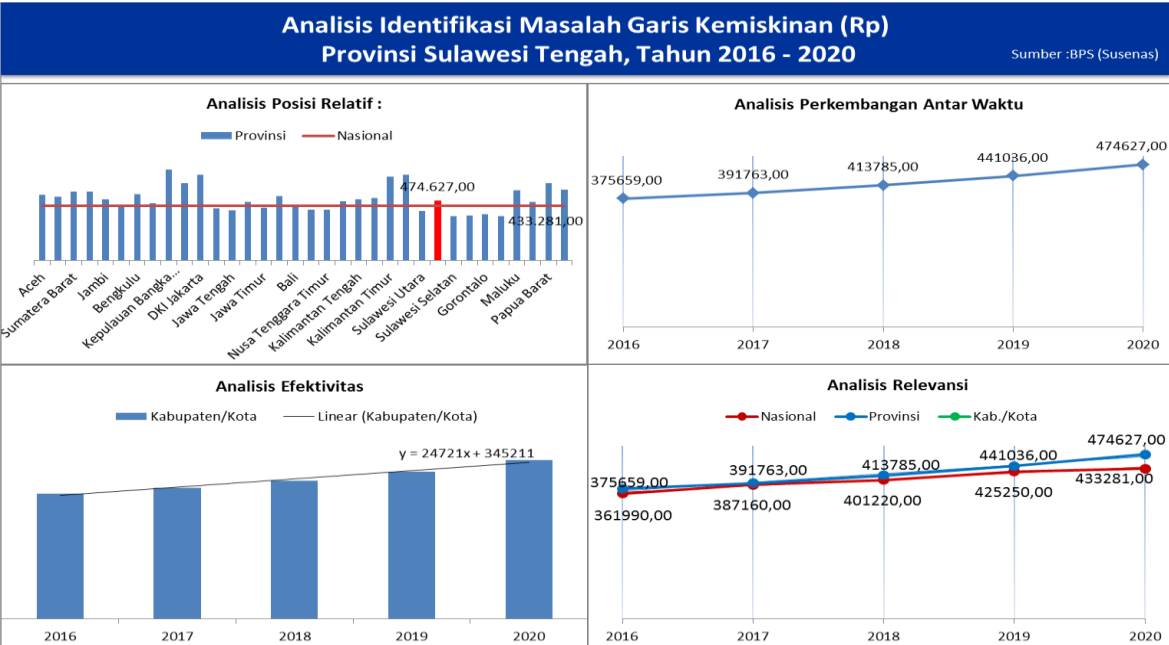
Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.5 dan 3.6 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin perkotaan di Sulawesi Tengah relatif mengalami fluktuatif. Sementara jumlah penduduk miskin di desa cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal. Terjadinya gempa pada bulan September tahun 2018, juga memberikan andil dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Kabupaten Donggala, Sigi, Kota Palu dan Parigi Moutong merupakan kabupaten yang terdampak gempa dan juga menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di

Sulawesi Tengah. Selain itu peningkatan harga-harga kebutuhan pokok yang menyebabkan meningkatnya garis kemiskinan tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan terutama akibat pandemic sehingga daya beli masyarakat menurun.

3.1.5 Garis Kemiskinan (GK)

Menurut BPS, garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Hasil identifikasi permasalahan garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2020 ditampilkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7
Analisis Identifikasi Permasalahan Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, garis kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata nasional atau menempati urutan ke 18 tertinggi di Indonesia, dimana nilai garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi pertama. Jika dibandingkan dengan provinsi lain dalam regional Sulawesi Maluku dan Papua (SULAMPUA), garis kemiskinan di Sulawesi Tengah menempati urutan keempat dari sepuluh provinsi, tertinggi di Provinsi Papua Barat dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa harga makanan dan non makanan di Sulawesi Tengah terbilang cukup tinggi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan 26,35 selama lima tahun terakhir atau 6,59 persen pertahun atau lebih tinggi dibanding periode 2015-2019 yakni rata-rata 6,20 persen per tahun. Peningkatan ini memicu peningkatan jumlah penduduk miskin terutama bagi masyarakat yang pertumbuhan pendapatannya sangat lamban. Kabupaten yang berbasis industri pertambangan seperti Kabupaten Morowali, Banggai, Morowali Utara dan Kota Palu merupakan kabupaten yang masyarakatnya memiliki tingkat pengeluaran perkapita terbesar untuk belanja makan dan non makanan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di Sulawesi Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah belum efektif. Ketidakefektifan ini diduga bersumber dari intervensi kebijakan yang belum mampu meningkatkan secara signifikan pendapatan perkapita masyarakat. Di lain pihak, meningkatnya harga komoditi untuk bahan kebutuhan pokok (makanan) diduga karena harga sarana produksi pertanian dan perikanan yang cukup tinggi sehingga produsen menerapkan harga lebih tinggi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi belum sepenuhnya membantu kelancaran distribusi barang guna menjamin ketersediaannya sehingga harga barang cenderung tinggi dan fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi pengendalian harga belum efektif.

Analisis Relevansi

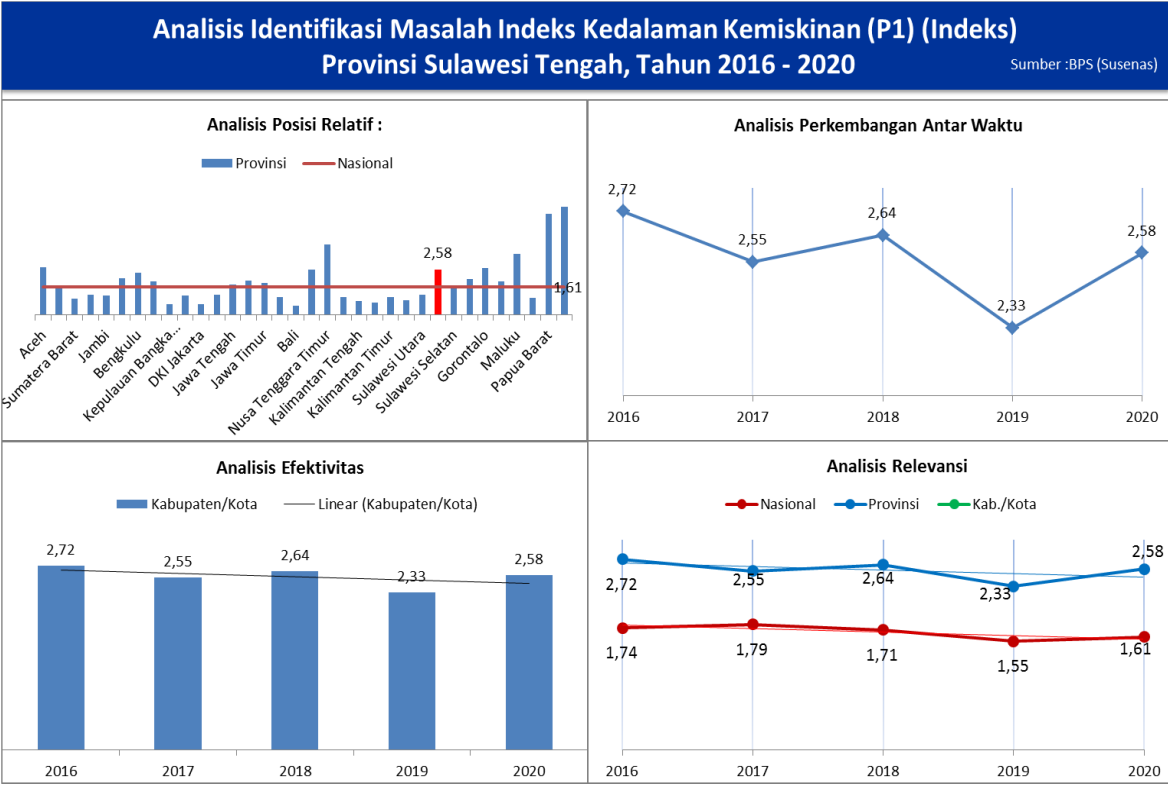
Jika ditinjau dari analisis relevansi dari peningkatan garis kemiskinan provinsi Sulawesi Tengah, hampir berbanding lurus dengan peningkatan garis kemiskinan secara nasional yang cenderung meningkat tipis. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Nasional dan Sulawesi Tengah hampir sama, dari tahun 2018-2020 peningkatan garis kemiskinan Sulawesi Tengah melebihi nasional. Ini menunjukkan bahwa peningkatan garis kemiskinan di Sulawesi Tengah, tidak serta merta meningkatkan garis kemiskinan nasional. Ini berarti bahwa terdapat provinsi lain yang perkembangan garis kemiskinan yang menurun atau rendah dalam lima tahun terakhir dan umumnya provinsi tersebut berada di wilayah regional Sulawesi.

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis relatif, besarnya garis kemiskinan di Sulawesi Tengah masih dalam kategori cukup tinggi (20 besar) di Indonesia.
2. Selain garis kemiskinan yang cukup tinggi, besarnya mengalami peningkatan yang cukup besar dengan nilai perubahan Rp 24.721 per tahun. Walaupun secara nasional terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan, namun perubahan peningkatan garis kemiskinan Sulawesi Tengah lebih tinggi dibanding nasional.

3.1.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8
Analisis Identifikasi Permasalahan Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020, berada di atas rata-rata nasional sebesar 1,61. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, terdapat 6 (enam) provinsi seperti Aceh, NTT, Maluku dan dua Papua yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah, dan terdapat satu provinsi memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang sama yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di tingkat regional SULAMPUA, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi Tengah menduduki peringkat enam atau di atas Provinsi Gorontalo, Maluku dan dua Papua. Kabupaten yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 yakni Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Tolitoli, dan Donggala. Sebaliknya wilayah dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah dan dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Tabel 3.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2013-2020

Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	2.28	2.11	2.52	2.72	2,55	2,64	2,33	2,58
Banggai Kepulauan	2.41	2.57	2.95	2.17	2,71	2,65	1,98	1,99
Banggai	1.30	1.20	1.43	1.38	1,98	1,70	1,15	1,05
Morowali	2.44	2.53	2.03	2.76	2,88	3,05	2,12	2,48
Poso	3	2.11	3.01	4.17	2,57	2,67	2,87	2,53
Donggala	3.26	2.84	3.01	3.01	3,17	3,04	2,86	3,01
Tolitoli	2.07	1.92	2.15	1.64	2,30	2,58	1,89	2,33
Buol	2	2.60	3.02	2.97	2,65	2,15	2,89	1,97
Parigi Moutong	2,33	2.92	3.24	3.24	2,20	2,71	3,06	3,49
Tojo Una-una	3.96	2.40	3.26	3.30	2,89	3,65	1,76	3,27
Sigi	1.92	2.58	1.98	1.42	2,64	1,66	2,17	1,96
Banggai Laut	-	-	4.52	2.48	2,89	2,45	2,49	1,59
Morowali Utara	-	-	3.04	2.28	2,57	1,76	2,90	2,95
Kota Palu	1.33	0.90	0.97	1.19	1,02	0,91	0,99	0,97

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2021.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan namun sifatnya berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks yang naik turun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,72, menurun ditahun 2017 (2,55), meningkat kembali menjadi 2,64 pada 2018 dan kembali menurun di tahun 2019 (2,33). Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 2,58.

Ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam berbelanja sangat dipengaruhi konsistensi pendapatan dari matapencahariannya dan perubahan dalam harga-harga barang pembentuk garis kemiskinan. Trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin membaik.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan fluktuasi indeks yang berarti sangat rentan akan perubahan (tidak stabil). Ini berarti bahwa intervensi yang diberikan hanya efektif pada saat program dan kegiatan diberikan ke masyarakat miskin. Namun pada saat masa proyek (intervensi) berakhir, maka perilaku dan kondisi masyarakat kembali seperti pada saat intervensi belum diberikan.

Kondisi ini terjadi jika intervensi yang diberikan tidak tepat sasaran, pendampingan tidak bersifat jangka panjang sehingga tidak menyebabkan adanya perubahan perilaku produksi masyarakat sasaran ke arah yang lebih baik, dan output yang dihasilkan masyarakat terutama petani dan nelayan tidak terdistribusi secara kontinyu dan kurang bernilai tambah.

Menurut Alif Basuki (2007), ada dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama program-program penagnnggulan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, kedua adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Penaggulangan kemiskinan haruslah berperspektif kepada hak.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Perbedaannya terletak pada tingginya fluktuasi dalam perubahan indeks di Provinsi Sulawesi Tengah. Kesamaan yang ditunjukkan baik nasional maupun tingkat provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemic Covid19 secara nasional, dan dampaknya bagi provinsi Sulawesi Tengah baru terasa pada September 2020, dengan adanya pembatasan kegiatan dalam mikro. Peningkatan indeks kemiskinan pada tahun 2020 umumnya disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat sehingga menurunkan kegiatan ekonomi terutama di sektor transportasi dan sektor produksi lainnya.

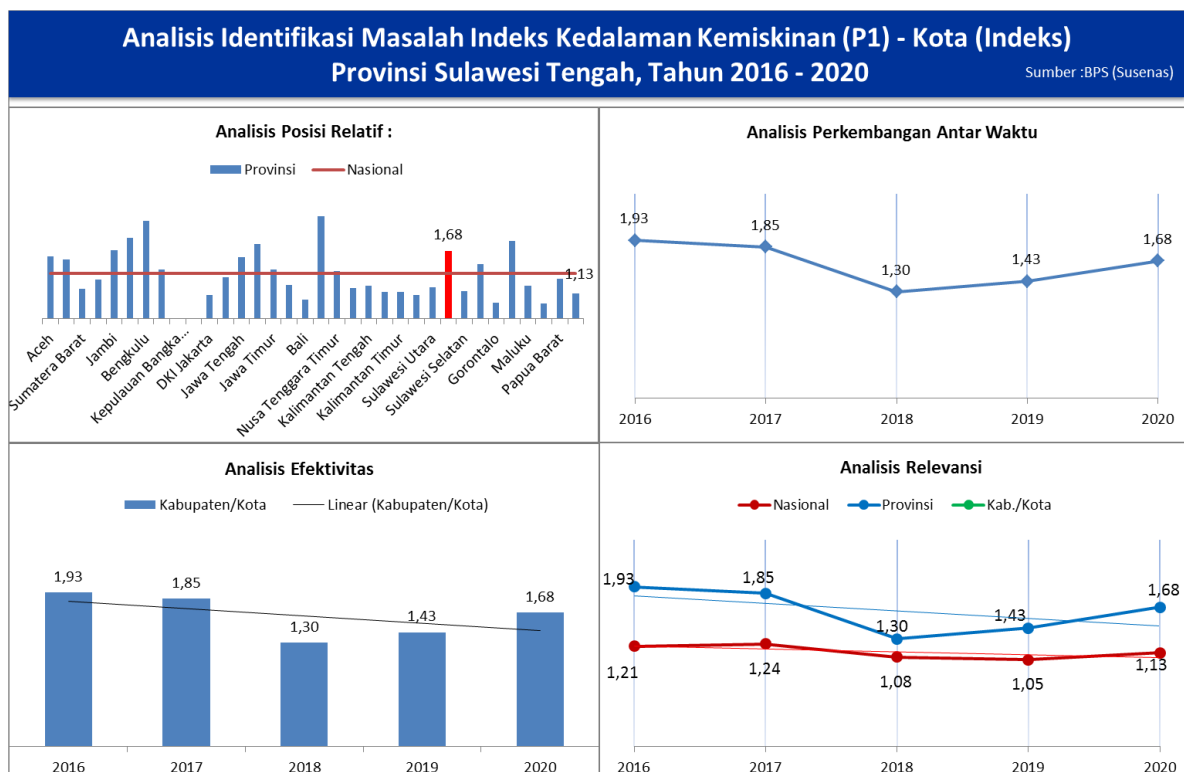
3.1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota (P1)

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks kedalaman kemiskinan kota, maka Gambar 3.9 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 1,68, masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 1,13. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 6 (enam) provinsi seperti NTB, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jambi dan DIY yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan kota yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah. Di tingkat regional SULAMPUIA, Indeks Kedalaman Kemiskinan kota di Sulawesi Tengah tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa baik indeks kedalaman kemiskinan kota maupun desa berada di atas rata-rata nasional, dan masuk 10 besar provinsi yang memiliki indeks kedalaman tertinggi. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia bagian Timur yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih baik dari salah satu kategori baik desa maupun kota. Misalnya Dua Provinsi Papua yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan kota yang lebih rendah (lebih baik) dibanding kemiskinan desa sehingga arah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terfokus pada wilayah pedesaan.



Gambar 3.9

Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Kedalaman Kemiskinan-Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

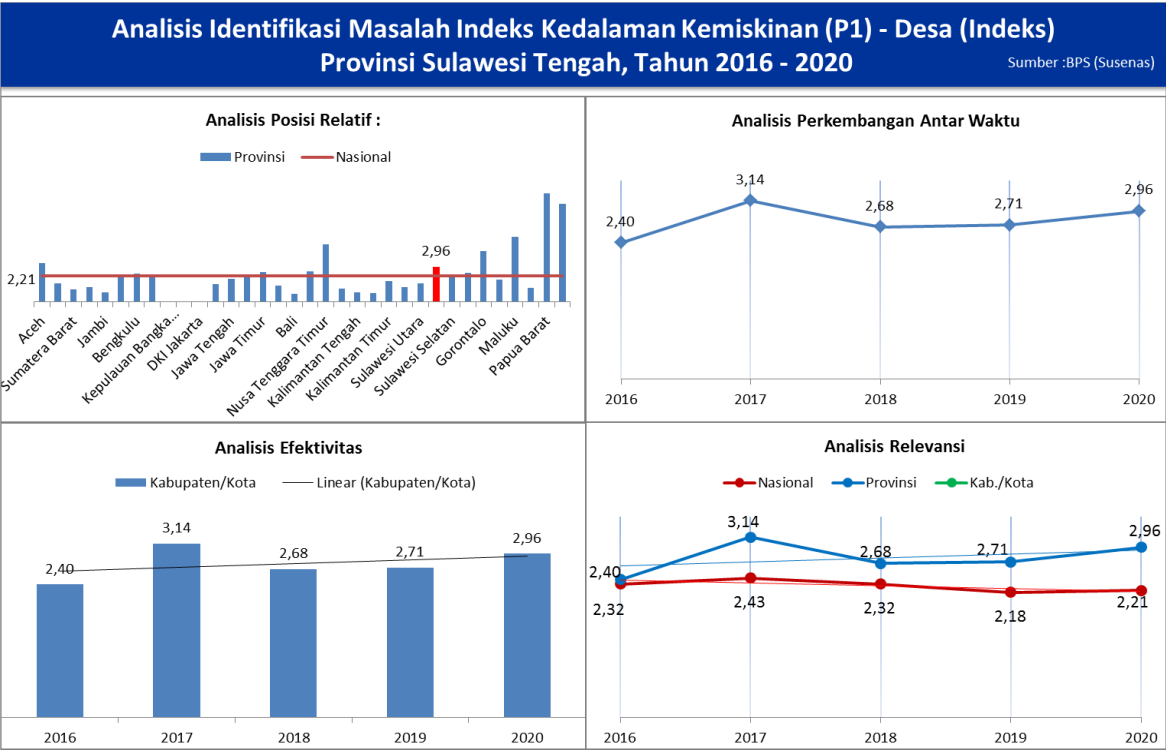
Gambar 3.9 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan kota di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan disbanding tahun 2018.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan kota di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun perubahan indeks kedalaman di Sulawesi Tengah lebih tinggi dibanding nasional.

3.1.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa (P1)

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks kedalaman kemiskinan desa, maka Gambar 3.10 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.



Gambar 3.10 Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Kedalaman Kemiskinan- Desa Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Jika ditinjau dari indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 3.10) pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 2,96, juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 2,21. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 6 (enam) provinsi seperti seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, dan Aceh yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan desa yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah. Di tingkat regional SULAMPUA, Indeks Kedalaman Kemiskinan desa di Sulawesi Tengah tertinggi kelima setelah Sulawesi Barat. Perkembangan dalam lima tahun terakhir pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan indeks kedalaman desa selalu lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kota. Tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan desa di Sulawesi Tengah mencapai 2,96.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan desa di Sulawesi Tengah, walaupun cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2018, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Fenomena perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di desa dan

kota di Sulawesi Tengah menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana tahun 2018 mengalami penurunan, dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan desa dalam lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 3.10), dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah belum efektif pelaksanaannya terutama di daerah pedesaan. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan desa selain dipengaruhi dampak bencana alam (gempa, likuifaksi dan tsunami) tahun 2018, juga dipengaruhi oleh pandemi Covid19 tahun 2020. Beberapa kasus intervensi program penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang salah sasaran, bukan masyarakat yang dikategorikan miskin. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi di daerah pedesaan berjalan lamban.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan kota di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun berbeda dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan desa di Sulawesi Tengah yang berbanding terbalik dengan penurunan indeks secara nasional, atau ada kecenderungan peningkatan dalam indeks yang dicapai oleh Sulawesi Tengah. Peningkatan indeks kemiskinan desa pada tahun 2020 di Sulawesi Tengah tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan desa secara nasional.

Kesimpulan

1. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah baik di kota maupun desa termasuk dalam kategori sangat tinggi (masuk dalam 10 besar) di Indonesia, dan masih berada di atas rata-rata nasional.
2. Indeks kedalaman kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kemiskinan kota. Indeks kedalaman kemiskinan kota di Sulawesi Tengah cukup rendah namun tidak lebih baik dari beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia terutama Papua.
3. Dari sisi perkembangan antar waktu, dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan desa di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, sementara indeks kedalaman kemiskinan kota mengalami penurunan.

3.1.9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

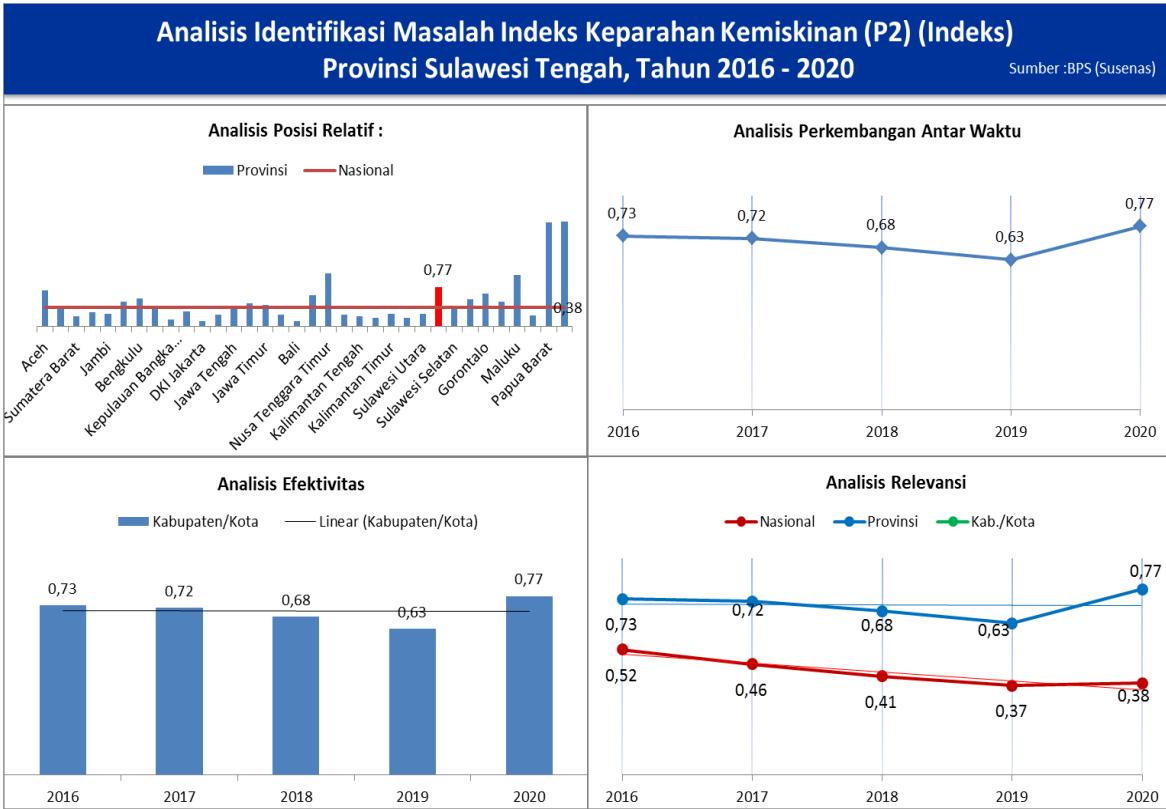
Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.11.

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020 yang sebesar 0,77 berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,38. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah hanya lebih baik dari 4 provinsi yakni Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di regional Pulau Sulawesi, indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah merupakan peringkat tertinggi tingkat keparahan kemiskinannya. Ini berarti bahwa

di tingkat regional SULAMPUA, Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Tengah menduduki peringkat keempat setelah Provinsi Maluku dan kedua provinsi di Papua.



Gambar 3.11
Hasil Analisis Identifikasi Indeks Keparahan Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Pada Tabel 3.2 memperlihatkan perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah selama delapan tahun terakhir (2013-2020). Beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang indeks keparahan kemiskinannya di atas rata-rata Nasional dan Provinsi tahun 2020 yakni Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-una, Morowali Utara, Donggala. Sebaliknya wilayah dengan indeks Keparahan kemiskinan terendah dan dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Terdapat tiga kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang melebihi nilai 1 (satu) yakni Parigi Moutong, Tojo Una-Una dan Morowali Utara di tahun 2020.

Tabel 3.2
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2013-2020

Kab/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	0.53	0.55	0.66	0.73	0.72	0.74	0.63	0.77
Bangkep	0.56	0.59	0.77	0.45	0.74	0.61	0.40	0.47
Banggai	0.26	0.25	0.35	0.30	0.64	0.52	0.26	0.21
Morowali	0.59	0.71	0.42	0.79	0.82	0.93	0.50	0.67
Poso	0.78	0.44	0.69	1.38	0.59	0.68	0.80	0.68
Donggala	0.98	0.70	0.89	0.90	1.05	0.86	0.76	0.79
Tolitoli	0.53	0.46	0.45	0.27	0.68	0.76	0.46	0.63
Buol	0.42	0.67	0.81	0.69	0.65	0.54	0.78	0.47
Parigi Moutong	0.53	0.78	0.88	0.88	0.43	0.64	0.91	1.22
Tojo Una-una	1.08	0.44	0.86	0.79	0.67	1.04	0.22	1.03
Sigi	0.41	0.78	0.51	0.23	0.85	0.38	0.60	0.49
Banggai Laut	-	-	1.55	0.58	0.79	0.53	0.56	0.36
Morowali Utara	-	-	0.79	0.60	0.63	0.43	0.77	1.02
Kota Palu	0.32	0.23	0.27	0.32	0.24	0.19	0.22	0.22

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2021.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2019 indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 kembali meningkat melebihi tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi, dimana jumlah penduduk miskin yang rendah kemampuan pengeluaran komsumsinya semakin besar jumlahnya.

Analisis Efektivitas

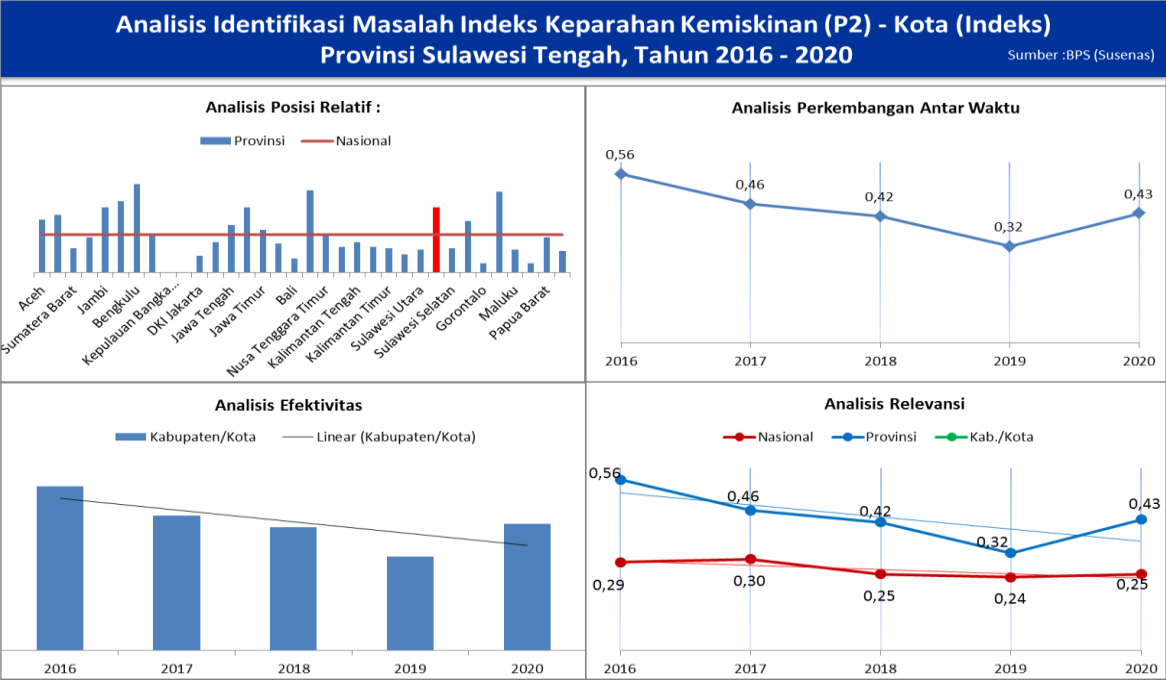
Jika ditinjau dari trend penurunan indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah yang cenderung konstan dan lebih mengarah ke peningkatan jumlah, sehingga dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah masih belum efektif pelaksanaannya. Ini berarti bahwa intervensi yang diberikan kurang efektif kepada masyarakat miskin. Diduga kegiatan intervensi yang diberikan salah sasaran atau menjadikan kelompok masyarakat miskin semakin ‘manja’ akan program yang diberikan dan berharap untuk diberikan kembali tanpa ada upaya untuk memperbaiki perilaku dan kehidupannya.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya peningkatan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah berbanding terbalik dengan penurunan indeks secara nasional. Akibat dari peningkatan indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Tengah pada tahun 2020 menyebabkan sedikit peningkatan indeks keparahan kemiskinan secara nasional. Selain disebabkan oleh dampak pandemic Covid19 secara nasional, peningkatan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah juga diduga disebabkan oleh dampak bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi) di wilayah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Donggala yang belum sepenuhnya pulih kondisi perekonomian masyarakatnya.

3.1.10. Indeks Keparahkan Kemiskinan Kota dan Desa

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks keparahan kemiskinan kota dan desa, maka Gambar 3.12 dan 3.13 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.



Gambar 3.12
Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Keparahkan Kemiskinan-Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

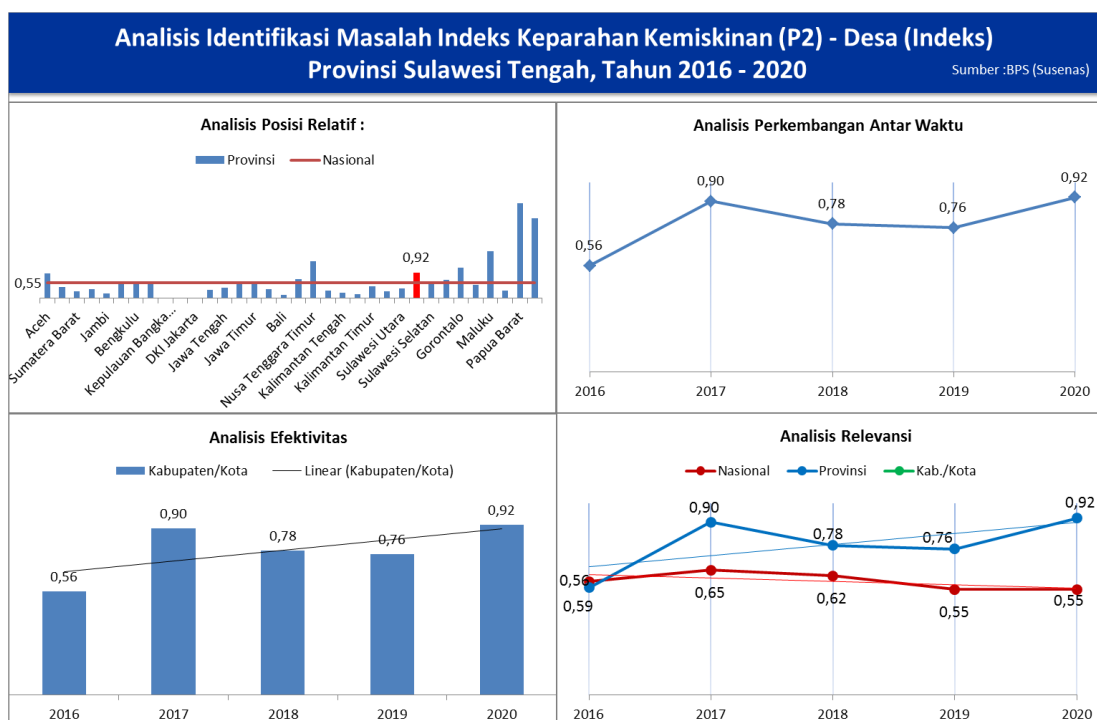
Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 0,43, masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,25. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 3 (tiga) provinsi seperti NTB, Sulawesi Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah, juga terdapat dua provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang sama dg Sulawesi Tengah yakni DIY dan Jambi. Provinsi Gorontalo dan Maluku utara merupakan provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota terrendah di Indonesia. Di tingkat regional SULAMPUA, Indeks Keparahana Kemiskinan kota di Sulawesi Tengah tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat.

Jika ditinjau dari indeks keparahan kemiskinan desa di Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 3.13) pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 0,92, juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,55. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Sulawesi Tengah masuk sebagai provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan desa keenam terbesar setelah Papua, Papua Barat (tertinggi), NTT, Maluku, dan Gorontalo. Di tingkat regional SULAMPUA, Indeks Keparahana Kemiskinan desa di Sulawesi Tengah tertinggi kelima setelah Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik indeks keparahan kemiskinan kota maupun desa di Sulawesi Tengah berada masih di atas rata-rata nasional, dan masuk 7 besar provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan desa tertinggi. Berbeda dengan dua Provinsi Papua memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang lebih rendah (lebih baik), namun dari sisi indeks kemiskinan desa kedua provinsi ini merupakan yang tertinggi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Serupa dengan gabungan indeks keparahan kemiskinan, Gambar 3.12 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan kota di Sulawesi Tengah cenderung menurun, walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Berbeda dengan indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga berdampak secara total pada indeks keparahan kemiskinan. Perkembangan dalam lima tahun terakhir pencapaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan indeks keparahan desa juga selalu lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan kota. Pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan desa di Sulawesi Tengah mencapai 0,92.



Gambar 3.13

**Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Keparahana Kemiskinan-Desa
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020**

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau indeks keparahan kemiskinan kota dalam lima tahun terakhir di Sulawesi Tengah (Gambar 3.12) menunjukkan trend penurunan sampai berfluktuatif pada tahun 2020. Ini dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah cukup efektif pelaksanaannya di wilayah perkotaan. Sebaliknya trend indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yang berarti bahwa penerapan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang efektif.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks keparahan kemiskinan kota di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun berbeda dengan capaian indeks keparahan kemiskinan desa di Sulawesi Tengah yang berbanding terbalik dengan penurunan indeks keparahan desa secara nasional. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan desa pada tahun 2020 di Sulawesi Tengah tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan indeks keparahan kemiskinan desa secara nasional.

Kesimpulan

1. Indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Tengah (kota dan desa) masuk dalam kategori sangat tinggi (urutan ke-5 setelah Papua Barat, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur) di Indonesia, dan jauh di atas rata-rata nasional. Namun secara spesifik, indeks keparahan kemiskinan kota kelima Provinsi tersebut masih lebih baik dibanding di Sulawesi Tengah, dan sebaliknya indeks keparahan kemiskinan desa di Sulawesi Tengah masih lebih rendah dibanding kelima provinsi tersebut.
2. Indeks keparahan kemiskinan di desa di Sulawesi Tengah masih lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan kota.
3. Dari sisi perkembangan antar waktu, dalam lima tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan desa di Sulawesi Tengah cenderung berfluktuatif dan indikasi meningkat, sementara indeks kedalaman kemiskinan kota mengalami penurunan.

3.2 Profil Kemiskinan Non Konsumsi

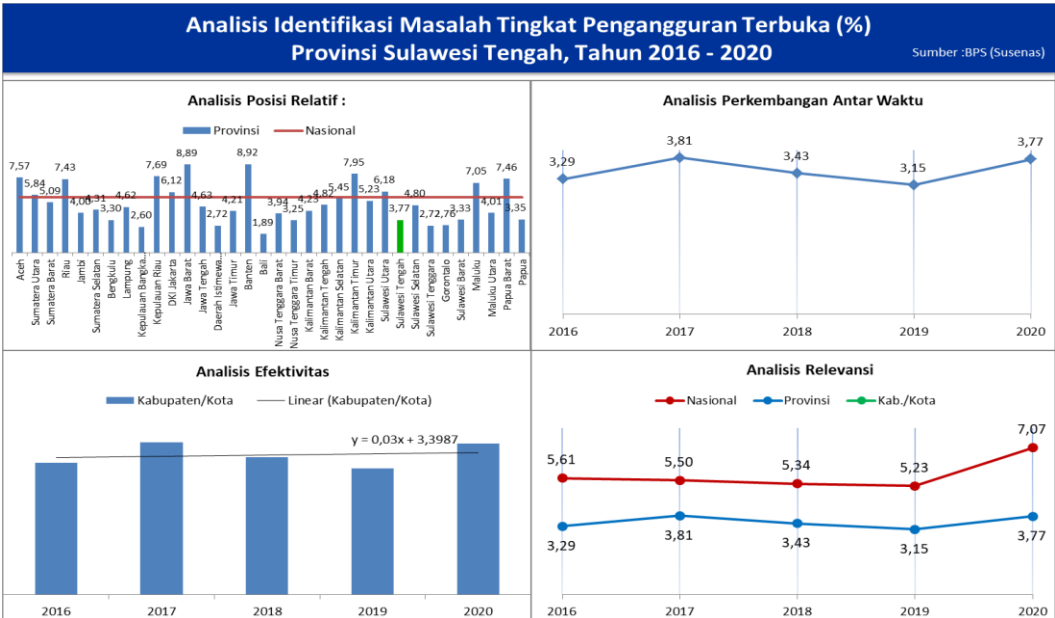
Secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia, selain disebabkan oleh tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan dasar, juga berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kewirausahaan, pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta rendahnya kemampuan keuangan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk merealisasikan program dan kegiatan (intervensi kebijakan) penanggulangan kemiskinan.

3.2.1 Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa indikator yang dibahas dalam mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sementara TPAK sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2005).

3.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil analisis masalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Relatif

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa TPT Sulawesi Tengah masih di bawah angka TPT nasional dan masuk dalam kategori 10 provinsi terbaik dalam rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam regional SULAMPUA, provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat keempat terendah dalam tingkat pengangguran terbuka, setelah Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Analisis posisi relatif menurut kabupaten, TPT menunjukan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan ditahun 2020, akibat dampak dari Pandemi Covid-19. TPT tertinggi adalah Kota Palu (8,38%) diatas rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, TPT Kabupaten yang berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah namun di bawah rata-rata nasional adalah Kabupaten Morowali (5,21%), Morowali Utara (5,16%), Buol (4,36%) dan Kabupaten Tolitoli (3,74%). Sementara sembilan kabupaten lainnya masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Tengah menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	4.10	3.29	3,37	3,37	3,11	3,77
Banggai Kepulauan	2.22	-	3,60	3,60	2,00	2,47
Banggai	4.55	-	3,00	3,00	2,18	2,42
Morowali	2.29	-	2,89	2,89	2,97	5,21
Poso	2.86	-	2,47	2,47	2,18	2,39
Donggala	3.13	-	2,85	2,85	2,76	2,58
Tolitoli	3.89	-	3,18	3,18	3,10	3,74
Buol	3.58	-	4,57	4,57	3,01	4,36
Parigi Moutong	2.27	-	2,70	2,70	2,36	2,70
Tojo Una-una	3.62	-	3,74	3,74	2,92	2,84
Sigi	5.74	-	3,78	3,78	2,54	3,36
Banggai Laut	1.38	-	3,35	3,35	3,04	3,09
Morowali Utara	5.43	-	2,12	2,12	3,05	5,16
Kota Palu	8.32	-	5,81	5,81	6,32	8,38

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2021.

Analisis Perkembangan

Perkembangan dimensi kemiskinan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu tahun terakhir 2016-2020 Berdasarkan data perkembangan dimensi kemiskinan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu dua tahun terakhir (2016-2017) tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 3,11%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,77%.

Analisis Efektivitas

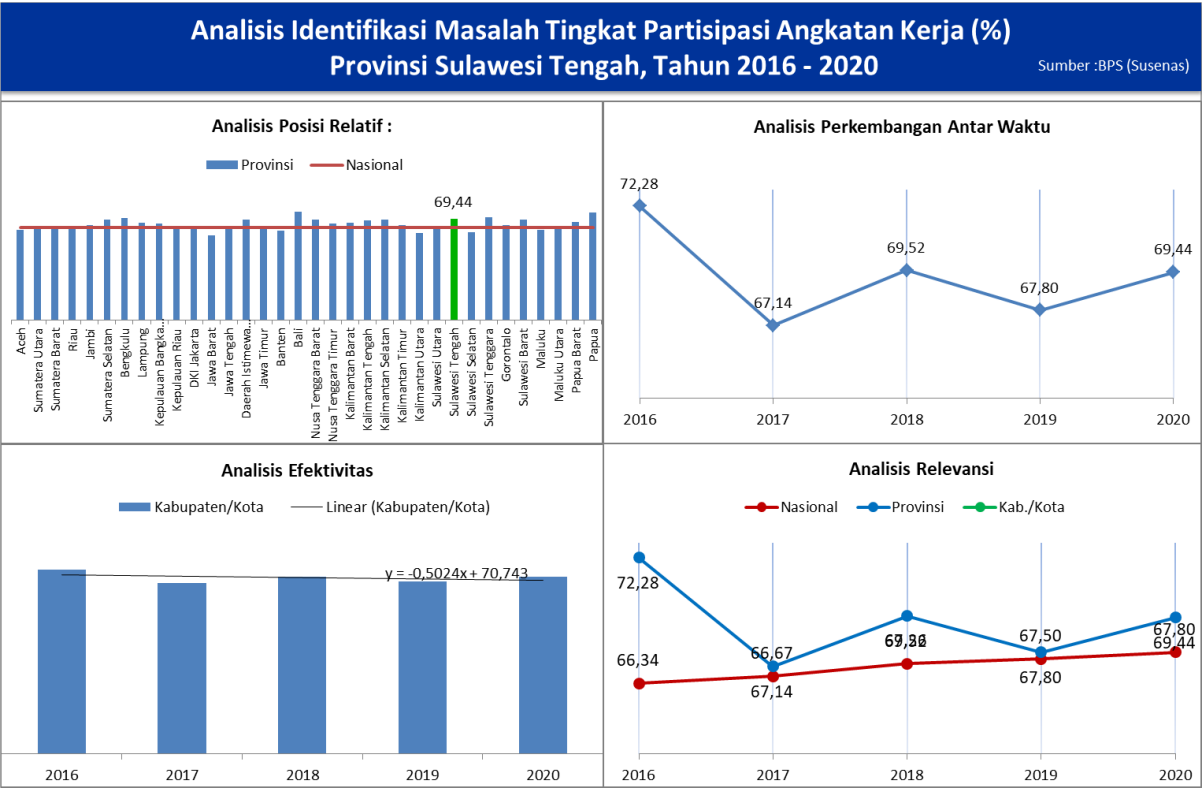
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 3,11%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,77%. Peningkatan yang terjadi ditahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19. Capaian tersebut menunjukan bahwa penanganan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui penyediaan lapangan kerja masih belum efektif dan berdampak besar pada serapan tenaga kerja yang terjadi.

Analisis Relevansi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah Selama kurun waktu 2016-2020, berdasarkan analisis relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah Selama kurun tahun tersebut, secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum optimal, dimana pada tahun 2016 sebesar 3,2 persen menurun menjadi 3,77 persen pada Tahun 2020, dari garis *trendline* di atas menggambarkan adanya relevansi dengan tingkat pengangguran secara Nasional kurun waktu 2016-2020 yang perkembangannya sejalan.

3.2.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil analisis masalah tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15

Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa TPAK Sulawesi Tengah masih lebih tinggi dibanding TPAK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TPAK Sulawesi Tengah masuk kategori lima terbesar. TPAK Kabupaten yang tertinggi dan di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Tojo Una-Una adalah yang tertinggi, kemudian Kabupaten Poso, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan 11 Kabupaten termasuk Kota Palu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisis Perkembangan

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (72,28%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (67,14%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2020 naik turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2019 sebesar 69,44 persen.

Analisis Efektivitas

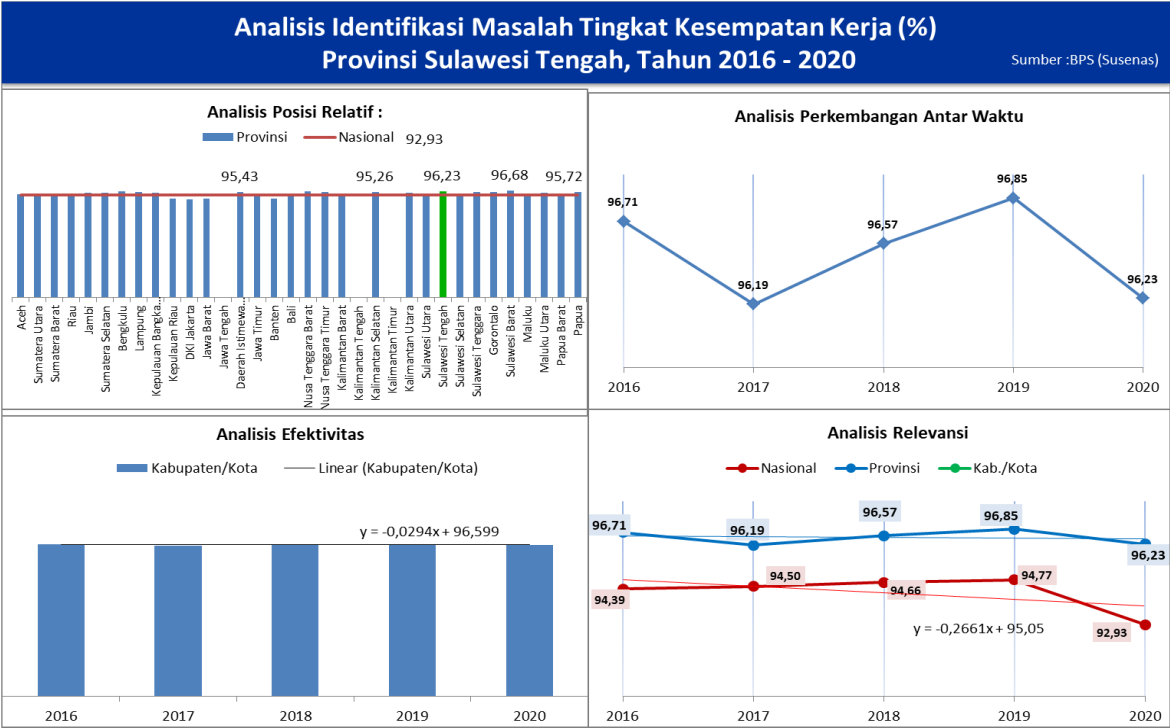
Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (72,28%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (67,14%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2020 naik turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2019 sebesar 69,44 persen. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan cukup efektif dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan TPT dan TPAK

1. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah tergolong rendah dibanding nasional dan regional. Hal ini didukung oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, baik Sulawesi Tengah dan nasional terjadi peningkatan pengangguran terbuka pada tahun 2020. Perubahan tingkat pengangguran terbuka nasional lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah.
3. Peningkatan pengangguran terbuka juga diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 72,28 persen tahun 2016 menjadi 69,44 persen tahun 2020.

3.2.1.3. Kesempatan Kerja

Hasil analisis masalah tingkat kesempatan kerja (TKK) di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.16 sebagai berikut.



Gambar 3.16
Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.16 menunjukkan bahwa TKK Sulawesi Tengah masih lebih tinggi dibanding TKK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TKK Sulawesi Tengah berada pada urutan kedua terbesar setelah Provinsi Sulawesi Barat. TKK Kabupaten yang tertinggi dan di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Poso adalah yang tertinggi (97,61%), kemudian Kabupaten Banggai (97,58%), Banggai Kepulauan (97,53%), Donggala (97,42%) dan Kabupaten Parigi Moutong (97,30%) serta Kabupaten Tojo Una-Una (97,16%). Sedangkan TKK terendah dibanding kabupaten lain dan Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu (91,62%). Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat kemiskinan penduduk, dimana kabupaten seperti Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Tojo Una-Una yang memiliki persentase kemiskinan yang sangat tinggi dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisis Perkembangan

Perkembangan tingkat kesempatan kerja di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang relatif berfluktuatif, namun dengan kisaran perubahan yang relatif sangat kecil, dimana pada tahun 2016 (96,71%), namun menurun pada tahun 2017 (96,19%) lalu mengalami peningkatan sampai tahun 2019 (96,85%). Walaupun TKK mengalami penurunan pada tahun 2020, namun penurunan tersebut belum melewati angka TKK pada tahun 2017.

Analisis Efektivitas

Kondisi tingkat kesempatan kerja yang menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif namun cenderung konstan, dimana nilai perubahan TKK yang terjadi berada pada kisaran angka TKK 96 % atau besarnya perubahan TKK sebesar 0,0294 yang berarti bahwa perubahan TKK yang cenderung menurun hanya 0,0294 %. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang ketenagakerjaan terutama dalam menyediakan lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan bagi masyarakatnya cukup efektif dilaksanakan.

Analisis Relevansi

Berdasarkan analisis relevansi menunjukkan bahwa Tingkat Kesempatan Terbuka (TKK) di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2016-2020, secara umum menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Kondisi TKK Sulawesi Tengah memiliki kesamaan dengan penurunan TKK pada tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan oleh garis *trendline* yang cenderung menurun yang menggambarkan adanya relevansi antara TKK Nasional kurun waktu 2016-2020 dengan TKK Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian terdapat perbedaan dalam besaran tingkat perubahan keduanya, dimana perubahan TKK di Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dibanding perubahan TKK nasional yang mencapai 0,27 %.

Kesimpulan Tingkat Kesempatan Kerja

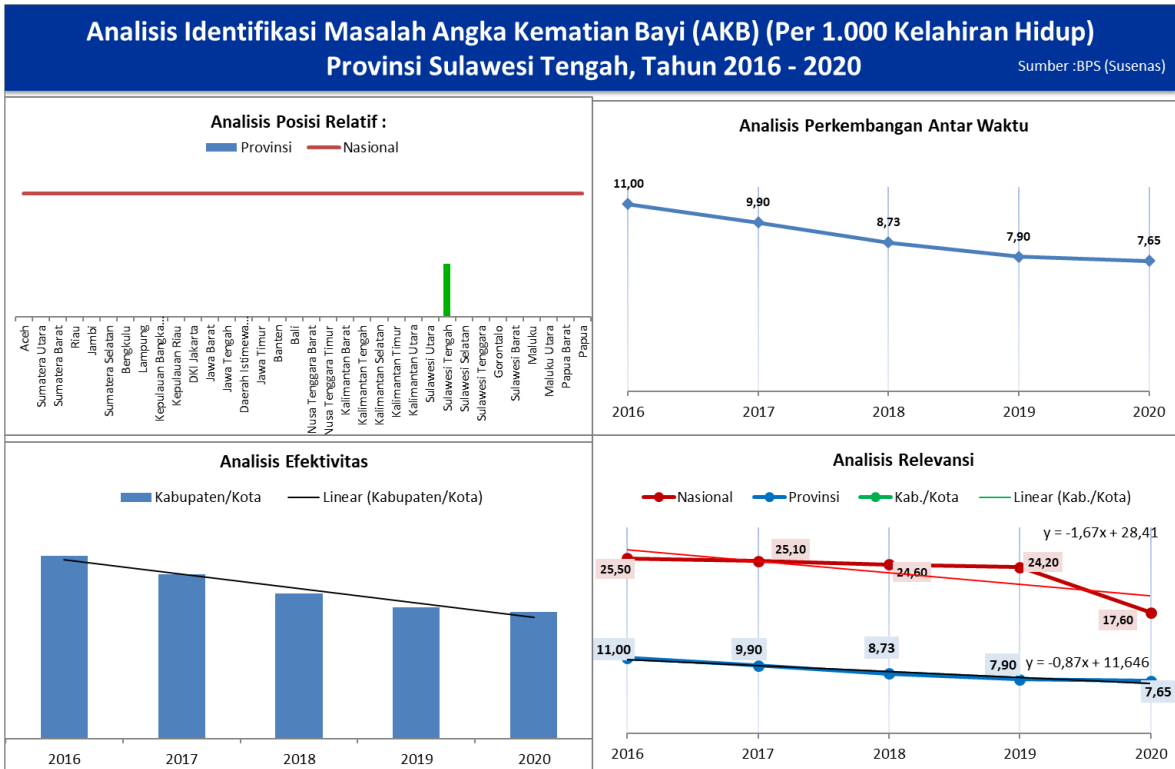
- 1. Tingkat kesempatan kerja di Sulawesi Tengah tergolong tinggi (urutan kedua terbaik) atau di atas TKK nasional dan provinsi lain di Indonesia selain Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
- 2. Dari sisi perkembangan antar waktu, TKK di Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan dengan perubahan yang sangat kecil dibanding TKK nasional perubahannya cenderung lebih tinggi.
- 3. Berdasarkan analisis relevansi, penurunan TKK nasional tidak berdampak pada penurunan TKK, TPAK dan peningkatan pengangguran terbuka Sulawesi Tengah.

3.2.2 Bidang Kesehatan

3.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Secara nasional, target penurunan angka kematian bayi dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.



Gambar 3.17

Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Sejak tahun 2016-2020 angka kematian bayi semakin menurun dari 11 kematian bayi pada tahun 2016 menjadi 7,65 kematian pada tahun 2019. Angka kematian bayi tersebut lebih rendah dari target dalam RPJMN sebesar 16 kematian per 1000 kelahiran bahkan telah melampaui target global sebesar 12/1000 kelahiran.

Analisis Efektivitas

Sejumlah program dan strategi pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah cukup efektif menurunkan angka kematian bayi. Hal ini berdasarkan capain pada tahun 2016 sejumlah 11,00 terus turun setiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai jumlah 7,65 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Analisis Relevansi

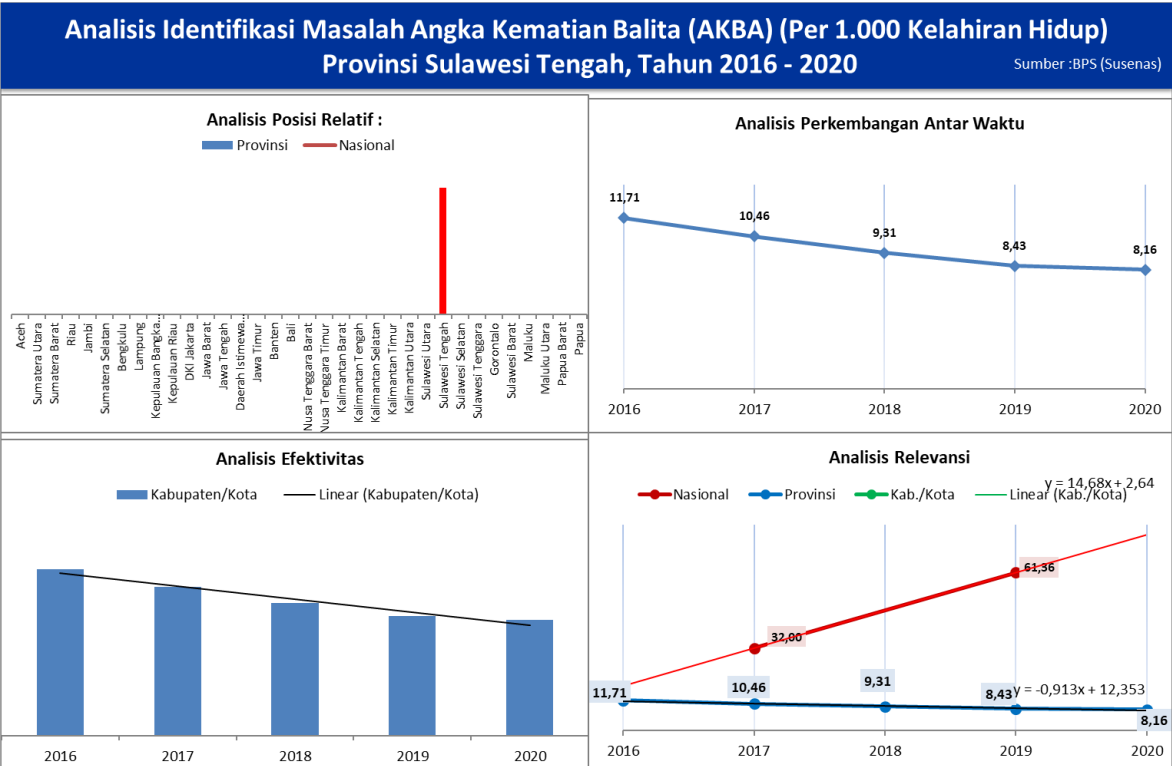
Secara nasional, trend penurunan angka kematian bayi sebesar 0,87 masih lebih rendah dibandingkan trend penrurunan angka kematian bayi di Sulawesi Tengah sebesar 1,02. Hal ini menunjukan efektivitas program-program propinsi Sulawesi Tengah lebih baik dari dari nasional.

3.2.2.2. Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, target penurunan angka kematian BALITA dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.



Gambar 3.18

Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2016-2020 angka kematian BALITA terus mengalami penurunan dari 11,71 kematian bayi pada tahun 2016 menjadi 8,16 kematian pada tahun 2020. Angka kematian bayi tersebut lebih rendah dari target dalam RPJMN sebesar 16 kematian per 1000 kelahiran bahkan telah melampaui target global sebesar 12/1000 kelahiran.

Analisis Efektivitas

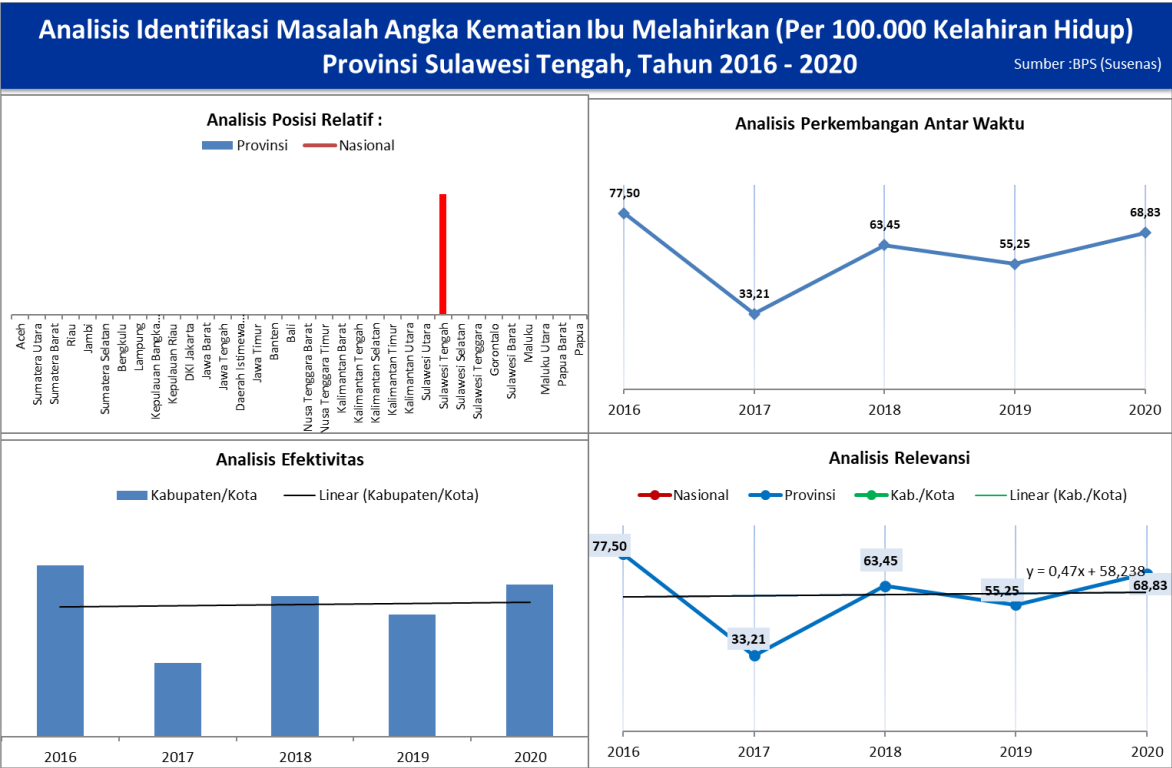
Sejumlah program dan strategi pendekatan yang selama ini dilakukan sangat efektif menurunkan angka kematian bayi. Hal ini berdasarkan capain pada tahun 2016 sejumlah 11,71 terus turun setiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai jumlah 8,16 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup.

Analisis Relevansi

Trend penurunan angka kematian bayi pertahun di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,91 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas program-program yang ada sudah relevan untuk menurunkan angka kematian BALITA.

3.2.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 3.19

Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

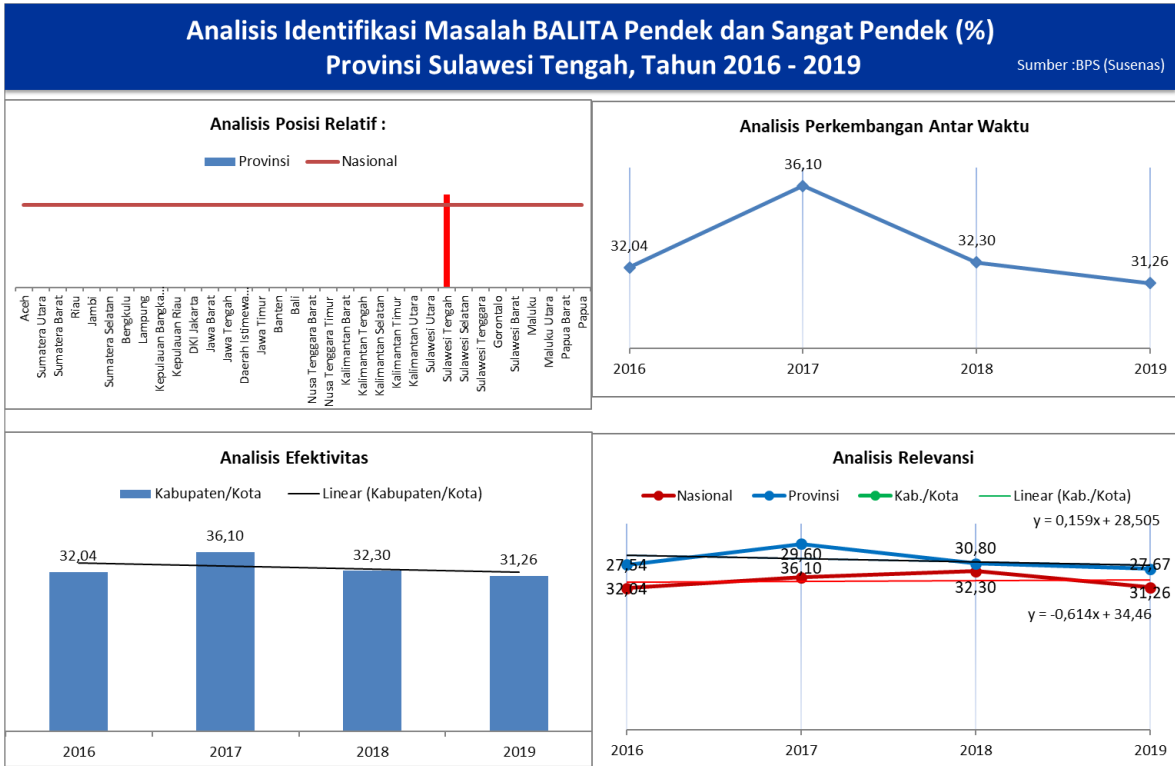
Selama tahun 2016-2020, angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat fluktuatif naik-turun dan cenderung turun. Pada tahun 2016 sejumlah 77,50 angka kematian, hingga tahun 2020 menjadi 68,83.

Analisis Efektifitas

Jika diukur capaian selama 3 tahun, maka berbagai pendekatan dan program yang dilakukan cukup efektif menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

3.2.2.4. Balita Pendek dan Sangat Pendek (%)

Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2006. Dalam RPJMN 2020-2024, target penurunan angka *stunting* adalah 14%



Gambar 3.20
Analisis Identifikasi Masalah Balita Pendek dan Sangat Pendek (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

Analisis Posisi Relatif

Persentase Stunting di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi dan masih di atas rata-rata nasional. Bahkan dalam skala regionalpun posisi Sulawesi Tengah masih diatas propinsi Papua Barat.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Angka stunting di Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 selalu berfluktuatif. Angka stunting terendah di capai pada tahun 2016 sebesar 32,04% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 36,10%.

Analisis Efektifitas

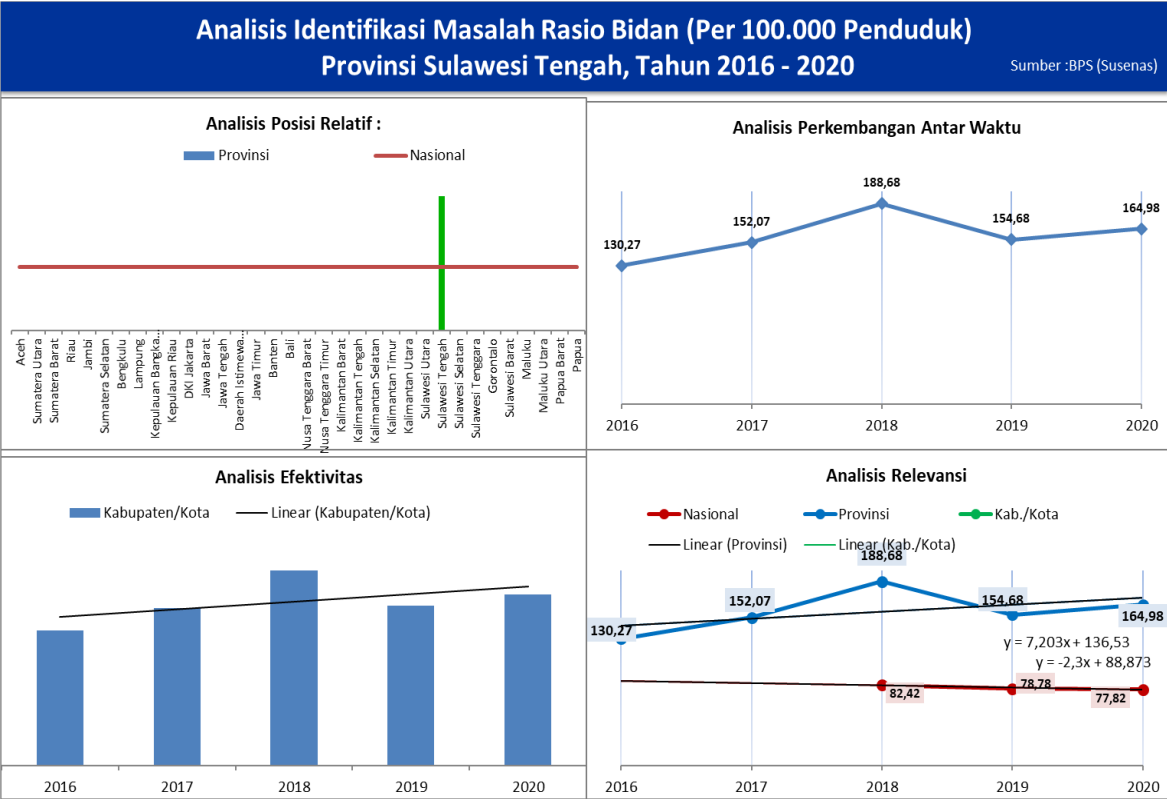
Berbagai pendekatan dan program yang dilakukan nampaknya belum efektif untuk menurunkan angka stunting. Dibutuhkan kebijakan dan strategi yang konsisten sehingga nampak dalam gambar penurunannya.

Analisis Relevansi

Secara umum, terjadi trend penurunan angka stunting di Sulawesi Tengah sebesar 0,49%, lebih baik dari secara nasional yang mengalami trend kenaikan sebesar 0,74%.

3.2.2.5. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)

Rasio bidan menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga bidan per 100.000 penduduk. Berikut diuraikan gambaran rasio bidan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.



Gambar 3.21
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

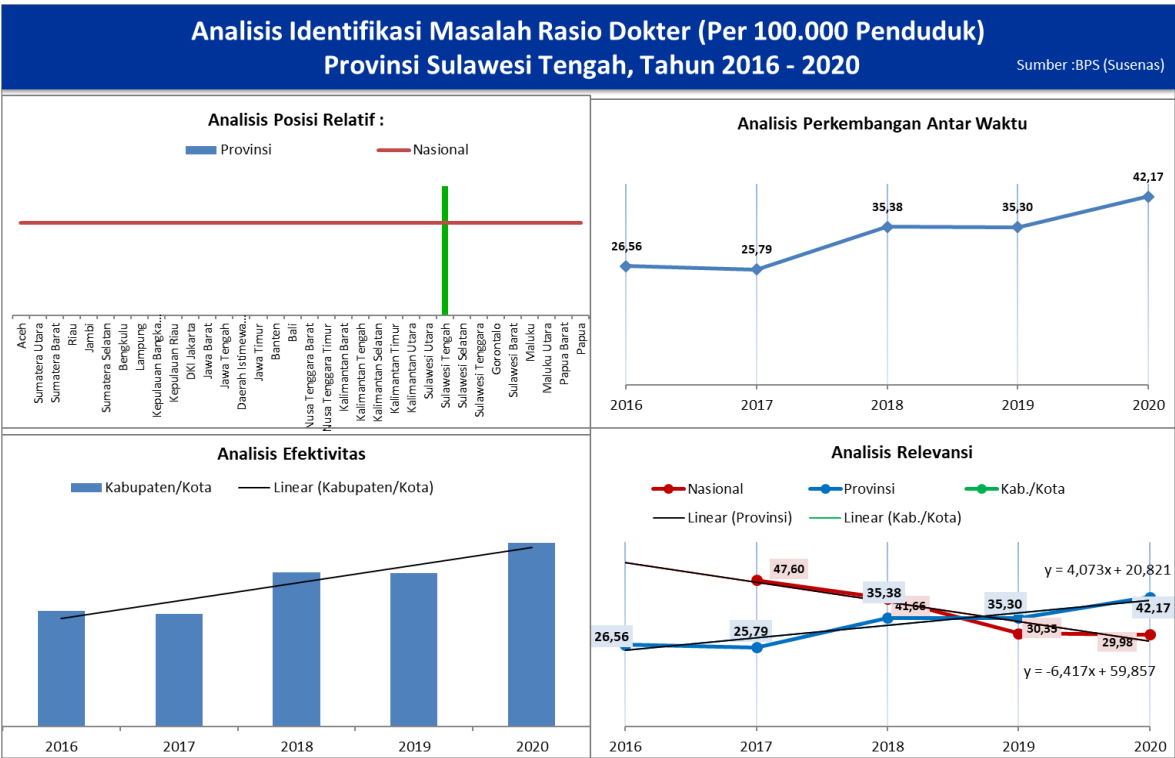
Dari tahun 2016-2020, rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk terus mengalami perbaikan dengan rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 188,68% per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni sebesar 164,98% dan berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif naik-turun namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 rasio bidan sejumlah 130,27 per 100.000 penduduk, hingga tahun 2020 sejumlah 164,98 per 100.000 penduduk.

3.2.2.6. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah perbandingan ketersediaan tenaga dokter untuk 100.000 jiwa penduduk. Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai telah ditetapkan target ketersediaan tenaga dokter per 100.000 penduduk hingga tahun 2025 sebanyak 112 orang.



Gambar 3.22
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Secara umum, posisi relatif Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata nasional dari sisi rasio dokter per 100.000 penduduk.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Rasio dokter Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2016 rasio dokter per 100.000 penduduk sejumlah 26,56 persen, hingga tahun 2020 sejumlah 42,17 persen.

Analisis Efektifitas

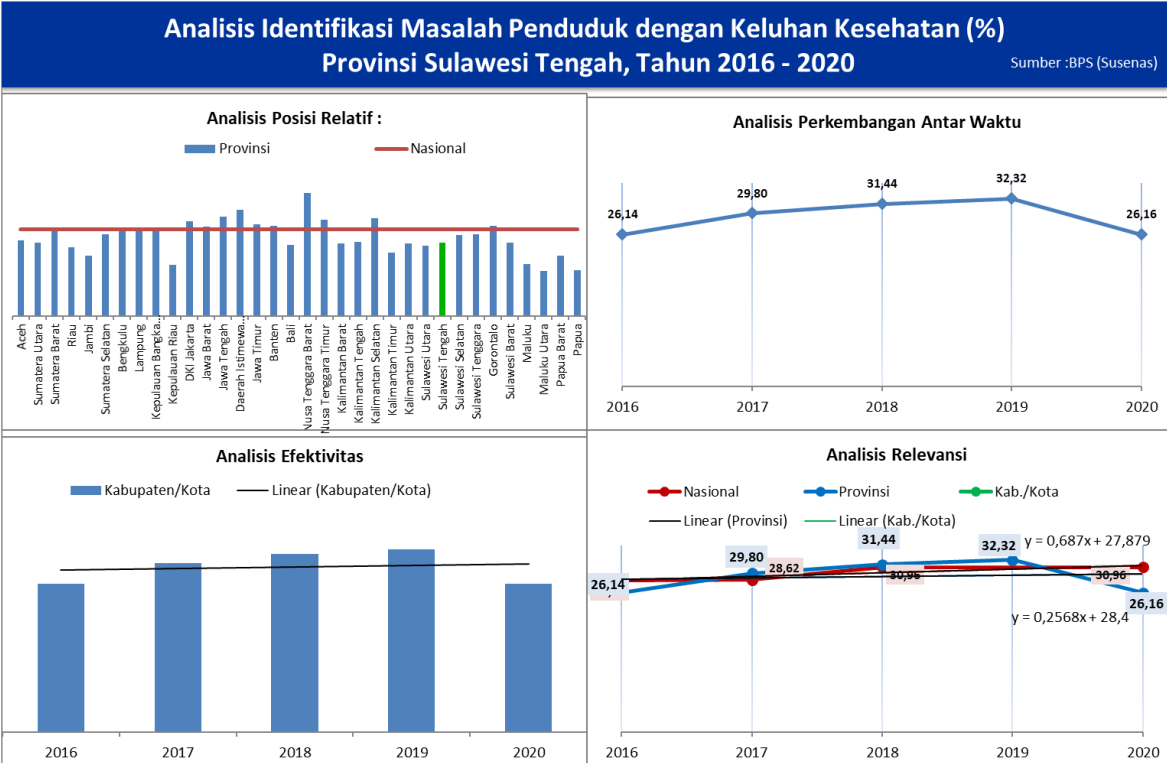
Atas peningkatan rasio dokter selama lima tahun terakhir menunjukkan program-program pendidikan dan penempatan dokter di Provinsi Sulawesi Tengah terbilang efektif, dan ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Analisis Relevansi

Jika peningkatan rasio dokter di Sulawesi Tengah menunjukkan trend peningkatan sebesar 4,07%, namun rata-rata nasional justru menunjukkan trend penurunan hingga 6,4%.

3.2.2.7. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Semakin tinggi presentase penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan buruknya derajat kesehatan penduduk tersebut.



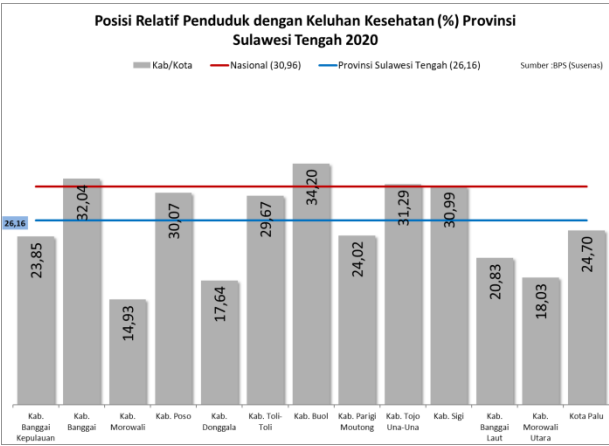
Gambar 3.23
Analisis Identifikasi Masalah Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif penduduk dengan keluhan kesehatan Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional. Artinya derajat kesehatan rata-rata Sulawesi Tengah lebih baik dari derajat kesehatan rata-rata nasional.

Jika dilihat dari posisi relatif masing-masing kab/kota, terdapat 4 kabupaten dengan persentase keluhan kesehatan di atas rata-rata nasional dengan persentase tertinggi di kab. Buol sebesar 34,20%.

Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan terendah itu berada di kab. Morowali sebesar 14,93%. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk di kab. Morowali lebih baik dari pada kab/kota lainnya.



Analisis Perkembangan Antar Waktu

Jika di tinjau dari sisi perkembangan antar waktu, sejak tahun 2016-2020 maka tahun 2016 merupakan capaian terendah persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. Sehingga derajat kesehatan penduduk Sulawesi Tengah menunjukkan angka peningkatan walaupun di periode 2020 terjadi penurunan.

Analisis Efektifitas

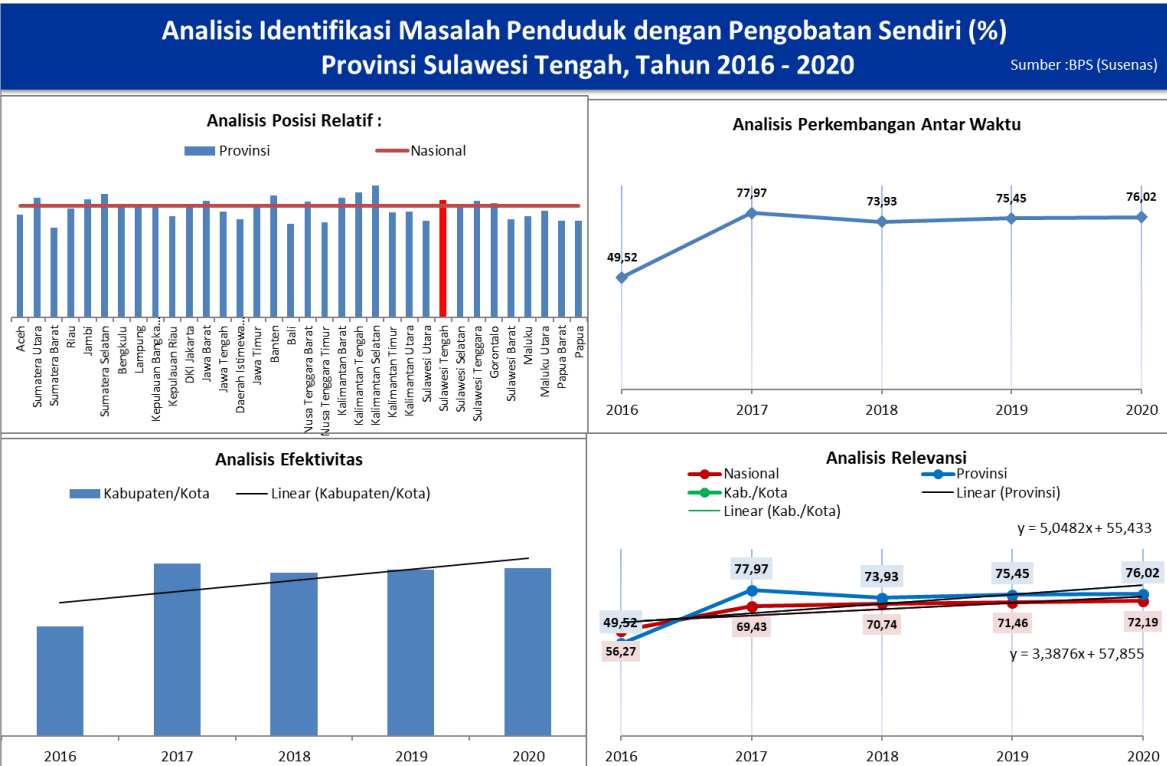
Sejumlah program dan pendekatan yang dilakukan selama kurun waktu 2016-2020, mampu menurunkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 0,32%.

Analisis Relevansi

Trend penurunan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan Sulawesi tengah sebesar 0,25%, justru secara rata-rata nasional terjadi kenaikan sebesar 0,68%.

3.2.2.8. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Pengobatan sendiri atau sering disebut swamedikasi adalah upaya pengobatan atau perawatan diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas atau obat wajib apotek yang didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek berdasarkan keterangan obat yang ada di brosur sesuai dengan penyakitnya (Izzatin, 2015).



Gambar 3.24

Analisis Identifikasi Masalah Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Persentase penduduk dengan pengobatan sendiri di Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata nasional, bahkan di skala regionalpun Sulawesi Tengah menduduki peringkat teratas.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Angka persentase penduduk dengan pengobatan sendiri di Sulawesi Tengah terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 hanya sebesar 49,52% dan tahun 2020 sebesar 76,02%.

Analisis Efektifitas

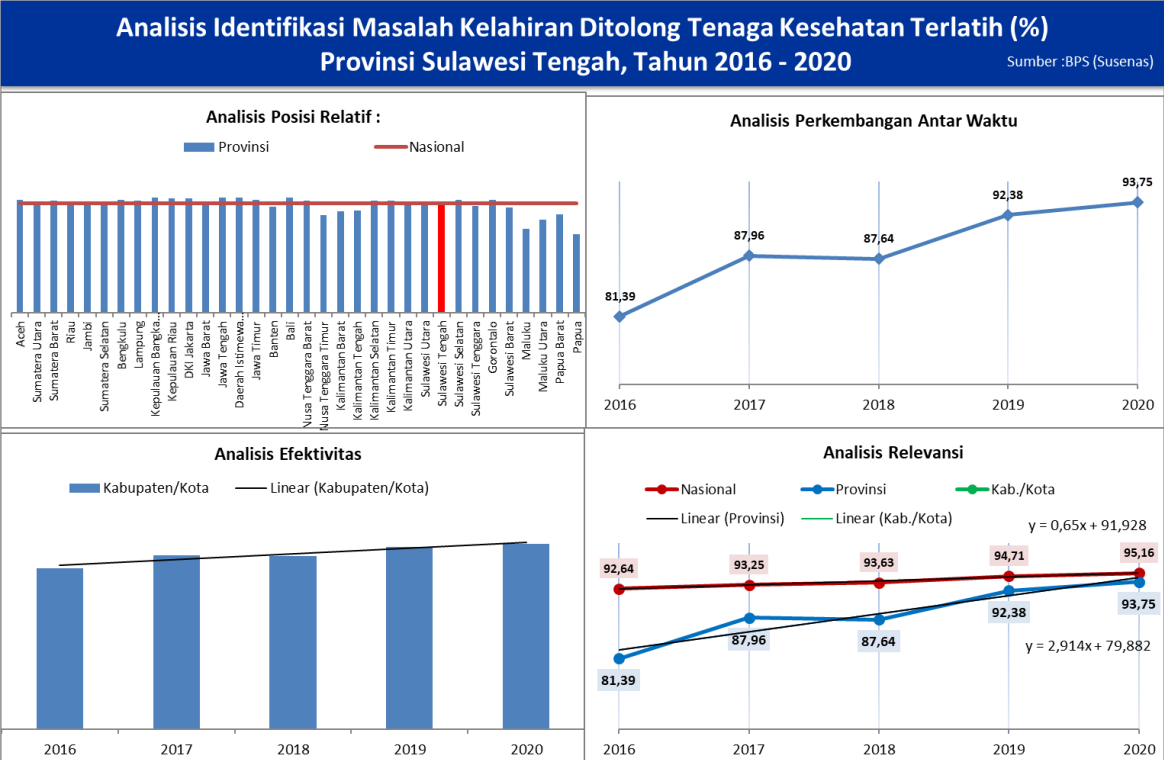
Berbagai pendekatan dan program yang dilakukan selama ini belum efektif untuk menurunkan angka persentase penduduk dengan pengobatan sendiri.

Analisis Relevansi

Dari tahun 2016-2020, baik nasional maupun Sulawesi Tengah menunjukkan trend peningkatan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri. Namun trend peningkatan Sulawesi Tengah lebih tinggi sebesar 5,04% dibandingkan nasional yang hanya sebesar 3,38%.

3.2.2.9. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga tidak terlatih/tidak terampil.



Analisis Identifikasi Masalah Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif Sulawesi Tengah untuk kelahiran yang ditolong oleh tenaga terampil masih dibawah capaian rata-rata nasional. Masih terdapat gap dengan nasional sebesar 1,41%. Untuk skala regional, posisi Sulawesi Tengah berada diurutan ke 4 dari 6 propinsi di Sulawesi, masih dibawah Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari perkembangan waktu, dari tahun 2016-2020 terus mengalami perbaikan walaupun capaian pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan 0,32%, namun pada tahun 2019-2020 mengalami perbaikan.

Analisis Efektifitas

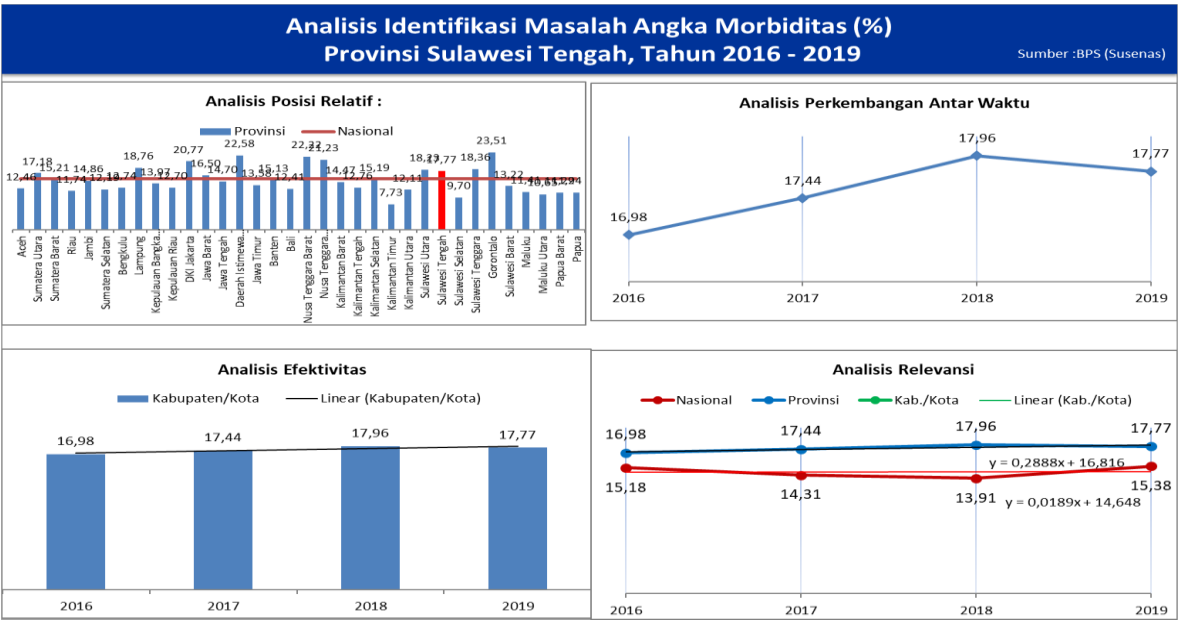
Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dikatakan efektif meningkatkan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga terlatih.

Analisis Relevansi

Trend kenaikan kenaikan persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga terlatih Sulawesi Tengah sebesar 2,91% jauh diatas trend kenaikan rata-rata nasional yang hanya sebesar 0,65%. Walaupun demikian trend kenaikan tersebut capaiannya masih di bawah rata-rata nasional.

3.2.2.10. Angka Morbiditas (%)

Angka Morbiditas merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

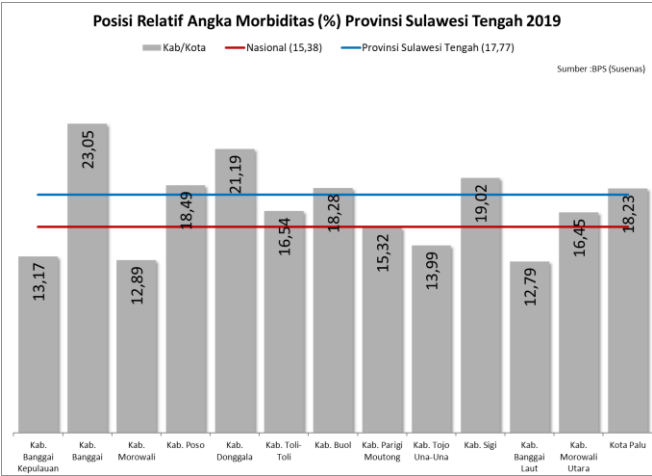


Gambar 3.26
Analisis Identifikasi Masalah Angka Morbiditas (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

Analisis Posisi Relatif

Posisi angka morbiditas Sulawesi Tengah tahun 2020 masih di atas rata-rata nasional yakni sebesar 17,17% dari rata-rata nasional sebesar 15,38%. Hal ini menunjukkan tingkat kesakitan penduduk Sulawesi Tengah masih di atas tingkat kesakitan nasional.

Jika dilihat posisi relatif kab/kota di Sulawesi Tengah, terdapat 8 kab/kota yang tingkat kesakitannya di atas rata-rata nasional dan 6 kota/kab. di atas rata-rata propinsi dengan tingkat kesakitan tertinggi di kab. Banggai dan terendah di kab. Banggai Laut.



Analisis Perkembangan Antar Waktu

Sejak tahun 2015-2019, tingkat kesakitan di propinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan presentase tingat kesakitan terendah pada tahun 2016. Setelah tahun 2016, perkembangan tingkat kesakitan mengalami kenaikan hingga tahun 2018 sebesar 17,96% dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2019.

Analisis Efektifitas

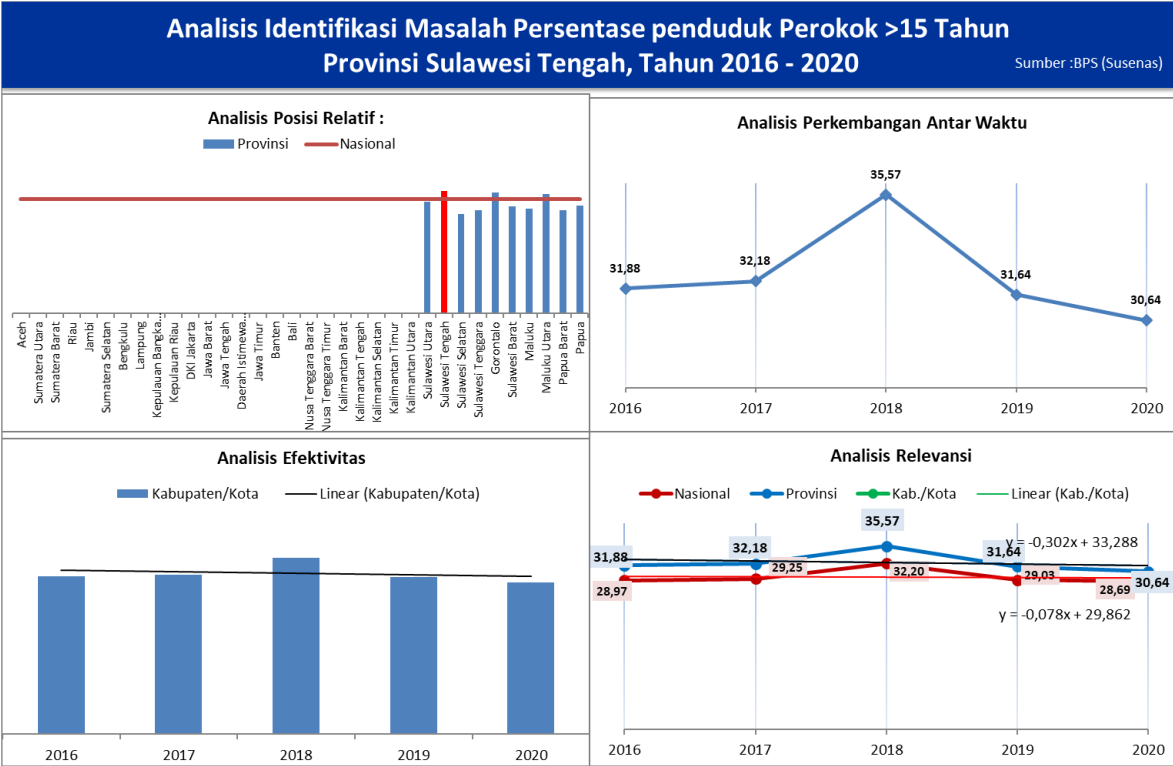
Berbagai pendekatan penanganan atas tingkat kesakitan di Sulawesi Tengah belum efektif dalam menurunkan angka morbiditas dimana trend penurunan selama periode 2015-2019 hanya sebesar 0,04%.

Analisis Relevansi

Penurunan angka morbiditas Sulawesi Tengah kurang relevan dengan penurunan secara nasional. Trend penurunan sebesar 0,04% sangat jauh dibandingkan trend penurunan nasional sebesar 0,28%.

3.2.2.11. Persentase Penduduk Perokok >15 Tahun

Gambaran persentase penduduk merokok umum >15 tahun Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada Gambar 3.27.



Gambar 3.27

Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Perokok >15 tahun
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif jumlah perokok umur >15 tahun di Sulawesi Tengah masih diatas rata-rata nasional, bahkan di kawasan regionalpun posisi Sulawesi Tengah adalah tertinggi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Sejak tahun 2016-2020, jumlah perokok berumur >15 tahun di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari sebelumnya 31,88% pada tahun 2016 menjadi 30,64% pada tahun 2020 walaupun mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 yakni sebesar 35,57%

Analisis Efektifitas

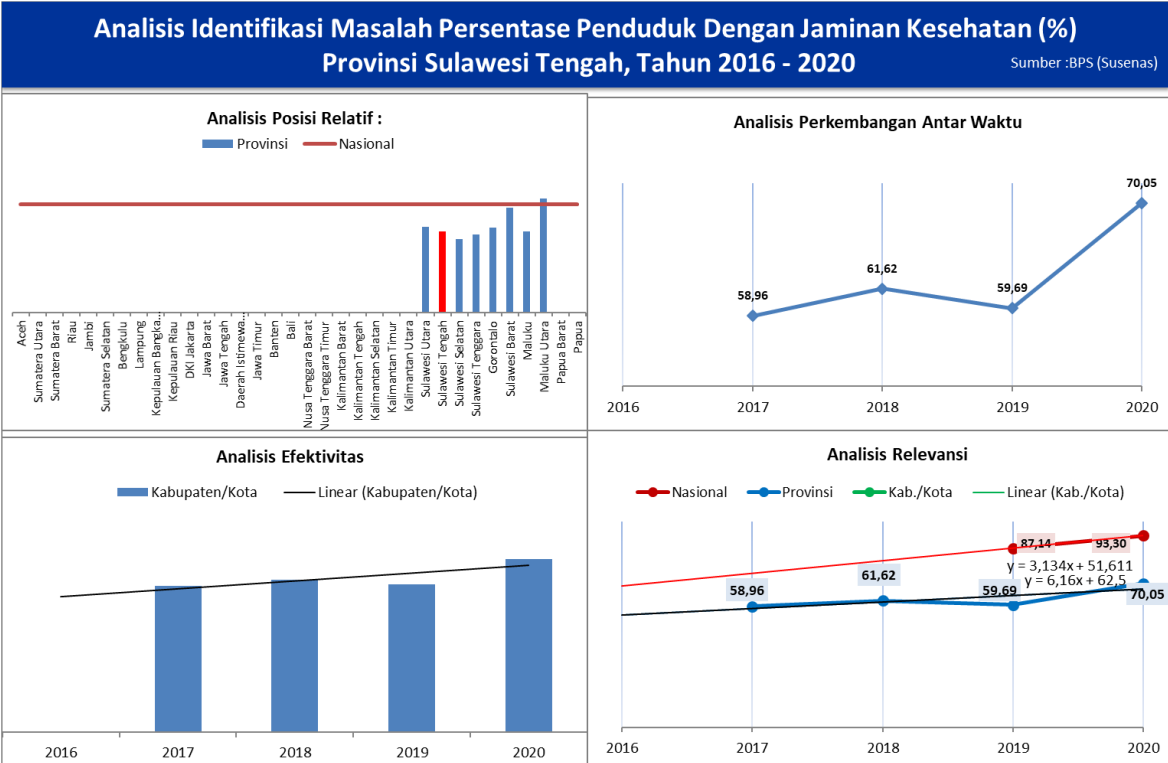
Walaupun mengalami penurunan, efektifitas kegiatan menurunkan jumlah perokok di Sulawesi Tengah kurang optimal. Hal ini juga disebabkan zat yang di kandung oleh rokok.

Analisis Relevansi

Adanya relevansi penurunan jumlah perokok umur >15 tahun antara Sulawesi Tengah dengan Nasional, dimana penurunan jumlah perokok di Sulawesi Tengah trennya lebih besar jika dibandingkan dengan nasional yaitu 0,3% : 0,07%

3.2.2.12. Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan (%)

Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut.



Gambar 3.28

**Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif Sulawesi Tengah dengan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan masih di bawah rata-rata nasional. Pada kawasan regional, Sulawesi Tengah berada pada posisi ke-6 dari 8 propinsi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

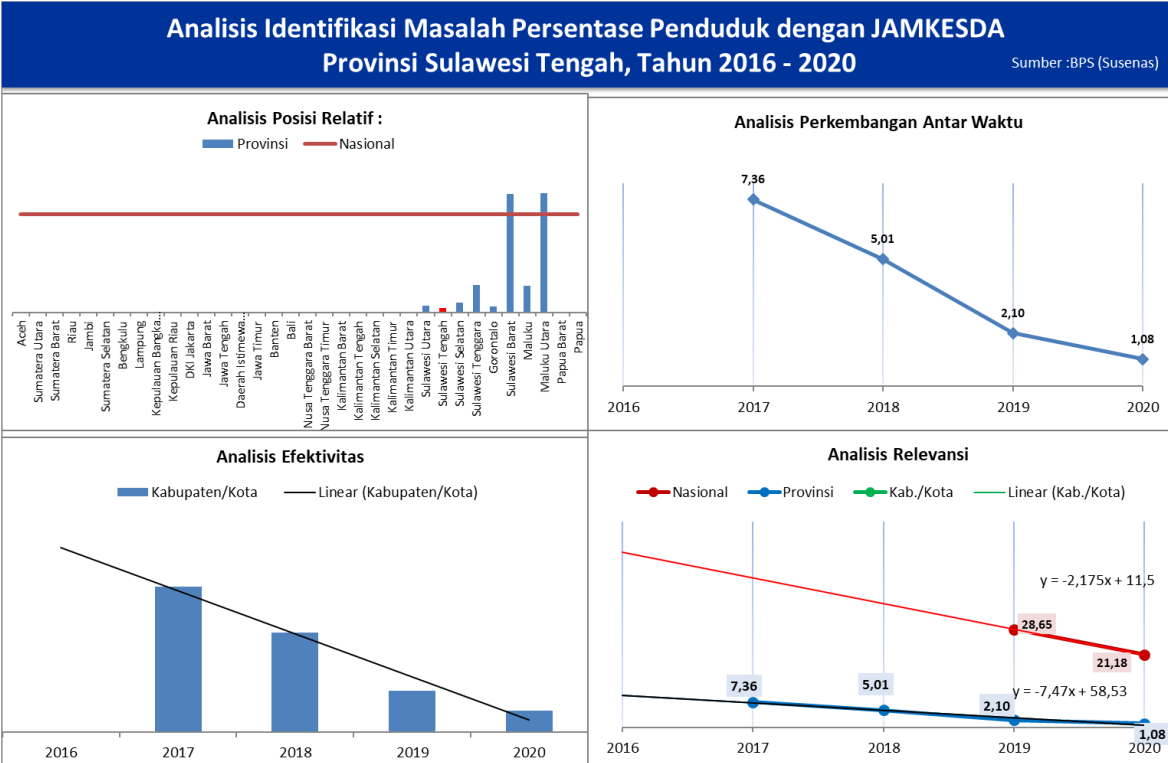
Dari tahun 2017-2020, persentase penduduk dengan jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 sejumlah 58,96 persen hingga tahun 2020 sejumlah 70,05 persen.

Analisis Relevansi

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, persentase penduduk dengan jaminan kesehatan Sulawesi Tengah masih sangat jauh dari rata-rata nasional.

3.2.2.13. Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan Daerah (%)

Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut.



Gambar 3.29
Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Dengan JAMKESDA
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif Sulawesi Tengah dengan jaminan Kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah masih sangat jauh dari capaian rata-rata nasional. Bahkan dari skala regionalpun, posisi Sulawesi Tengah berada pada posisi terakhir dari 8 propinsi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Ditinjau dari 4 tahun terakhir, persentase penduduk dengan JAMKESDA, mengalami penurunan yang, dari 7,36% tahun 2017 menjadi hanya 1,08% pada tahun 2020.

Analisis Relevansi

Secara rata-rata nasional, persentase penduduk dengan JAMKESDA mengalami trend penurunan sebesar 2,175% namun trend penurunan Sulawesi Tengah lebih tinggi yakni sebesar 7,47%.

Kesimpulan Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis masing-masing indikator di atas, dihasilkan kesimpulan untuk isu dan permasalahan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

- a) Persentase Stunting di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi dan masih di atas rata-rata nasional.
- b) Berbagai pendekatan program dan kegiatan yang dilakukan nampaknya belum efektif untuk menurunkan angka stunting. Dibutuhkan kebijakan dan strategi yang konsisten untuk menurunkan angka stunting.
- c) Posisi relatif penduduk dengan keluhan kesehatan Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional. Artinya derajat kesehatan rata-rata Sulawesi Tengah lebih baik dari derajat kesehatan rata-rata nasional
- d) Persentase penduduk dengan pengobatan sendiri di Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata nasional, bahkan di skala regional Sulawesi Tengah menduduki peringkat teratas.
- e) Berbagai pendekatan dan program yang dilakukan selama ini belum efektif untuk menurunkan angka persentase penduduk dengan pengobatan sendiri.

- f) Trend peningkatan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri Sulawesi Tengah lebih tinggi sebesar 5,04% dibandingkan nasional yang hanya sebesar 3,38%.
- g) Posisi relatif Sulawesi Tengah untuk kelahiran yang ditolong oleh tenaga terampil masih dibawah capaian rata-rata nasional. Masih terdapat gap dengan nasional sebesar 1,41%. Untuk skala regional, posisi Sulawesi Tengah berada diurutan ke 4 dari 6 propinsi di Sulawesi, masih dibawah Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
- h) Posisi angka morbiditas Sulawesi Tengah tahun 2020 masih di atas rata-rata nasional.
- i) Berbagai pendekatan penanganan atas tingkat kesakitan di Sulawesi Tengah belum efektif dalam menurunkan angka morbiditas dimana trend penurunan selama periode 2015-2019 hanya sebesar 0,04%.
- j) Penurunan angka morbiditas Sulawesi Tengah kurang relevan dengan penurunan secara nasional. Trend penurunan sebesar 0,04% sangat jauh dibandingkan trend penurunan nasional sebesar 0,28%.
- k) Propinsi Sulawesi Tengah menempati urutan ke 26 dari tingkat kesakitan nasional dan masih di atas rata-rata nasional
- l) Trend Perkembangan antar waktu kurang menggembirakan dan menunjukan kenaikan tingkat kesakitan Sulawesi Tengah sebesar 0,28%
- m) Berbagai intervensi yang dilakukan selama ini belum relevan untuk penurunan angka kesakitan.
- n) Jumlah penduduk merokok umur >15 tahun di Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata nasional.
- o) Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan Sulawesi Tengah juga masih di bawa rata nasional, bahkan jaminan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 29,03% menjadi hanya 1,08% pada tahun 2020.

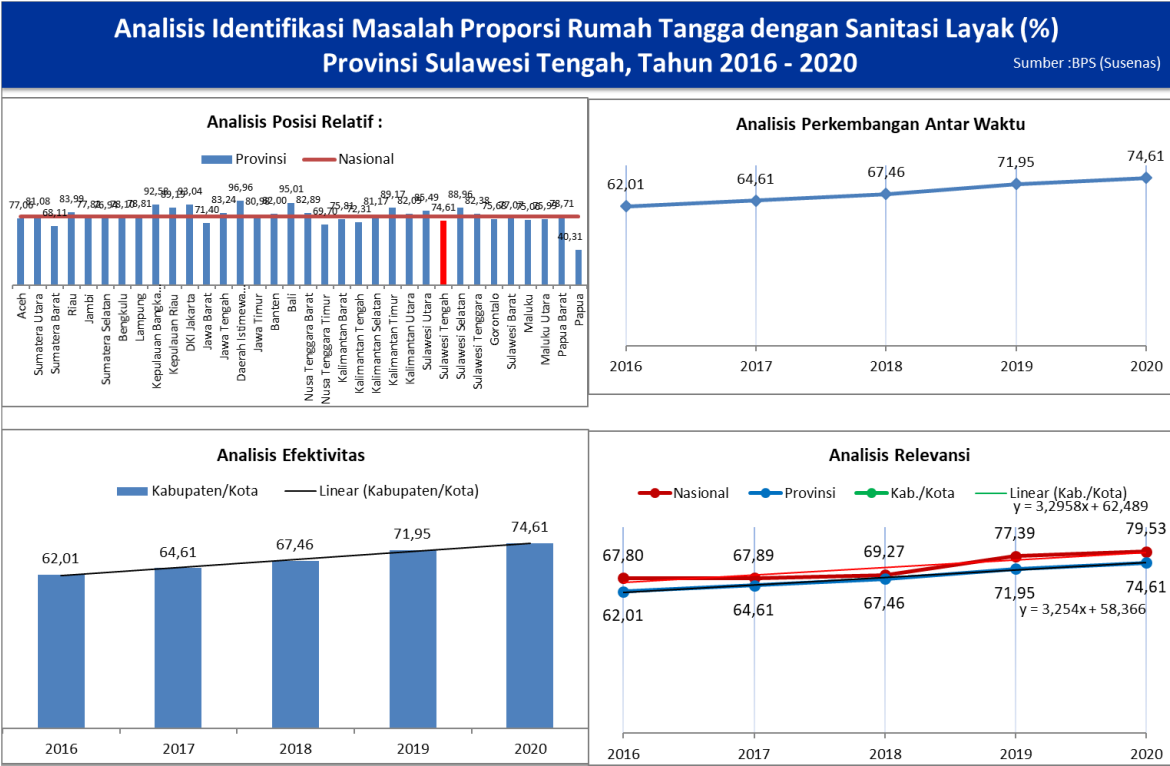
3.2.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur dasar dapat mempengaruhi kualitas kehidupan warga terutama dengan kualitas kesehatan. Prasarana dan sarana infrastruktur yang buruk berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit.

3.2.3.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di pedesaan.



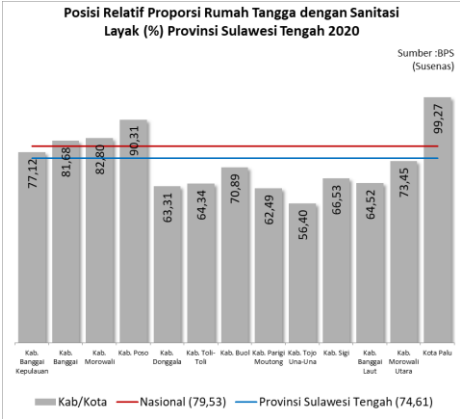
Gambar 3.30

Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Dalam skala nasional, posisi Sulawesi Tengah terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 74,61%. Bahkan skala regionalpun, posisi Sulawesi Tengah berada di peringkat terbawa dari 6 propinsi di Sulawesi.

Untuk skala propinsi, 8 kabupaten berada di posisi rata nasional bahkan berada di bawah posisi rata-rata propinsi dengan kab. Tojo Una-Una memiliki akses sanitasi terendah yakni hanya sebesar 56,40%.



Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sulawesi Tengah terus mengalami perkembangan positif.

Analisis Efektivitas

Berbagai stretegi dan pendekatan selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukan efektifitas untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2016 sejumlah 62,01 persen hingga tahun 2020 menjadi 74,61 persen.

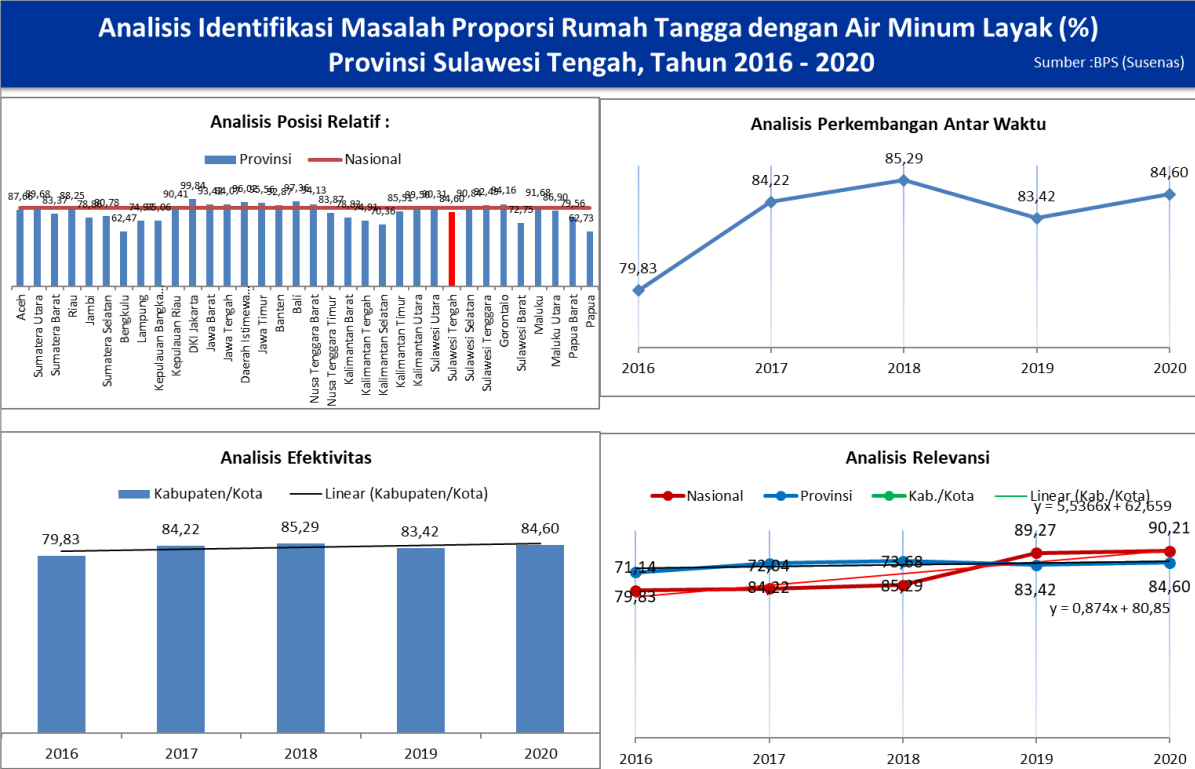
Analisis Relevansi

Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sulawesi Tengah sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional.

3.2.3.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses

air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. (Metadata SDGs)

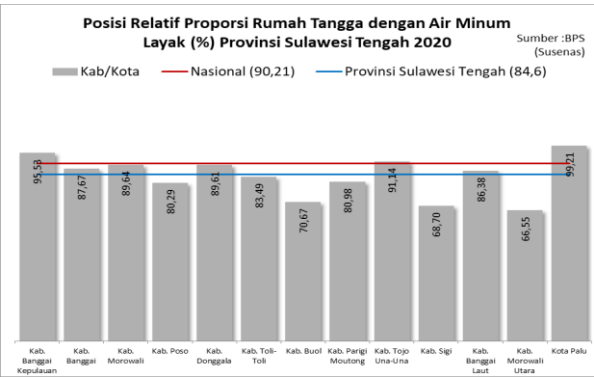


Gambar 3.31
Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi Sulawesi Tengah untuk akses air minum layak sebesar 84,60% masih di bawa rata-rata nasional sebesar 90,21%. Untuk skala regional Sulawesi Propinsi Sulawesi Tengah berada di posisi ke 5 di atas propinsi Sulawesi Barat.

Sementara posisi relatif masing-masing kabupaten menunjukkan hanya 3 kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata nasional. Bahkan 6 kabupaten lainnya masih di bawah rata-rata Sulawesi Tengah dengan posisi terendah di Kabupaten Morowali Utara dengan persentase air minum layak hanya mencapai 66,55% masih sangat jauh dengan capaian nasional sebesar 90.21%.



Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2016-2020, perkembangan antar waktu capaian akses air minum layak di propinsi Sulawesi Tengah mengalami pasang surut. Dimana sejak tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan naik lagi pada tahun 2020.

Analisis Efektivitas

Trend kenaikan efektifitas penanganan akses air minum layak hanya sebesar 0,87% masih sangat jauh tertinggal dengan efektifitas penanganan nasional sebesar 5,53%.

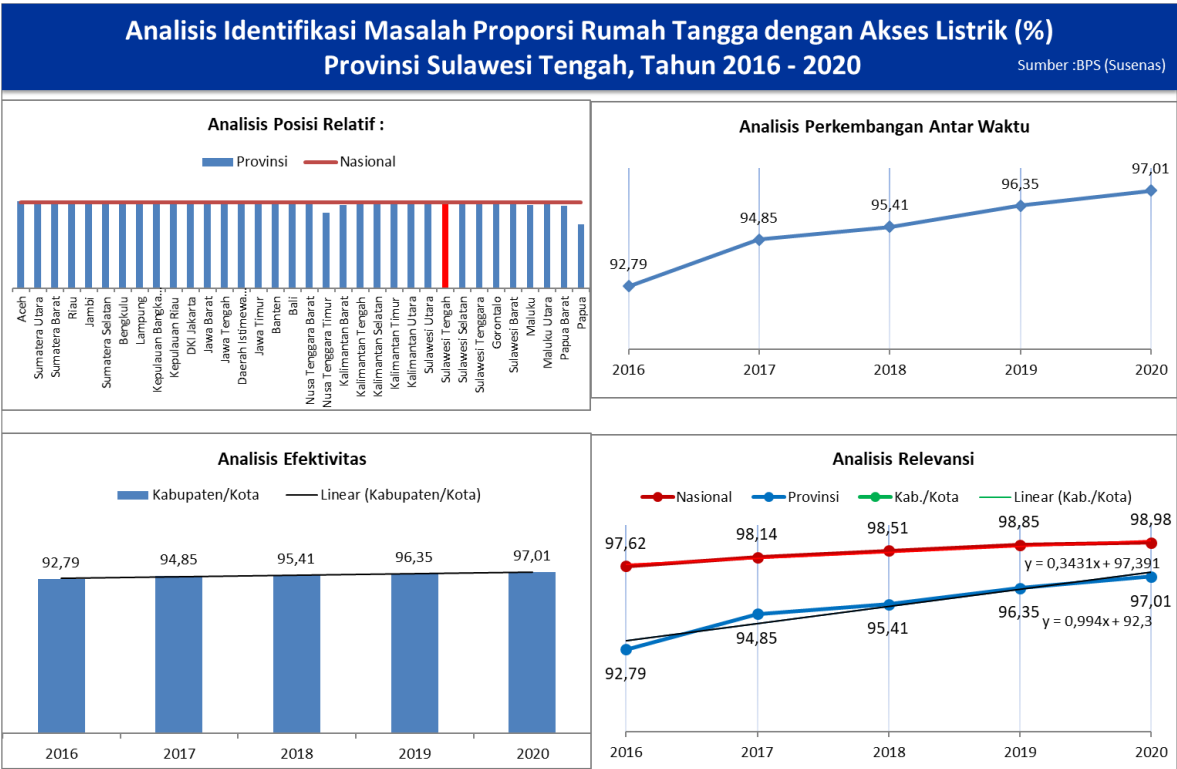
Analisis Relevansi

Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sulawesi Tengah kurang relevan dengan capaian penanganan nasional. Pada tahun 2019, kenaikan akses air minum layak nasional mencapai 9,74%, namun pada tahun yang sama

justru di Sulawesi Tengah terjadi penurunan akses air minum layak sebesar 1,87% hingga tahun 2020 terjadi gap dengan nasional sebesar 5,61%.

3.2.3.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).



Gambar 3.32 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Persentase rumah tangga dengan akses listrik di Sulawesi Tengah masih berada di bawa rata-rata nasional.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari perkembangan waktu sejak tahun 2016-2020, rumah tangga dengan akses listrik di Sulawesi Tengah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sejumlah 92,79 persen teruse meningkat hingga tahun 2020 sejumlah 97,01 persen.

Analisis Efektivitas

Berbagai program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah selama ini telah memberi kontribusi untuk menaikkan persentase rumah tangga dengan akses listrik. Memperlihatkan dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan peningkatan akses listrik.

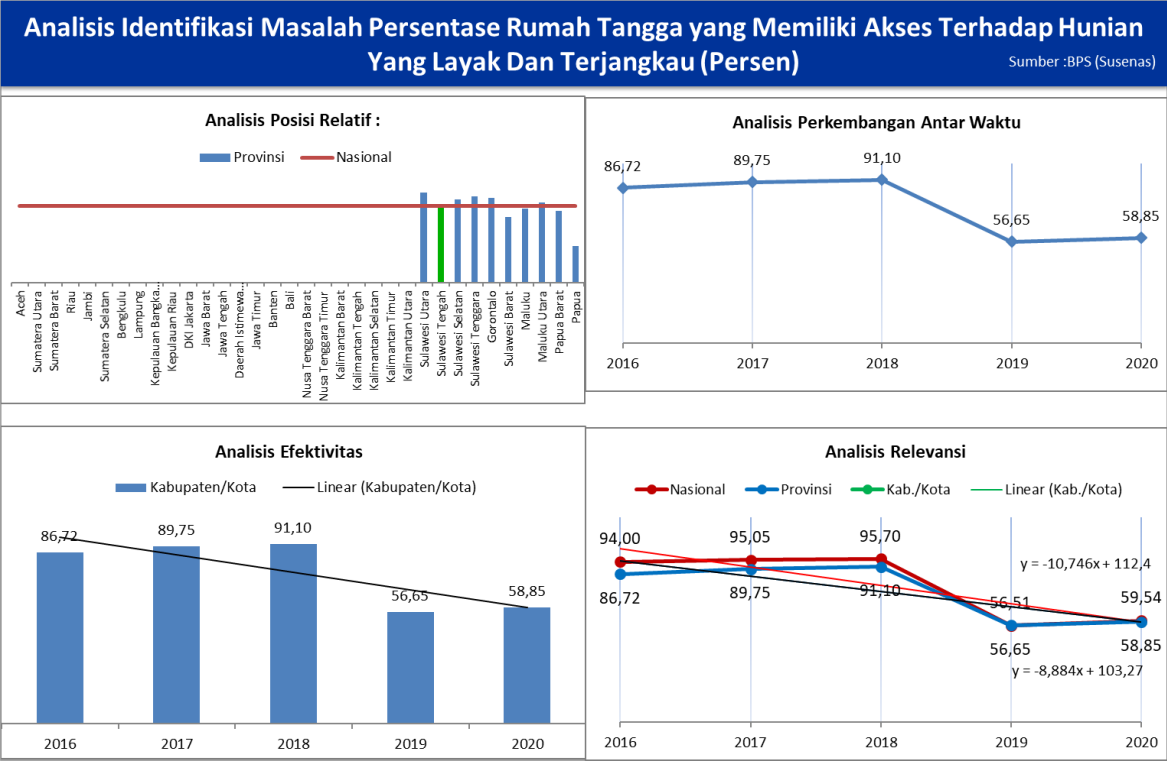
Analisis Relevansi

Dari trend kenaikan, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,99% dan nasional sebesar 0,34%. Namun demikian trend kenaikan tersebut belum melampaui capain nasional.

3.2.3.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau (%)

Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
- b. memiliki akses terhadap air minum layak
- c. memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d. ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.



Gambar 3.33

Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Hunian Layak dan Terjangkau (%) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Posisi Sulawesi Tengah untuk akses hunian layak huni dan terjangkau masih di bawah rata nasional, bahkan untuk skala regional Sulawesipun, posisi Sulawesi Tengah berada di urutan ke 5 di atas Sulawesi Barat.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2016-2018, persentase akses hunian layak huni terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat ekstrim sebesar 34,45% yang disebabkan salah satunya adalah gempa bumi tahun 2018.

Kesimpulan Bidang Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisis masing-masing indikator di atas, dihasilkan isu dan permasalahan bidang Infrastruktur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- Dalam skala nasional, posisi Sulawesi Tengah terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 74,61%. Bahkan skala regionalpun, posisi Sulawesi Tengah berada di peringkat terbawa dari 6 propinsi di Sulawesi.
- Akses air minum layak masih di bawa rata-rata nasional. Untuk skala regional Sulawesi Propinsi Sulawesi Tengah berada di posisi ke 5 di atas propinsi Sulawesi Barat.

- Trend kenaikan efektifitas penanganan akses air minum layak hanya sebesar 0,87% masih sangat jauh tertinggal dengan efektifitas penanganan nasional sebesar 5,53%.
- Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sulawesi Tengah kurang relevan dengan capaian penanganan nasional.
- Persentase rumah tangga dengan akses listrik di Sulawesi Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional.
- Posisi Sulawesi Tengah untuk akses hunian layak huni dan terjangkau masih di bawah rata nasional, bahkan untuk skala regional Sulawesipun, posisi Sulawesi Tengah berada di urutan ke 5 di atas Sulawesi Barat.

3.2.4 Bidang Pendidikan

Jika dilakukan analisis masalah perkembangan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan kecenderungan yang sangat variatif, khususnya tingkat partisipasi masyarakat bersekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga setara Sekolah Menengah Umum. Data yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dari siswa yang sekolah sesuai usia dan jenjang pendidikannya.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam seperti apa perkembangan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini diuraikan analisis identifikasi angka partisipasi murni dari tingkat SD/MI sampai SMU dengan menggunakan (a) analisis Posisi Relatif, (b) analisis perkembangan antar waktu, (c) analisis efektifitas dan (d) Analisis Relevansi.

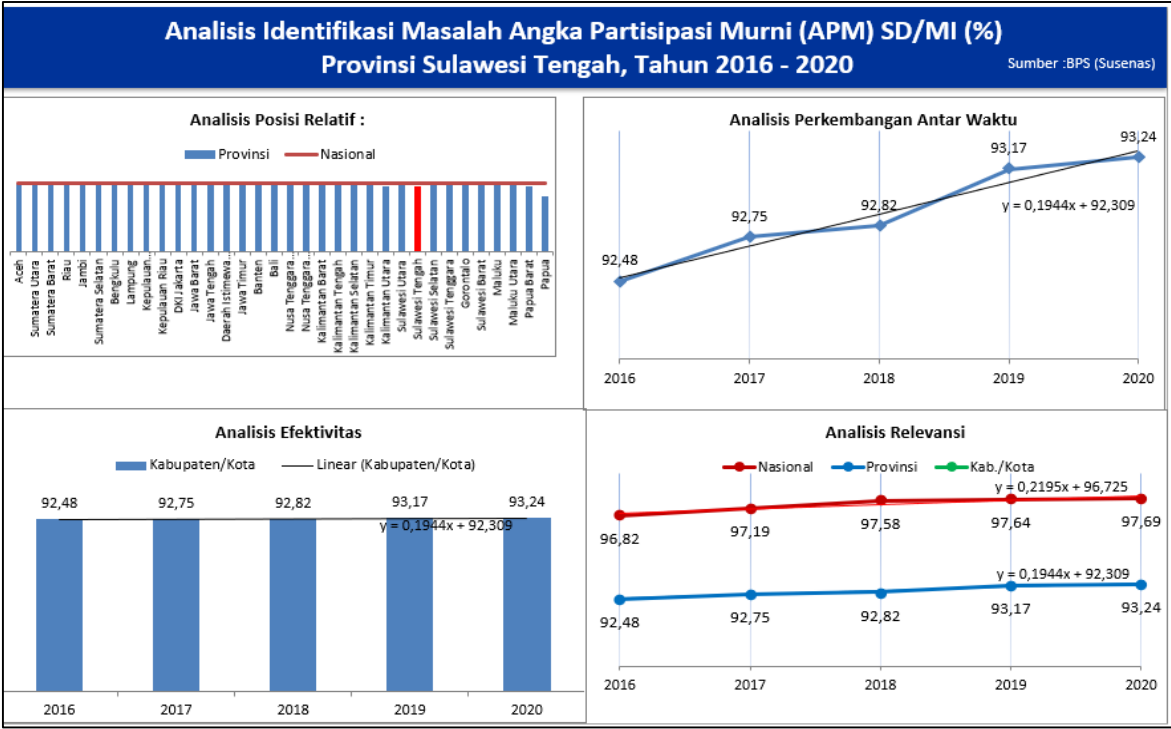
3.2.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Secara umum data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MD dengan kisaran usia 7 s/d 12 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 rata-rata capainnya 92,89%, masih dibawah capaian rata-rata nasional 97,38%.

Tingkat partisipasi penduduk Sulawesi Tengah usia 7 – 12 tahun untuk masuk di Sekolah Dasar umumnya melebihi 90 %, kecuali Kabupaten Banggai Laut, masih dibawah 90 %. Namun demikian jika dilihat dari pendekatan analisis identifikasi masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020 memperlihatkan kecenderungan yang berbeda khususnya jika dilihat dari aspek Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada Gambar 3.34.

Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif adalah mengukur tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Gambar Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah (94,17), masih dibawah capaian rata-rata nasional (97,64%).

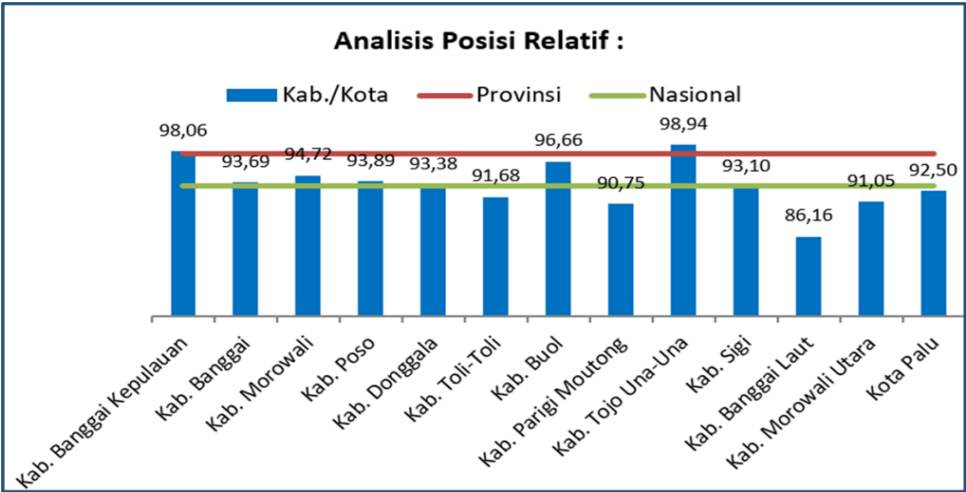


Sumber Data: TNP2K dan BPS 2016- 2020. Data diolah kembali

Gambar 3.34.

Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 - 2020

Di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir, terdapat lima kabupaten/kota capaian APM setara SD/MI dibawah rata-rata nasional, yakni Kota Palu 92,50%, Kabupaten Morowali Utara 91,05%, Kabupaten Banggai Laut 86,16 %, Kabupaten Parigi Moutong 90,75% dan Kabupaten Tolitoli 91,68%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 10 % dari anak sesuai usia dan jenjang pendidikan di SD/MI tidak bersekolah di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.35

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) tingkat partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI memperlihatkan kenaikan dari tahun ketahun, walau kenaikan (partisipasi masyarakat) tersebut relatif kecil. Jika merujuk pada gambar Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar hanya naik rata-rata 0,19% pertahun.

Analisis Efektifitas

Data analisis efektifitas memperlihatkan seperti apa efektifitas Angka Partisipasi Murni masyarakat Sulawesi Tengah usia 7 s/d 12 tahun ke Sekolah Dasar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Jika dihitung hasil analisis tersebut, maka rata-rata kenaikan pertahun hanya mencapai 0,19 %. Kabupaten terendah tingkat partisipasinya dalam kurun lima tahun terakhir adalah Banggai Laut dengan rata-rata capain 84,55 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang optimal.

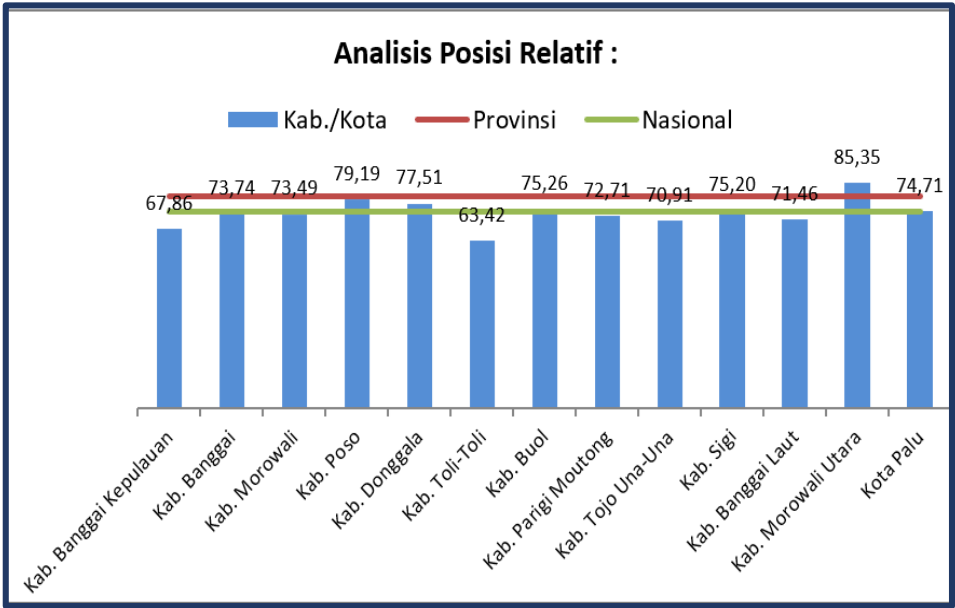
Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir menunjukkan hasil yang belum memadai jika dibanding hasil capaian secara nasional. Itu artinya pendekatan analisis relevansi menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah menyekolahkan anaknya ke jenjang SD/MI jika dibandingkan dengan capaian secara nasional belum relevan. Dalam rentang waktu lima tahun capaian nasional naik 0,21% sementara provinsi Sulawesi Tengah hanya 0,19%. Tahun 2020 memperlihatkan capaian nasional 97,69% dan Provinsi Sulawesi Tengah 93,24%. Masih terdapat gap 4,53%.

3.2.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

Secara umum jika kita merujuk pada data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/MTs dengan kisaran usia 13 s/d 15 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 rata-rata capainnya 72,99 %, masih berada dibawah angka angka partisipasi secara nasional 78,69%. Hal lainnya, masih terdapat 25,58 % penduduk usia 13 s/d 15 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMP/MTs di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu 2016-2020 untuk capaian rata-rata dalam lima tahun, terdapat sepuluh kabupaten/kota APM melebihi capaian provinsi, seperti Kabupaten Morowali, Banggai, Poso Donggala, Buol, Parigi Moutong, Sigi, Banggai Laut Morowali Utara dan Kota Palu. Bahkan Kabupaten Morowali Utara melebihi rata-rata nasional 84,79%. Namun demikian masih terdapat tiga kabupaten capainnya masih dibawah 70 %, seperti Kabupaten Banggai Kepulauan, Tolitoli dan Kabupaten Tojo Una-Una.

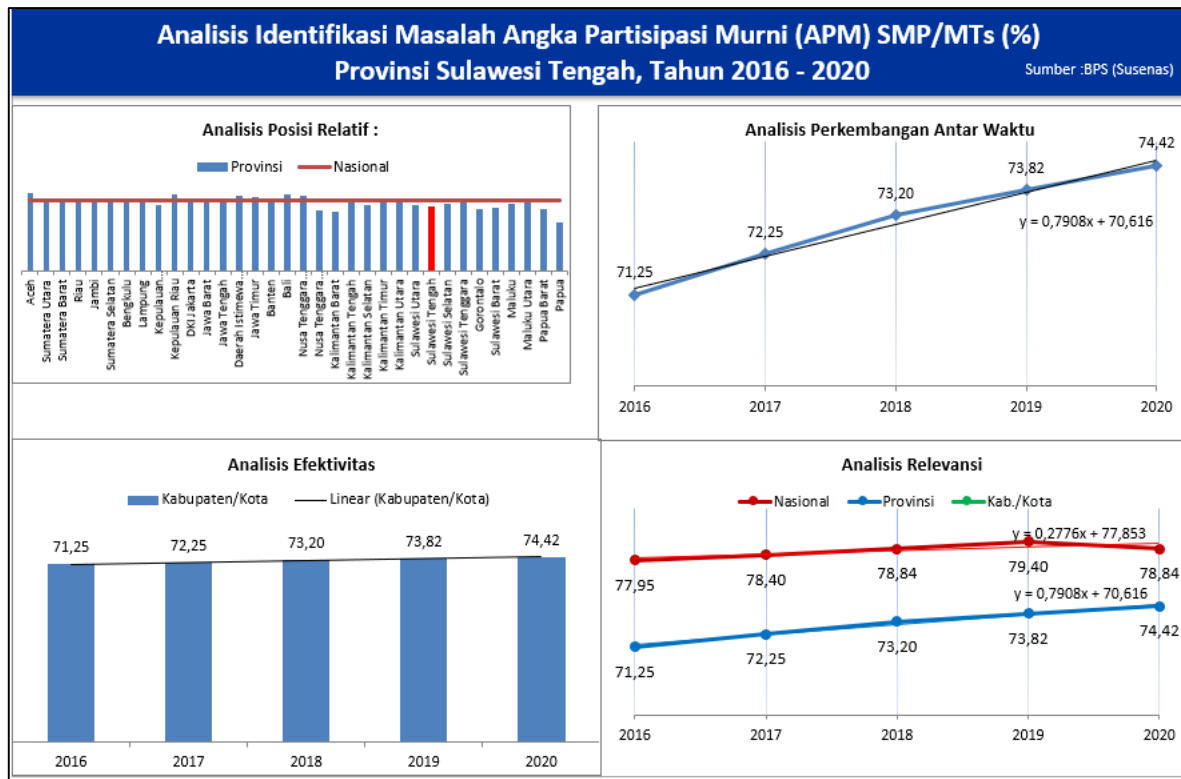


Sumber Data: TNP2K dan BPS 2016- 2020. Data diolah kembali

Gambar 3.36.

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Untuk melihat perkembangan lebih detail di Provinsi Sulawesi Tengah, antara tahun 2016 – 2020 akan terlihat pada Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada gambar berikut ini:



Gambar 3.37.

Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020

Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan, capaian Provinsi Sulawesi Tengah 73,82 %, sementara capaian rata-rata nasional 79,4 %, atau masih terdapat gap 5,58%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APM untuk jenjang pendidikan setara SMP/MTs, sementara provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional.

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) antar kota/ kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima Tahun (2016 – 2020) menunjukkan bahwa, delapan (8) kota/kabupaten capaiannya masih dibawah rerata nasional, seperti Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 13 s/d 15 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SMP/MTs di Provinsi Sulawesi tengah perkembangan yang melambat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 terdapat 71,25 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SMP/MTs. Angka tersebut hanya naik 72,25% pada tahun 2017, kemudian naik sekitar 1 % pada tahun 2018 menjadi 73,20%. Pada tahun 2019 hanya naik 0,62 % atau rata-rata 73,82 % dan tahun 2020 74,42%. Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 0,79 %.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sulawesi Tengah usia 13 s/d 15 tahun ke jenjang pendidikan SMP/MTs dalam lima tahun terakhir (2016-2020) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 0,79 %. Kecenderungan lain menunjukkan, seiring dengan perkembangan usia dan waktu, pada tahun 2020 terdapat 26 % penduduk Sulawesi Tengah tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sulawesi Tengah.

Analisis Relevansi

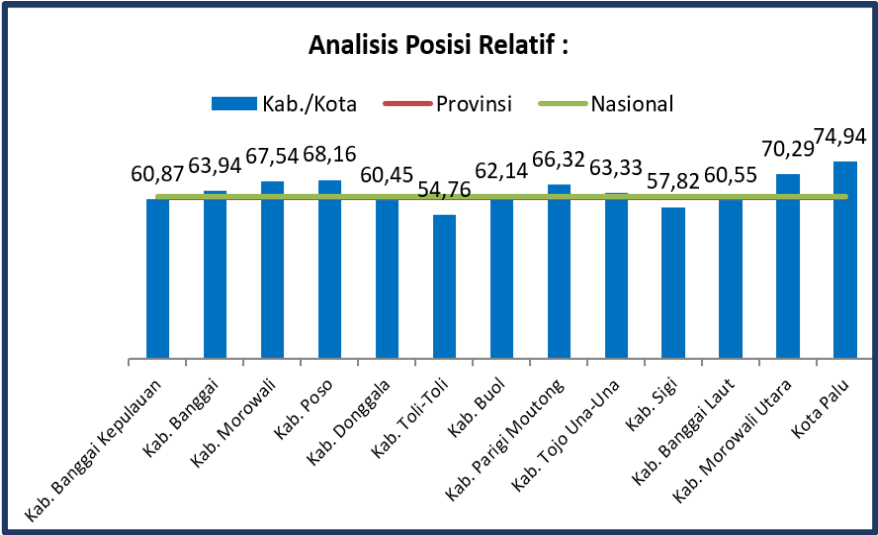
Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,12%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 5,5 % dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah (74,42%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami penurunan 79,40% tahun 2019 menjadi 78,84 % tahun 2020. Di tahun yang sama Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan positif 0,79 % dari tahun 2019 ke 2020 dengan relevansi pertumbuhan 74,42 %.

3..2.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Secara umum jika kita merujuk pada data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 berada pada kisaran rata-rata 64,26 % melebihi capaian rata-rata nasional 60,61%. Walau melebihi rata-rata nasional, namun masih terdapat permasalahan karena 35,74% penduduk usia 16 s/d 18 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMA/MA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika merujuk Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu 2016-2020 untuk capaian rata-rata dalam lima tahun, hanya Kabupaten Morowali Utara yang bisa mencapai diatas 70 %, namun jika dilihat angka partisipasi penduduk sekolah pada jenjang SMU/MA akhir tahun 2020, hanya Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara yang bisa mencapai diatas 70%.

Kecenderungan lain yang bisa dibaca pada Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun (2016-2020), terdapat enam kabupaten capaiannya masih dibawah APM Nasional, seperti, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut. Data selengkapnya pada gambar berikut ini:

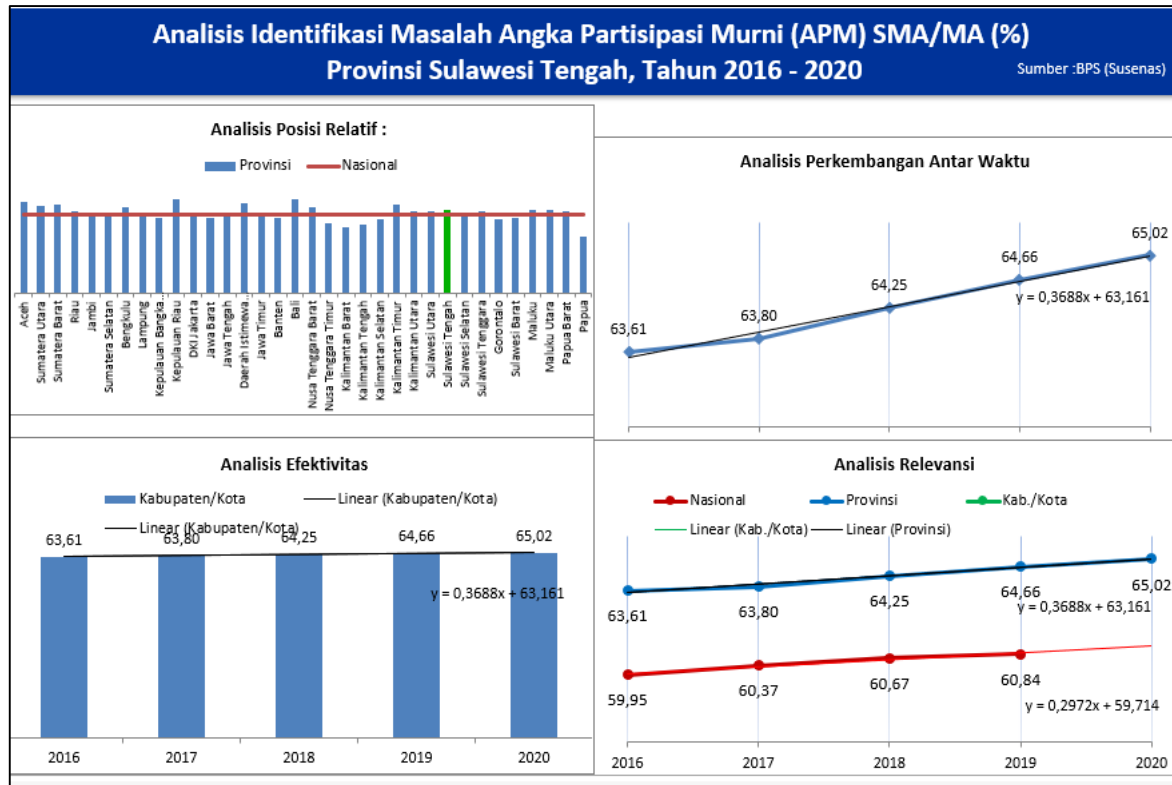


Sumber Data: TNP2K dan BPS 2016- 2020. Data diolah kembali

Gambar 3.38.

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Untuk melihat perkembangan lebih detil Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, antara tahun 2016 – 2020 akan terlihat pada Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada gambar berikut ini:



Gambar 3.39.
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Capaian rata-rata Provinsi Sulawesi untuk analisis posisi relatif Angka Partisipasi Murni penduduk umur antara 16 s/d 18 tahun sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA adalah 64,61 %, sementara capaian rata-rata nasional 60,61%. Capaian ini terpaut 3,77%. Artinya capaian provinsi Sulawesi Tengah masih diatas rata-rata nasional.

Jika ditelusuri lebih dalam, hanya terdapat lima Kabupaten yang berada dibawah rata-rata nasional untuk Angka Partisipasi Murni penduduk umur antara 16 s/d 18 tahun sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA. Sementara itu terdapat enam kota/kabupaten melampaui capaian rata-rata nasional 60,61%, bahkan capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah 64,61 %, seperti Kota Palu 74,94 %, Kabupaten Morowali Utara 70,29 %, Kabupaten Parigi Moutong 66,32%, Kabupaten Poso 68,16% dan Kabupaten Morowali 67,54%.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Jika digunakan analisis perkembangan antara tahun 2016-2020 untuk tingkat partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya usia 16 s/d 18 tahun di SMU/MA di Provinsi Sulawesi Tengah memperlihatkan kecenderungan yang baik. Terdapat perkembangan kenaikan partisipasi penduduk untuk meneruskan pendidikannya di tingkat SMU/MA. Tahun 2016 capainnya 61,61 % kemudian naik 63,80 % pada tahun 2017 dan 64,25 % pada tahun 2018 dan 64,61% tahun 2019 serta 65,02 tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan tiap tahun 0,36%. Kenaikan tertinggi hanya dicapai Kabupaten Morowali Utara, 70,18 %, selebihnya masih dibawah 70 %, termasuk Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, hanya 67,40% rata-rata pertahun.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi usia 16 s/d 18 tahun di SMU/MA di Provinsi Sulawesi ke jenjang pendidikan SMU/MA dalam lima tahun terakhir (2016-2020) rerata kenaikan terhitung belum efektif, hanya 0,36%. Selain tingkat kenaikannya belum signifikan (efektif) ke jenjang pendidikan SMU/MA, juga terdapat hal mencemaskan karena pada tahun 2020 hanya 65,02 % penduduk Sulawesi Tengah meneruskan pendidikan ke SMU/MA, itu artinya masih terdapat 34,98 % penduduk 16 s/d 18 tahun tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMU/MA di Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir untuk jenjang pendidikan SMU/MA jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (61,25%), posisi Sulawesi Tengah (65,02%) masih di atas rata-rata nasional. Bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata 0,38 % sementara nasional 0,30 %. Jika dibandingkan rerata nasional, Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir cukup relevan kenaikannya, walaupun hasil akhirnya hanya 65,92%. Namun demikian angka capaian tersebut harus di dibaca bahwa masih terdapat 34,08% masyarakat Sulawesi Tengah tidak meneruskan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMU/MA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan, Isu dan Permasalahan

Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

1. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah (94,17), masih dibawah capaian rata-rata nasional (97,64%).
2. Di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020), terdapat lima kabupaten/kota capaian APM setara SD/MI di bawah rata-rata nasional, yakni Kota Palu 92,50%, Kabupaten Morowali Utara 91,05%, Kabupaten Banggai Laut 86,16 %, Kabupaten Parigi Moutong 90,75% dan Kabupaten Tolitoli 91,68%. Hal ini mengindikasikan, terdapat 10 % dari anak sesuai usia dan jenjang pendidikan di SD/MI tidak bersekolah di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, kurun waktu tahun 2016-2020, tingkat partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI hanya naik rata-rata 0,19% pertahun.
4. Data analisis efektifitas APM masyarakat Sulawesi Tengah usia 7 s/d 12 tahun ke Sekolah Dasar kurun waktu 2016-2020 rerata kenaikan pertahun hanya 0,19 %. Kabupaten terendah tingkat partisipasinya adalah Banggai Laut dengan rata-rata capain 84,55 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang optimal.
5. Analisis Relevansi melihat APM jenjang pendikan SD/MI masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir menunjukkan hasil yang belum memadai jika dibanding hasil capaian secara nasional. Capaian nasional naik 0,21% sementara provinsi Sulawesi Tengah hanya 0,19%. Tahun 2020 memperlihatkan capaian nasional 97,69% dan Provinsi Sulawesi Tengah 93,24%. Terdapat gap 4,53%.

Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

1. Analisis Posisi Relatif APM) SMP/MTs dalam kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan, terdapat delapan (8) kota/kabupaten capaiannya masih dibawah rerata nasional, seperti Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol,

- Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 13 s/d 15 tahun bersekolah pada jenjang SMP/MTs.
2. Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun, tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SMP/MTs mengalami pelambatan dari tahun ketahun. Tahun 2016 terdapat 71,25 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SMP/MTs, dan tahun 2020 naik 74,42%. Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 0,79 %.
 3. Analisis efektifitas dalam lima tahun terakhir (2016-2020) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 0,79 %. Kecenderungan lain menunjukkan, seiring dengan perkembangan usia dan waktu, pada tahun 2020 terdapat 26 % penduduk Sulawesi Tengah tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs
 4. Berdasarkan Analisis Relevansi, APM masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, capaian secara nasional 80,12%, belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 5,5 % dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah 74,42%.

Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

1. Analisis posisi relatif menunjukkan, APM Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 berada pada kisaran rata-rata 64,26 % melebihi capaian rata-rata nasional 60,61%. Namun kecenderungan lainnya selama lima tahun, masih terdapat enam kabupaten capaiannya masih dibawah APM Nasional, seperti, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut.
2. Jika digunakan analisis perkembangan antar waktu (2016-2020), tingkat partisipasi masyarakat menyekolahkan anak usia 16 s/d 18 tahun di SMU/MA memperlihatkan kecenderungan yang belum optimal. Tahun 2016 capainnya 61,61 % dan lima tahun kemudian (2020) 65,02 %. Rerata kenaikan 0,36%. Kenaikan tertinggi dicapai Kabupaten Morowali Utara, 70,18 %, selebihnya masih dibawah 70 %.
3. Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi usia 16 s/d 18 tahun ke jenjang pendidikan SMU/MA dalam lima tahun terakhir (2016-2020) rerata kenaikan hanya 0,36%. Juga terdapat hal yang mencemaskan, jika capaian APM pada tahun 2020 hanya 65,02 %, itu artinya terdapat 34,98 % penduduk tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMU/MA di wilayah Sulawesi Tengah.
4. Analisis relevansi menunjukkan, capaian rerata APM masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir cukup relevan kenaikannya, walaupun hasil akhirnya hanya 65,92%.

3.2.5 Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

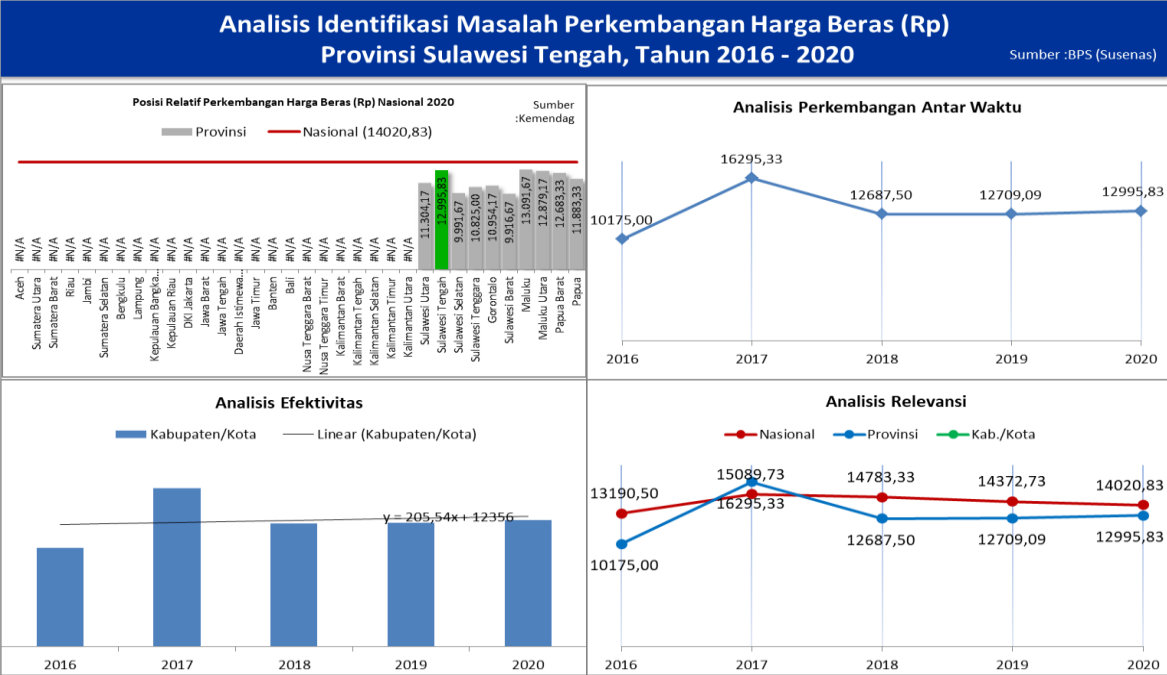
Masalah ketahanan pangan di Indonesia disebabkan oleh ketidakadanya keberlanjutan serta perbedaan dari dari setiap kebijakan pangan yang dibuat dari setiap periode pemerintahan, sehingga kebijakan pangan yang belum terselesaikan belum mencapai tujuan sudah tergantikan oleh kebijakan baru yang memiliki perbedaan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang memiliki andil dalam permasalahan kemiskinan adalah harga beras dan perkembangan harga kebutuhan pokok. Kedua indikator tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain produksi dan produktivitas pangan utama dan permintaan pangan.

3.2.5.1. Perkembangan Harga Beras

Dalam teori ekonomi, ada yang disebut kurva Engel. Kurva ini menghubungkan pendapatan dengan proporsi makanan dalam total pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan semakin rendah proporsinya demikian juga sebaliknya. Tentunya melihat angka-angka kemiskinan di atas, Indonesia dan Sulawesi Tengah masih jauh dari sejahtera, maka proporsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya akan cukup besar.

Idealnya, ketika kebutuhan konsumsi makanan rakyat masih cukup tinggi, harusnya harga-harga makanan, terutama makanan pokok cukup terjangkau. Sayangnya ini tidak terjadikarena terkadang harga-harga makanan kebutuhan pokok di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga internasional.

Bahkan Food and Agriculture Organization (FAO), sering menempatkan Indonesia pada daftar negara dengan *red-alert* karena harga pangannya sering mengalami flutuasi ke tingkat harga yang abnormal sehingga beresiko berdampak negatif terhadap aksesibilitasnya. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya harga-harga bahan pangan di Indonesia termasuk beras, baik dari sisi permintaan maupun penawaran atau produksi. Yang pasti, salah satunya adalah tata niaganya masih harus dibenahi. Capaian perkembangan harga beras di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.40.



Gambar 3.40
Analisis Identifikasi Permasalahan Perkembangan Harga Beras
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.40 menunjukkan bahwa perkembangan harga beras di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020 (Rp 13.050,00 per kilogram), berada di bawah rata-rata nasional sebesar Rp 13.937,50 per kg. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah regional SULAMPUIA, harga beras di di Sulawesi Tengah menduduki peringkat enam termahal atau di bawah harga Maluku, dua Papua dan Sulawesi Utara. Ini berarti bahwa baik secara nasional maupun regional, harga beras di Sulawesi Tengah berada pada kategori sedang.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.40 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir perkembangan harga beras di Sulawesi Tengah cenderung konstan, walaupun pada akhir periode 2020. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harga yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, dan selanjutnya menurun pada tahun 2018 dan meningkat sangat tipis di angka Rp 12.600 – Rp 12.900 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat petani dalam menyediakan bahan pangan utama

ini cukup baik. Selain itu intervensi program pemerintah dalam pembagian dan penjualan beras mampu menekan peningkatan harga beras.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend perkembangan harga beras yang konstan empat tahun di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan utama di Sulawesi Tengah cukup efektif pelaksanaannya. Selanjutnya intervensi program dan kegiatan tetap diberikan ke masyarakat miskin dan diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran produk dari masyarakat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya peningkatan pada tahun 2017 dan penurunan harga beras di Sulawesi Tengah berbanding lurus dengan penurunan harga beras secara nasional. Perbedaannya terletak pada tingginya fluktuasi dalam perubahan harga di Provinsi Sulawesi Tengah. Kesamaan yang ditunjukkan baik nasional maupun tingkat provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada tahun 2019 dan 2020, dimana nilai harga beras nyaris sama di angka Rp 13.000 per kilogram.

3.2.5.2. Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok

Barang yang paling sering dikonsumsi oleh manusia adalah bahan pokok, yang merupakan menu wajib untuk manusia. Bahan pokok adalah kebutuhan sehari-hari manusia yang harus dipenuhi. Bahan pokok juga biasa disebut dengan sembako yang merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang namanya sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan manusia terutama masyarakat Indonesia.

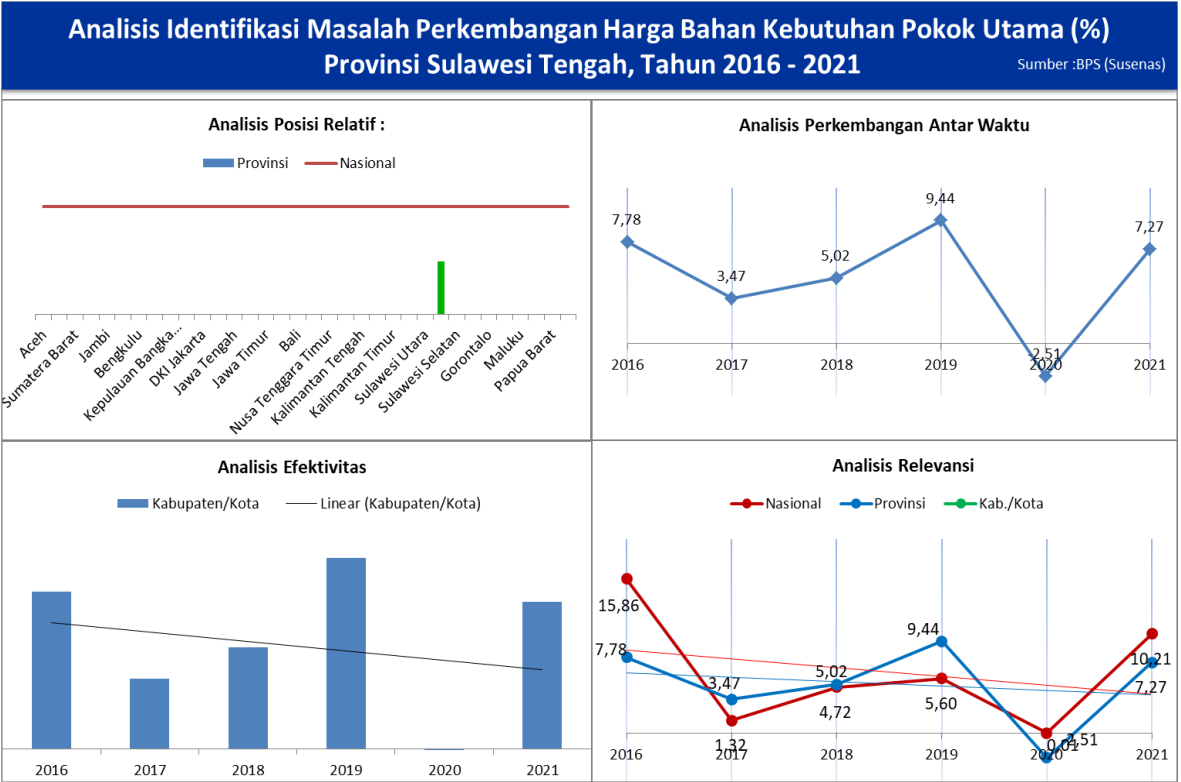
Kesembilan jenis sembako adalah sebagai berikut: 1) Beras, Sagu dan Jagung. 2) Gula pasir. 3) Sayur-sayuran dan Buah-buahan. 4) Daging Sapi, Ayam, dan Ikan. 5) Minyak Goreng dan Margarin. 6) Susu. 7) Telur. 8) Minyak Tanah atau gas ELPIJI. 9) Garam berIodium dan berNatrium. Pengukuran perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dalam dokumen ini adalah perkembangan harga ke seluruh bahan pokok dalam satuan persen. Selengkapnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.41.

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.40 menunjukkan bahwa persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2020 (7,27 persen), berada di bawah rata-rata nasional sebesar 10,21 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah regional SULAMPUA, harga kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Tengah relatif lebih murah dibanding harga kebutuhan pokok di provinsi Maluku, dan dua Papua. Ini berarti bahwa baik secara nasional maupun regional, harga kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Tengah berada pada kategori sedang.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.40 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, walaupun pada akhir periode 2020 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harga yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, dan selanjutnya menurun tajam pada tahun 2020 dan meningkat kembali sampai 7,27 persen pada awal tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Tengah secara umum tidak stabil. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh musim untuk tanaman pertanian dan hasil peternakan terutama cabe, gula, minyak goreng dan daging. Secara keseluruhan di Indonesia terjadi peningkatan harga cabe dan komoditi lainnya terutama menjelang hari besar keagamaan.



Gambar 3.41

Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang berfluktuatif di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah belum efektif pelaksanaannya. Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan terutama operasi pasar perlu dilakukan bersamaan dengan pengaturan produksi pertanian yang baik dan peningkatan program resi gudang untuk mempertahankan ketersediaan serta pengolahan hasil pertanian.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya terdapat relevansi yang kuat antara persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Sulawesi Tengah dengan persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok secara nasional baik dalam hal waktu dan fluktuasi harganya. Perbedaannya hanya terletak pada tingginya angka persentase fluktuasi dalam perubahan harga pada skala nasional.

Todaro mengembangkan konsep nilai yang ditawarkan Gaulet yang menyatakan nilai tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan, dimana sasaran pembangunan setidaknya harus mencakup tiga hal yaitu: pertama, pembangunan harus mampu menjamin adanya peningkatan kemampuan penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan lingkungan yang naik; kedua, pembangunan harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik dengan memerhatikan sisi budaya dan kemanusiaan; dan ketiga perluasan jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan mengurangi ketergantungan, tidak hanya pada orang lain melainkan juga pada kebodohan dan penderitaan.

Konsekuensi dari tiga sasaran pembangunan ekonomi diatas maka strategi pembangunan harus diarahkan pada: pertama, pemerintah secara terus menerus harus mampu meningkatkan kemampuan produksi penduduk hingga mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Peningkatan produktivitas akan membuat masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya; kedua, perkembangan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Pemenuhan akan kebutuhan

tenaga kerja sebaiknya dipenuhi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal; ketiga, pembangunan harus mampu mengurangi dan memperkecil ketimpangan antar kelompok yang ada di masyarakat; dan keempat pembangunan harus mampu mendorong terciptanya perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

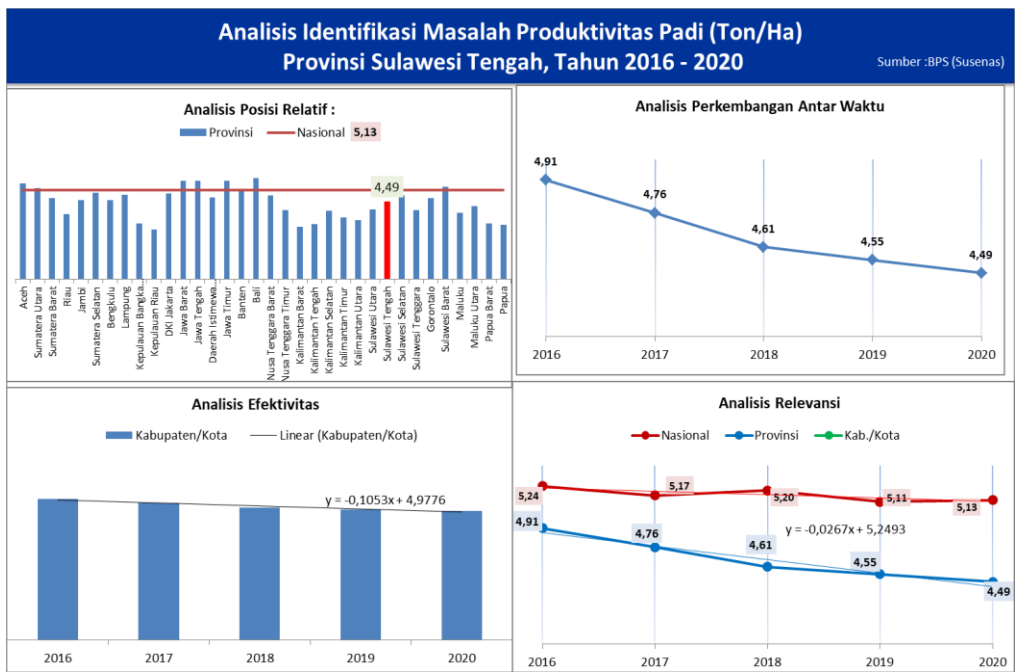
Kesimpulan

- 1. Indikator ketahanan pangan terkait harga beras menunjukkan bahwa rata-rata harga beras di Sulawesi Tengah lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Namun dalam skala regional Sulawesi, rata-rata harga beras Sulawesi Tengah hanya lebih rendah dibanding Provinsi Maluku. Perbedaan ini disebabkan karena hampir seluruh provinsi di regional Sulawesi memiliki ketersediaan pangan terutama beras yang cukup besar dibanding tingkat konsumsi masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan diversifikasi pangan seperti jagung, ubi kayu dan sagu oleh masyarakat juga dapat menurunkan harga beras.
- 2. Namun demikian di akhir tahun 2020 terdapat kecenderungan peningkatan harga beras di Sulawesi Tengah maupun nasional. Ini menunjukkan bahwa ada relevansi permasalahan pengangguran terbuka baik nasional maupun Sulawesi Tengah.
- 3. Sementara harga bahan pokok cenderung mengalami fluktuasi baik secara nasional maupun Sulawesi Tengah. Namun jika diperbandingkan antara nasional dan Sulawesi Tengah, rata-rata persentase perubahan harga bahan kebutuhan pokok nasional masih lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah.

3.2.6 Bidang Pertanian dan Perikanan

3.2.6.1. Produktivitas Tanaman Padi

Ketersediaan pangan (*food availability*) merupakan jumlah pangan yang tersedia cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Produksi sendiri dalam suatu daerah tergantung kemampuan suatu lahan dalam menghasilkan produksi yang tertinggi atau disebut dengan produktivitas. Produktivitas padi sebagai salah satu tanaman pangan utama di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kesuburan tanah, penggunaan bibit, pemakaian pupuk sesuai anjuran, kondisi serangan hama dan penyakit, ketersediaan air irigasi, pemeliharaan, ketersediaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan mesin dan alat pertanian serta iklim. Hasil analisis permasalahan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.42

Analisis Identifikasi Masalah Produktivitas Padi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.42 menunjukkan bahwa produktivitas padi Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional. Produktivitas padi tertinggi berada di Bali dan umumnya provinsi di Jawa. Sementara luar Pulau Jawa dan Bali, produktivitas padi tertinggi atau di atas nasional hanya di Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat. Kondisi ini disebabkan karena kondisi tanah di Sulawesi Tengah yang kurang subur dan umumnya memiliki dataran rendah yang relative terbatas, serta kecenderungan jenuhnya tanah dalam penggunaan pupuk anorganik. Dibanding 9 provinsi di wilayah SULAMPUIA, produktivitas padi Sulawesi Tengah berada pada peringkat keempat tertinggi setelah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.42 menunjukkan bahwa produktivitas padi di Sulawesi Tengah dalam tahun 2016-2020 mengalami penurunan sebesar 0,42 ton/ha. Berdasarkan data produksi padi pada rentan tahun yang sama, juga terjadi penurunan dari 1.086.074 ton pada tahun 2016 menjadi 810.108,26 ton tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 25,41 persen. Demikian pula luas panen padi terjadi penurunan dari 221.272 ha tahun 2016 menjadi 180.509,55 ha pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 18,42 persen. Ini menunjukkan bahwa perubahan penurunan produksi lebih besar dibanding perubahan penurunan luas panen padi yang menyebabkan produktivitas padi juga mengalami penurunan. Penurunan luas lahan diduga disebabkan adanya konversi lahan padi sawah menjadi areal pemukiman terutama yang berada di dekat wilayah perkotaan dan pusat pemukiman serta dekat jalan raya.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan utama terutama padi di Sulawesi Tengah belum efektif pelaksanaannya. Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan terutama pencegahan dan penegakkan aturan terkait pemanfaatan ruang untuk pertanian dengan komoditas strategis perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan pengaturan produksi pertanian tanaman pangan yang sesuai anjuran teknologi pertanian melalui penerapan pola tanam dan penggunaan pupuk organik guna mengurangi kejenuhan tanah dan peningkatan kepadatan tanah pada lahan akibat penggunaan pupuk anorganik berlebihan.

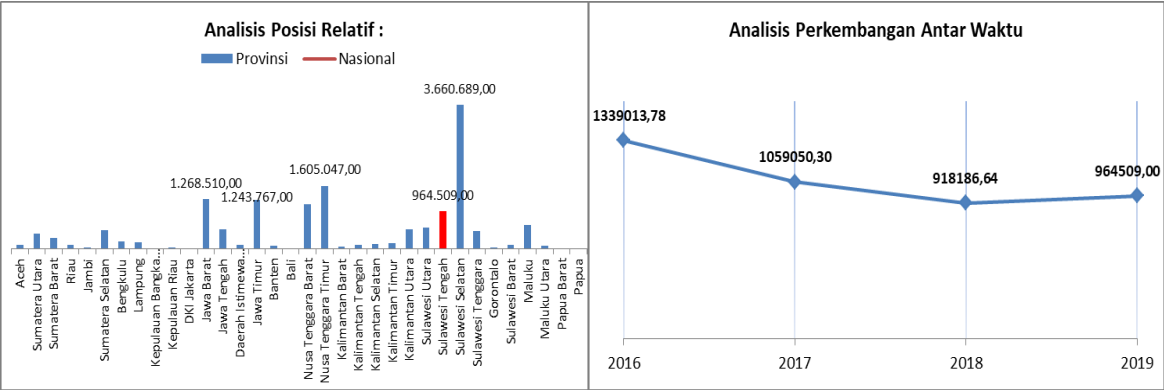
Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya terdapat relevansi yang kuat antara penurunan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan produktivitas padi secara nasional baik dalam kurun waktu 2016-2020. Namun, perbedaannya terletak pada koefisien perubahan produktivitas padi (0,105 ton/ha) setiap tahun di Provinsi Sulawesi Tengah lebih besar dibanding perubahan produktivitas padi (0,026 ton/ha) pada skala nasional. Penurunan produktivitas padi secara nasional pada tahun 2020 diduga disebabkan penurunan aktivitas ekonomi (melalui *social distancing* atau Penerapan Pembatasan Kegiatan Skala Mikro) secara umum akibat pandemic covid-19 yang secara tidak langsung berdampak pada penyaluran sarana produksi dan hasil pertanian.

3.2.6.2. Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan merupakan salah satu bagian dari sumberdaya ekonomi maritim, yang keberadaannya sangat strategis dalam memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Bahkan, se-level Badan Pangan Dunia/FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nation) telah memprediksi bahwa sub sektor perikanan budidaya akan menggeser peran perikanan tangkap menjadi salah satu sumberdaya yang akan sangat diandalkan ke depan utamanya dalam memenuhi

kebutuhan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat global. Dengan semakin tingginya permintaan terhadap produk perikanan, negara-negara di dunia dihadapkan pada kekhawatiran adanya fakta bahwa perikanan tangkap yang dilakukan secara over eksploitatif lambat laun akan menurunkan potensi lestari sumberdaya ikan yang ada. Fenomena *over fishing* dan kerusakan habitat akan menjadi momok sebagai penyebab menurunnya suplai produksi ikan, ini jika tidak dilakukan pengelolaan secara bertanggungjawab. Kekhawatiran atas fakta diatas, akan menggiring pada suatu keputusan bahwa ke depan sub sektor perikanan budidaya.



Gambar 3.43

Analisis Identifikasi Masalah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.43 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan keenam terbesar di Indonesia, tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam wilayah SULAMPUA, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki produksi perikanan budidaya berada pada urutan kedua terbesar. Jika ditinjau dari sisi komoditas yang dihasilkan baik di Sulawesi Tengah maupun di Sulawesi Selatan, rumput laut merupakan komoditi perikanan budidaya yang dominan diproduksi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

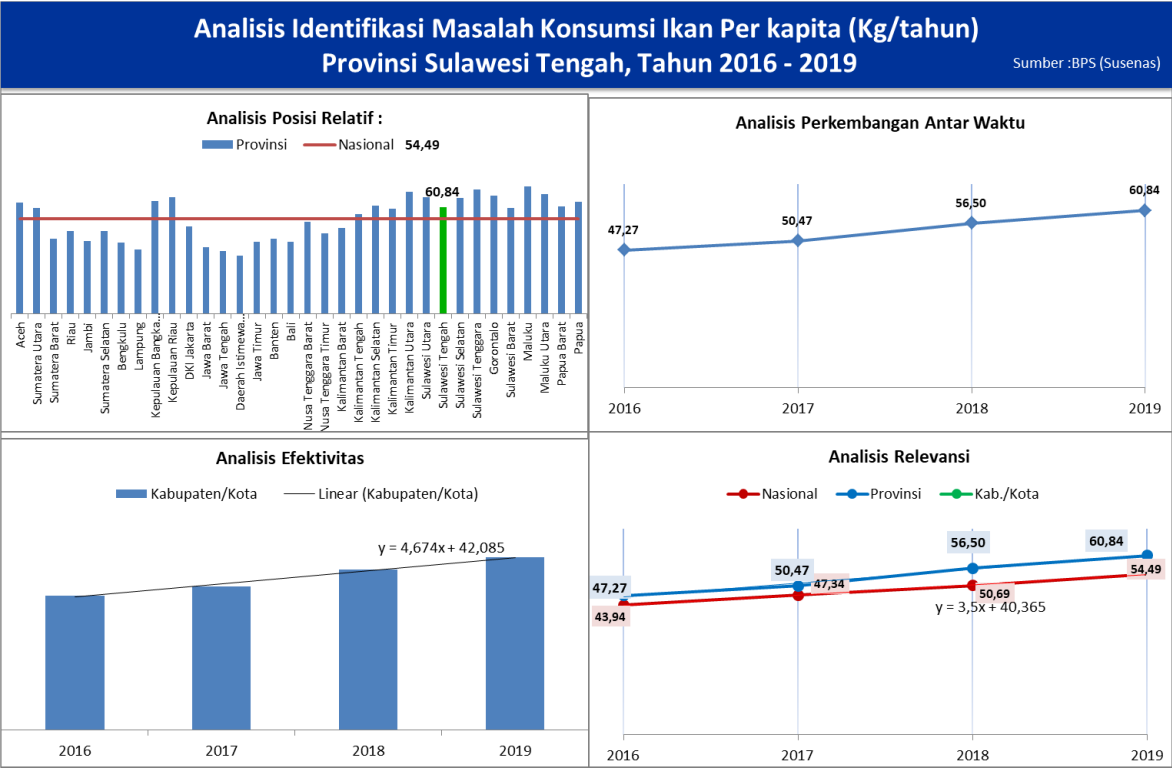
Gambar 3.43 menunjukkan bahwa secara umum produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2016-2019 kecenderungan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.339.013,78 ton menjadi 964.509,0 ton, penurunan terendah pada tahun 2018. Penurunan produksi terutama pada komoditi rumput laut yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim, kejadian gempa besar dan tsunami pada tahun 2018 yang menyebabkan rasa takut pada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan budidaya di wilayah pesisir. Selain itu, harga rumput laut kering yang cenderung berfluktuasi menyebabkan masyarakat berhati-hati dalam memelihara rumput laut dengan tujuan menghindari kerugian.

3.2.6.3. Konsumsi Ikan

FAO dalam rilis datanya menyimpulkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat dunia cenderung naik secara signifikan, sementara konsumsi daging merah justru memperlihatkan trend yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya fenomena pergeseran orientasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih mengedepankan pada konsumsi pangan yang aman dan menyehatkan atau dengan kata lain terjadi pergeseran pola konsumsi dari produk pangan berbasis daging merah ke arah produk pangan yang berbasis daging putih dalam hal ini ikan. Dari sisi ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, konsumsi ikan telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang

mengandung protein berkualitas tinggi. Konsumsi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, rendahnya suplai ikan khususnya ke daerah-daerah pedalaman akibat kurang lancarnya distribusi pemasaran ikan, belum berkembangnya teknologi pengolahan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen dan sarana pemasaran serta distribusi masih terbatas baik dari segi kualitas (Ronny, 2013). Hasil analisis permasalahan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.44.



Gambar 3.44
Analisis Identifikasi Masalah Konsumsi Ikan Per Kapita di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.44 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat Sulawesi Tengah cukup tinggi (60,84 kg/kapita/tahun) dan berada di atas rata-rata nasional yakni 54,49 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya, Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke 13 terbaik di Indonesia, tertinggi konsumsi ikan di Provinsi Maluku dan terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara regional, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia memiliki konsumsi ikan yang sangat tinggi dibanding Kawasan Barat dan Tengah Indonesia.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.44 menunjukkan bahwa trend konsumsi ikan penduduk Sulawesi Tengah yang meningkat dalam tahun 2016 sampai 2020, dimana terjadi perubahan peningkatan sebesar 20 kg/kapita. Tren konsumsi ikan perkapita yang cenderung terus naik mengindikasikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah telah mengalami pergeseran paradigma pola konsumsi sebagaimana negara-negara lain di dunia. Hal ini juga bisa dilihat bahwa ternyata produk ikan memberikan share dominan terhadap konsumsi protein hewani yaitu sebesar 57,2 persen. Nilai ini jauh mengungguli susu/telur dan daging, yang masing-masing hanya memberikan share sebesar 23,2 persen dan 19,6 persen (SUSENAS-BPS, 2010).

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend perkembangan konsumsi ikan yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar di Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari sisi peningkatan gizi dan pemenuhan pangan bagi masyarakat Sulawesi Tengah sudah efektif pelaksanaannya.

Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan sebaiknya dikembangkan ke diversifikasi konsumsi ikan ke variasi produk olahan ikan yang higienis dan sehat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya terdapat relevansi yang kuat antara peningkatan konsumsi ikan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan peningkatan konsumsi ikan secara nasional dalam kurun waktu 2016-2020.

Namun, perbedaannya terletak pada koefisien perubahan peningkatan konsumsi ikan (4,67 kg/kapita) setiap tahun di Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi dibanding konsumsi ikan skala nasional (3,5 kg/kapita). Peningkatan konsumsi ikan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan secara nasional yang diikuti kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas.

Kesimpulan

1. Penurunan produktivitas padi dalam lima tahun di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi perhatian bersama terutama OPD teknis dalam rangka menyediakan kebutuhan pangan di Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertahankan lahan-lahan sawah produktif, penerapan pola tanam dan penggunaan pupuk organik guna menjaga tingkat kesuburan tanah.
2. Diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama perdagangan perikanan budidaya terutama rumput laut guna meningkatkan harga komoditi di tingkat pembudidaya.
3. Selain itu diperlukan upaya-upaya pemerinatah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memanfaatkan potensi kawasan pesisir dan lautan dalam pengembangan perikanan budidaya terutama udang, bandeng, kerapu dan bawal serta perikanan budidaya air tawar melalui komoditi ikan mas, nila bawal air tawar guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan ikan, dimana produksi perikanan tangkap stagnan dan mengalami penurunan.
4. Peningkatan produksi perikanan dapat diikuti dengan peningkatan program gemar makan ikan guna memenuhi kebutuhan protein masyarakat Sulawesi Tengah dan penyerapan pasar perikanan dari pembudidaya. Juga diperlukan upaya peningkatan budidaya air tawar dan ikan hias endemic untuk ikan yang bernilai tinggi seperti sidat dan Banggai Kardinal Fish, sekaligus mempertahankan kelestarian ikan endemic Sulawesi Tengah.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Analisis Determinan Kemiskinan

Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Teori Perubahan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan.

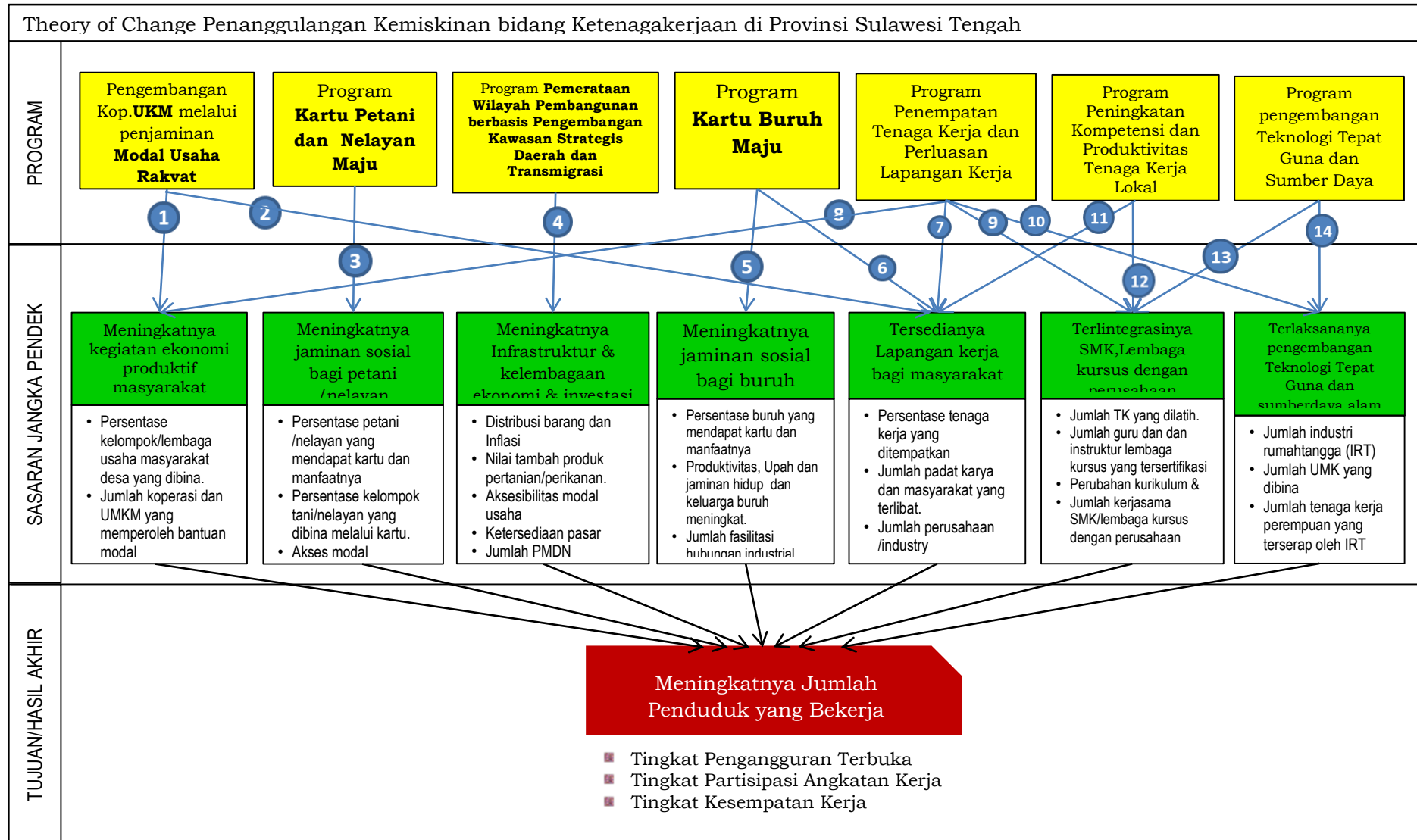
Teori Perubahan menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat dalam suatu inisiatif, yaitu, hasil jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Perubahan yang diidentifikasi dipetakan - sebagai "jalur hasil" - menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis dengan yang lainnya, serta alur kronologis. Hubungan antara hasil dijelaskan oleh "alasan" atau pernyataan mengapa satu hasil dianggap sebagai prasyarat untuk yang lain.

4.1.1. Theory of Change (ToC)/Logika Program

Theory of Change (ToC)/Logika Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah diurai dalam bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dan Kemiskinan. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

4.1.1.1. Analisis ToC Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.1. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan keterkaitan program penanggulangan kemiskinan melalui bidang ketenagakerjaan dengan sasaran kinerja yang diperoleh pada periode 2016-2020 adalah:

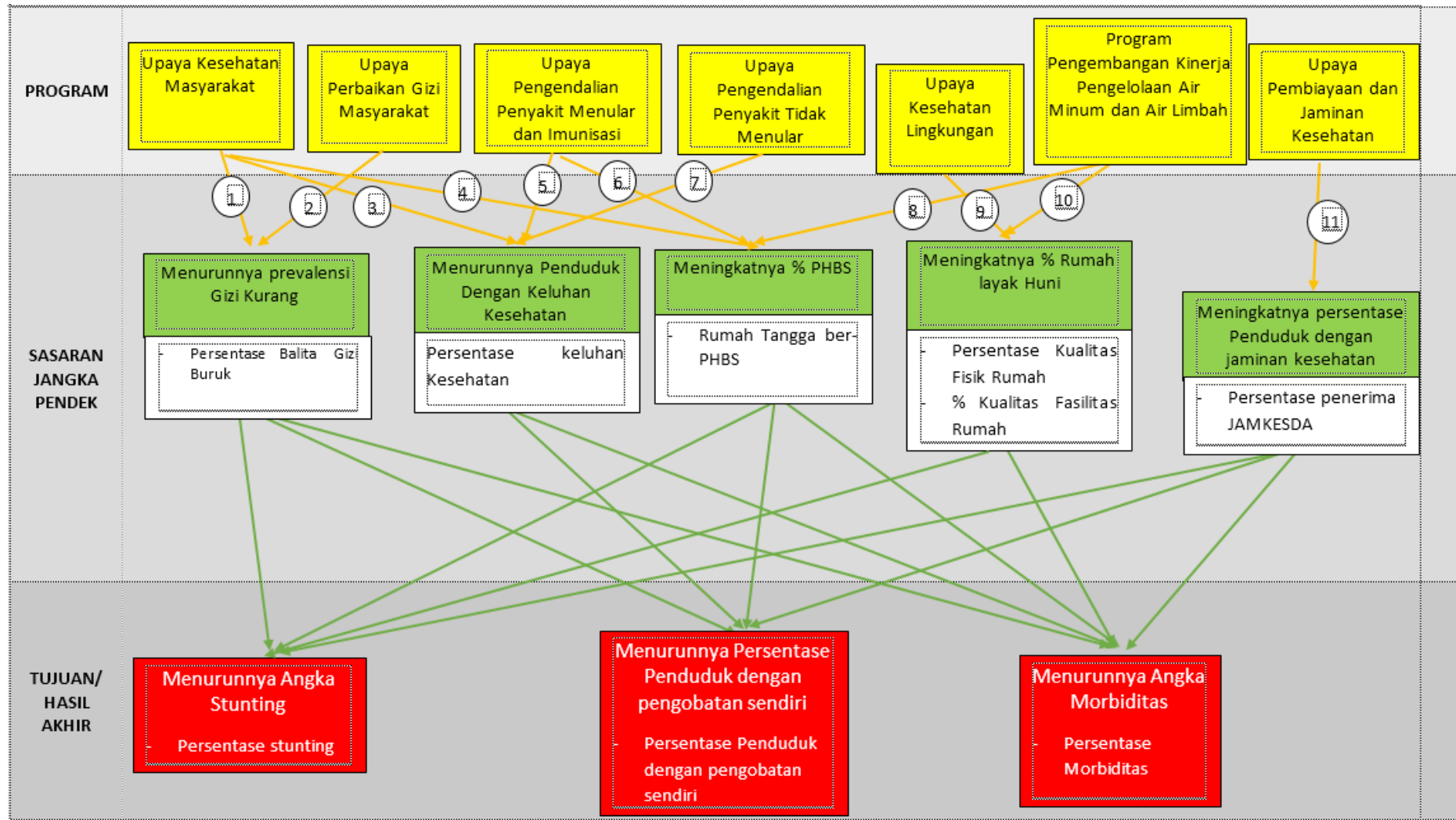
1. Program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produk produktif masyarakat. Indikator jangka pendek dari sasaran program tersebut adalah meningkatnya persentase kelompok usaha mikro (petani, nelayan, peternak dan usaha pengolahan hasil pertanian), dan kelompok lembaga non formal (kelompok perempuan dan pemuda, karang taruna, dan penyandang disabilitas). Selain itu program tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus peningkatan kapasitas modal usaha. Peningkatan jumlah jenis, modal skala usaha pertanian, koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan selanjutnya kesejahteraan masyarakat.
2. Selain menumbuhkan UMKM, program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan calon wirausaha.
3. Program pemberian kartu petani dan nelayan maju ditujukan untuk meningkatkan jaminan social bagi masyarakat petani, peternak dan nelayan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah petani, peternak dan nelayan yang mendapatkan kartu dan jaminan sosial baik untuk jaminan keberlanjutan usaha, jaminan pendidikan dan kesehatan. Kepemilikan kartu jaminan social ini juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi mereka untuk mengakses modal dari lembaga perkreditan dan perbankan. Indikator sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mempertahankan kesempatan kerja di tingkat pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan.
4. Program pemerataan wilayah dan pembangunan berbasis pengembangan kawasan strategis daerah dan transmigrasi memiliki sasaran untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka memperlancar distribusi barang, membangun kelembagaan ekonomi guna mendukung peningkatan nilai tambah produk dan skala usaha dan investasi usaha agroindustri di daerah pedesaan. Lancarnya distribusi barang dari produsen di pedesaan ke pusat pasar diharapkan dapat menurunkan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Keterkaitan antara program pengembangan kawasan dan indikator ketenagakerjaan adalah pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi dan investasi di kawasan strategis dan transmigrasi dapat menyediakan lapangan kerja di pedesaan, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan usaha mikro dan kecil sehingga keberlanjutan pekerjaan di pedesaan tetap terjaga, meningkatkan TPAK serta menurunkan tingkat pengangguran di wilayah perdesaan.
5. Program pemberian kartu buruh maju ditujukan untuk meningkatkan jaminan social bagi buruh. Program ini diharapkan mampu meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi buruh terutama bagi jaminan pendidikan dan kesehatan.
6. Indikator sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, produktivitas tenaga kerja terutama buruh, dan mempertahankan keberlanjutan hubungan antara pekerja dan perusahaan sehingga menekan angka pengangguran.
7. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Indikator sasaran jangka pendek terkait program ini adalah meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di daerah perkotaan dalam bentuk program padat karya yang sifatnya mendukung pendapatan kepala rumah tangga oleh anggota keluarga.

8. Program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan juga ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di wilayah pedesaan. Indikator sasaran jangka pendek lainnya adalah adanya kemudahan investor dalam menginvestasikan modalnya bagi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tumbuhnya kegiatan usaha ekonomi produktif dan penciptaan wirausaha baru diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
9. Sasaran lain program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan juga ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan perusahaan dalam penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan. Perusahaan berpartisipasi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan perusahaan, sehingga penempatan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan pekerja.
10. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan sumberdaya alam local.
11. Program kompetensi dan produktivitas memiliki indikator sasaran jangka pendek bagi penciptaan lapangan, dimana hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah diharapkan dapat mempercepat penyerapan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan local dan nasional.
12. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja memiliki indicator sasaran untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja local, dan peningkatan dan jumlah guru SMK serta instruktur lembaga pelatihan. Kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdampak pada meningkatnya kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan perusahaan/industry.
13. Indikator sasaran jangka pendek program peningkatan pengembangan teknologi tepat guna dan sumberdaya alam yakni terintegrasinya lembaga pendidikan dan pelatihan dengan masyarakat usaha dan yang berpotensi sebagai wirausaha baru dalam menyediakan teknologi pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Sasaran akhir program ini melalui indicator jangka pendek adalah penciptaan lapangan (kesempatan) kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
14. Sasaran program pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam adalah meningkatnya jumlah usaha-usaha skala rumah tangga (mikro), kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumberdaya alam local, dan ditindaklanjuti dengan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Sasaran program ini pengembangan teknologi tepat guna umumnya ditujukan pada masyarakat pedesaan terutama kelompok perempuan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berbasis pengolahan komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.

4.1.1.2. Analisis ToC Bidang Kesehatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.

Theory of Change Bidang Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah



Gambar 4.2. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah

A. Keterangan (Kegiatan Program):

1. Promosi tentang makanan bergizi,
2. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga kurang mampu
3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bagi keluarga kurang mampu
4. Kegiatan yang berpengaruh langsung pada PHBS bagi keluarga kurang mampu
5. Program imunisasi lengkap bagi keluarga kurang mampu
6. Bimbingan dan pengendalian penyakit menular bagi keluarga kurang mampu
7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa bagi keluarga kurang mampu
8. Kesadaran pemanfaatan air dengan kualitas yang baik bagi keluarga kurang mampu
9. Penyediaan dan pengamanan kualitas air dan sanitasi bagi keluarga kurang mampu
10. Penyediaan akses air minum bagi keluarga kurang mampu
11. Penambahan jumlah penerima JAMKESDA bagi keluarga kurang mampu.

B. Prioritas Intervensi

Logika program (*Theory Of Change*) bidang kesehatan menunjukkan bahwa untuk menurunkan angka stunting memiliki 4 determinan kunci yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang, meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi keluarga kurang mampu, meningkatnya persentase rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan persentase keluarga kurang mampu atas jaminan kesehatan.

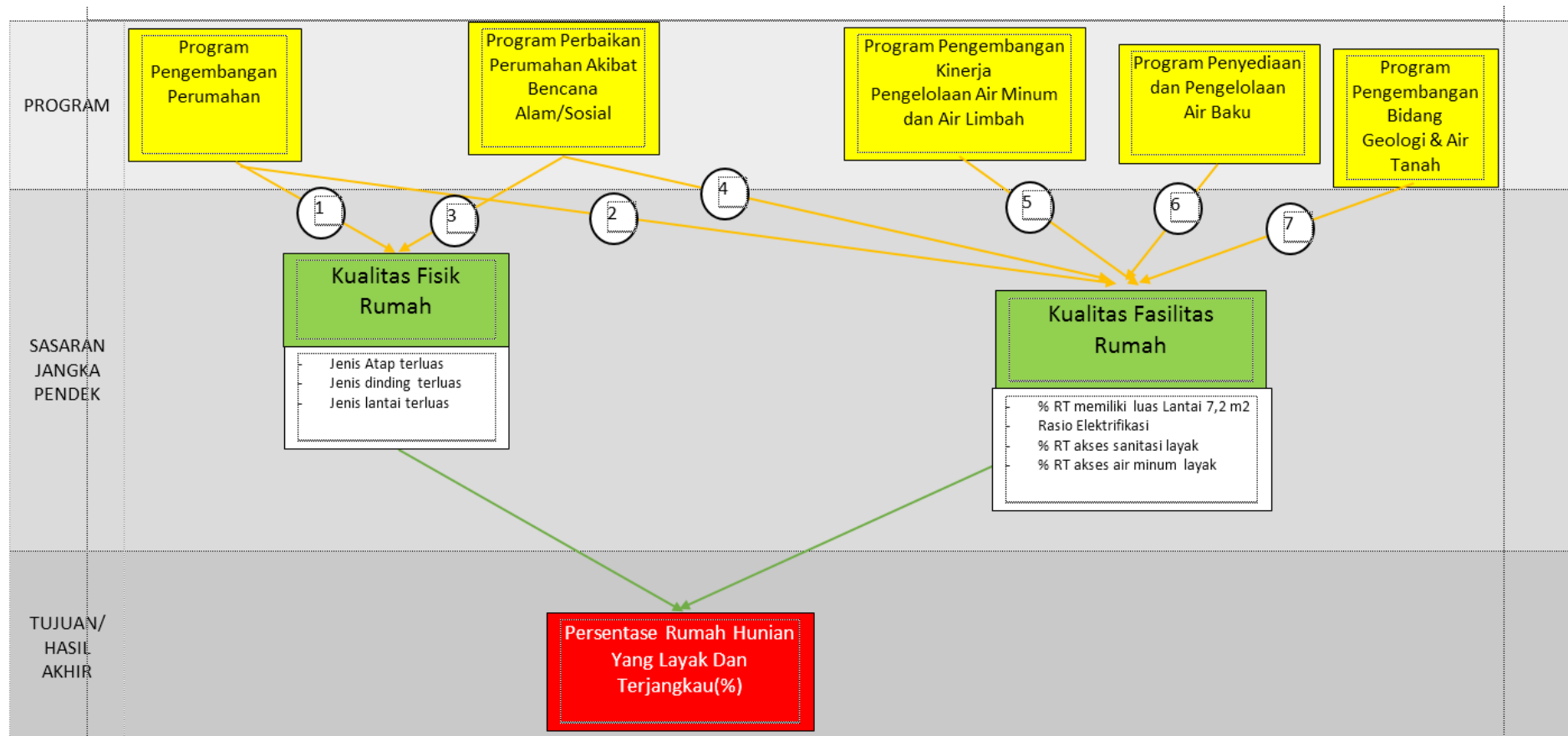
Berbeda dengan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri. Determinan kuncinya antara lain menurunnya prevalensi gizi kurang, menurunnya persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan persentase penduduk kurang mampu dengan jaminan kesehatan.

Sementara itu, untuk menurunkan tingkat kesakitan penduduk, memiliki determinan yang lebih kompleks yaitu menurunkan prevalensi gizi kurang, menurunkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, meningkatkan PHBS, meningkatnya % rumah layak huni dan meningkatnya penduduk dengan jaminan kesehatan.

4.1.1.3. Analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.

Theory of Change Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar Propinsi Sulawesi Tengah



Gambar 4.3. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Infrastruktur Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah

A. Keterangan (Kegiatan Program)

1. Penyediaan rumah sehat bagi keluarga kurang mampu
2. Penyediaan fasilitas rumah bagi keluarga kurang mampu
3. Rehab rumah bagi korban bencana
4. Penyediaan fasilitas rumah bagi korban bencana
5. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi keluarga kurang mampu
6. Penyediaan air baku bagi keluarga kurang mampu
7. Penyediaan akses air minum layak di kawasan yang tidak terakses jaringan perpipaan bagi keluarga kurang mampu.

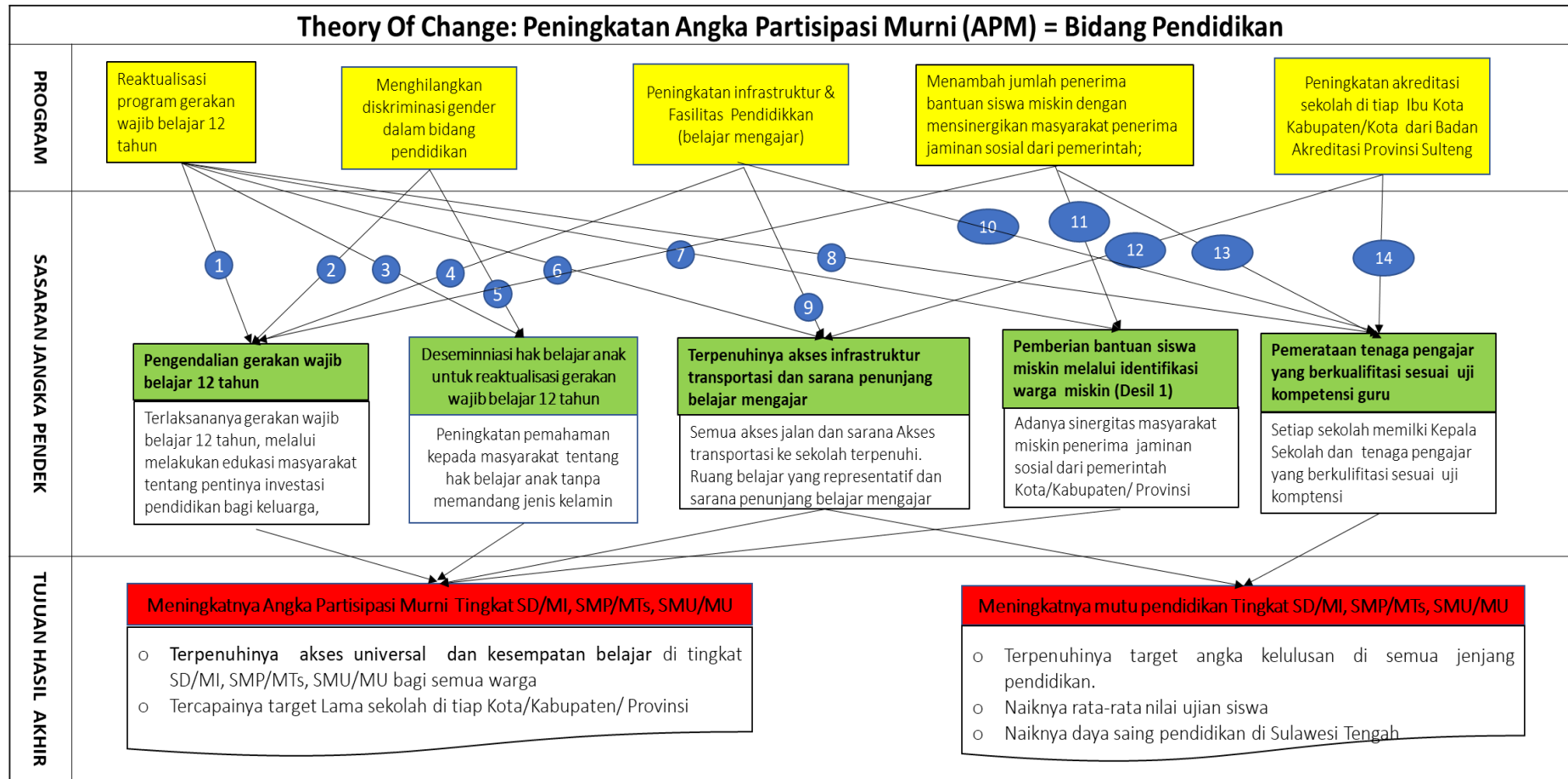
B. Prioritas Intervensi

Untuk meningkatkan presentase rumah layak huni, memiliki 2 determinan yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah memiliki 3 determinan yaitu jenis atas terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sementara itu, kualitas fasilitas rumah dipengaruhi oleh luas lantai rumah, penggunaan penerangan rumah (Listrik), ketersediaan air minum layak dan ketersediaan sanitasi layak.

4.1.1.4. Analisis ToC Bidang Pendidikan

Program Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)

- o Secara umum data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MD kisaran usia 7 s/d 12 tahun kurun waktu 2016-2020 rata-rata capainnya 92,89%, masih dibawah capaian rata-rata nasional 97,38%. Artinya masih terdapat 7,11 % usia 7 s/d 12 tahun belum terdaftar di sekolah pendidikan formal setara SD/MI.
- o Jika merujuk pada data APM jenjang pendidikan SMP/MTs kisaran usia 13 s/d 15 tahun waktu 2016-2020 rerata ta capainnya 72,99 %, masih dibawah angka APM nasional 78,69%. Masih terdapat 25,58 % penduduk usia 13 s/d 15 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMP/MTs di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- o Data APM Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 kisaran usia 16-18 tahun capaiannya rata-rata 64,26 % melebihi capaian rata-rata nasional 60,61%. Namun masih terdapat permasalahan karena 35,74% anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMA/MA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 4.4. Theory Of Change Peningkatan Angka Partisipasi Murni(APM) = Bidang Pendidikan

Sebagaimana yang telah diurai pada Bab III tentang Profil Kemiskinan, masalah pendidikan menjadi salah satu indikator penyebab tinggi angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber masalah tersebut bermuara pada soal APM, dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, apalagi di tingkat SMU/MU. Data BPS 2020 menunjukkan, masih terdapat 35,74% anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMA/MA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Program Utama

Dari fakta seperti itu, hingga dalam analisis Theory Of Change Bidang Pendidikan yang menyoroti secara khusus soal APM di Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan lima determinan kunci, yang akan menjadi program bidang pendidikan yang diharapkan akan menaikkan APM masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima program utama bidang pendidikan tersebut adalah:

1. Reaktualisasi gerakan program Wajib Belajar 12 Tahun
2. Menghilangkan diskriminasi gender dalam bidang pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur & Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar)
4. Menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah;
5. Peningkatan akreditasi sekolah di tiap Ibu Kota Kabupaten/Kota dari Badan Akreditasi Provinsi Sulteng.

Hal yang mendasari lahirnya lima program tersebut:

Pertama: Program Reaktuliasi gerakan program wajib belajar 12 Tahun.

Program Wajib Belajar 12 tahun gratis dalam mewujudkan “Indonesia Pintar” mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2015. Plaksanaan program wajar 12 tahun diharapkan dapat berjalan pada pendidikan tingkat dasar sampau menengah. Untuk mewujudkan program wajib belajar tersebut dibutuhkan instrumen pendukung, mulai dari perencanaan, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan dilapangan.

Dasar hukum yang mendasari lahirnya program Wajib Belajar belajar 12 tahun adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tap MPR No.9 tahun 2007 Tentang anggaran dana Pendidikan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan.

Pencanangan program Wajar 12 tahun tersebut, dalam pelaksanaannya mempunyai konsekuensi. Konsekwensi pertama adalah semua anak bangsa akan wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah. Konsekwensi kedua, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan biaya (APBN/APBD) dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun gratis.

Fakta di lapangan menunjukkan, walaupun terdapat program wajib belajar 12 tahun dengan dasar hukum yang melandasinya, masih terdapat 35,74% anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMA/MA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan fakta seperti itu, maka diperlukan adanya program Reaktuliasi gerakan program wajib belajar 12 Tahun.

Kedua: Program Menghilangkan diskriminasi gender dalam bidang pendidikan

Salah satu faktor hingga tinggi angka putus sekolah di masyarakat Sulawesi Tengah adalah masalah sistem sosial maupun budaya masyarakat, khususnya masalah diskriminasi gender dalam bidang pendidikan. Masalah tersebut lebih dominan terjadi pada lingkungan masyarakat miskin perkotaan maupun pedesaan.

Dalam satu lingkungan keluarga di masyarakat, masih dijumpai anak lelaki yang selalu diprioritaskan untuk bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Fakta ini bisa dilihat pada buku Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021, terlihat persentase penduduk Usia 7–24 tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur sekolah, dan partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018–2020, untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah, jenis kelamin laki-laki hanya 0,92%, sementara perempuan 1,16% tidak atau belum pernah sekolah.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 70,64% laki-laki dan 73% perempuan terkategori masih sekolah, namun untuk kategori tidak sekolah pada rentang usia 7-24 tahun dominan laki-laki, 28,45 % dan perempuan 25,85%. Dengan argumentasi seperti itu hingga diperlukan adanya program menghilangkan diskriminasi gender dalam bidang pendidikan pada kaum miskin kota dan pedesaan.

Ketiga: Program Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar)

Salah satu masalah yang menjadi pemicu terjadinya penurunan APM di level sekolah menengah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah terbatasnya sarana infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar). Data Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021 menunjukkan hal tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018–2020. Untuk kategori SD terdapat 1934 unit bangunannya, mulai menurun pada jenjang pendidikan SMP, 961 unit bangunan dan kembali berkurang menjadi 337 unit bangunan untuk kategori SMA dan 167 sekolah untuk kategori SMK.

Penurunan jumlah bangunan dari tingkat SD sampai SMA dan SMK tersebut berkorelasi dengan penurunan APM dari jenjang Sekolah Dasar hingga sekolah menengah. Data yang ditampilkan tersebut untuk kategori unit bangunan, belum untuk kategori sarana fasilitas pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar. Inilah alasan yang mendasari hingga diperlukan adanya Program Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar).

Keempat: Menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah;

Salah satu sumber masalah angka putus sekolah adalah, soal biaya yang menopang kebutuhan siswa di sekolah. Untuk menunjang peningkatan APM dari level sekolah dasar sampai menengah, diperlukan adanya bantuan siswa miskin berupa bea siswa khusus untuk warga kategori Desil 1. Begitu banyak ditemukan siswa yang memiliki prestasi baik namun bermasalah dalam hal biaya sekolah.

Kelima: Peningkatan akreditasi sekolah di tiap Ibu Kota Kabupaten/Kota dari Badan Akreditasi Provinsi Sulteng

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Variabel utama untuk dinilai dalam akreditasi adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, khusus sekolah negeri yang dinilai, dari 2783 SD hanya 68 sekolah terkategori A, 289 terkategori B dan 187 kategori C. Demikian halnya dengan SMP Negeri, jumlahnya 897 sekolah yang diakreditasi dan hasilnya, hanya 20 sekolah terkategori A dan 88 B serta 69 C. Untuk SMA terdapat

188 sekolah yang dinilai dan hasilnya hanya 4 sekolah terkategori A, 38 kategori B dan 12 sekolah terkategori C.

Fakta ini memperlihatkan bahwa untuk masalah pendidikan di Sulawesi Tengah masih bermasalah untuk beberapa hal, seperti mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

B. Sasaran Jangka Pendek.

Dari lima program utama bidang pendidikan, sasaran jangka pendek yang mau dicapai bertalitemali dengan program utama hingga menjadi kesatuan sistem yang menopang program pendidikan yang bertujuan pada peningkatan APM di Sulawesi Tengah.

1. Pengendalian gerakan wajib belajar 12 tahun

Target yang akan di capai:

Terlaksananya gerakan wajib belajar 12 tahun, melalui melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga,

2. Deseminniasi hak belajar anak untuk reaktualisasi gerakan wajib belajar 12 tahun

Target yang akan di capai:

Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang hak belajar anak tanpa memandang jenis kelamin

3. Terpenuhinya akses infrastruktur transportasi dan sarana penunjang belajar mengajar

Semua akses jalan dan sarana Akses transportasi ke sekolah terpenuhi. Ruang belajar yang representatif dan sarana penunjang belajar mengajar

4. Pemberian bantuan siswa miskin melalui identifikasi warga miskin (Desil 1)

Target yang akan di capai:

Adanya sinergitas masyarakat miskin penerima jaminan sosial dari pemerintah Kota/Kabupaten/ Provinsi

5. Peningkatan akreditasi status sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah

Target yang akan di capai:

Setiap kecamatan memiliki satu sekolah dengan kulifikasi A dari jenjang SD hingga sekolah menengah pertama dan atas.

C. Tujuan Hasil Akhir

Terdapat dua tujuan hasil akhir yang akan dicapai;

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU, dengan utama;

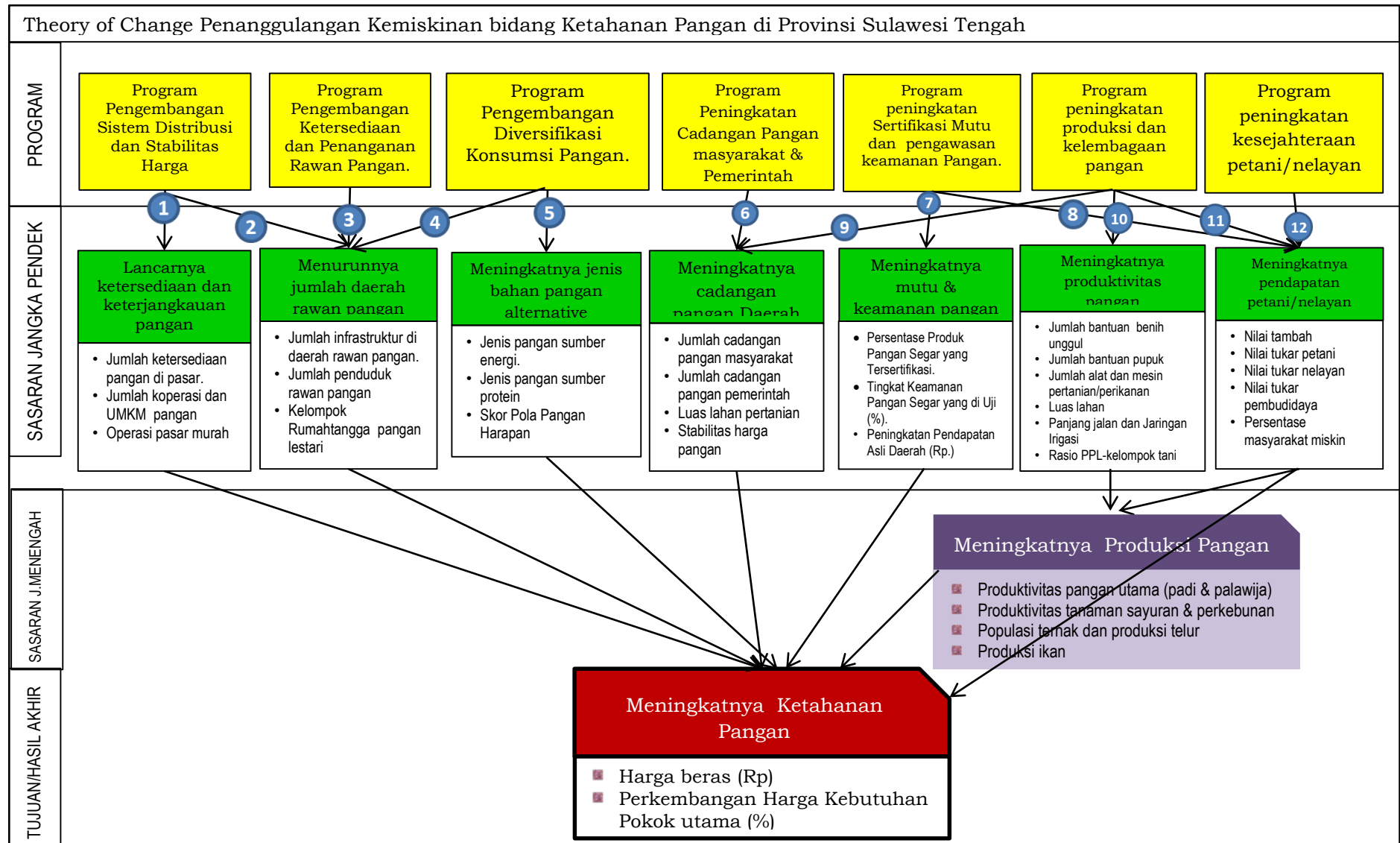
- Terpenuhinya akses universal dan kesempatan belajar di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU bagi semua warga
- Tercapainya target Lama sekolah di tiap Kota/Kabupaten/ Provinsi

2. Meningkatnya mutu pendidikan Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU, dengan target utama;

- Terpenuhinya target angka kelulusan di semua jenjang pendidikan.
- Naiknya rata-rata nilai ujian siswa
- Naiknya daya saing pendidikan di Sulawesi Tengah.

4.1.1.5. Analisis ToC Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.5. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang ketahanan pangan dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020:

1. Lancarnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan sasaran jangka pendek program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan. Kegiatan ini dilakukan secara sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator sasaran jangka pendek yang diperoleh dari pelaksanaan program adalah jumlah ketersediaan stok pangan di pasar, jumlah koperasi dan usaha perdagangan (UMKM) yang difasilitasi pemerintah dalam melakukan operasi pasar murah.
2. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan juga memiliki sasaran jangka pendek dalam menurunkan jumlah daerah rawan pangan. Bentuk indikator sasaran kegiatan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan jumlah infrastruktur di daerah rawan pangan, dan menurunnya jumlah penduduk di daerah rawan pangan.
3. Sasaran penurunan jumlah daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah juga dilakukan melalui program pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Indikator sasaran yang dihasilkan dari program tersebut adalah meningkatnya ketersediaannya infrastruktur yang menunjang penurunan daerah rawan pangan seperti gudang pangan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan dari pusat produksi pangan. Penurunan daerah rawan pangan juga dilakukan dengan membentuk kelompok rumatangga pangan lestari (KRPL) sehingga keberadaan kelompok ini dalam jangka pendek mampu menutupi kebutuhan pangan keluarga.
4. Program pengembangan diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan alternative selain pangan utama pada daerah rawan pangan. Bentuk kegiatan KRPL adalah bantuan bibit dan benih sayuran serta ternak ruminansia yang nantinya hasil kegiatan digunakan untuk subsisten.
5. Penyediaan pangan utama dan alternative umumnya melalui program diversifikasi dilakukan oleh petani, peternak dan nelayan, dan juga oleh rumatangga miskin. Ketersediaan pangan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang mencapai minimal 2.200 kkal, dan sumber protein bagi masyarakat. Terpenuhinya pangan untuk sumber energy dan protein dapat meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan. Indikator kinerja akhir dari pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan adalah selain untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, juga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan protein per kapita penduduk.
6. Program peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah memiliki sasaran untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembelian bahan pangan terutama beras dari petani jika terjadi over produksi di tingkat petani dan melakukan stabilitas harga beras dengan menyalurkan beras di pasar. Peningkatan cadangan pangan pemerintah juga dilakukan oleh pemerintah

pusat melalui impor beras lalu disalurkan ke daerah-daerah rawan pangan atau bagi masyarakat miskin. Tujuan akhir dari program dan kegiatan peningkatan ketersediaan cadangan pangan adalah terjangkau harga beras bagi konsumen.

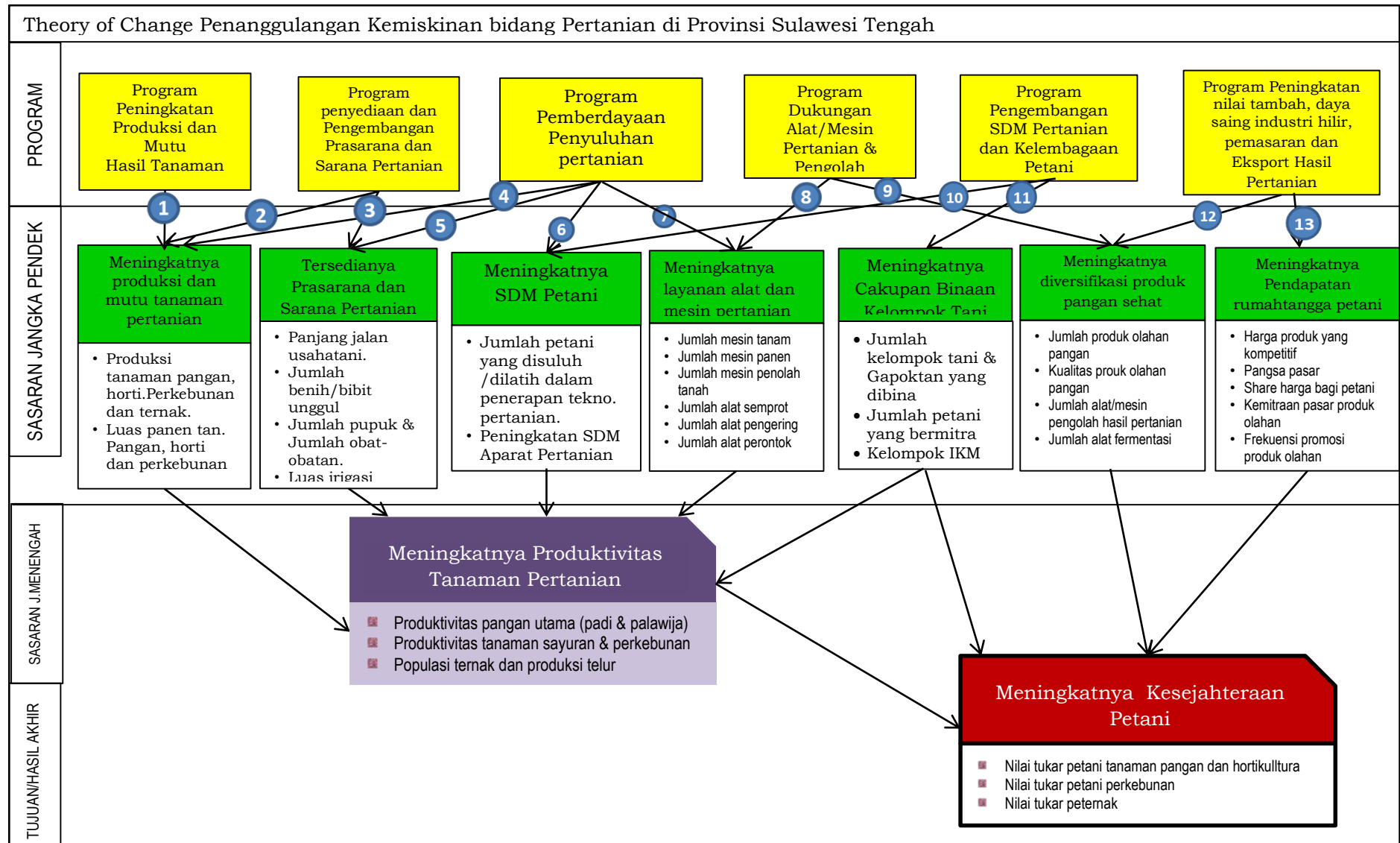
7. Pemerintah Sulawesi Tengah juga memprogram peningkatan sertifikasi mutu dan pengawasan keamanan pangan. Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa indikator jangka pendek yang dihasilkan dalam program ini adalah meningkatnya persentase pangan segar yang tersertifikasi mutunya yang dijual ke pasar, tingkat keamanan pangan segar yang dikonsumsi meningkat dan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah melalui kegiatan sertifikasi pangan.
8. Sasaran jangka pendek lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan program sertifikasi mutu dan pengawasan keamanan pangan adalah meningkatnya pendapatan petani, nelayan, pembudidaya dan industri (usaha) mikro (rumah tangga) dan kecil pengolahan hasil pertanian. Hal ini diperoleh dari meningkatnya nilai tambah produk yang ditimbulkan dari komoditi maupun produk yang sudah teruji mutu dan keamanannya sehingga konsumen memiliki kepercayaan tinggi dalam mengkonsumsi barang yang dihasilkan dan berani membayar dalam nilai yang tinggi.
9. Program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan memiliki sasaran jangka pendek dalam meningkatkan cadangan pangan daerah melalui peningkatan luas lahan tanaman pangan (padi dan palawija) guna meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan bagi petani dijadikan sebagai cadangan pangan pemerintah melalui BULOG.
10. Sasaran jangka pendek program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan lainnya adalah peningkatan produktivitas pangan melalui kegiatan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. Indikator kegiatan tersebut meliputi percontakan sawah baru (ekstensifikasi), jumlah bantuan benih bermutu (unggul) bagi petani setiap jenis komoditi pangan, jumlah bantuan pupuk kepada petani tanaman pangan, jumlah bantuan peralatan dan mesin. Guna mendukung produktivitas dan peningkatan aksesibilitas pasar, selanjutnya dilakukan kegiatan pengembangan jaringan irigasi dan pembangunan jalan usahatani. Hasil akhir yang diperoleh dari meningkatnya produktivitas akibat dari ketersediaan sarana produksi, prasarana jalan dan irigasi serta perbaikan kelembagaan kelompok tani/nelayan adalah meningkatnya produksi pangan utama (padi dan palawija), sayur-sayuran, populasi ternak dan produksi ikan.
11. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan juga merupakan sasaran jangka pendek dari pelaksanaan program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan. Produksi pangan yang tinggi dan penataan

kelembagaan pangan yang baik dan ditunjang oleh harga pangan kompetitif di pasar mampu meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan pembudidaya, serta mampu menurunkan masyarakat miskin.

12. Sasaran jangka pendek program peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani dan nelayan. Indikator kinerja kegiatan yang diperoleh meliputi meningkatnya nilai tambah dari produk pangan yang dihasilkan, dan Nilai Tukar Petani/Nelayan/Pembudidaya yang berada di atas nilai indeks 100. Sasaran jangka menengah dari pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan ini adalah meningkatnya produksi pangan (padi, sayuran, hasil ternak, hasil perkebunan dan ikan). Peningkatan produksi pangan diperoleh dari peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan menyebabkan kemampuan dalam mengorganisasikan usahatani, usaha peternakan dan usaha perikanan menjadi lebih optimal mengingat akumulasi modal yang diperoleh dengan meningkatnya pendapatan dapat mudah dialokasi baik untuk kebutuhan usahanya maupun untuk kebutuhan rumahtangga lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, social, dan pakaian. Sasaran akhir dari program ini adalah stabilitas harga kebutuhan pokok lebih terjaga.

4.1.1.6. Analisis ToC Bidang Pertanian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.6. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah

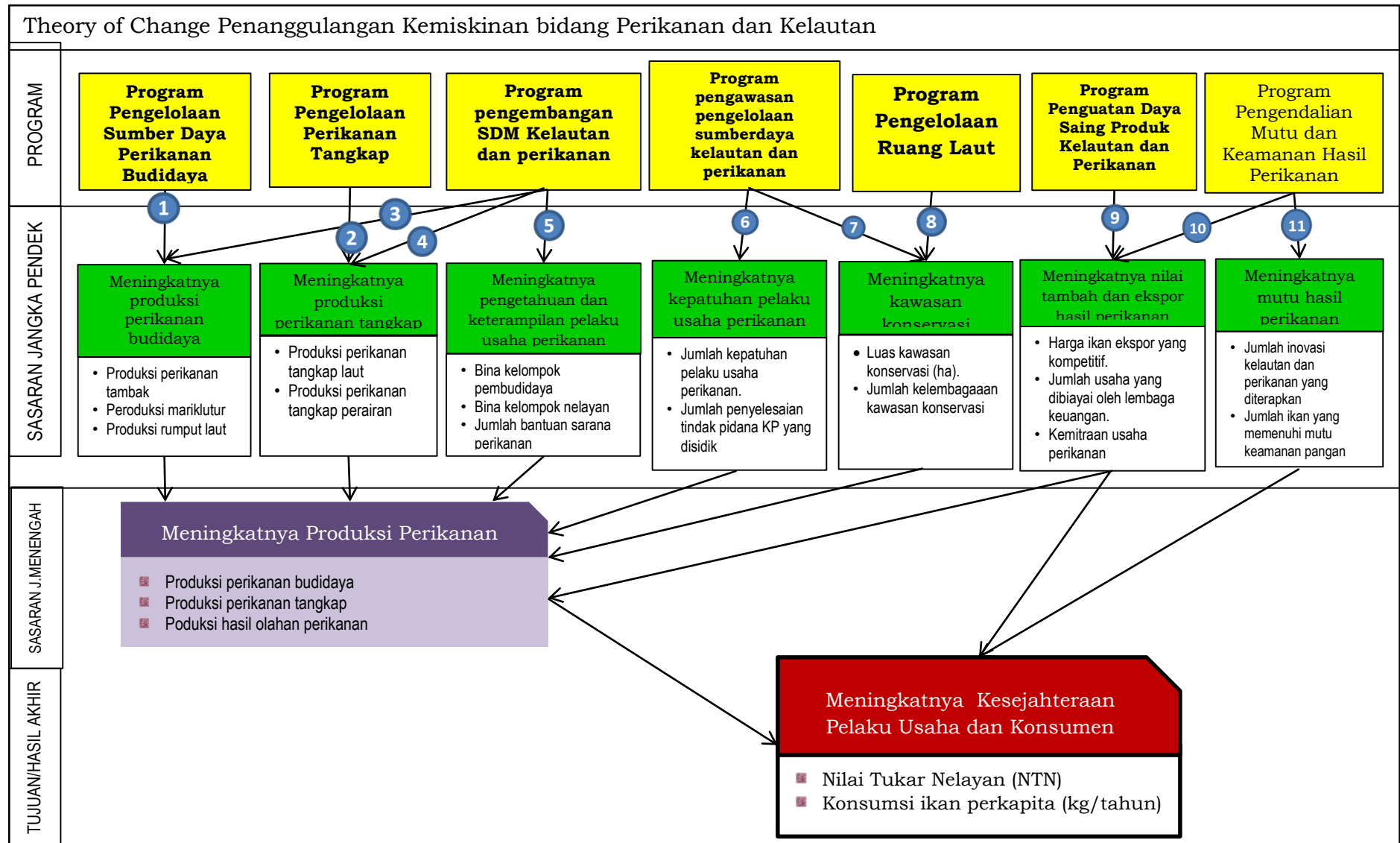
Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang pertanian dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Selain peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman, juga diikuti dengan peningkatan luas panen dan kesuburan melalui penggunaan pupuk organik dan penggunaan teknologi pertanian lainnya. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian terutama tanaman pangan juga dapat dicapai melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
3. Pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian memiliki sasaran jangka pendek dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian seperti peningkatan panjang jalan usahatani, penyediaan benih/bibit bermutu, penyediaan pupuk dan obata-obatan dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat, serta peningkatan dan perbaikan saluran irigasi. Dengan tercapainya penyediaan prasarana dan sarana tersebut akan terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
4. Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman juga melalui program pemberdayaan penyuluhan pertanian, yang memiliki indikator peningkatan produksi tanaman dan peternakan.
5. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni mengawal penyediaan prasarana dan sarana pertanian agar dapat diaplikasikan oleh petani sesuai dengan metode dan anjuran pelaksanaannya guna meningkatkan produktivitas tanaman.
6. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian memiliki sasaran jangka pendek yang utama yakni meningkatnya sumberdaya manusia petani yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah petani yang mendapat penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penerapan teknologi pertanian yang disuluhkan. Selain itu program mengharapkan adanya peningkatan jumlah petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan kualitas SDM dalam mendampingi petani. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman, ternak dan kesejahteraannya.
7. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian juga memiliki sasaran jangka pendek yakni mengawal penyediaan alat/mesin pertanian dan pengolah agar dapat digunakan oleh petani sesuai dengan cara/teknik pelaksanaannya guna meningkatkan produktivitas tanaman.
8. Program dukungan alat dan mesin pertanian memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya layanan alat dan mesin pertanian dengan beberapa indikator kegiatan yakni jumlah alat/mesin tanam, mesin pengolah tanah, mesin panen, alat semprot, jumlah perontok dan pengering hasil panen. Keberadaan peralatan dan mesin yang sesuai dengan penggunaannya dalam jangka menengah dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil panen, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
9. Program dukungan alat dan mesin pertanian dan pengolah juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk pangan yang sehat dan higienis. Secara spesifik indikator sasaran jangka pendek tersebut ditunjukkan oleh jumlah alat pengolah, variasi jenis produk yang dihasilkan dan mutu produk yang dihasilkan yang semakin meningkat. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan peternak sebagai pengolah hasil.

10. Meningkatnya sumberdaya manusia petani juga dapat dicapai melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. Capaian indikator kelembagaan petani melalui kelompok ditujukan agar peningkatan SDM petani diperoleh dari interaksi dalam kelompok tani dan gabungan kelompok taninya guna meningkatkan pengetahuan dan teknologi budidaya. Dengan tercapaiannya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
11. Program pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan petani memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya cakupan bina kelompok tani. Indikator sasaran yang dicapai meliputi jumlah kelompok tani dan gapoktan yang dibina terutama dalam pengelolaan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemitraan dengan pengusaha pengolah dan pedagang hasil pertanian. Dengan tercapaiannya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani, dan peternak.
12. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk olahan hasil pertanian, dan mutu produk dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Indikator sasaran yang dicapai meliputi meningkatnya jumlah produk olahan, kualitas atau mutu produk olahan, jumlah alat yang dimiliki baik pasca panen dan alat pengolah menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi. Pencapaian sasaran jangka pendek tersebut akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan peternak.
13. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya pendapatan rumah tangga petani dan peternak. Indikator sasaran jangka pendek secara spesifik yang diperoleh meliputi harga produk olahan yang kompetitif, meningkatnya pangsa pasar, meningkatnya share harga yang diterima petani, dan meningkatnya promosi produk olahan dapat meningkatkan kerjasama dengan mitra pasar dan pemasar produk olahan. Tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani, peternak dan industri pengolahan hasil pertanian.

4.1.1.7. Analisis ToC Bidang Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.7. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Perikanan dan Kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang perikanan dan kelautandengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020:

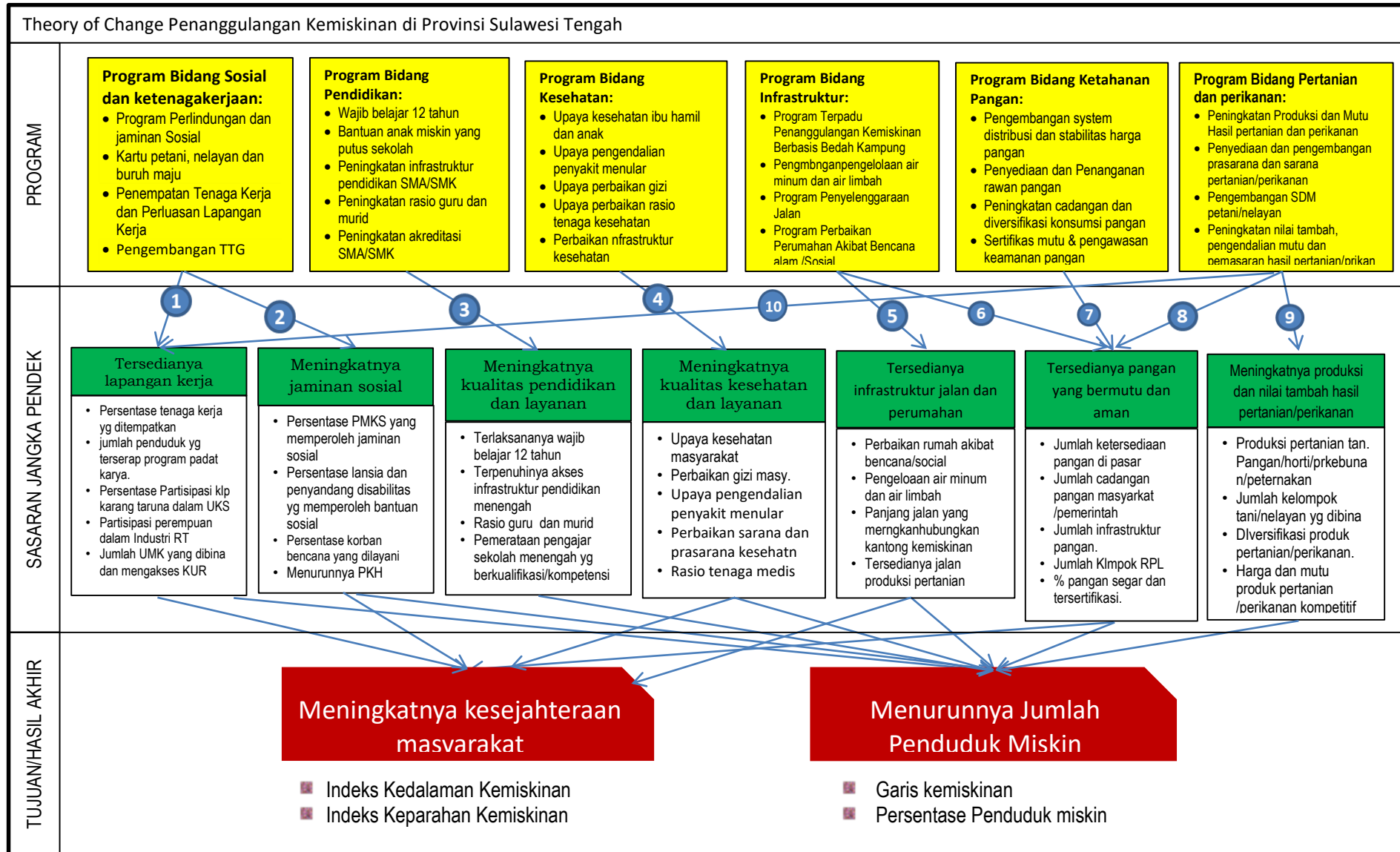
1. Program pengelolaan perikanan budidaya memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan budidaya yang terdiri dari produksi tambak (udang dan bandeng), produksi marikultur (karamba jaring), dan produksi rumput laut. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan budidaya dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan pembudidaya sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
2. Program pengelolaan perikanan tangkap memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan tangkap yang terdiri dari produksi perikanan tangkap laut (3 kelompok ikan: pelagis, demersal dan karang), dan produksi perikanan tangkap di perairan umum. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan tangkap dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan nelayan sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
3. Pelaksanaan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni produksi perikanan budidaya dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan teknologi budidaya guna meningkatkan produksi perikanan budidaya.
4. Pelaksanaan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan juga memiliki sasaran jangka pendek yakni produksi perikanan tangkap dalam bentuk pendampingan dalam pemberian bantuan teknologi penangkapan ikan guna meningkatkan produksi perikanan tangkap.
5. Program pengembangan SDM kelautan dan perikanan juga memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan. Program ini memiliki beberapa indikator sasaran yakni peningkatan pembinaan kelompok nelayan dan pembinaan kelompok budidaya, serta pendampingan dalam pengaplikasian teknik budidaya dan penangkapan ikan.
6. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui beberapa indikator sasaran yakni jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam menerapkan UU perikanan, dan jumlah penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dipertanggungjawabkan. Penerapan program ini berdampak pada peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
7. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya kawasan konservasi. Indikator sasarnya adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi melalui terbentuknya lembaga yang mengelola kawasan konservasi dan berbasis masyarakat.
8. Program pengelolaan ruang laut juga memiliki sasaran jangka pendek yang sama dengan program pengawasan yakni meningkatnya kawasan konservasi. Indikator sasarnya adalah meningkatnya luas kawasan konservasi dan terbentuknya lembaga yang mengelola kawasan konservasi. Peningkatan luas kawasan konservasi dan terbentuknya lembaga konservasi laut mampu meningkatkan populasi ikan dan hasil tangkapan nelayan, serta kelestarian ekosistem pesisir dan lautan.
9. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya nilai tambah dan ekspor hasil perikanan, dengan beberapa indikator sasaran spesifik yakni meningkatnya nilai jual produk ekspor perikanan yang kompetitif, jumlah usaha perikanan yang dibiayai lembaga permodalan dan kemitraan usaha perikanan. Dengan

tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pelaku usaha pemasaran perikanan.

10. Meningkatnya nilai tambah dan ekspor hasil perikanan juga dapat dicapai melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk perikanan ekspor.
11. Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya mutu hasil perikanan dengan indikator sasaran spesifik yakni jumlah (volume) ikan dan turunannya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu meningkatnya jumlah inovasi perikanan dan yang diterapkan oleh pelaku usaha perikanan guna menjamin keamanan pangan ikan. Jaminan mutu dan keamanan pangan dapat mempertahankan nilai gizi dan meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

4.1.1.8. Analisis ToC Penanggulangan Kemiskinan Bidang Konsumsi

Analisis ToC Penanggulangan kemiskinan bidang konsumsi merupakan kombinasi dari seluruh program dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Program-program yang ditampilkan merupakan program strategis pemerintah daerah Sulawesi Tengah pada periode 2016-2020 guna mengurangi tingkat kemiskinan. Analisis ToC Penanggulangan Kemiskinan bidang konsumsi di Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 4.8. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan konsumsi dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Program pemberian kartu petani, nelayan maju , dan buruh ditujukan untuk meningkatkan jaminan social bagi masyarakat petani, peternak, nelayan dan buruh. Program ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah petani, peternak dan nelayan yang mendapatkan kartu dan jaminan sosial baik untuk jaminan keberlanjutan usaha, jaminan pendidikan dan kesehatan. Kepemilikan kartu jaminan social ini juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi mereka untuk mengakses modal dari lembaga perkreditan dan perbankan. Selain itu, terdapat program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produk produktif masyarakat. Indikator jangka pendek dari sasaran program tersebut adalah meningkatnya persentase kelompok usaha mikro (petani, nelayan, peternak dan usaha pengolahan hasil pertanian), dan kelompok lembaga non formal (kelompok perempuan dan pemuda, karang taruna, dan penyandang disabilitas). Selain itu program tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus peningkatan kapasitas modal usaha. Peningkatan jumlah jenis, modal skala usaha pertanian, koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan selanjutnya kesejahteraan masyarakat.
2. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Indikator sasaran jangka pendek terkait program ini adalah meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di daerah perkotaan dalam bentuk program padat karya yang sifatnya mendukung pendapatan kepala rumahtangga oleh anggota keluarga.
3. Sasaran program pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam adalah meningkatnya jumlah usaha-usaha skala rumahtangga (mikro), kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumberdaya alam lokal, dan ditindaklanjuti dengan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Sasaran program ini pengembangan teknologi tepat guna umumnya ditujukan pada masyarakat pedesaan terutama kelompok perempuan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berbasis pengolahan komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Program utama bidang pendidikan adalah Reaktualisasi gerakan program Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan infrastruktur & Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar), menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah dan peningkatan rasio guru memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah melalui peningkatan APK, APM, rasio infrastruktur sekolah menengah dengan penduduk dan rasio guru murid.
5. Program promosi tentang makanan bergizi, pemberian makanan tambahan bagi keluarga kurang mampu memiliki sasaran untuk meningkatnya kesehatan masyarakat. Sementara program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bagi keluarga kurang mampu ditujukan untuk menurunkan kematian bayi dan bu hamil. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa bagi keluarga kurang mampu.
6. Meningkatnya ketersediaan pemukiman layak huni dan ketersediaan air minum layak merupakan sasaran program infrastruktur khususnya penyediaan rumah sehat bagi keluarga kurang mampu, penyediaan fasilitas rumah bagi keluarga kurang mampu, rehab rumah bagi korban bencana, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi keluarga kurang mampu dan penyediaan

fasilitas rumah bagi korban bencana. Selain itu untuk memperlancar distribusi bahan pangan, juga dilakukan program peningkatan infrastruktur jalan dari kantong kemiskinan dan jalan produk usahatani.

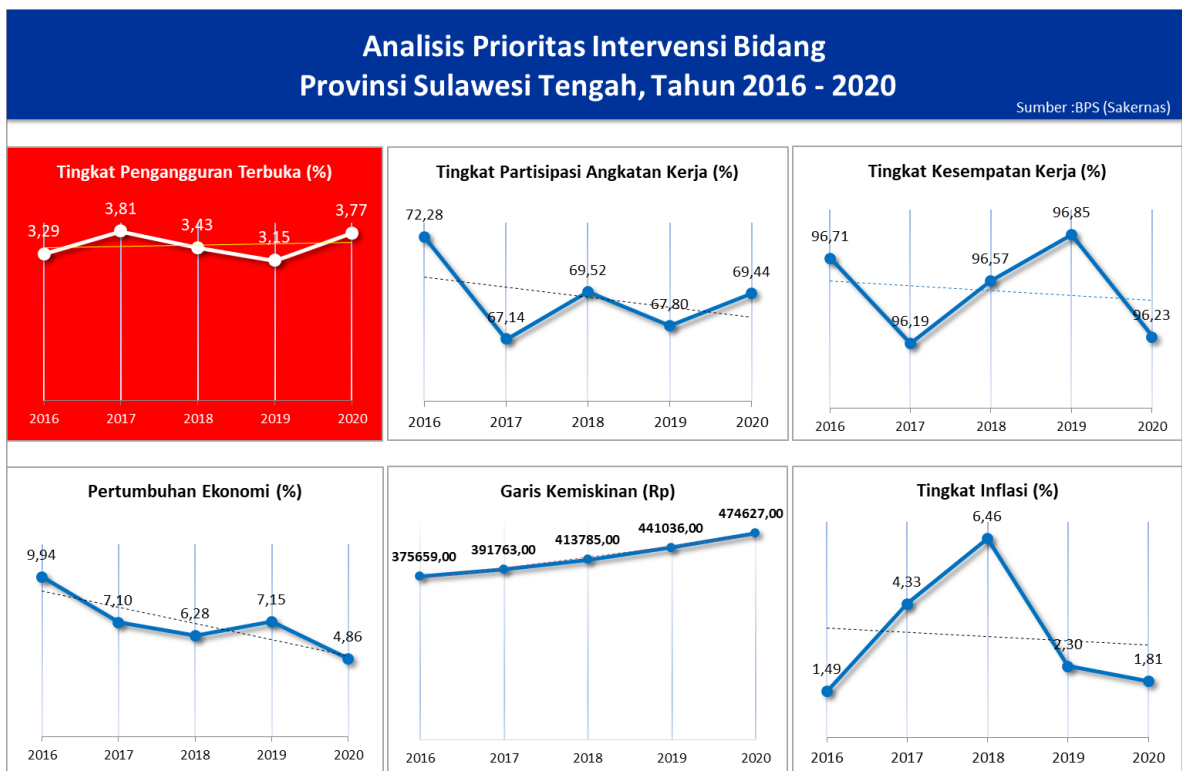
7. Tersedianya pangan bermutu dan aman merupakan sasaran jangka pendek program bidang ketahanan pangan yang meliputi program sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, penyediaan dan penanganan rawan pangan, cadangan pangan, diversifikasi dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan. Indikator sasaran jangka pendek yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah jumlah ketersediaan stok pangan di pasar, jumlah infrastruktur pangan, infrastruktur di daerah rawan pangan, RPL dan tersedianya pangan segar dan bermutu.
8. Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Selain peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman, juga diikuti dengan peningkatan luas panen, penyediaan saprodi, dan meningkatnya kesuburan melalui penggunaan pupuk organik dan penggunaan teknologi pertanian lainnya. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
9. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian terutama tanaman pangan juga dapat dicapai melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui peningkatan panjang jalan usahatani, penyediaan benih/bibit bermutu, penyediaan pupuk dan obat-obatan dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat, serta peningkatan dan perbaikan saluran irigasi, peningkatan SDM petani, yang memiliki indikator peningkatan produksi tanaman dan peternakan, pembinaan kelompok tani dan gapoktan, kemitraan dengan pengusaha pengolah dan pedagang hasil pertanian. Dengan tercapaainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani, dan peternak.
10. Program pengelolaan perikanan budidaya memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan budidaya yang terdiri dari produksi tambak (udang dan bandeng), produksi marikultur (karamba jaring), dan produksi rumput laut. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan budidaya dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan pembudidaya sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
11. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk olahan hasil pertanian, dan mutu produk dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. Indikator sasaran yang dicapai meliputi meningkatnya jumlah produk olahan, kualitas atau mutu produk olahan, jumlah alat yang dimiliki baik pasca panen dan alat pengolah menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi. Pencapaian sasaran jangka pendek tersebut akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak.

4.1.2. Causal Attribution

Analisis Keterkaitan semua bidang (sebagai cara untuk menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana)

4.1.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.9.
Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Variabel Bidang Lain di Provinsi Sulawesi Tengah

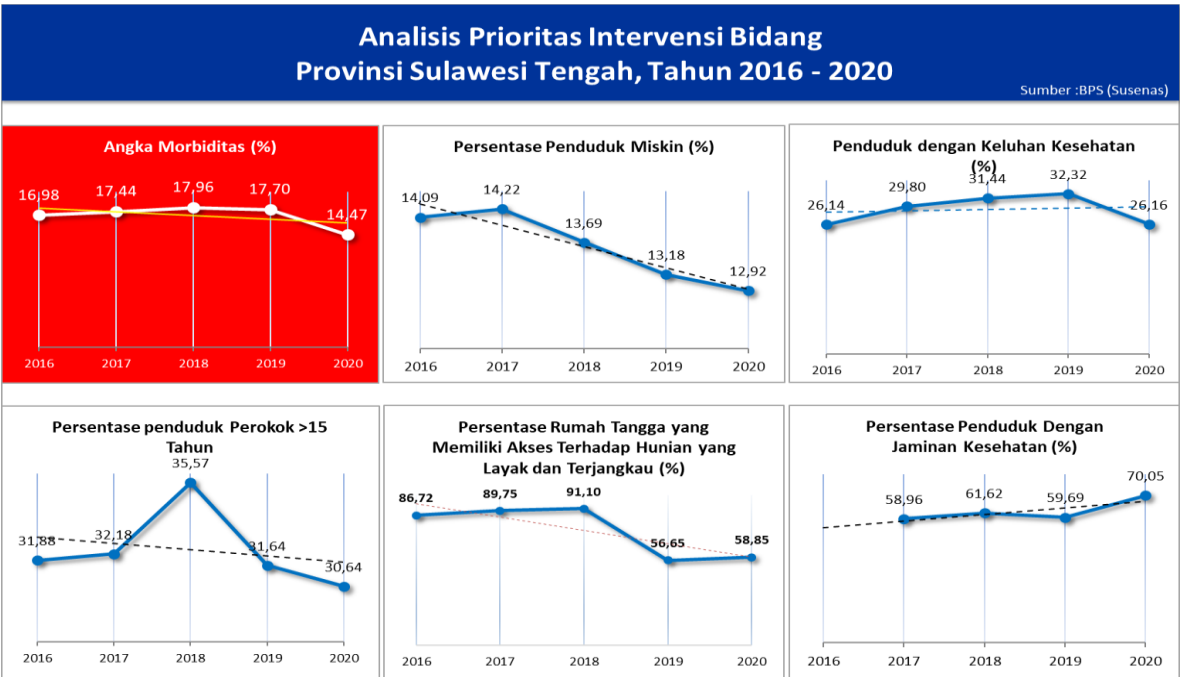
Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang cenderung berfluktuasi memiliki keterkaitan erat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan garis kemiskinan. Penurunan TPAK berkorelasi positif terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan tingkat pengangguran menurun atau sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran terbuka. Selanjutnya tingkat pengangguran yang cenderung naik di tahun 2020 juga disebabkan karena meningkatnya garis kemiskinan.

Sebaliknya tingkat inflasi yang meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka sampai 3,81 % pada tahun 2017 lalu menurun sampai 3,15% pada tahun 2019, dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan tingkat inflasi sampai tahun 2020. Namun penurunan harga barang pada tahun 2020 tidak diikuti penurunan tingkat pengangguran malah meningkat yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan dan industri mengurangi aktivitas dan kapasitas produksi sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja mengalami penurunan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi tersebut adalah intervensi program yang dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka terutama di masa pandemic Covid yakni dengan melakukan program padat karya terutama di daerah perkotaan dengan memperhatikan protocol kesehatan. Sementara kebijakan pemerintah untuk industri/perusahaan dan kegiatan ekonomi lainnya adalah tetap melakukan aktivitas produksi setengah dari kapasitas terpasang dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat di lingkungan kerja. Transaksi dalam pertukaran barang dan jasa lebih mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi atau melalui e-commerce.

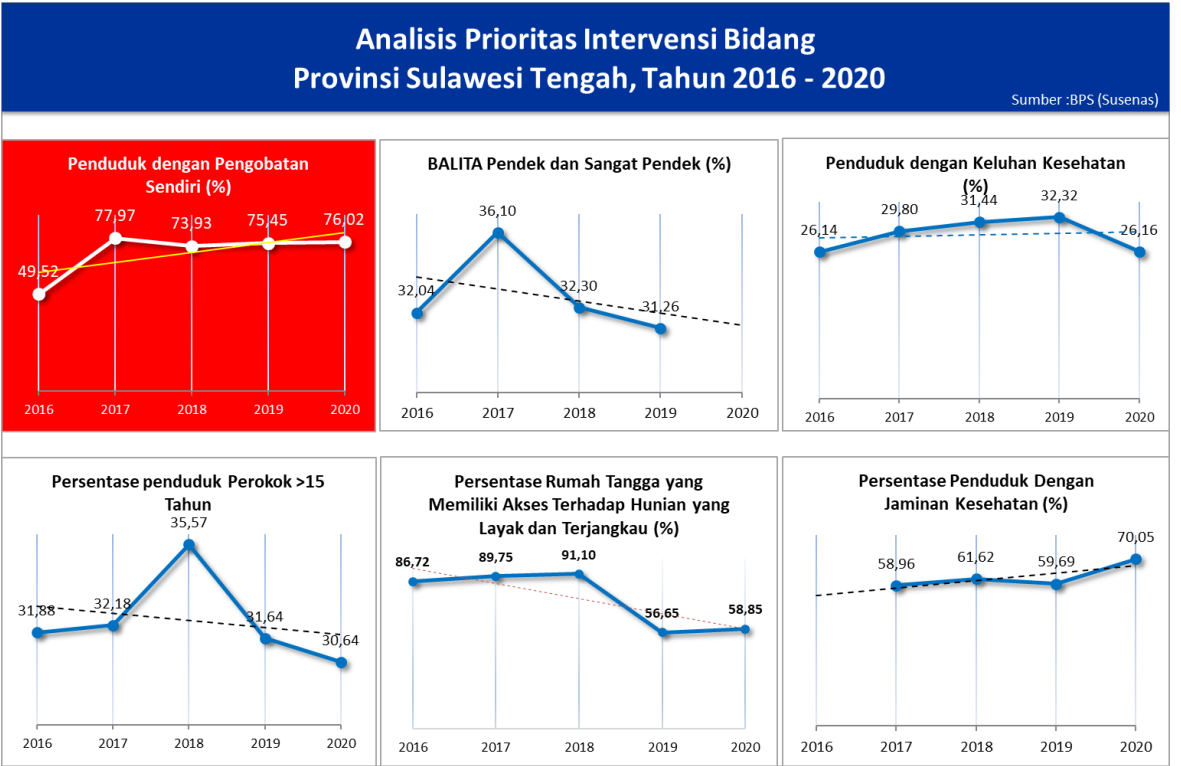
4.1.2.2. Bidang Kesehatan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang kesehatan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.10.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Morbilitas

Tingkat kesakitan sangat erat kaitannya dengan keluhan kesehatan, persentase penduduk dengan perokok umur>15 tahun dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan. Angka morbiditas berkurang jika penduduk dengan keluhan kesehatan berkurang, persentase penduduk merokok juga berkurang dan apabila persentase penduduk dengan jaminan kesehatan meningkat.

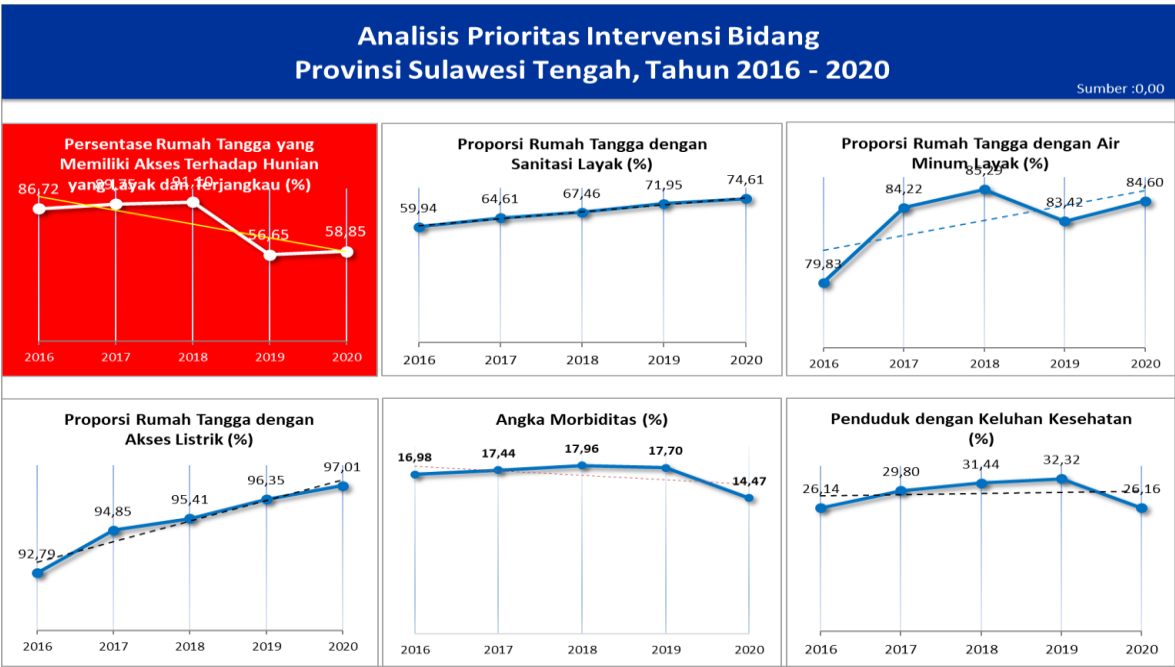


Gambar 4.11.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Penduduk dengan Pengobatan Sendiri

Penduduk dengan pengobatan sendiri menjadi salah satu pemicu stunting (BALITA Pendek dan Sangat Pendek), juga berkorelasi dengan penduduk dengan keluhan kesehatan, persentase penduduk merokok dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan.

4.1.2.3. Bidang Infrastruktur Dasar

Hasil analisis prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.12.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Rumah Tangga Layak Huni dan Terjangkau

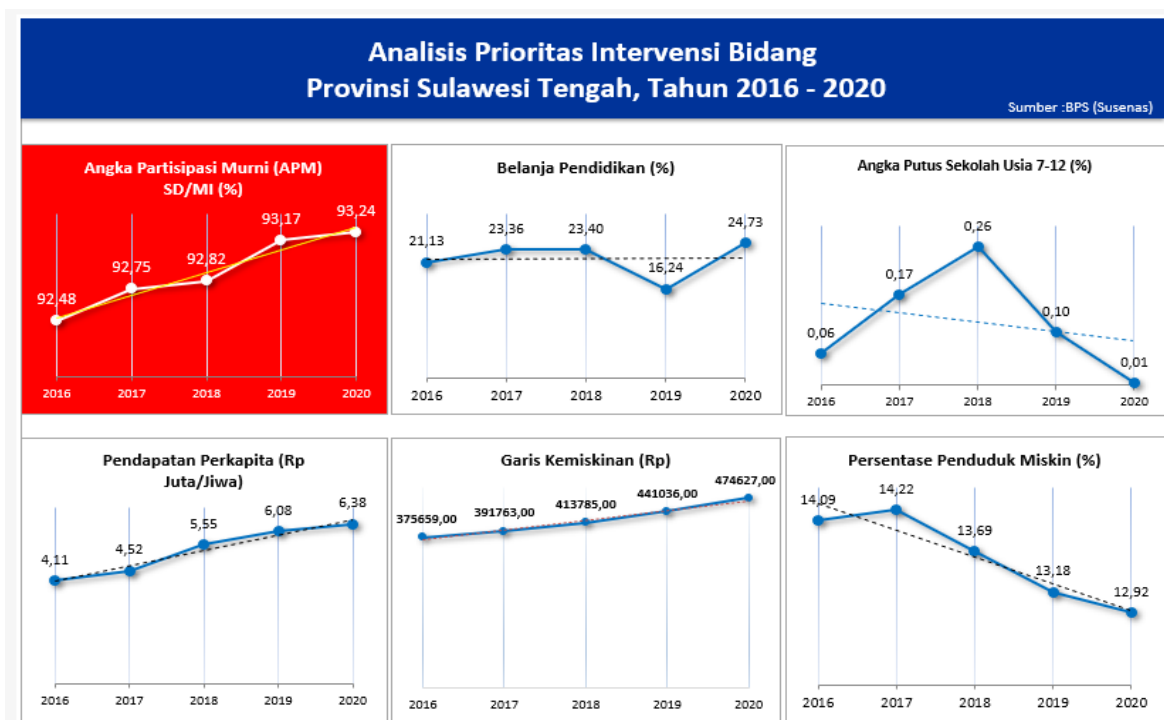
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dipengaruhi oleh proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Juga sangat erat kaitannya dengan angka morbiditas dan penduduk dengan keluhan kesehatan.

4.1.2.4. Bidang Pendidikan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang Pendidikan di Sulawesi Tengah, melihat perkembangan bidang pendidikan berdasarkan pendekatan Angka Partisipasi Murni (APM). Hal ini ingin melihat seperti apa tingkat partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah dalam menyekolahkan anaknya dari tingka sekolah dasar sampai sekolah menengah. Disisi lain seperti apa kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung bidang pendikan dasar sampai menengah.

Dari hasil analisis memperlihatkan kecenderungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi ketentuan belanja pendidikan di atas 20 persen dari APBD, namun hasilnya belum memperlihatkan hasil yang optimal terkait partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Disudut yag lain juga terdapat kecenderungan makin membaiknya pendapatan perkapita masyarakat maupun adanya kenaikan pendapatan masyarakat dalam lima tahun terakhir jika dilihat kecenderungan angka pada Garis Kemiskinan.

Data hasil analisis prioritas intervensi bidang pendidikan disajikan pada Gambar berikut.



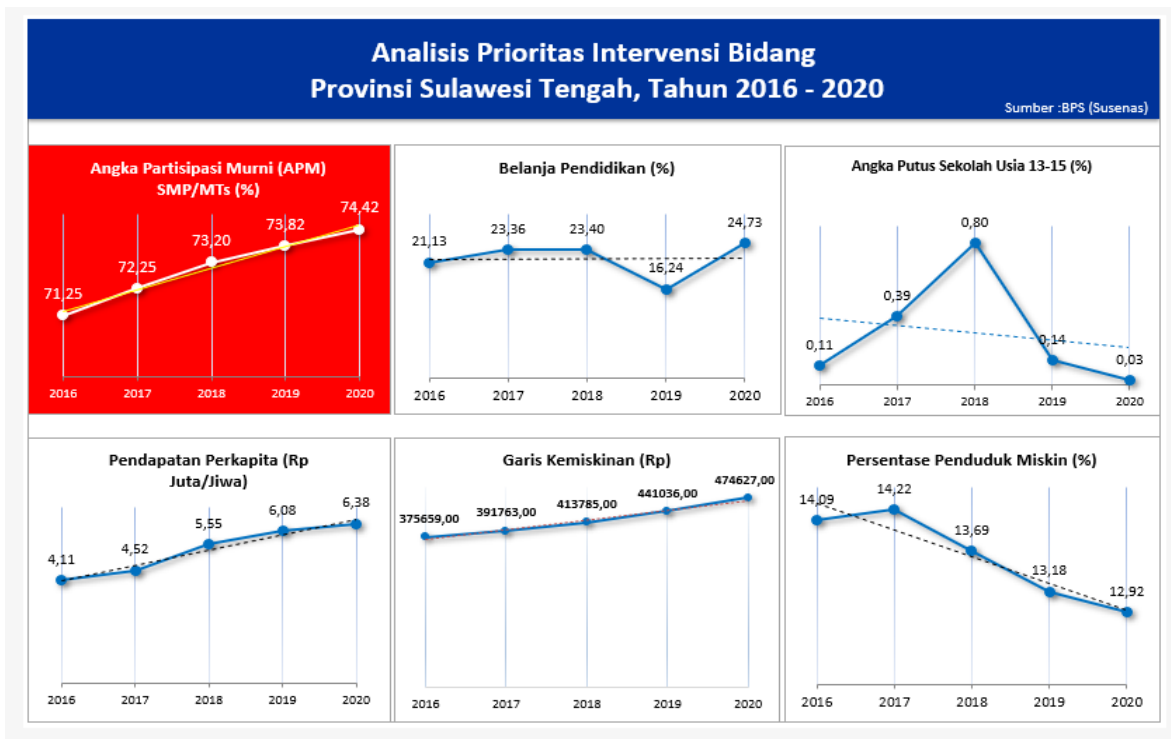
Gambar 4.13.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Angka Partisipasi Murni SD/MI

Gambar 4.13 menunjukkan APM ditingkat SD dalam kurun waktu mengalami kenaikan rata-rata 0,79 %. Kenaikan APM SD tersebut berkorelasi dengan naik belanja pendidikan yang telah melampaui ketentuan ambang batas di atas 20 %. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,24 % anak usia setara SD berpartisipasi atau terlibat bersekolah. Namun demikian angka itu menyisahkan masalah karena masih terdapat 6,76 % anak usia setara SD belum bersekolah.

Ketentuan wajib belajar seperti belum dipatuhi masyarakat. Capaian APM tingkat SD tersebut juga memiliki korelasi dengan angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lima tahun terakhir angka putus sekolah mengalami fluktuasi Tahun 2016 0,06 % naik tajam pada tahun 2018 diangka 0,26 % dan kembali turun pada 2020 menjadi 0,01 %.

Capaian APM ditingkat SD/MI diatas 90 % juga memili korelasi yang signifikan dengan kenaikan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2020 sekitar Rp 6,38 juta perjiwa. Lima tahun sebelumnya (Tahun 2016) hanya 4,11 juta/jiwa.

Angka putus sekolah yang berkorelasi dengan capaian APM tersebut terkadang disematkan pada masyarakat miskin karena terkait dengan rendahnya tingkat pendapatan. Jika asumsi tersebut digunakan, maka akan mendapat pembenaran jika melihat data statistis soal Garis Kemiskinan di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 baru mencapai Rp 474.627,- perbulan atau rata-rata per tahun Rp 5.695.524,-. Jika dihitung rerata perhari hanya Rp 15.820,- BPS secara nasional *merelease*, Garis Kemiskinan pada September 2020 berada pada angka Rp 458.947,-. Capaian tersebut masih diatas rata-rata Sulawesi Tengah. Capaian APM tingkat SD/MI tersebut juga memiliki korelasi dengan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 12,92 %. Angka ini terbilang masih tingkat jika dikaitkan dengan rata-rata nasional. Capaian angka kemiskinan 12,92 % tersebut dipastikan memiliki korelasi dengan garis kemiskinan yang dicapai masyarakat Sulawesi Tengah yang hasilnya Rp 15.820,- menopang biaya hidup perhari masyarakat miskin.



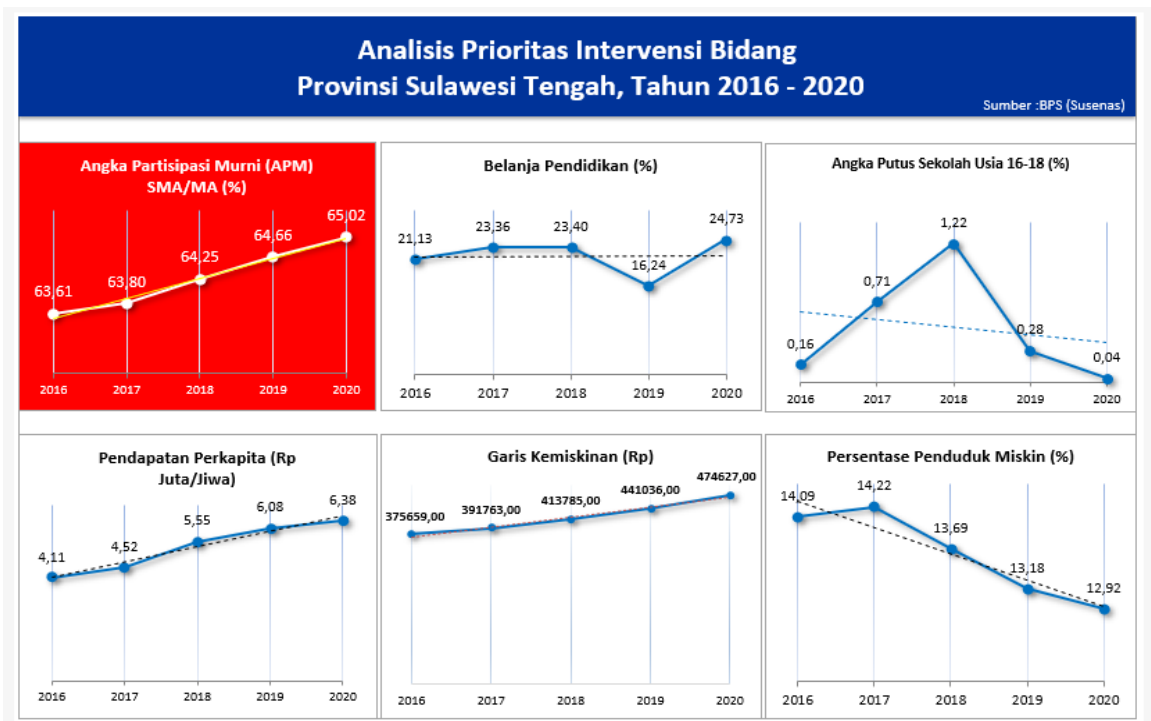
Gambar 4.14.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Data Analisis prioritas intervensi terhadap APM di Provinsi Sulawesi Tengah memperlihatkan kecenderungan, makin naik jenjang pendidikan akan diikuti dengan makin berkurangnya partisipasi masyarakat yang terlibat. Hal ini bisa dilihat dari APM tingkat SMP/MTs, tahun 2020 capainnya 74,42 %. Sementara SD/MI ditahun yang sama 93,24 %.

Capaian APM ditingkat SMP/MTs tersebut bisa disebut tidak memiliki korelasi yang positif dengan naiknya anggaran belanja pendidikan. Diasumsikan, makin tinggi belanja pendidikan akan makin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah.

Naiknya anggaran belanja pendidikan sekitar 24,73 % dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah hanya bisa menaikkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dijenjang usia setara SMP/MTS sebesar 74,42 %. Angka capaian ini bisa disebut bahwa masih terdapat 25,58% anak-anak Sulawesi Tengah tidak meneruskan pendidikannya ditingkat SMP/MTs. Angka tersebut memiliki korelasi dengan angka putus sekolah usia 13-15 tahun sebesar 0,03 % pada tahun 2020.

Jika kemiskinan tersebut diasumsikan terjadi karena faktor ekonomi, maka menurunnya APM di level SMP/MTs memiliki hubungan yang signifikan dengan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Tengah yang baru mencapai Rp 6,38 juta per jiwa. Demikian halnya dengan garis kemiskinan baru mencapai Rp 474.627,- per bulan atau rata-rata per tahun Rp 5.695.524. Semua capaian tersebut adalah implikasi dari angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 12,92%.



Gambar 4.15.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Angka Partisipasi Murni SMA/MI

Asumsi yang digunakan pada analisis sebelumnya, bahwa makin tinggi tingkat pendidikan makin turun tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Asumsi ini makin mendapat pembenaran ketika melihat capaian APM tahun 2020 ditingkat SD/MI sebesar 93,24%. Menurun ditingkat SMP/MTs sebesar 74,42% dan kembali turun ditingkat SMA/MA sebesar 65,02 %.

Penurunan APM dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas tidak diikuti dengan naiknya anggaran belanja pendidikan yang terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016 anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 21,13%. Mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 24,73%.

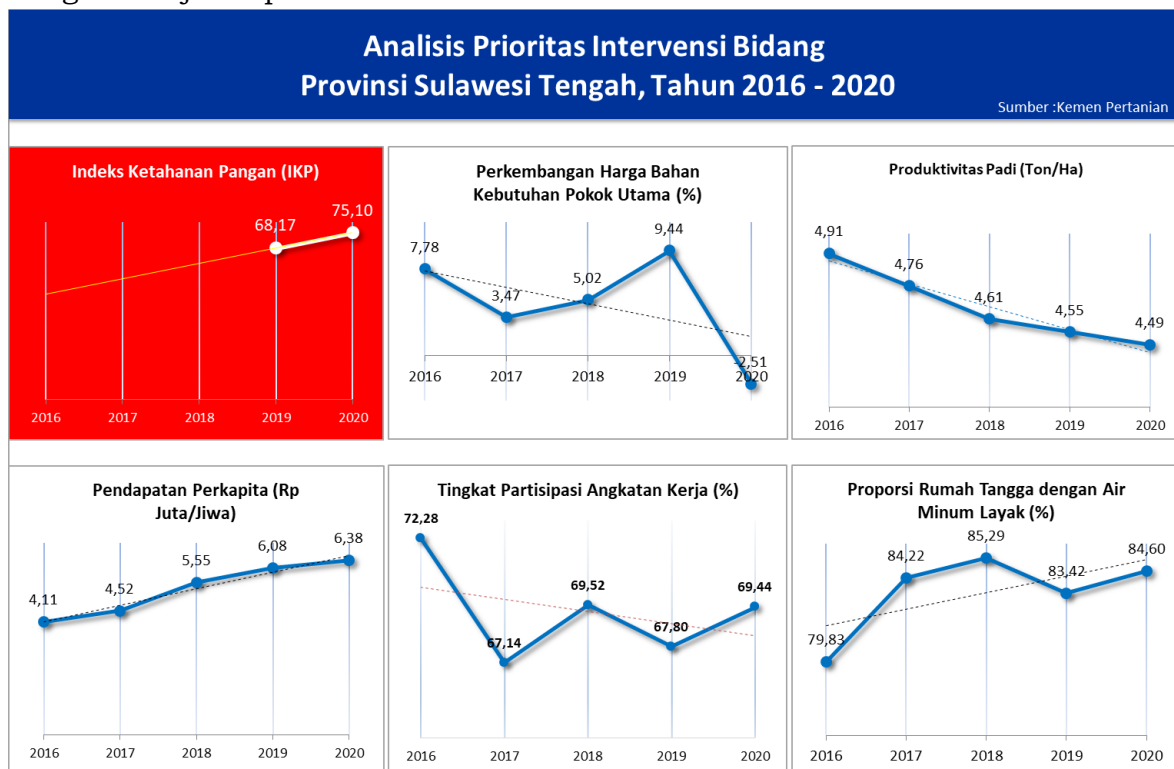
Anggaran belanja pendidikan sebesar 24,73 % tersebut hanya berdampak sebesar 65,02 % masyarakat Sulawesi Tengah berpartisipasi dijenjang pendidikan SMA/MA. Sementara 34,98% masyarakat Sulawesi Tengah belum meneruskan pendidikannya di jenjang SMA/MA. Angka tersebut juga berkorelasi dengan angka putus sekolah usia 16-18 tahun sebesar 0,04%.

Walau pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir (2016-2020), demikian halnya garis kemiskinan juga mengalami kenaikan, namun dipastikan walau belum signifikan memberi pengaruh yang positif terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan makan minum dan kebutuhan dasar lainnya, belum untuk kepentingan investasi di bidang pendidikan. Kondisi ini terjadi karena angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada pada kisaran angka 12,92%.

Dari kondisi kemiskinan yang nyaris terbilang ekstrim tersebut, maka disimpulkan bahwa, perlu ada intervensi Pemerintah Provinsi Sulawesi berupa Program Reaktulasi gerakan program wajib belajar 12 Tahun, ditopang dengan komponen penunjangnya seperti, pemberian bea siswa, peningkatan kualitas guru, akreditasi sekolah serta pemenuhan infrastruktur dasar bidang pendidikan. Target akhir yang akan dicapai adalah naiknya daya saing pendidikan di Sulawesi Tengah sebagai sumber daya utama yang akan menggerakkan roda pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1.2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang ketahanan pangan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.



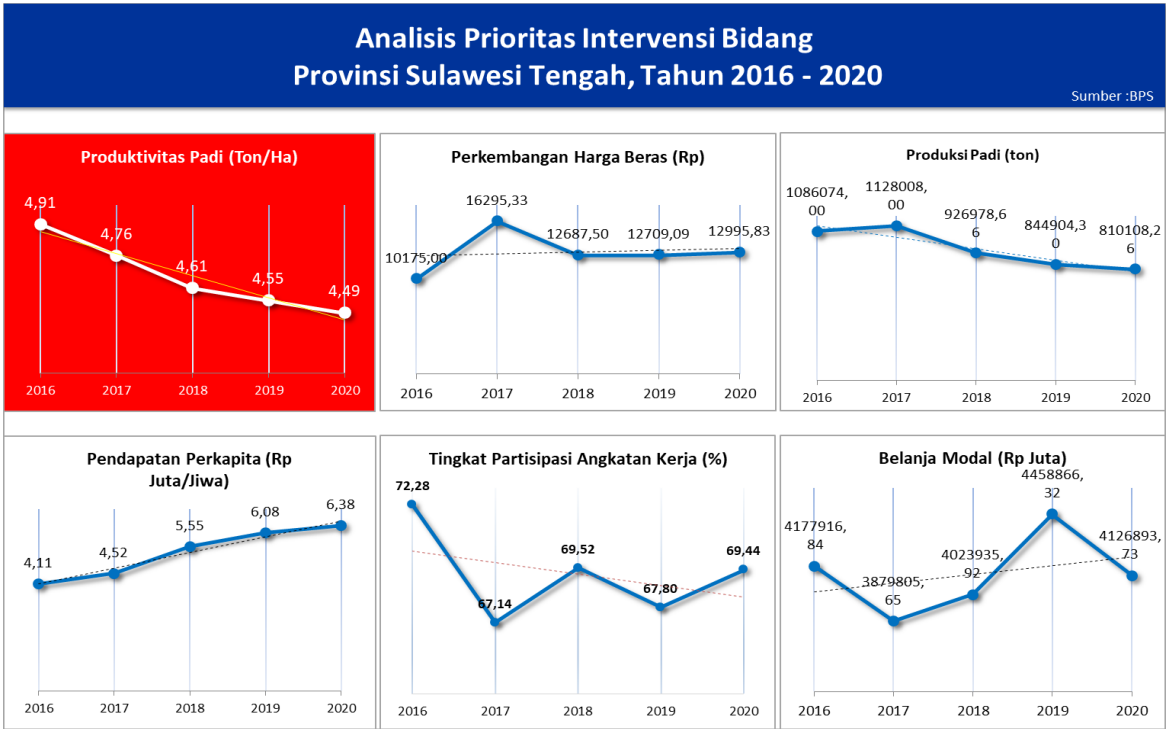
Gambar 4.16.
Hubungan antara Indeks Ketahanan Pangan dengan Variabel Bidang Lain dalam Analisis Prioritas Intervensi di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara indeks ketahanan pangan dengan pendapatan perkapita penduduk dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Sebaliknya penurunan harga kebutuhan pokok utama menyebabkan indeks ketahanan pangan meningkat. Namun terdapat anomali terkait dengan penurunan produktivitas dan TPAK yang menyebabkan peningkatan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kecenderungan peningkatan pendapatan perkapita per tahun masyarakat Sulawesi Tengah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan belanja masyarakat untuk barang kebutuhan pokok utama yang ditandai dengan peningkatan harga pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan perkapita juga ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja sampai tahun 2019. Penurunan harga kebutuhan pokok utama pada tahun 2020 selain disebabkan kapasitas produksi pertanian di daerah pedesaan tidak terpengaruh oleh pandemic covid-19 sehingga menyebabkan stok pangan meningkat.

Kesimpulannya adalah himbauan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan agar masyarakat tidak menahan uang atau membelanjakan uangnya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar dan peningkatan pendapatan petani dan nelayan yang menyediakan kebutuhan pokok utama. Sementara intervensi program dari pemerintah daerah Sulawesi Tengah adalah meningkatkan pasar dan distribusi pangan yang surplus dihasilkan para petani/nelayan kita ke daerah-daerah yang ketersediaan pangannya terbatas seperti ke Kalimantan dan Papua. Program padat karya dan melonggarkan aktivitas beberapa sektor ekonomi di daerah perkotaan akan mampu menolong para petani dan nelayan di desa yang terus memproduksi guna meredam menurunnya harga komoditi bahan kebutuhan pokok.

4.1.2.6. Bidang Pertanian

Hasil analisis prioritas intervensi bidang pertanian di Sulawesi Tengah di sajikan pada Gambar berikut.



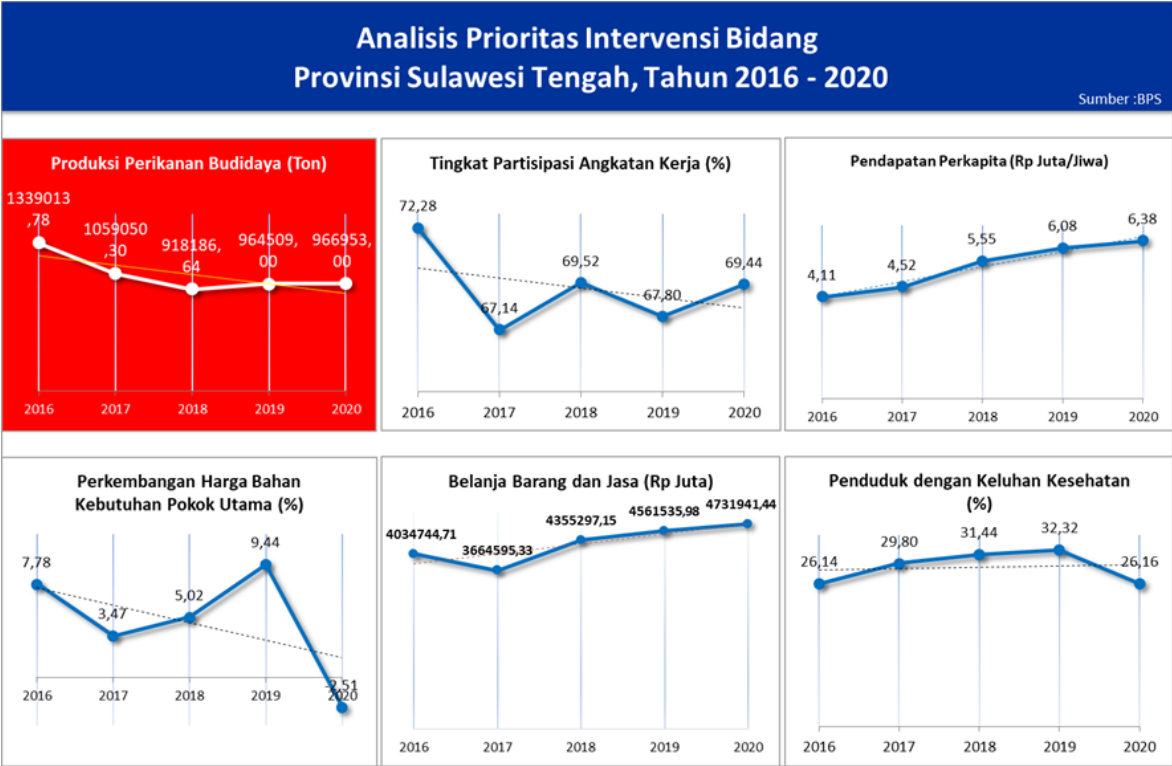
Gambar 4.17.
**Hubungan antara Produktivitas Padi dengan Variabel Bidang Lain dalam Analisis
Prioritas Intervensi Bidang Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah**

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara produktivitas padi dengan perkembangan harga beras dan produksi padi. Penurunan produksi padi dari tahun 2017 sampai 2020 menyebabkan penurunan produktivitas padi. Walaupun terjadi peningkatan harga beras yang relatif kecil pada tahun 2020, namun peningkatan harga tersebut tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas padi.

Peningkatan pendapatan perkapita selama lima tahun terakhir dan peningkatan belanja modal oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu meningkatkan produktivitas padi. Ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terkait langsung dengan upaya mendukung produktivitas padi atau tanaman pangan secara umum seperti untuk belanja pemeliharaan irigasi dan kebutuhan sarana produksi. Kecenderungan peningkatan pendapatan perkapita per tahun masyarakat Sulawesi Tengah kurang berpengaruh belanja masyarakat untuk sarana produksi pertanian tanaman pangan. Atau dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan perkapita kemungkinan tidak berasal dari kelompok petani padi, namun kelompok masyarakat lain terutama pekerja industri pertambangan dan pengolahan.

4.1.2.5. Bidang Perikanan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang perikanan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 4.18.



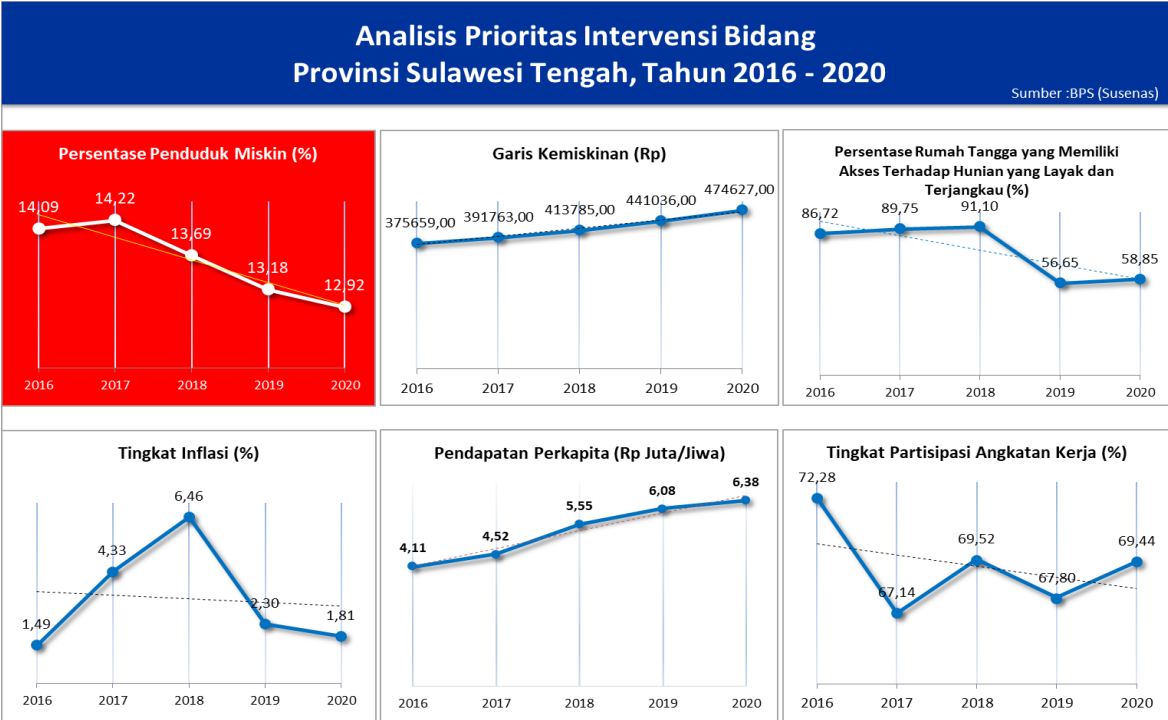
Gambar 4.18.
Analisis Prioritas Intervensi terkait Hubungan antara Produksi Perikanan Budidaya dengan Variabel Bidang Lain pada Bidang Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa penurunan produksi perikanan budidaya disebabkan karena TPAK relatif konstan dan harga kebutuhan pokok utama terutama harga ikan yang mengalami penurunan. Selanjutnya hampir tidak terdapat pengaruh pendapatan perkapita dan penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap produksi perikanan budidaya. Seharusnya peningkatan pendapatan per kapita penduduk menyebabkan permintaan ikan meningkat sehingga pembudidaya termotivasi untuk meningkatkan produksinya.

Kenyataan ini memang tidak terjadi karena produksi perikanan budidaya umumnya berasal dari produksi rumput laut. Penurunan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan seharusnya dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya. Peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah kurang berpengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belanja barang dan jasa umumnya untuk kegiatan di luar perikanan.

4.1.2.6. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Hasil analisis prioritas intervensi bidang kemiskinan konsumsi di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut.

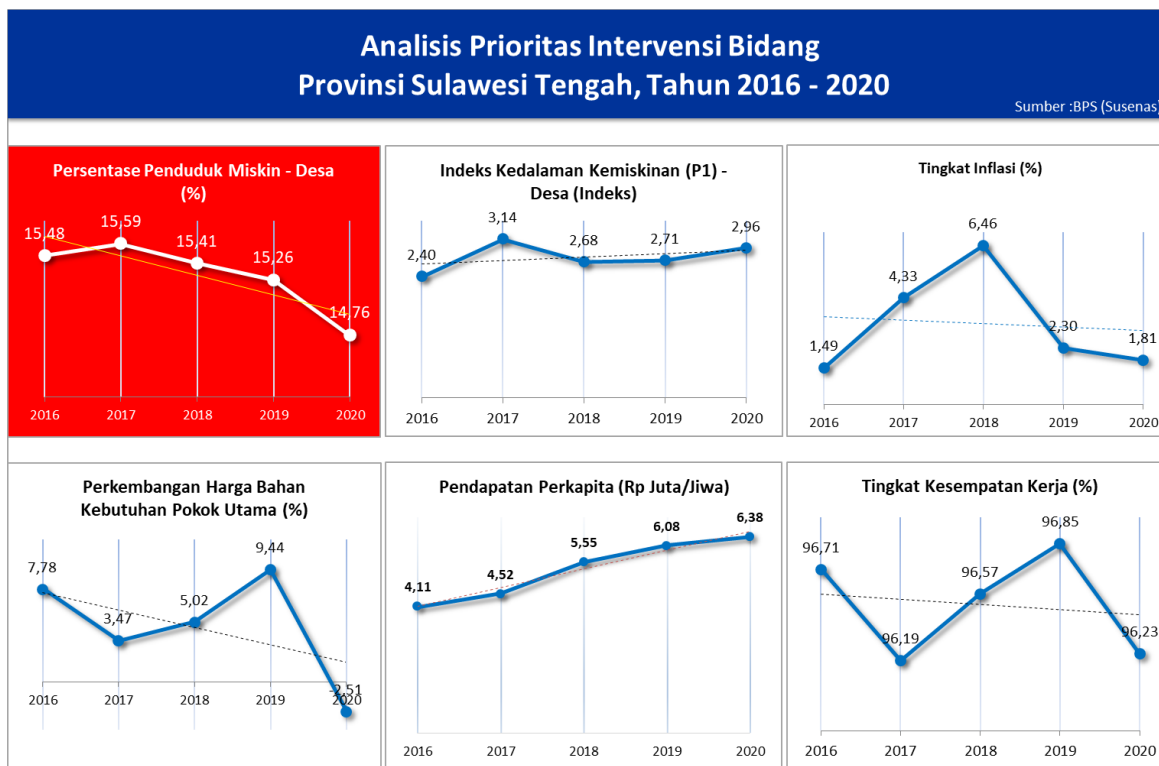


Gambar 4.19.
Hubungan antara Persentase Penduduk Miskin dengan Variabel Bidang Lain di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.19 menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan angka garis kemiskinan (Rp) selama lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak secara signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan persentase penduduk miskin, malah terjadi penurunan. Kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin sampai Maret 2020 disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Jadi walaupun terjadi peningkatan biaya hidup yang diperlihatkan oleh garis kemiskinan, namun perubahan pendapatan perkapita cenderung lebih besar sehingga jumlah penduduk kategori miskin mengalami penurunan.

Jika dikaitkan dengan kepemilikan rumah, penurunan persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga tidak serta merta dapat meningkatkan persentase penduduk, atau berbanding terbalik. Ini berarti hubungan antara akses kepemilikan dengan penduduk miskin memiliki hubungan yang tidak langsung, namun melalui tingkat pendapatan dan harga kebutuhan (makanan dan non makanan). Hal ini diperlihatkan oleh tingkat inflasi yang mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir yang dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Mengingat indikator menyangkut perubahan indeks harga-harga seluruh kebutuhan pokok dan tidak pokok, dimana harga kebutuhan pokok merupakan proksi dari garis kemiskinan yang nilainya cenderung meningkat namun tidak secara nyata meningkatkan persentase penduduk miskin. Hal ini dapat diduga bahwa belanja (pengeluaran) konsumsi dari pendapatan yang diperoleh masyarakat Sulawesi Tengah umumnya ditujukan untuk pengeluaran non kebutuhan pokok sehingga terjadi penurunan tingkat inflasi maka persentase penduduk miskin juga berkurang.

Selain disebabkan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah juga disebabkan oleh semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Ini berarti bahwa peningkatan garis kemiskinan yang diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Mengingat tingkat kemiskinan, keparahan dan kedalaman kemiskinan desa di Provinsi Sulawesi Tengah sangat ekstrim, maka Gambar berikut mencoba menggambarkan hubungan antara beberapa faktor.



Gambar 4.20.
Hubungan antara Persentase Penduduk Miskin Desa dengan Variabel Bidang Lain di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.20 menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin di desa tidak serta merta menurunkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) malah sebaliknya meningkatkan indeks kedalaman kemiskinan desa. Namun tingkat inflasi yang menurun (yang berarti terjadi penurunan indeks harga-harga barang) secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan desa. Hal ini sejalan dengan penurunan harga kebutuhan pokok makanan secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan desa.

Dari sisi pendapatan, peningkatan pendapatan per kapita per tahun juga mampu menurunkan persentase penduduk miskin desa, mengingat pendapatan yang tinggi terkait dengan terpenuhi belanja kebutuhan pokok bagi masyarakat desa. Namun sebaliknya tingkat kesempatan kerja yang mengalami penurunan pada tahun 2020 tidak menyebabkan peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan. Ini berarti bahwa penurunan tingkat kesempatan kerja yang terjadi pada tahun 2020 terjadi di daerah perkotaan Sulawesi Tengah. Hal Ini juga diperkuat beberapa informasi dan data bahwa dampak pandemic covid-19 tahun 2020 lebih banyak berpengaruh pada daerah perkotaan terutama dibatasinya aktivitas ekonomi, sementara di daerah pedesaan umumnya aktivitas relative berjalan normal.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi ini adalah intervensi program yang harus dilakukan di daerah pedesaan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah bagaimana mempertahankan kesempatan kerja masyarakat, menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya serta meningkatkan distribusi komoditi ke pasar dan nilai tambah produk olahan hasil pertanian dan perikanan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah pedesaan sehingga peningkatan garis kemiskinan dapat diatasi dengan peningkatan pendapatan.

4.2 Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditingkatkan tidak hanya dari segi jumlah dan capaian, melainkan juga dari segi kualitas belanja dan kebermanfaatan guna menjawab tantangan dalam

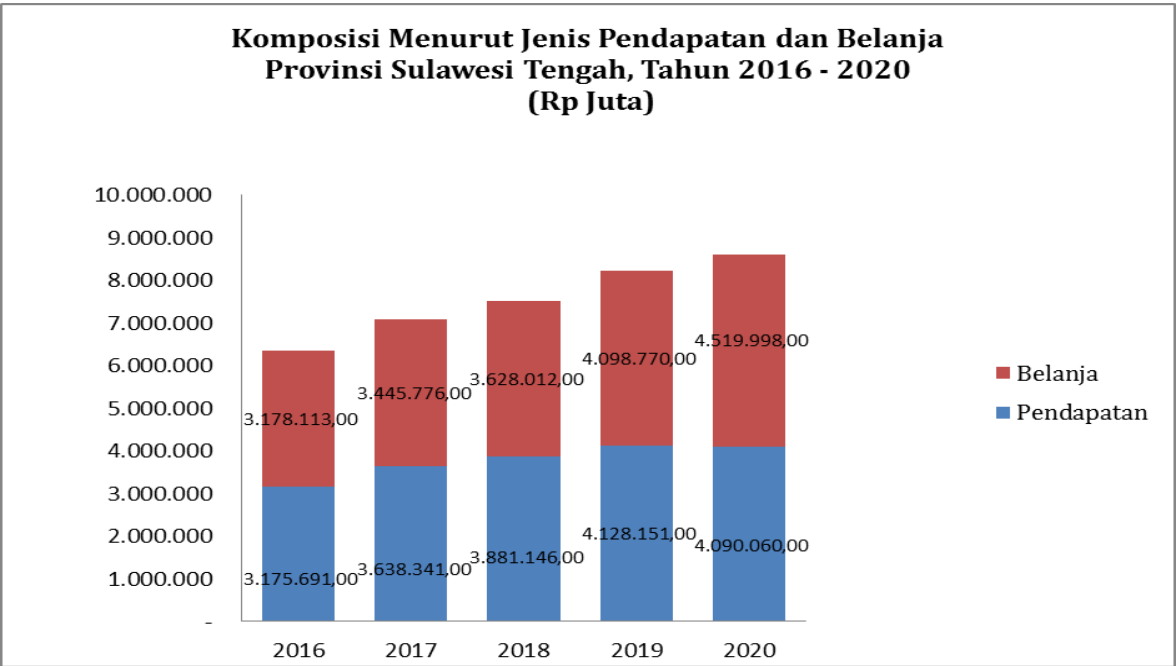
mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang mandiri dan sejahtera. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut terkait perkembangan dan komposisi APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2.1 Komposisi APBD Berdasarkan Pendapatan dan Belanja

APBD menunjukkan komponen pendapatan dan belanja daerah Sulawesi Tengah. Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

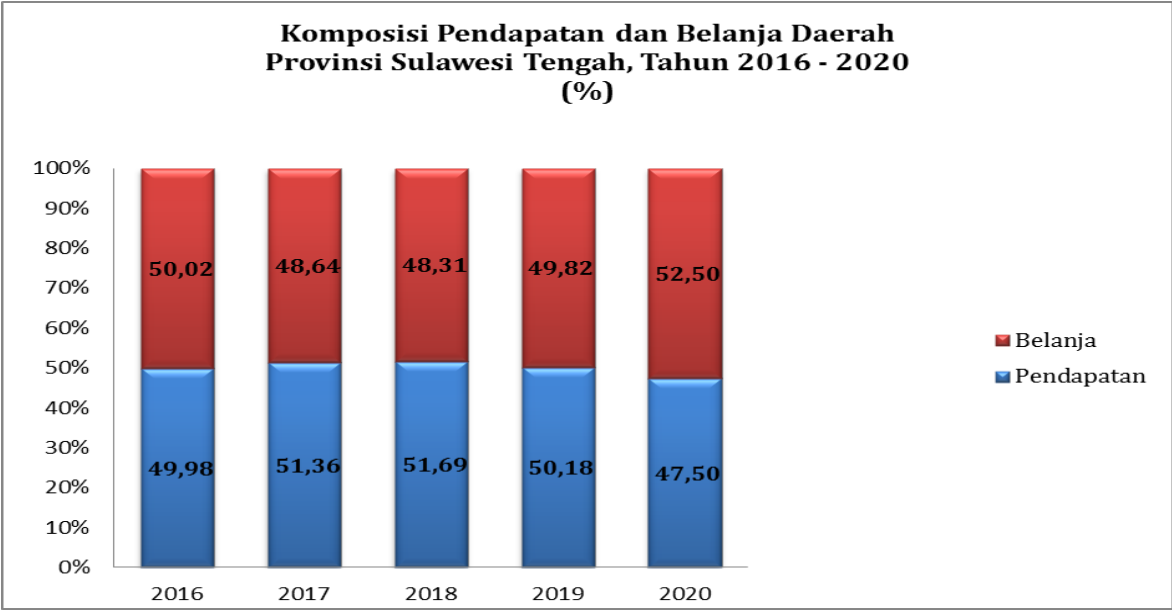
Perkembangan antar waktu APBD Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan baik dari segi pendapatan maupun dari segi belanja. Nilai pendapatan daerah Tahun 2016 hingga Tahun 2019 terus mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan dikarenakan nilai PAD dan DAU yang menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan nilai belanja daerah yang terus meningkat dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Adapun perkembangan peningkatan pendapatan dan belanja daerah ditunjukkan gambar berikut ini.



Gambar 4.21.
Komposisi Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa nominal APBD Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun bila ditinjau berdasarkan persentasi, belanja daerah terus meningkat sementara pendapatan daerah justru mengalami penurunan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

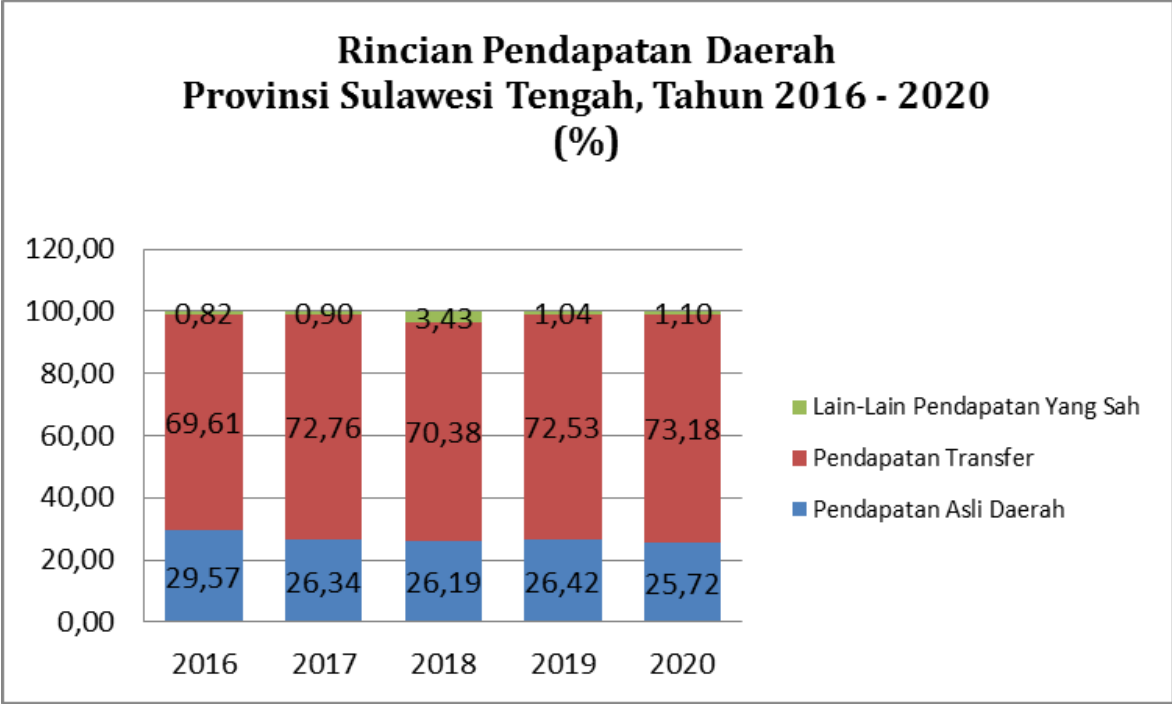


Gambar 4.22.
**Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)**

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentasi belanja berkembang semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan persentasi pendapatan yang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi APBD Sulawesi Tengah lebih besar belanja dibanding pendapatan. Belanja Daerah yang lebih besar tersebut dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi serapan anggaran dari OPD Tahun 2019 yang masih minim sehingga terdapat realisasi pendapatan lebih dari yang dianggarkan.

4.2.2 Sumber Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah
4.2.2.1 Rincian Pendapatan Daerah

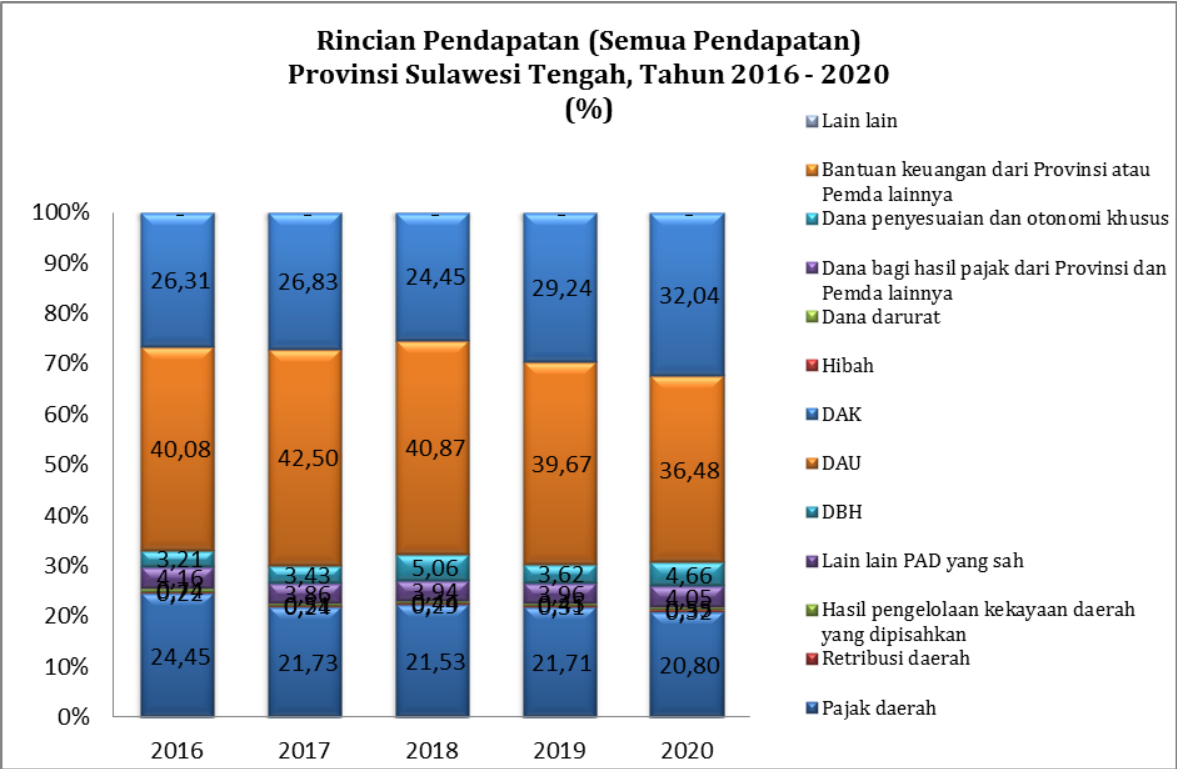
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah diartikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun komponen pembentuk pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.23.
Rincian Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan transfer menjadi komponen terbesar dalam Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020, pendapatan transfer selalu memiliki persentasi lebih dari 70 persen dari pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan Pendapatan transfer menjadi penopang utama sumber pendapatan dalam APBD di Sulawesi Tengah. Ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer pusat menggambarkan kondisi kemandirian daerah yang masih sangat rendah.

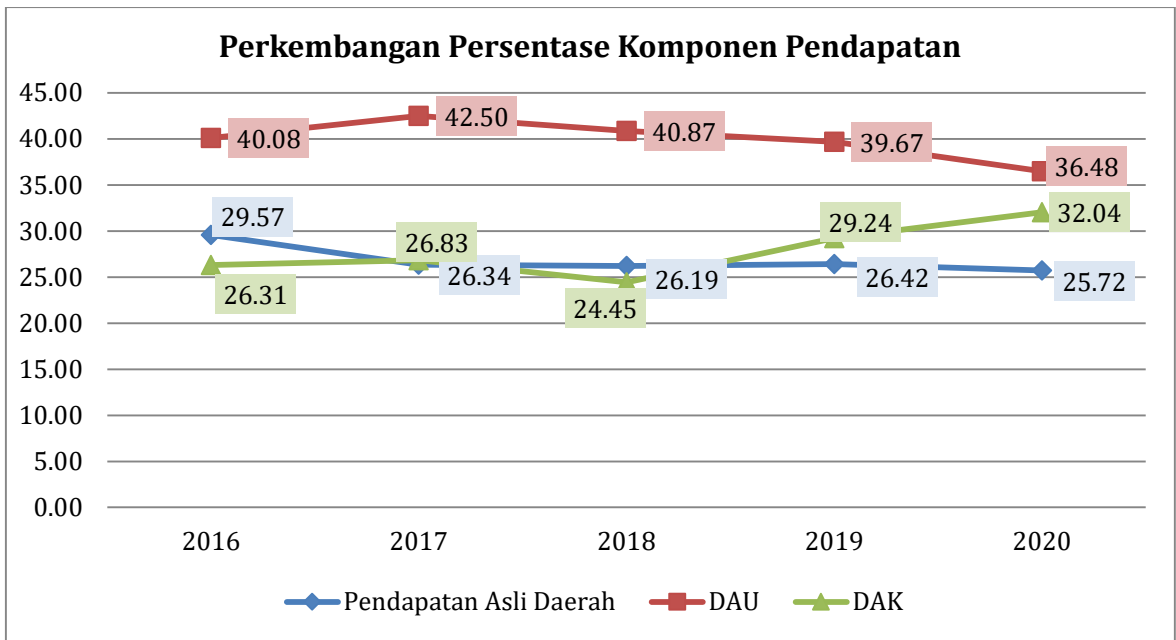
Pendapatan transfer atau Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini gambar yang menunjukkan persentase komponen pembentuk pendapatan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2016 hingga Tahun 2020.



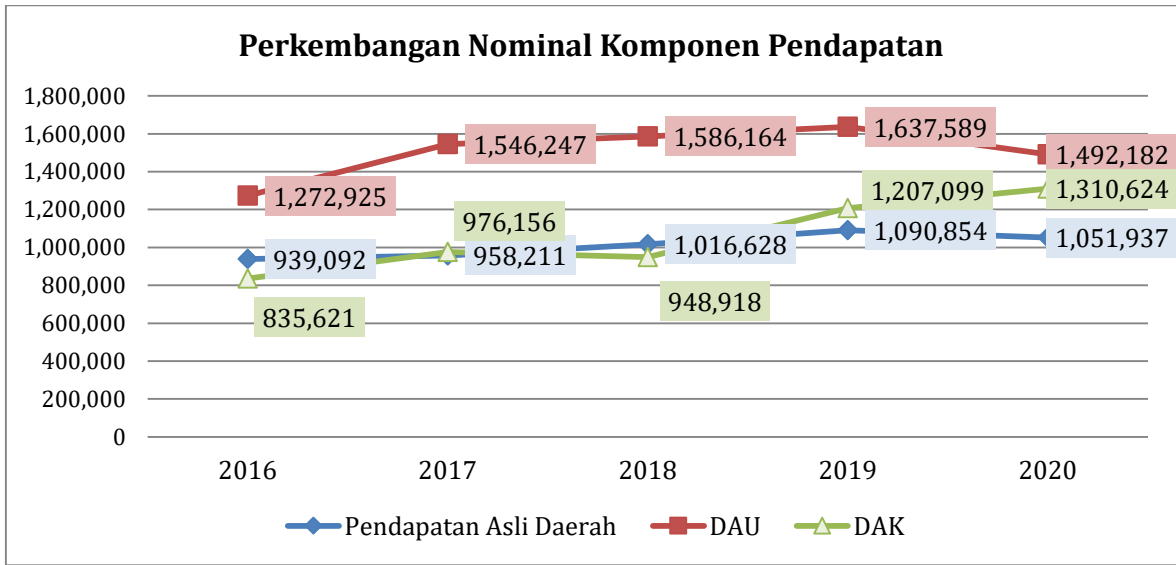
Gambar 4.24.
Rincian Pendapatan (Semua Pendapatan)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Gambar di atas menunjukkan proporsi terbesar pendapatan transfer daerah Sulawesi Tengah adalah DAU yang pada Tahun 2020 sebesar Rp 1,49 triliun atau memberikan kontribusi yang hampir mencapai 50 persen terhadap realisasi dana perimbangan. Bila ditinjau berdasarkan rincian pendapatan pada Tahun 2020, DAU memiliki persentasi 36,48 persen dari keseluruhan pendapatan, disusul DAK sebesar 32,04 persen dan Pajak Daerah sebesar 20,80 persen. Adapun komponen pendapatan daerah lainnya seperti DBH, Lain-lain PAD serta Lain-lain pendapatan yang sah hanya memiliki persentase yang kecil yakni tidak lebih dari 5 persen dari Pendapatan Daerah.

Berikut ini gambar yang menunjukkan proporsi serta perkembangan tiga komponen terbesar pembentuk pendapatan daerah di Sulawesi Tengah.



Gambar 4.25.
Perkembangan Persentase Komponen Pendapatan



Gambar 4.26.
Perkembangan Persentase Komponen Pendapatan

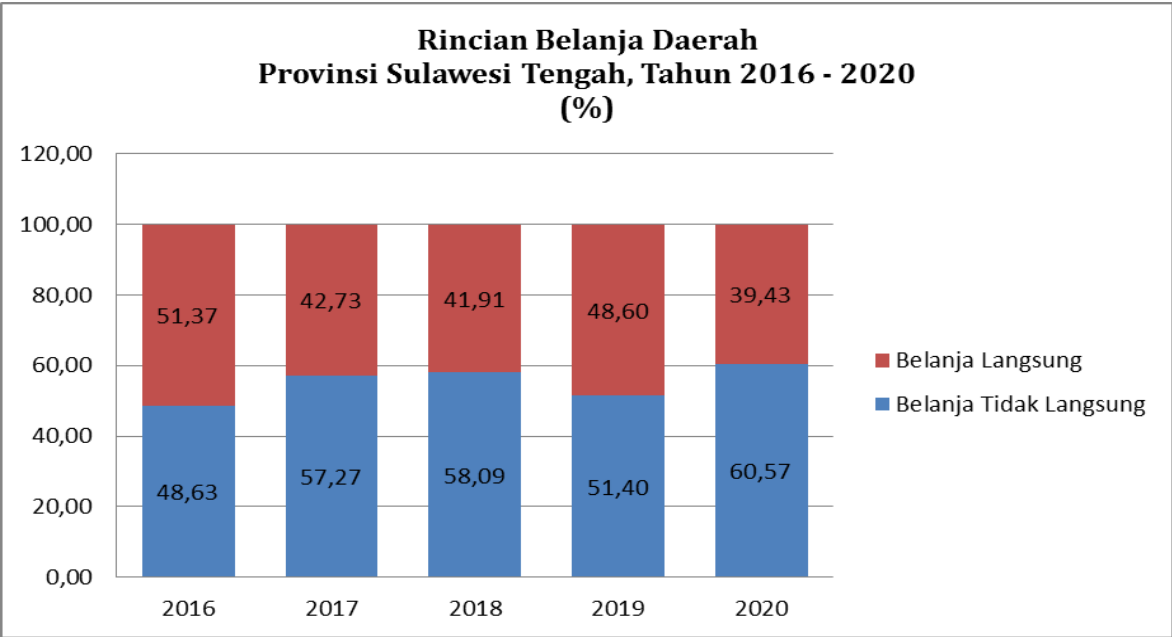
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU menjadi komponen terbesar pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Berdasarkan nominal, besaran DAU Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, namun Tahun 2020 nilai DAU sebesar Rp 1,49 Trilyun turun bila dibanding Tahun sebelumnya yakni Tahun 2019 sebesar Rp 1,63 Trilyun. Meski demikian data perkembangan persentase DAU lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tahun 2016 persentase DAU sebesar 40,08 persen dari Total pendapatan, turun menjadi 36,48 persen di Tahun 2020.

Perkembangan positif berlaku pada komponen DAK Sulawesi Tengah yang terus mengalami peningkatan baik dari segi nominal maupun persentase terhadap pendapatan total daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Secara umum, persentase dan nominal DAK dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 DAK Sulawesi Tengah sebesar Rp 835 Milyar atau sebesar 26,31 persen, terus meningkat hingga pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1,31 Trilyun atau sebesar 32,04persen dari total pendapatan.

Adapun komponen pendapatan terbesar ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen pembentuk PAD terbesar yakni 81 persen dari total PAD adalah pajak daerah. Nominal PAD secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga Tahun 2020 namun tidak cukup signifikan. Bahkan bila ditinjau dari segi persentasi, angka ini terus menurun dimana Tahun 2016 persentasi PAD sebesar 29,57 persen menjadi 25,72 persen dari total pendapatan pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal yang masih rendah.

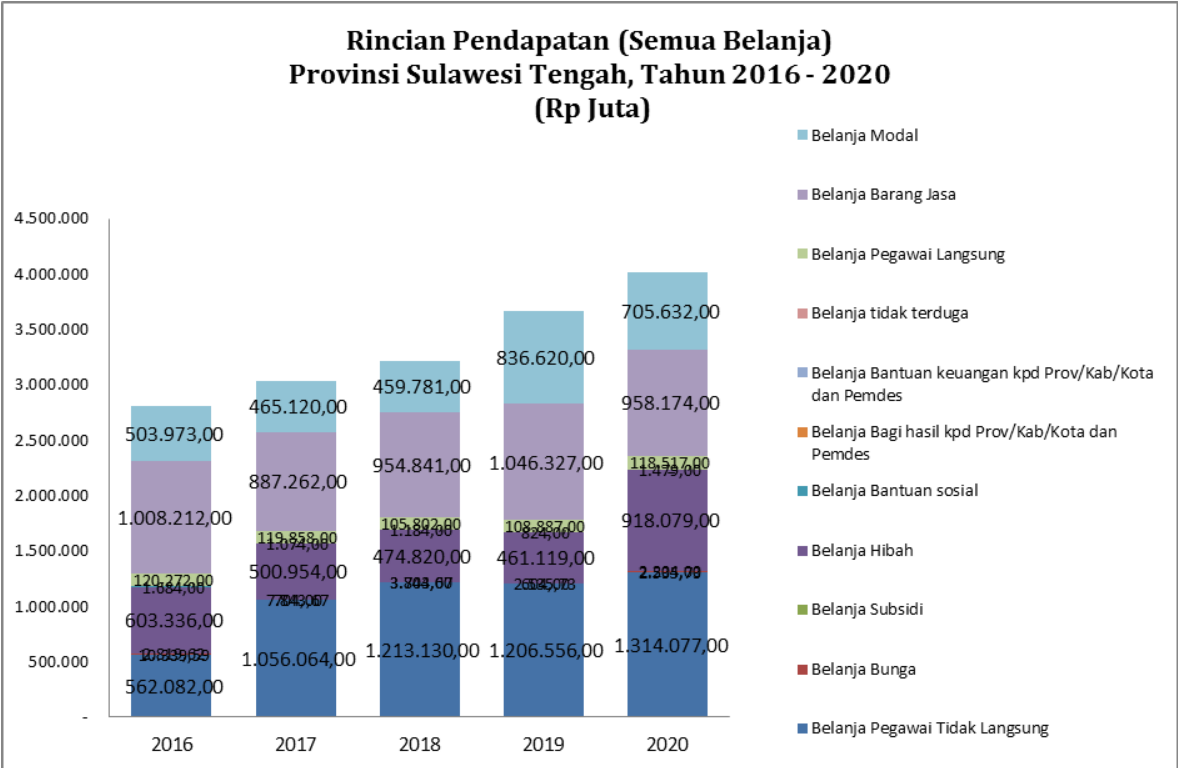
4.2.2.2 Rincian Belanja Daerah

Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Berikut komposisi belanja menurut persentase dan besaran belanja dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020.



Gambar 4.27.
Rincian Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Gambar di atas menunjukkan besaran persentase serta perkembangannya dalam lima tahun terakhir. Nampak bahwa besaran persentasi belanja langsung semakin menurun yakni 51,37 persen di Tahun 2016 turun menjadi 39,43 persen di Tahun 2020. Berbanding terbalik dengan Belanja Tidak Langsung yang memiliki persentase 48,63 persen Tahun 2016 naik menjadi 60,57 persen di Tahun 2020. Berdasarkan nilai nominal, belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami peningkatan nilai, namun peningkatan nominal belanja langsung tidak begitu signifikan sebagaimana peningkatan nominal Belanja Tidak Langsung. Berikut ini gambaran rincian belanja daerah Sulawesi Tengah menurut jenis belanja.



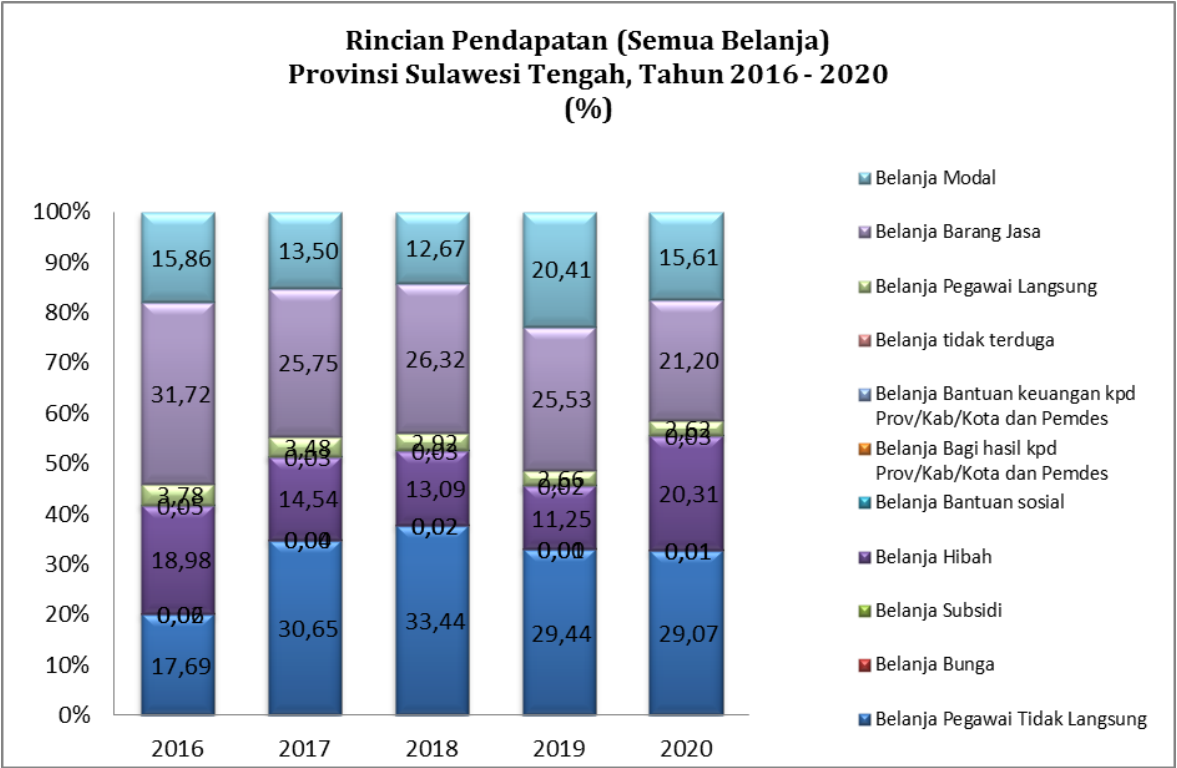
Gambar 4.28.
Rincian Pendapatan (Semua Belanja)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa komponen belanja terbesar yaitu Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Pegawai dan Belanja Hibah serta komponen Belanja Langsung yakni Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

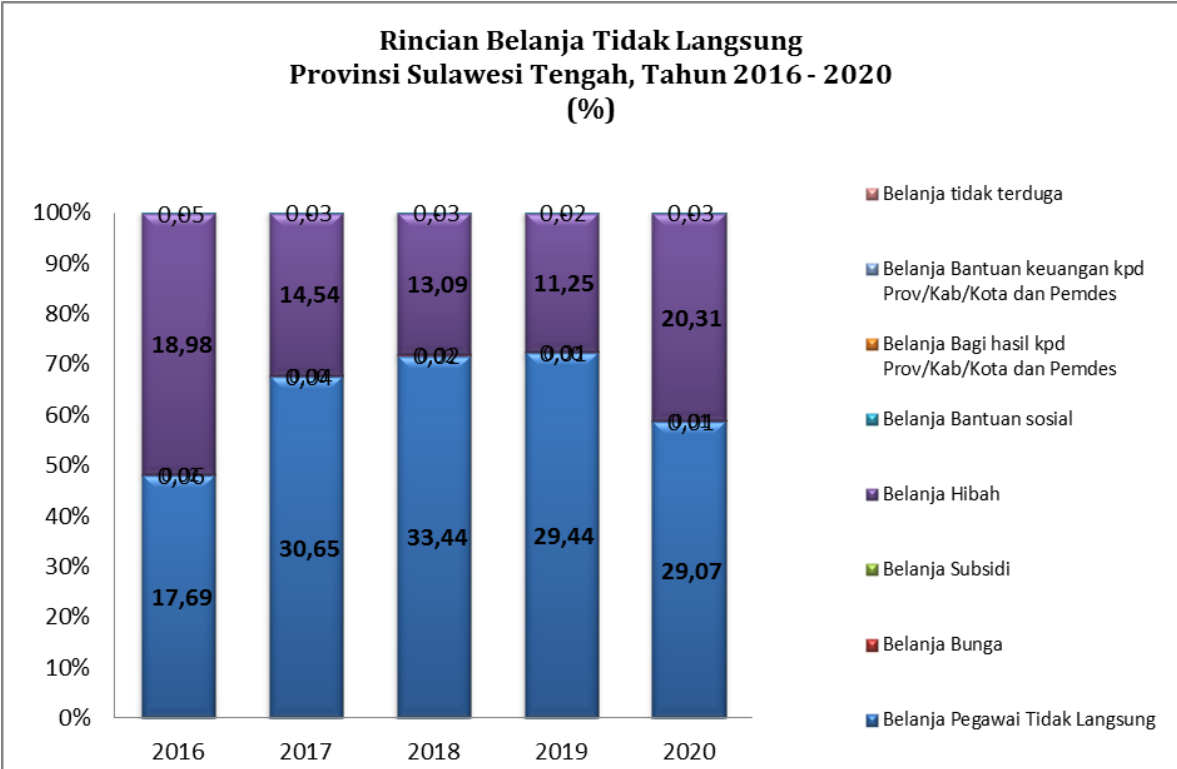
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran menjelaskan bahwa Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang bagi seluruh pegawai dan pejabat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit organisasi pemerintah. Sedangkan Belanja Hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang maupun barang yang bersifat sukarela. Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Hibah terus mengalami peningkatan baik dalam nominal maupun persentase,

Komponen Belanja Langsung yakni Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal secara umum dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan nominal belanja. Namun bila dilihat dua tahun terakhir, justru mengalami penurunan baik nominal maupun persentase. Refocusing Anggaran memangkas belanja langsung sehingga persentase belanja Barang/jasa dari Tahun 2019 sebesar 20,41 persen menjadi 15,61 persen di Tahun 2020. Begitupun belanja Modal Tahun 2019 sebesar 25,53 persen turun menjadi 21,20 persen di Tahun 2020.

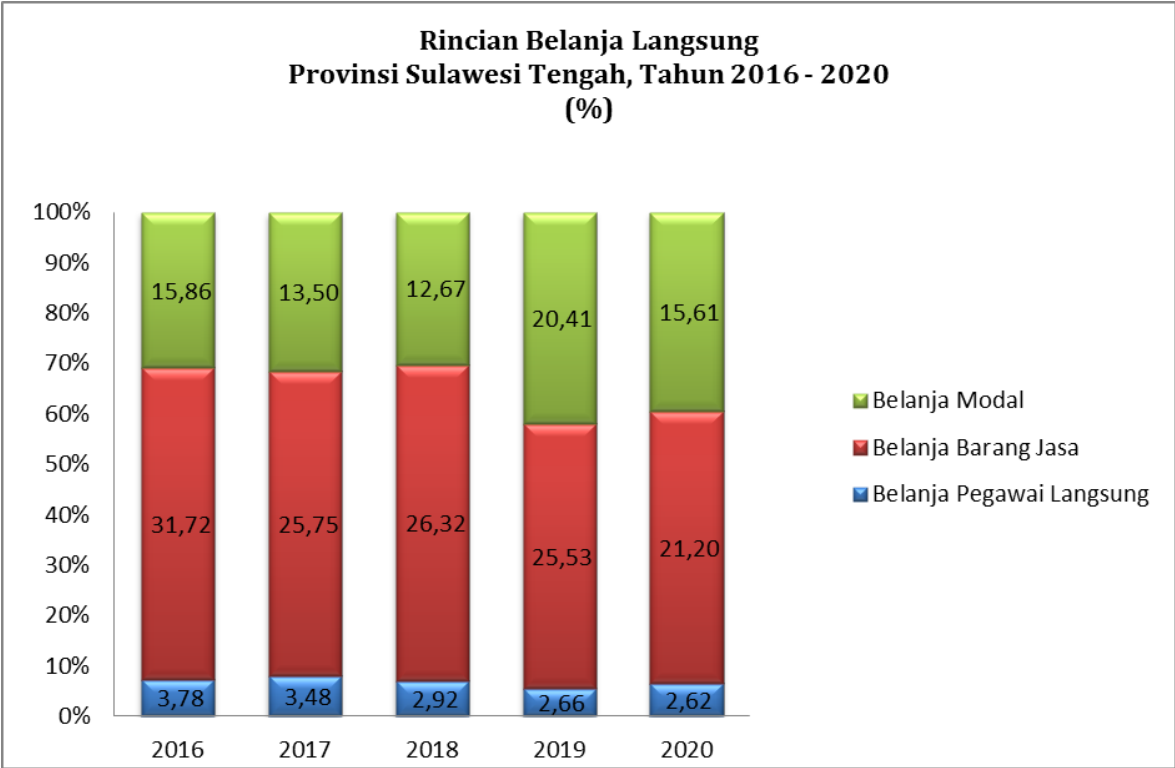
Belanja Barang/Jasa merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja dan pelayanan yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan belanja modal merupakan pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset baik fisik maupun nos fisik. Berikut ini rincian komponen belanja berdasarkan persentase.



Gambar 4.29.
Rincian Pendapatan (Semua Belanja)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)



Gambar 4.30.
Rincian Belanja Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)



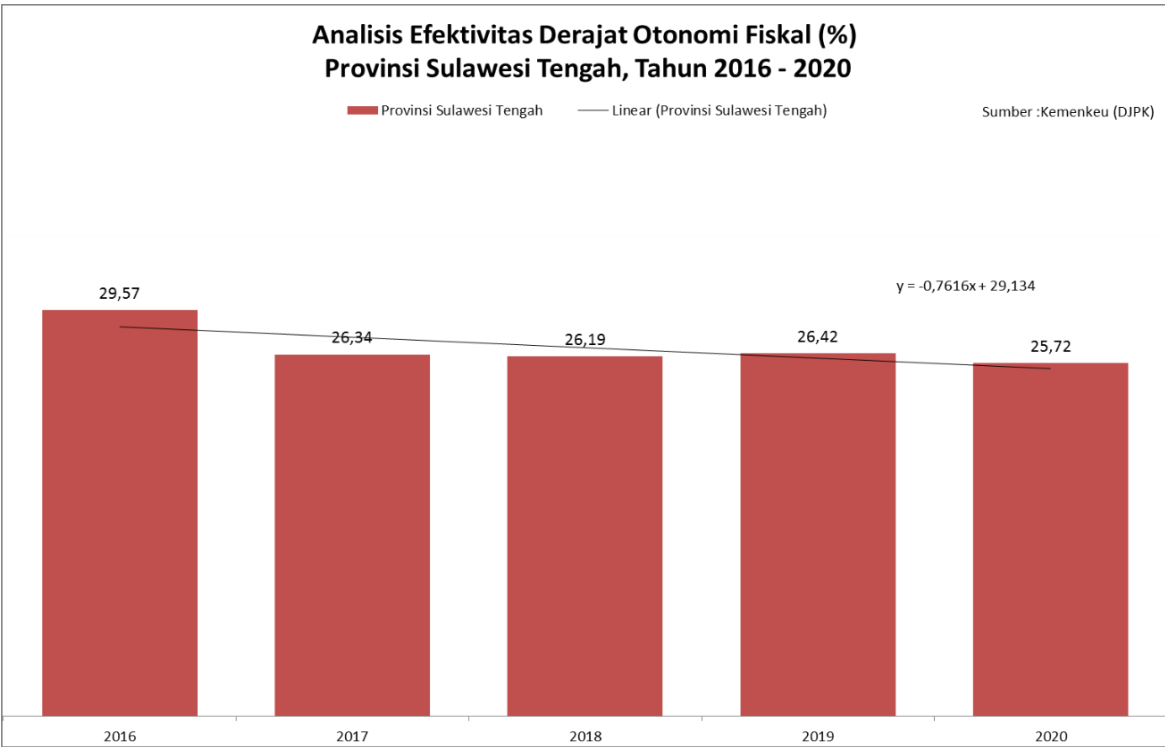
Gambar 4.31.
Rincian Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Dari beberapa tampilan gambar di atas, dapat diurutkan rincian belanja berdasarkan persentase terbesar yakni Belanja Pegawai (Tidak Langsung), Belanja Barang dan Jasa (Langsung), Belanja Hibah (Tidak Langsung) dan Belanja Modal (Langsung).

Beberapa yang menjadi catatan adalah bahwa besarnya belanja pegawai, ditambah belanja jasa kantor dan perjalanan dinas menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan besarnya anggaran yang di alokasikan untuk membiayai pejabat. Bila dibandingkan dengan anggaran yang langsung menyentuh masyarakat maupun anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memberi efek positif bagi perputaran ekonomi rakyatnya.

4.2.3 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal dan Ruang Fiskal

Kesiapan pemerintah provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari sisi perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOF). Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun berjalan. Dalam hal ini DOF akan menggambarkan besar kemampuan capaian PAD Sulawesi Tengah terhadap realisasi penerimaan daerah. Adapun perkembangan DOF Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 hingga Tahun 2020 ditunjukkan pada gambar berikut ini.

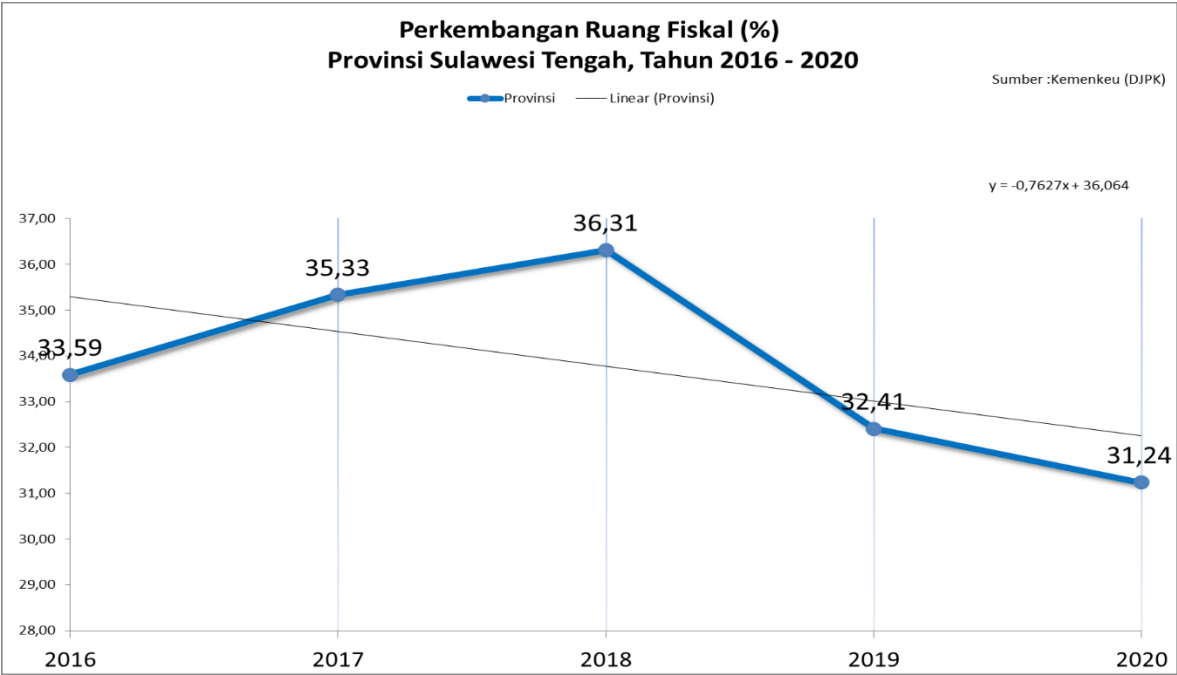


Gambar 4.32.
Analisis Efektivitas Derajat Otonomi Fiskal (%)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan DOF Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 29,57 persen pada Tahun 2016 menjadi sebesar 25,72 persen pada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa DOF yang menggambarkan Kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang terus menurun dalam lima tahun terakhir.

DOF Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 25,72 persen turut menyatakan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan bila dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah Hal ini disebabkan oleh dominanya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

Indikator lain dalam mengukur keleluasaan fiskal juga dapat dilihat dari indikator Ruang fiskal. Ruang fiskal merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan anggaran begi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Adapun gambaran ruang fiskal Sulawesi Tengah ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 4.33.
Perkembangan Ruang Fiskal (%) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Ruang fiskal adalah total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Besarnya pengeluaran yang sudah ditetapkan undang-undang (Mandatory Spending) menambah berat ruang fiskal yang dimiliki pemerintah. Gambar diatas menunjukkan tren menurun perkembangan ruang fiskal Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Kondisi ini relevan dengan perkembangan persentasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin menurun, sedangkan persentase pendapatan transfer/Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Semakin sempit ruang fiskal menunjukkan semakin sempit ruang dan semakin lemah pemerintah untuk memberikan stimulus perekonomian.

4.2.4. Relevansi dan Efektivitas APBD Terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah

Data kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2020 berada di angka 12,92 persen (BPS, 2020). Tren angka kemiskinan Sulawesi Tengah lima tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas capaian nasional bahkan masuk kedalam 10 besar tingkat kemiskinan tertinggi nasional Tahun 2020. Hal ini nampak tidak relevan dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan APBD pun turut andil dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan, serta kebijakan yang lebih efektif dan efisien menjadi unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, perlu komitmen dan upaya bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut ini anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah lewat OPD terkait penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.1 Anggaran Belanja Menurut Urusan

Bidang Urusan		Belanja 2020	Belanja 2021	Growth (%)	OPD
Wajib-yandas	Pendidikan	1.054.508.073.454	1.564.261.741.007	48,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan	491.749.889.610	393.554.677.623	-19,97	1. Dinas Kesehatan
					2. BLUD RSUD Undata
					3. BLUD RSUD Madani
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	338.941.030.372	404.749.215.673	19,42	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
					2. Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	37.585.708.601	51.390.333.642	36,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Sosial	23.932.502.520	28.917.705.931	20,83	Dinas Sosial Provinsi
Wajib non yandas	Tenaga Kerja	34.480.512.377	36.032.282.368	4,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak	14.966.887.144	18.051.935.133	20,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan	61.513.922.616	66.707.520.460	8,44	Dinas Pangan Provinsi
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.523.634.168	17.189.791.868	4,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16.677.385.522	24.346.377.076	45,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Urusan Pilihan	Kelautan Dan Perikanan	44.243.941.920	68.368.652.879	54,53	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata	16.519.531.298	21.916.430.003	32,67	Dinas Pariwisata.
	Pertanian	76.049.059.231	95.829.067.476	26,01	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		71.349.816.401	89.153.795.004	24,95	2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Kehutanan	60.447.204.719	83.214.220.266	37,66	Dinas Kehutanan Provinsi
	Energi Dan Sumber Daya	17.354.608.908	21.472.929.311	23,73	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Perdagangan perindustrian	29.461.909.984	34.281.666.619	16,36	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sumber: Perda No.5 Thn 2020 tentang APBD -P 2020 dan Pergub No.3 Thn 2021 Tentang Penjabaran APBD					

Gambar di atas menunjukkan besaran alokasi belanja menurut urusan. Adapun Alokasi anggaran **pendidikan telam memenuhi aturan dimana telah ditetapkan bahwa sebesar 20% dari APBD** sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Hasil olah data menunjukkan bahwa persentasi anggaran Belanja untuk pendidikan adalah sebesar 23 persen Tahun 2020 dan sebesar 36 persen Tahun 2021. Walaupun jika ditilik lebih dalam dan dipisahkan dari administrasi keuangan perangkat daerah yang didalamnya menyangkut gaji ASN dan pelaksanaan Akuntansi SKPD, persentase yang dicapai untuk bidang pendidikan hanya berkisar 10,76 persen Tahun 2020 dan 11, 27 persen Tahun 2021 dari Total Belanja Daerah

Besar anggaran **kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10%** (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah **di luar gaji** sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun pada praktiknya, anggaran kesehatan diluar gaji untuk daerah Sulawesi Tengah masih belum dapat diterapkan. **Karena Anggaran Kesehatan Tahun 2020 hanya sebesar 8,03 persen dari APBD. Angka ini turun menjadi 6 persen di Tahun 2021 menjadi sebesar 6,19 persen dari APBD.** Oleh sebab itu, APBD untuk bidang kesehatan dinilai kurang relevan dengan amanah dan ketentuan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, belanja daerah yang berkenaan dengan bidang-bidang penanggulangan kemiskinan mengalami pertumbuhan anggaran dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Namun hal ini bertolak belakang dengan belanja bidang kesehatan Tahun 2021 yang justru mengalami penurunan 19,97 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk menyoroti kebijakan anggaran dan memperbaiki kinerja OPD khususnya bidang kesehatan.

Kebijakan anggaran dinilai belum efektif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan mengingat angka kemiskinan Sulawesi Tengah masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Selain itu kebijakan anggaran dinilai belum relevan pemanfaatannya mengingat bidang kesehatan mengalami penurunan nilai alokasi belanja serta sebagian besar anggaran dipergunakan untuk membiayai pegawai pada unit kerja pemerintah, pembiayaan jasa kantor, perjalanan dinas dan belanja lainnya yang tidak berkenaan dengan

penanggulangan kemiskinan maupun infrastruktur bagi pemenuhan kebutuhan rakyat.

Adapun harapan kedepan dalam hal pelaksanaan kebijakan anggaran agar tersedianya alokasi anggaran dan program penanggulangan kemiskinan secara lebih besar, baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi keterlibatan OPD. Selain itu, Pemanfaatan data mutakhir terkait kemiskinan oleh seluruh OPD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perlu lebih ditingkatkan.

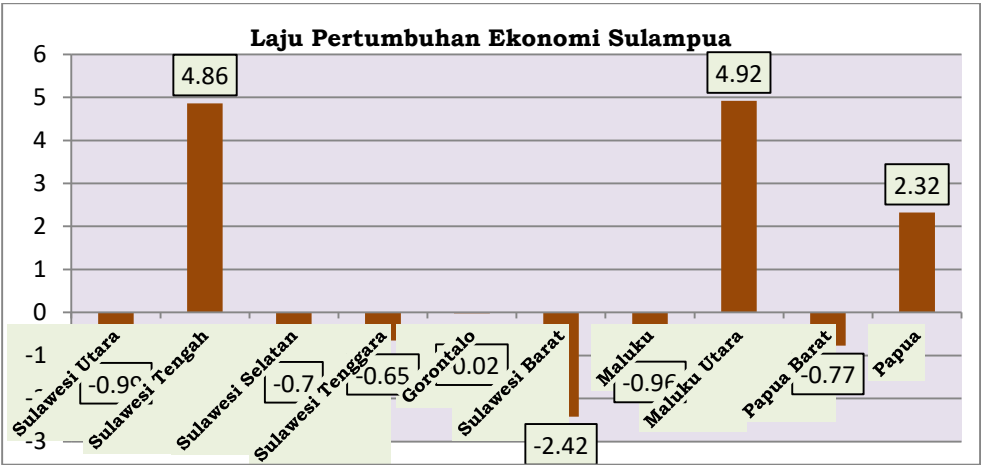
4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1. Faktor Pendorong

4.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi spektakuler. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020, kecuali pada tahun 2018 dan 2020 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan larangan ekspor bahan mentah minerba dan dampak bencana pandemi covid19. Meski demikian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih lebih tinggi selama tahun 2016-2020.

Saat bencana pandemi covid19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sampai -2,07 persen, namun Sulawesi Tengah mampu tumbuh pada angka 4,86 persen. Demikian pula, dalam skala regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama.



Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Gambar 4.34.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulampua

4.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita.

Tabel 4.2.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran makanan	420.182	480.986	474.811	505.608	516.839
Pengeluaran non makanan	422.730	437.364	465.824	478.032	1.035.777
Total Pengeluaran Perkapita	842.912	918.350	940.635	983.640	1.552.616
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan per Kapita	50,15	47,62	49,52	48,60	66,71

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2021.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp. 842.912,- perkapita perbulan pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.552.616,- perkapita perbulan pada Tahun 2020. Konsumsi rumah tangga dari non pangan Tahun 2020 lebih dominan di banding Tahun-Tahun sebelumnya.

Demikian pula dengan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita Sulawesi Tengah dari Tahun 2016-2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni pada Tahun 2016 sebesar Rp. 422.730,- perkapita/bulan, meningkat menjadi Rp.1.035.777,- perkapita/bulan pada Tahun 2020. Berdasarkan nilai pengeluaran tersebut persentase pengeluaran konsumsi non pangan naik dua kali lipat dengan capaian 65,71persen.

4.3.1.3. Produksi Total Daerah

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni pada Tahun 2016 nilai tambah total sebesar Rp.91.014.565,- mengalami peningkatan setiap Tahun hingga mencapai Rp.111.033.074,- pada Tahun 2020, atau 74,67 persen produksi total angkatan kerja.

Tabel 4.3
Perkembangan Produksi Total Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

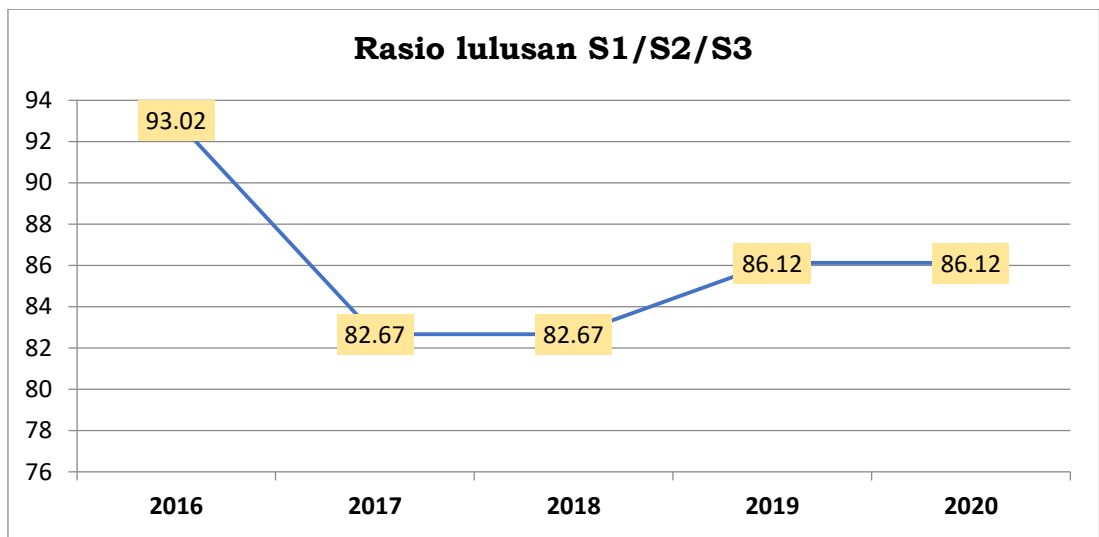
Uraian	2016	2017	2018	2019
Total Nilai Tambah (Rp)	91.014.565	97.474.859	103.593.339	111.003.074
Angkatan Kerja (orang)	1.509.505	1.428.583	1.502.972	1.486.561
Produktivitas Total Daerah	60,29	68,23	68,93	74,67

Sumber: BPS Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Data Diolah kembali).

4.3.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja khususnya di daerah. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 tersaji pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2020 (Diolah Kembali).

Gambar 4.35.
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

4.3.2. Faktor Penghambat

4.3.2.1. Pandemi Covid-19

Sejak mewabahnya virus corona (Covid-19) semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang terjangkit positif covid. Sehingga mengancam upaya peningkatan produksi dan perbaikan ekonomi yang dikhawatirkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan interaksi masyarakat (*social and physical distancing*). Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah meninjau kembali pengalokasian anggarannya ke tujuan mempercepat pengentasan dampak corona, terutama dari sisi kesehatan masyarakat.

Kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan dengan keluarga Surat Edaran Nomor 443/141/DIS-KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah. Salah satu poin penting di dalamnya adalah membatasi Pergerakan Arus Barang dengan Penumpang dengan mengeluarkan SE Kepada para Gubernur se Sulawesi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adanya pembatasan interaksi masyarakat dan pergerakan arus barang dalam mencegah meluasnya penularan wabah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kondisi tersebut adalah: (1) menurunnya interaksi antar masyarakat menyebabkan penurunan pendapatan, dan dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan masyarakat miskin baru pada tiga kabupaten (Donggala, Tolitoli dan Buol) di Sulawesi Tengah, (2) menurunnya penghasilan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah terutama pusat konsumen di Kota Palu akibat terbatasnya lapangan pekerjaan berkonsekuensi pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses pangan terbatas termasuk pangan hewani dari jenis ikan. (3) terbatasnya aliran barang dan jasa menyebabkan tersendatnya distribusi kebutuhan rumah tangga dan operasional seperti bahan bakar minyak, konsumsi, dan penunjang lain.

Realitas menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah belum secara signifikan mengatasi penularan wabah covid-19, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi terutama daerah-daerah yang tingkat penularan covid-19 rendah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini ditujukan agar ketersediaan bahan pokok terjamin, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil).

4.3.2.2. Potensi dan Penanganan Dampak Bencana Alam

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September 2018 lalu, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dana prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi (*earthquake*). Penyebab utama adanya Patahan Palu Koro (Sesar Palu Koro) yang memanjang dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone dengan panjang sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada di sekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relatif dangkal.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman.

Total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut.

4.4 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis ToC, causal attribution, analisis faktor pendukung dan penghambAt serta analisis situasi terkait pendapatan dan belanja kemiskinan maka dirumuskan isu strategis, seperti yang tertera pada Tabel berikut.

Tabel 4.4.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang	Rumusan Isu Strategis
Pendidikan	Peningkatan akses hak dasar pendidikan melalui kebijakan Penerapan kebijakan merdeka belajar di daerah, Menyelenggarakan sekolah gratis anak usia SMA yang putus sekolah dengan alasan ekonomi, Menyelenggarakan pendidikan vokasi, Meningkatkan mutu dan pemerataan distribusi tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah, dan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sasaran kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang berada pada wilayah prioritas Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi.
Kesehatan	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat

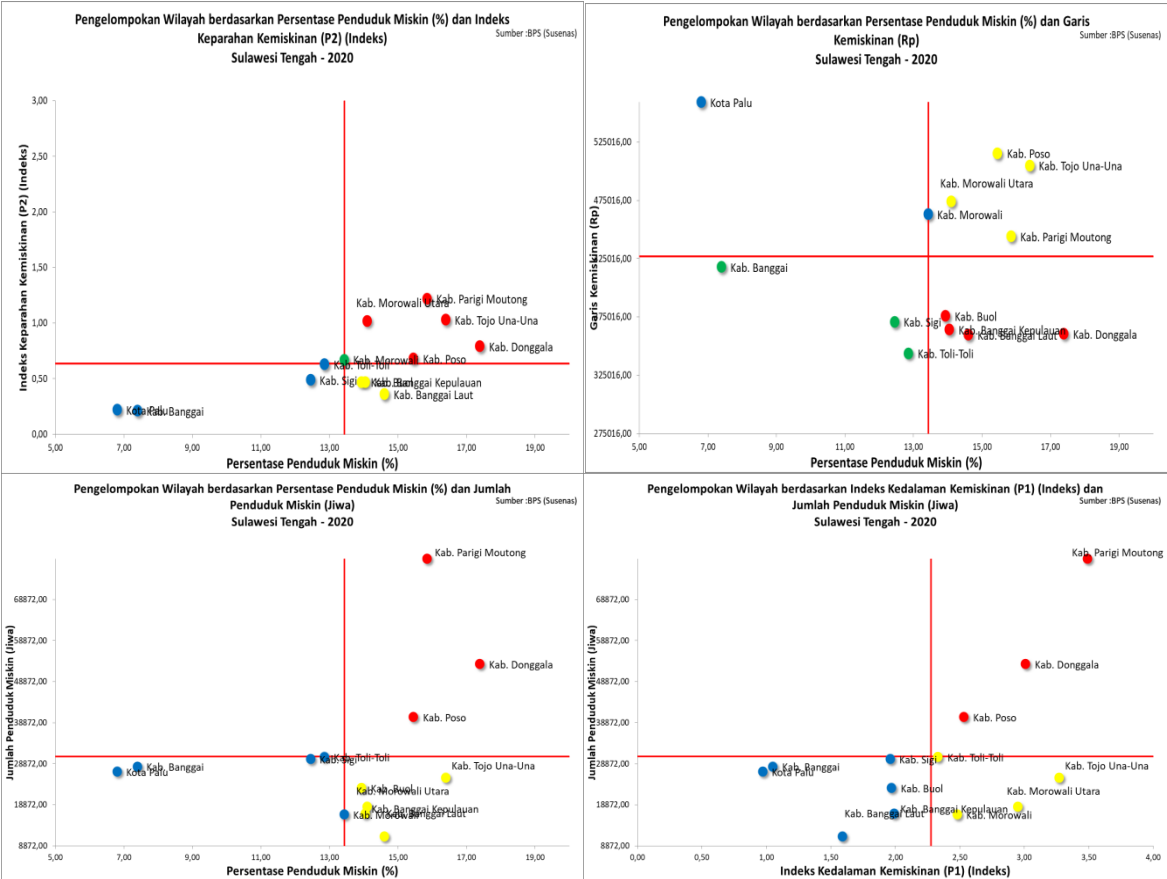
	melalui kebijakan penurunan angka stunting, penurunan penduduk dengan pengobatan sendiri, dan penurunan persentase morbiditas. Sasaran kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang berada pada wilayah prioritas seperti Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, serta Kabupaten Buol.
Infrastruktur Dasar Perumahan	Peningkatan rumah hunian yang layak dan terjangkau melalui kebijakan peningkatkan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pembangunan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah dengan air minum layak dan sanitasi layak yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala.
Ketenagakerjaan dan sosial	Peningkatan kesempatan bekerja melalui kebijakan kemudahan berinvestasi, pengembangan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan energi listrik, perbaikan jalan dari sumber bahan baku ke kawasan industri, pembinaan UKM dan wirausaha, dan peningkatan program padat karya. Pembangunan diprioritaskan bagi masyarakat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi seperti Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Buol dan Tolitoli.
Ketahanan Pangan	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal terutama padi, jagung, ubi kayu, sagu, ubi banggai, dan ubi jalar melalui diversifikasi pangan, penciptaan produk olahan pangan tahan lama dan higienis, dan penerapan pola pangan harapan (PPH). Sasaran masyarakat melalui kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) di daerah-daerah rawan pangan seperti Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong dan Sigi.
Pertanian	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi ternak unggulan daerah melalui intensifikasi lahan pertanian, penggunaan benih/bibit unggul lokal tahan hama/penyakit, penggunaan pupuk organik, pemanfaatan teknologi mesin dalam penanaman dan pemanenan, serta peningkatan peran PPL dalam perubahan pola pikir petani dan kelompoknya. Kebijakan ini diprioritaskan pada daerah-daerah yang ketersediaan pangan utama rendah seperti Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Poso dan Kabupaten Buol.
Perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya (terutama rumput laut), serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan perikanan melalui penggunaan kapal dan alat tangkap dengan kapasitas tangkap yang cukup besar, penyediaan sarana produksi bagi perikanan budidaya seperti bibit dan pakan murah bagi tambak dan kolam hemat air, serta bibit rumput laut tahan hama/penyakit, serta perbaikan mutu dan penanganan hasil perikanan pasca produksi. Kebijakan ini diprioritaskan pada masyarakat nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Parigi Moutong, Donggala, Poso, Morowali Utara, Buol dan Sigi.

BAB V
LOKASI PRIORITAS

5.1. Penentuan Lokasi Prioritas Program

5.1.1 Bidang Kemiskinan Konsumsi

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam dalam rangka penentuan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5.1.
Hasil Analisis Prioritas Lokasi Berdasarkan Indikator
Kemiskinan Konsumsi di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa jika indikator persentase penduduk miskin (indikator utama) dimasukkan sebagai dasar penentuan wilayah intervensi program, maka kabupaten prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara berdasarkan indikator indeks keparahan kemiskinan, persentase penduduk miskin, indikator garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin serta kedalaman kemiskinan sebagai indikator pendukung, maka ada beberapa kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan analisa perbandingan keempat indikator kemiskinan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah secara berurutan disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Konsumsi

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% penduduk miskin)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Jml Pddk miskin-Indeks Kedalaman Kemiskinan	
Kabupaten Parigi Moutong						2
Kabupaten Tojo Una-Una						4
Kabupaten Donggala						1
Kabupaten Morowali Utara						5
Kabupaten Poso						3
Kabupaten Banggai Laut						6
Kabupaten Banggai Kepulauan						7
Kabupaten Buol						8
Kabupaten Morowali						9
Kabupaten Tolitoli						10
Kota Palu						13
Kabupaten Sigi						11
Kabupaten Banggai						12

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.

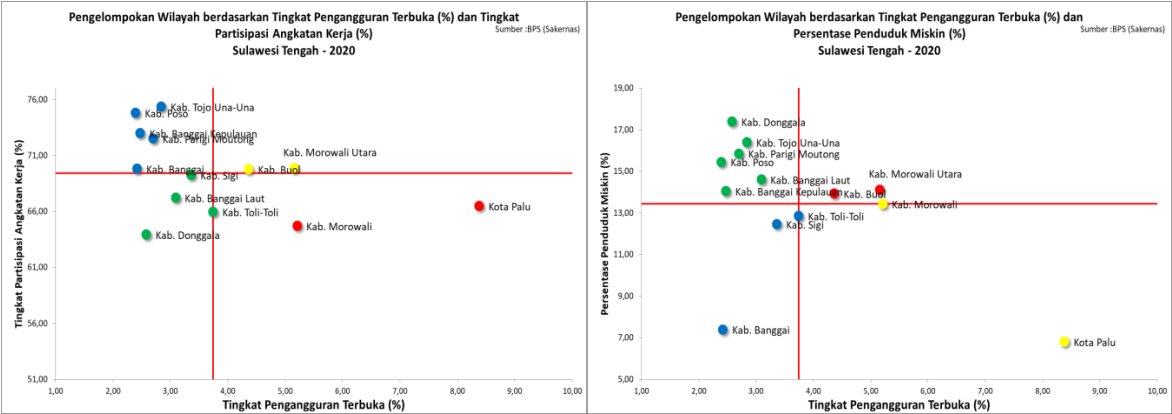
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

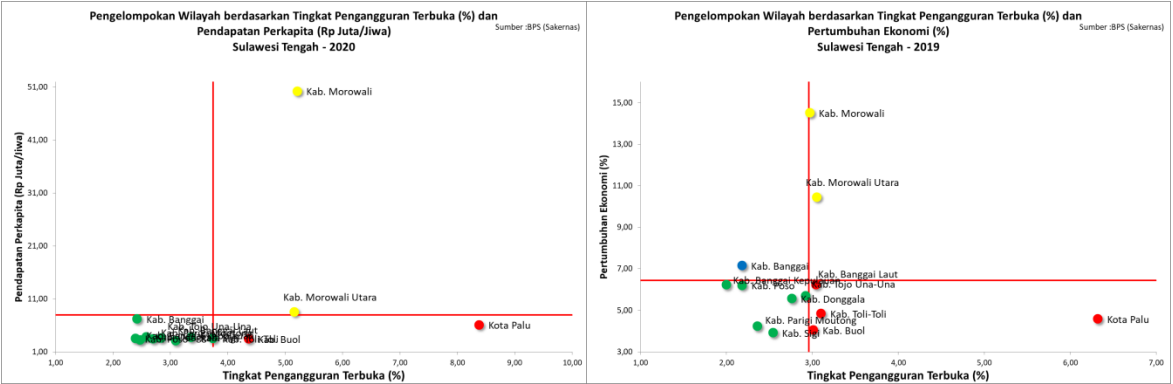
Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang konsumsi, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Donggala, Parigi Moutong,Poso,
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Morowali, Tolitoli
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Palu, Banggai, Sigi.

5.1.2. Bidang Ketenagakerjaan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 5.2. sebagai berikut.





Gambar 5.2.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tingkat pengangguran terbuka (indicator utama), kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Jika indikator TPAK, persentase penduduk miskin, pertumbuhan perkapita dan pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai dasar penentuan wilayah intervensi program, maka terdapat beberapa kabupaten yang prioritas berbeda dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah secara berurutan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% TPT)	Indikator Pendukung				Prioritas
		TPAK(%)	Persentase Penduduk miskin(%)	Pendapatan perkapita (Rp/thn)	Pertumbuhan ekonomi	
Kabupaten Parigi Moutong						7
Kabupaten Tojo Una-Una						10
Kabupaten Donggala						8
Kabupaten Morowali Utara						3
Kabupaten Poso						11
Kabupaten Banggai Laut						6
Kabupaten Banggai Kepulauan						12
Kabupaten Buol						2
Kabupaten Morowali						4
Kabupaten Tolitoli						5
Kota Palu						1
Kabupaten Sigi						9
Kabupaten Banggai						13

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang ketenagakerjaan, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

- Prioritas 1** Lokasi kabupaten/kota: Palu dan Buol
- Prioritas 2** Lokasi Kabupaten/kota: Morowali Utara, Morowali dan Tolitoli
- Prioritas 3** Lokasi Kabupaten/kota: Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, Poso dan Sigi
- Prioritas 4** Lokasi Kabupaten/kota: Banggai

5.1.3 Bidang Kesehatan

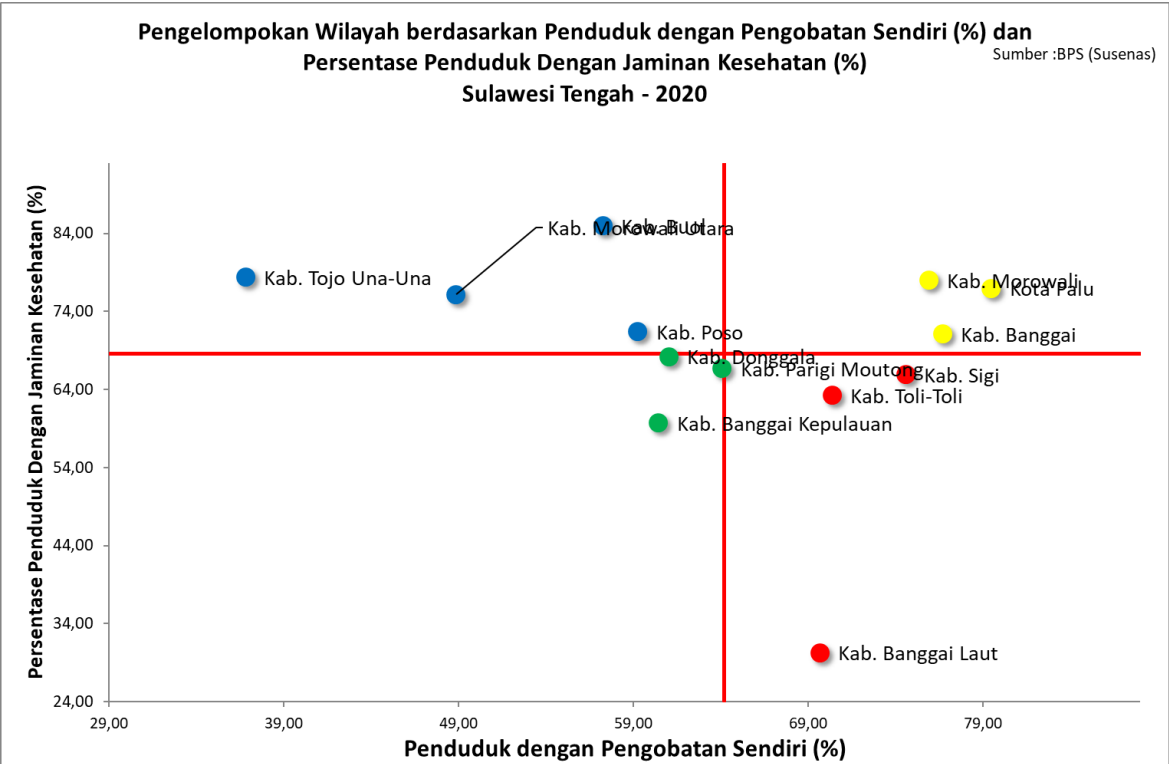
Berangkat dari permasalahan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka ditetapkan beberapa program dalam upaya perbaikan kualitas kesehatan daerah. Adapun program urusan pemerintahan Bidang Kesehatan diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, yang berkolaborasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lain serta pemangku kepentingan, dengan tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kesehatan.

1. Indikator Utama Persentase Penduduk dengan Pengobatan Sendiri

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan indikator utama: persentase penduduk dengan pengobatan sendiri, dan indikator pendukung: persentase penduduk dengan jaminan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan sebagai berikut.



Gambar 5.3. Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri dan Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan

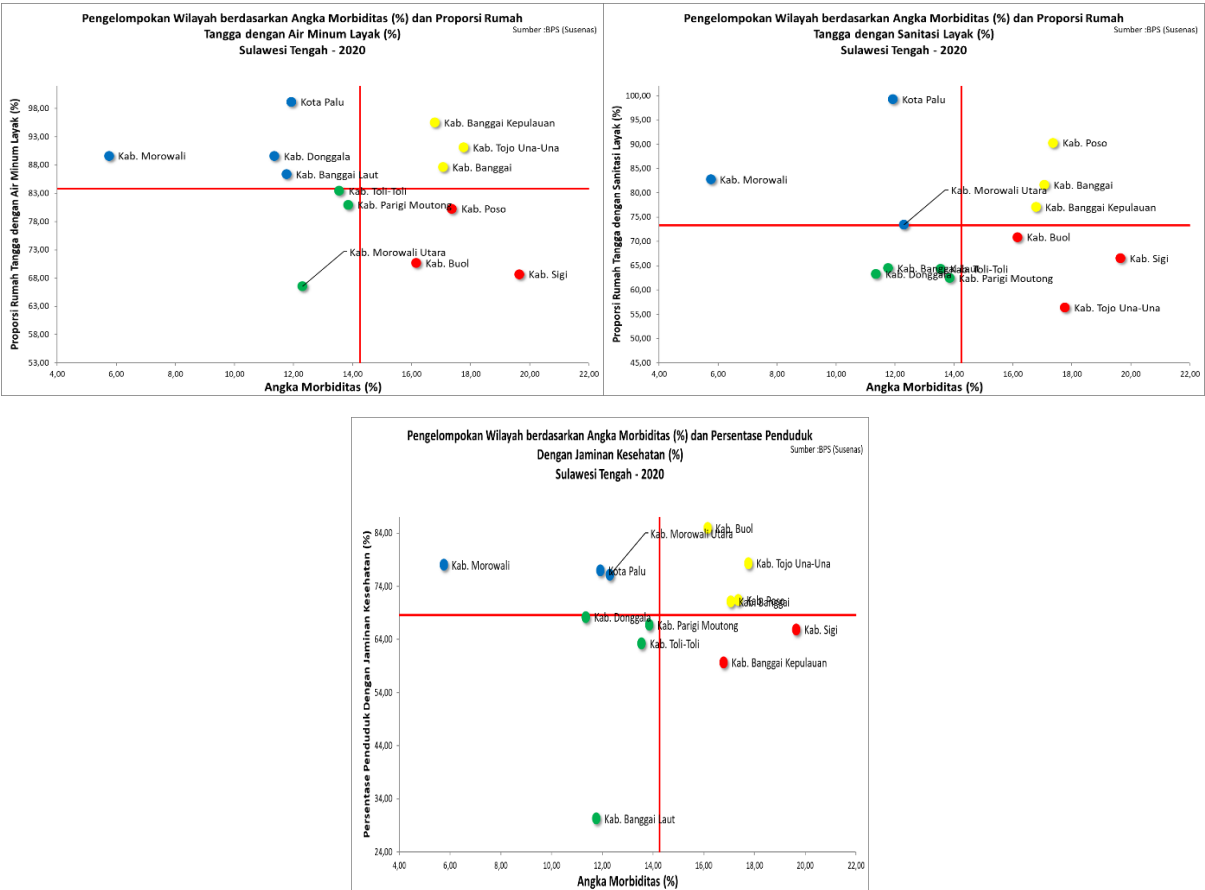
Gambar di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan indikator persentase penduduk dengan pengobatan sendiri, dan indikator persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, menunjukkan kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Sigi. Selengkapnya hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator utama dan pendukung diperoleh urutan prioritas sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Penentuan Lokasi Prioritas Pemberian Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kabupaten Banggai Laut	1	
2.	Kabupaten Toli-Toli	1	
3.	Kabupaten Sigi	1	
4.	Kabupaten Banggai	2	
5.	Kota Palu	2	
6.	Kabupaten Morowali	2	
7.	Kabupaten Banggai Kepulauan	3	
8.	Kabupaten Parigi Moutong	3	
9.	Kabupaten Donggala	3	
10.	Kabupaten Poso	4	
11.	Kabupaten Tojo Una-Una	4	
12.	Kabupaten Buol	4	
13.	Kabupaten Morowali Utara	4	

2. Indikator Utama Angka Morbiditas

Berikut gambaran analisis pengelompokan wilayah berdasarkan angka morbiditas (indikator utama), dan 3 (tiga) indiktor pendukung: proporsi rumah tangga dengan air minum layak, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 5.4.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Persentase Angka Morbiditas

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama: angka morbiditas dan hubungannya dengan indikator pendukung, menunjukkan wilayah yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada di wilayah Kabupaten Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Buol. Selengkapnya uraian hasil analisis prioritas berdasarkan indikator utama Angka Mordibitas duraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Indikator Utama Angka Morbiditas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

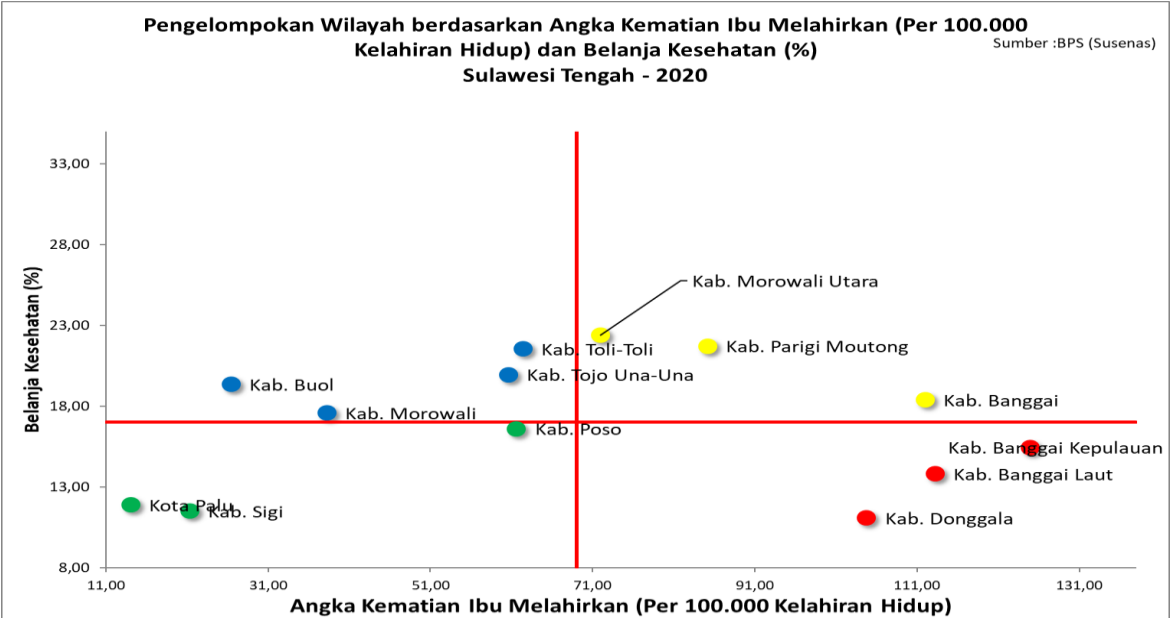
Kabupaten/Kota	Ind. Utama	Indikator Pendukung			Prioritas
	(% Morbiditas)	Air Minum Layak (%)	Sanitasi Layak (%)	Jamkes (%)	
Kabupaten Parigi Moutong					7
Kabupaten Tojo Una-Una					3
Kabupaten Donggala					9
Kabupaten Morowali Utara					11
Kabupaten Poso					4
Kabupaten Banggai Laut					10
Kabupaten Banggai Kepulauan					5
Kabupaten Buol					2
Kabupaten Morowali					13
Kabupaten Tolitoli					8
Kota Palu					12
Kabupaten Sigi					1
Kabupaten Banggai					6

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator utama Angka Morbiditas dan indikator pendukungnya, diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota sebagai berikut:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Sigi, dan Buol.
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Tojo Una-Una, Poso, Banggai Kepulauan, dan Banggai.
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Parigi Moutong, Tolitoli, Donggala, dan Banggai Laut.
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Morowali, Palu, Morowali Utara, dan Banggai Laut.

3. Indikator Utama Angka Kematian Ibu Melahirkan

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan indikator utama: angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, dan indikator pendukung: persentase belanja kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan sebagai berikut.



Gambar 5.5.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah
Berdasarkan Indikator Utama Angka Kematian Ibu Melahirkan

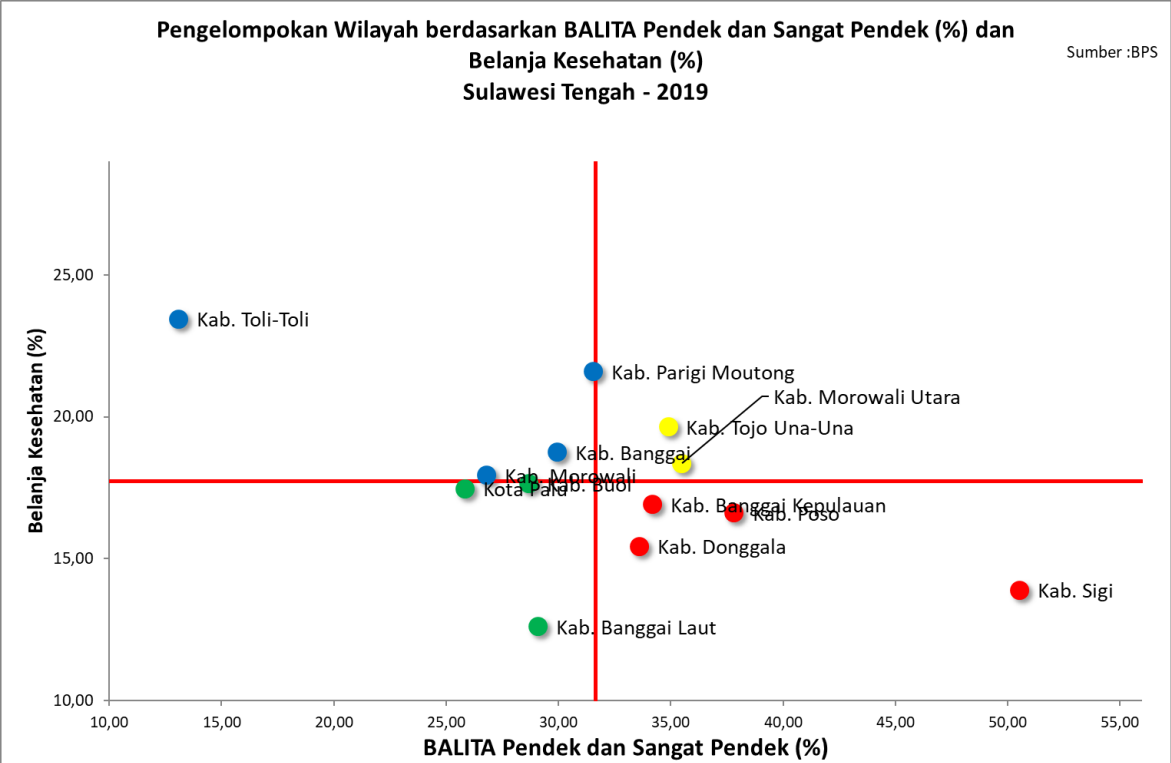
Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama: angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, dan indikator pendukung: persentase belanja kesehatan, menunjukkan kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk tersebut, diperoleh urutan prioritas intervensi sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Penentuan Lokasi Prioritas Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kabupaten Donggala	1	
2.	Kabupaten Banggai Laut	1	
3.	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	
4.	Kabupaten Banggai	2	
5.	Kabupaten Parigi Moutong	2	
6.	Kabupaten Morowali Utara	2	
7.	Kota Palu	3	
8.	Kabupaten Sigi	3	
9.	Kabupaten Poso	3	
10.	Kabupaten Morowali	4	
11.	Kabupaten Tojo Una-Una	4	
12.	Kabupaten Buol	4	
13.	Kabupaten Tolitoli	4	

4. Indikator Utama Persentase Stunting

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan indikator utama: persentase Balita pendek dan sangat pendek (Stunting), dan indikator pendukung: persentase belanja kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan sebagai berikut.



Gambar 5.6.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah
Berdasarkan Indikator Utama Persentase Stunting

Gambar di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan indikator utama: persentase Balita pendek dan sangat pendek (Stunting), dan indikator pendukung: persentase belanja kesehatan, menunjukkan kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk tersebut, diperoleh urutan prioritas intervensi sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Penentuan Lokasi Prioritas Penurunan Angka Stunting
Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

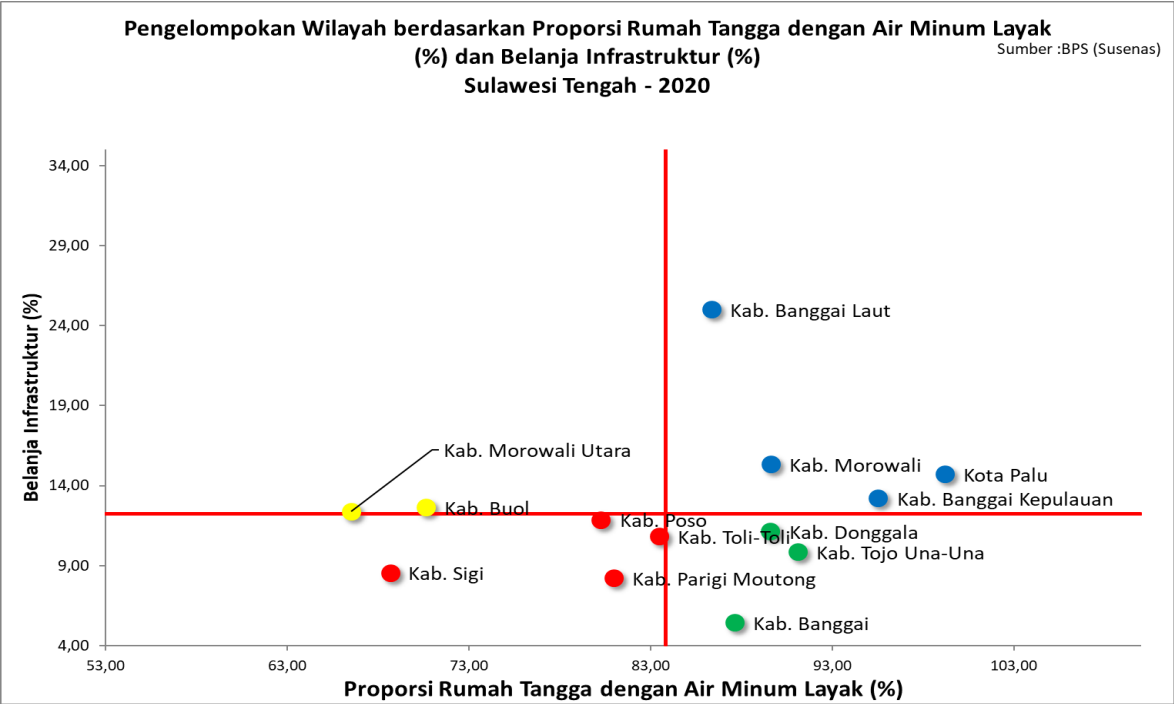
No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kabupaten Donggala	1	
2.	Kabupaten Sigi	1	
3.	Kabupaten Poso	1	
4.	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	
5.	Kabupaten Tojo Una-Una	2	
6.	Kabupaten Morowali Utara	2	
7.	Kabupaten Banggai Laut	3	
8.	Kota Palu	3	
9.	Kabupaten Buol	3	
10.	Kabupaten Morowali	4	
11.	Kabupaten Banggai	4	
12.	Kabupaten Parigi Moutong	4	
13.	Kabupaten Tolitoli	4	

5.1.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Berangkat dari permasalahan bidang Infrastruktur Dasar yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dirumuskan beberapa program. Program-program urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur Dasar dimaksud, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020. Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, yang disajikan sebagai berikut.

1. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut.



Gambar 5.7.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Proporsi Rumah
Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Poso. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan prioritas sebagai berikut.

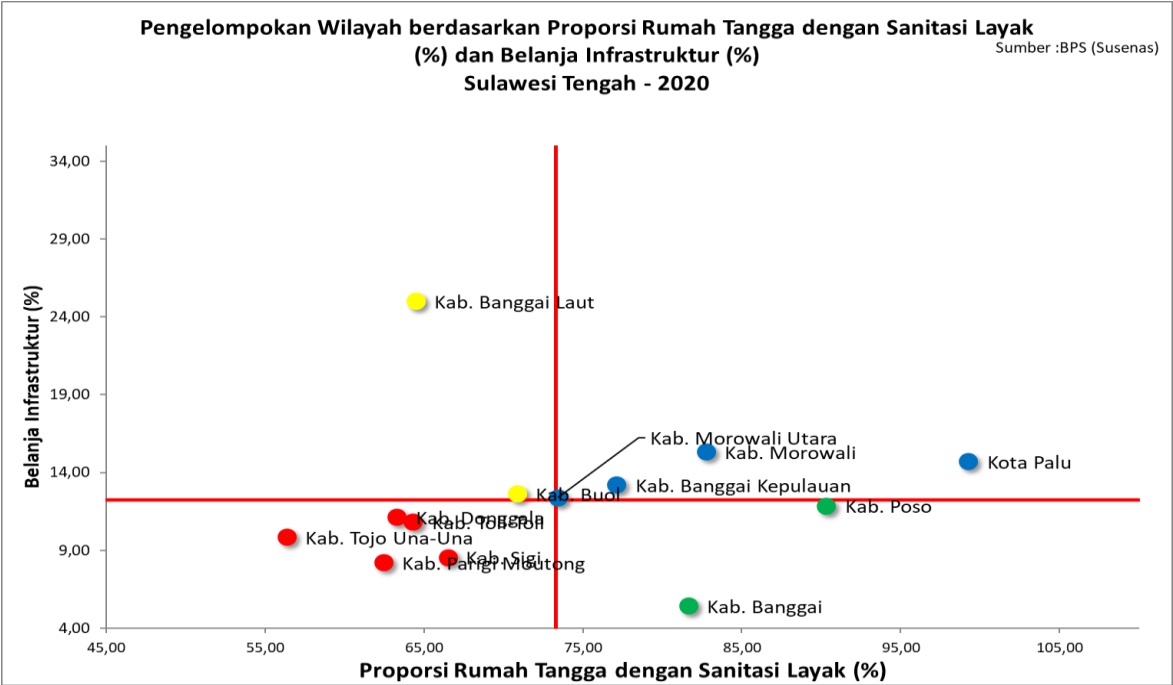
Tabel 5.7.
Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kabupaten Parigi Moutong	1	
2.	Kabupaten Sigi	1	
3.	Kabupaten Poso	1	
4.	Kabupaten Tolitoli	1	
5.	Kabupaten Buol	2	
6.	Kabupaten Morowali Utara	2	
7.	Kabupaten Banggai	3	
8.	Kabupaten Tojo Una-Una	3	
9.	Kabupaten Donggala	3	

10.	Kabupaten Banggai Kepulauan	4	
11.	Kota Palu	4	
12.	Kabupaten Morowali	4	
13.	Kabupaten Banggai Laut	4	

2. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut.



Gambar 5.8.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

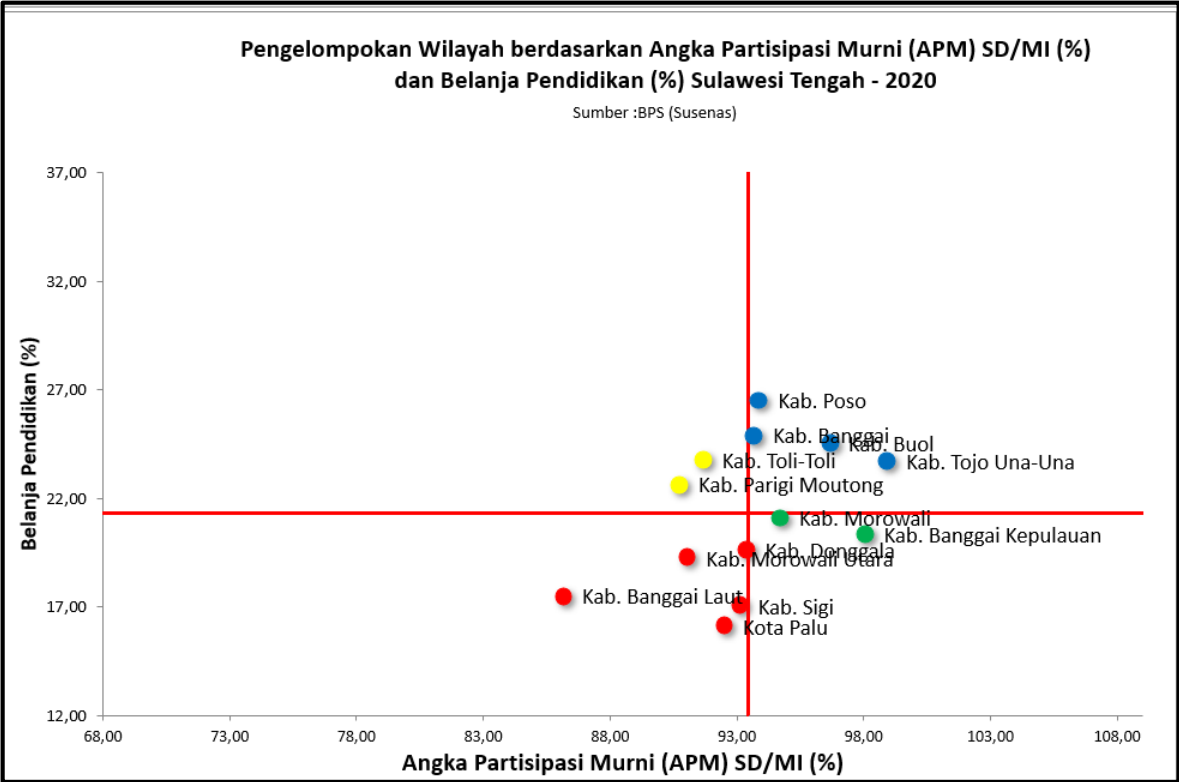
Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan daerah berada pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tolitoli. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan sebagai berikut.

Tabel 5.8.
Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kabupaten Parigi Moutong	1	
2.	Kabupaten Sigi	1	
3.	Kabupaten Tojo Una-Una	1	
4.	Kabupaten Donggala	1	
5.	Kabupaten Tolitoli	1	
6.	Kabupaten Banggai Laut	2	
7.	Kabupaten Buol	2	
8.	Kabupaten Poso	3	
9.	Kabupaten Banggai	3	
10.	Kabupaten Banggai Kepulauan	4	
11.	Kabupaten Morowali Utara	4	
12.	Kabupaten Morowali	4	
13.	Kota Palu	4	

5.1.5. Bidang Pendidikan

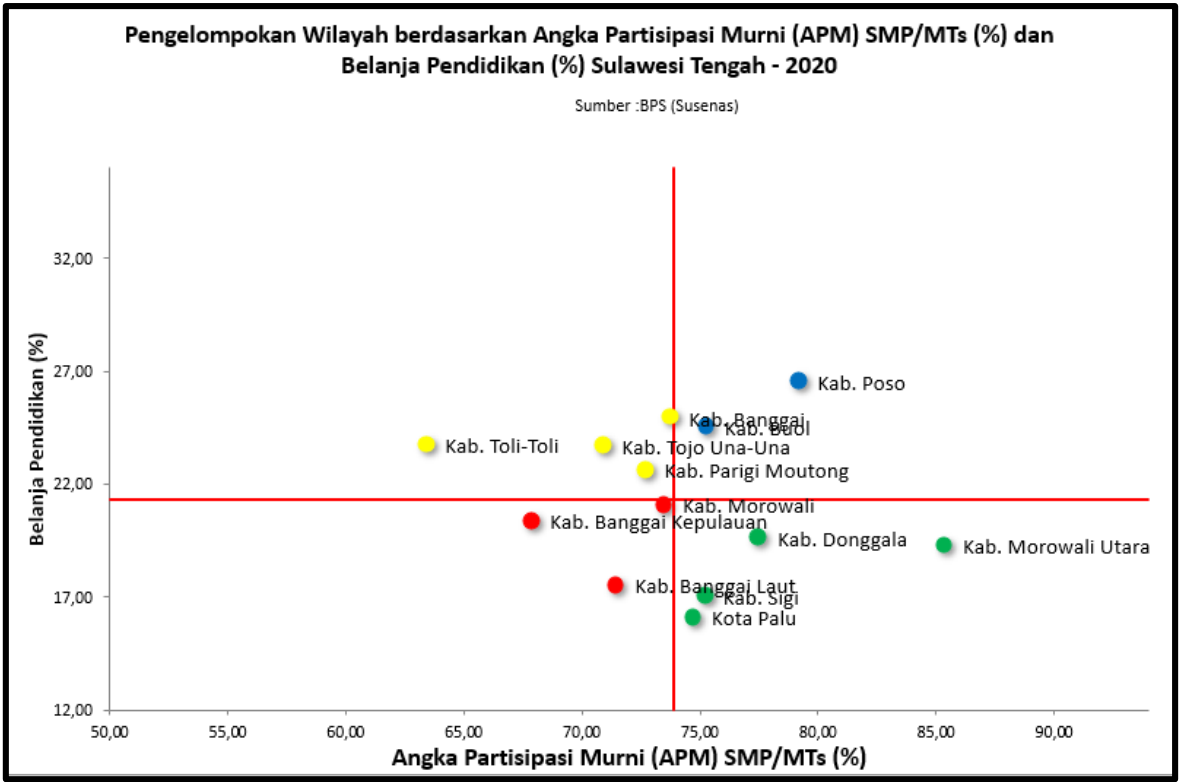
Beranjak dari identifikasi permasalahan bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa program dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Program urusan pemerintahan bidang Pendidikan diuraikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.



Gambar 5.9.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SD/MI dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.9 menunjukkan, berdasarkan indikator utama APM SD/MI dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan merujuk data tahun 2020, maka terdapat lima kabupaten kota menempati kwadran pertama dan menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Kelima kabupaten kota tersebut angka APM tingkat SD/MI masih dibawah 90 persen dengan anggaran pendidikan bersumber dari APBD belum mencapai 20 persen sebagaimana disyaratkan. Jika merujuk pada data lima tahun terakhir di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, anggaran untuk belanja pendidikan rata-rata diatas 20 persen. Namun terjadi penurunan drastis pasca bencana alam pada 28 September 2018 lalu.

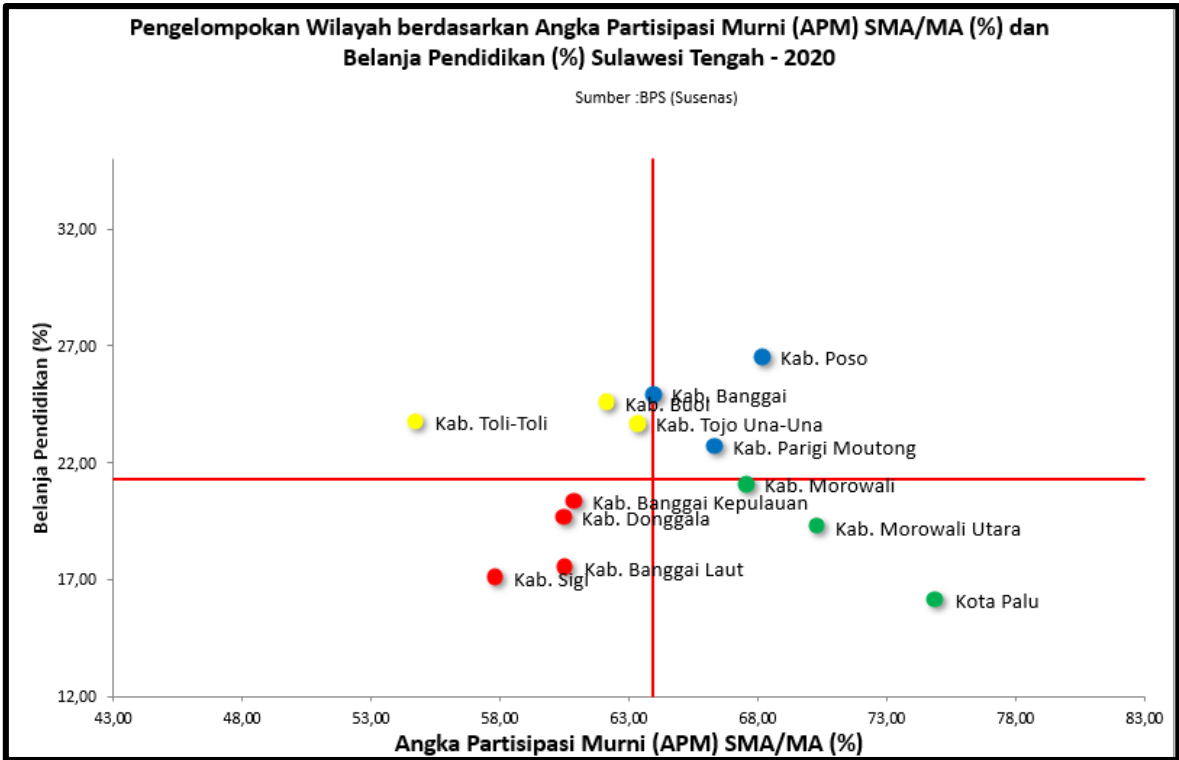
Gambar 5.9 juga menunjukkan pada kwadran kedua, terdapat dua kabupaten capaian belanja pendidikannya diatas 20 persen namun APM yang di capai masih dibawah 90 persen. Kedua Kabupaten tersebut yang perlu mendapat prioritas kedu adalah Kabupaten Parigi Moutung dan Kabupaten Tolitoli.



Gambar 5.10.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMP/MTs dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah

Merujuk pada Gambar 5.10. dengan melihat indikator utama APM SMP/MTs dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan sesuai data tahun 2020, terdapat dua kabupaten yang menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kedua kabupaten tersebut angka APM yang dicapai untuk tingkat SMP/MTs masih dibawah 75 persen dengan anggaran pendidikan bersumber dari APBD hanya Kabupaten Banggai Kepulauan belanja pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana disyaratkan. Sementara Kabupaten Banggai Laut belanja pendidikannya belum mencapai 20 persen. Rata-rata dalam lima tahun terakhir baru mencapai 15,65 persen.

Pada gambar 5.10 juga menunjukkan bahwa terdapat empat kabupaten belanja pendidikannya diatas 22 persen namun capaian APM masih dibawah 75 persen yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai dan Kabupatem Tojo Una-Una. Juga empat kabupaten perlu mendapat penanganan pada prioritas kedua, karna keempat kabupayen tersebut bisa disimpulkan bahwa, belanja pendidikannya diatas ketentuan yang ditetapkan (20 persen) namun masih terdapat 25 persen anak usia 13 s/d 15 tahun belum meneruskan pendidikannya dijenjang SMP/MTS.



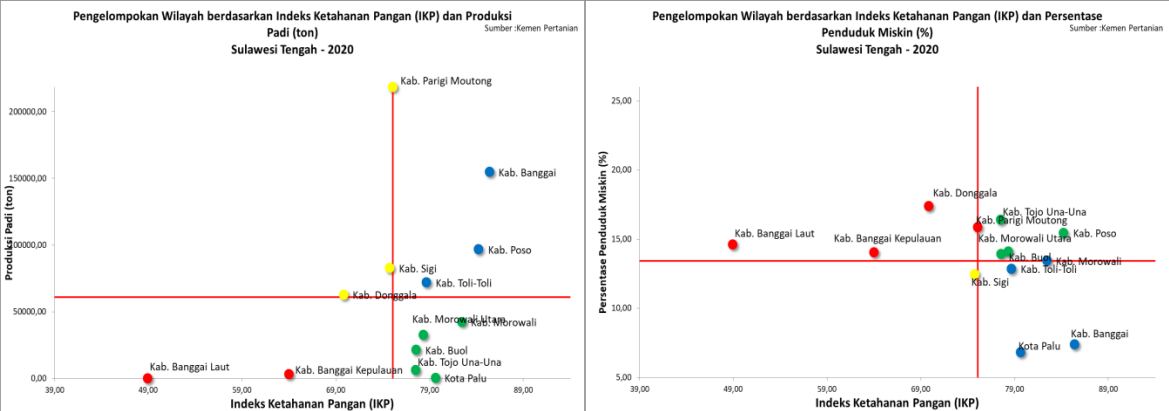
Gambar 5.11.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMA/MA dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah

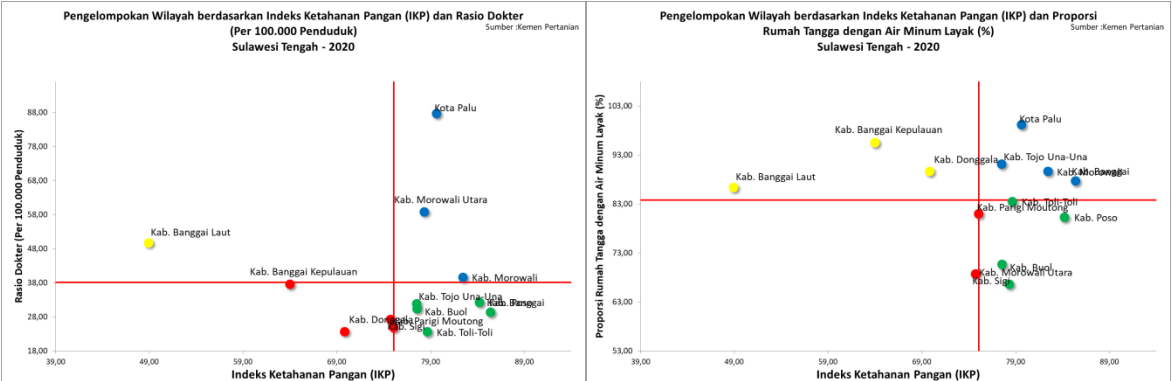
Pada Gambar 5.11 memperlihatkan, terdapat empat kabupaten (Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sigi) perlu mendapat prioritas utama karena jika merujuk pada indikator utama APM SMA/MA, persentase penduduk usia 16-18 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MT masih dibawah 65 persen. Dari aspek dukungan belanja pendidikan, dari keempat kabupaten tersebut terdapat tiga kabupaten belanja pendidikannya pada Tahun Anggaran 2020 kurang dari 20 persen, yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Sigi.

Jika diyakini hipotesis bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini pendidikan, maka terdapat tiga kabupaten perlu mendapat penanganan khusus yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupten Tojo Una-Una dan Kabupaten Buol. Ketiga kabupaten tersebut belanja pendidikannya diatas 22 persen namun capaian APM untuk SMA/MT masih dibawah 65 persen.

5.1.6 Bidang Ketahanan Pangan

Penentuan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar sebagai berikut.





Gambar 5.12.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan analisa kuadran bidang ketahanan pangan, indikator indeks ketahanan pangan sebagai indikator utama diperoleh Kabupaten Donggala, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan sebagai prioritas intervensi program kemiskinan bidang ketahanan pangan. Ditinjau dari indikator produksi padi, persentase penduduk miskin, rasio dookter per 100.000 penduduk dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak sebagai indikator pendukung, maka terlihat beberapa kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Laut, Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

Prioritasnya selanjutnya berdasarkan analisis kuadran 3 adalah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali Utara dan Kabupaten Buol. Sementara Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong masing-masing merupakan prioritas terakhir dalam intervensi program ketahanan pangan, mengingat kabupaten tersebut merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya lokus prioritas intervensi program berdasarkan analisis kuadran disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 5.9.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota	Indikator Utama Indeks Ketahanan Pangan)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Produksi Padi	Persentase penduduk Miskin (%)	Rasio Dokter (per 100ribu penduduk)	Proporsi Rmh tangga dgn air minum layak (%)	
Kabupaten Parigi Moutong						2
Kabupaten Tojo Una-Una						4
Kabupaten Donggala						1
Kabupaten Morowali Utara						5
Kabupaten Poso						3
Kabupaten Banggai Laut						6
Kabupaten Banggai Kepulauan						7
Kabupaten Buol						8
Kabupaten Morowali						9
Kabupaten Tolitoli						10
Kota Palu						13
Kabupaten Sigi						11
Kabupaten Banggai						12

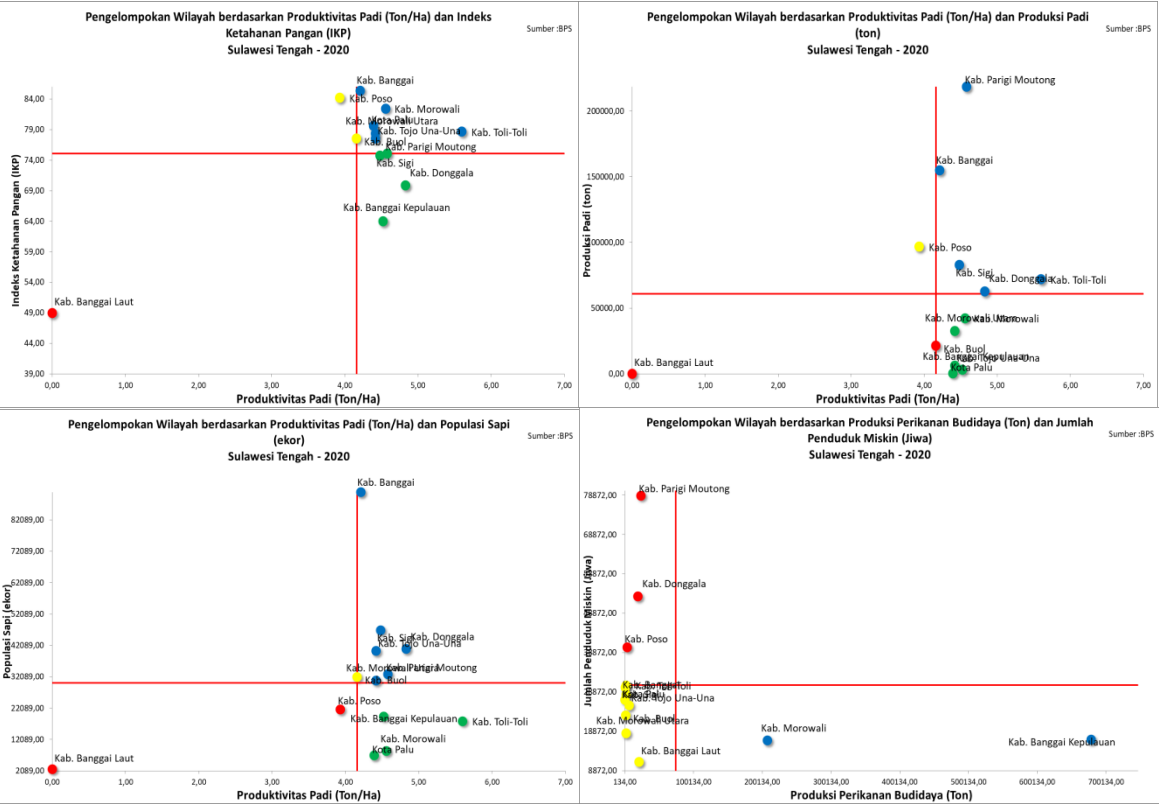
Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4.

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang ketahanan pangan, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Donggala, Parigi Moutong, Poso,
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Morowali, Tolitoli
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Sigi, Palu, Banggai.

5.1.7 Bidang Pertanian dan Perikanan

Penentuan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang pertanian dan perikanan di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar sebagai berikut.



Gambar 5.13.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Bidang Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan analisa kuadran bidang pertanian dan perikanan, dimana indikator produktivitas padi sebagai indicator utama diperoleh Kabupaten Banggai Laut sebagai prioritas intervensi program kemiskinan bidang pertanian. Ditinjau dari indikator indeks ketahanan pangan, produksi padi, populasi sapi, persentase penduduk miskin, dan produksi perikanan budidaya sebagai indikator pendukung, maka terlihat beberapa kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi pertanian dan perikanan di Sulawesi Tengah terutama Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Buol, Kabupaten Poso, dan Parigi Moutong.

Sementara prioritasnya selanjutnya berdasarkan analisis kuadran 2 dan 3 adalah Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Tolitoli, Buol, Sigi dan Kota Palu. Sementara Kabupaten Morowali merupakan prioritas terakhir dalam intervensi program pertanian dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya lokus prioritas intervensi program berdasarkan analisis kuadran disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.10.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Pertanian dan Perikanan

Kabupaten/Kota	Indikator Utama Produktivitas Padi (ton/ha)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Indeks Ketahanan Pangan	Produksi padi (ton)	Populasi sapi (ekor)	Produksi perikanan budidaya (ton)	
Kabupaten Parigi Moutong						5
Kabupaten Tojo Una-Una						8
Kabupaten Donggala						4
Kabupaten Morowali Utara						6
Kabupaten Poso						2
Kabupaten Banggai Laut						1
Kabupaten Banggai Kepulauan						11
Kabupaten Buol						3
Kabupaten Morowali						13
Kabupaten Tolitoli						12
Kota Palu						7
Kabupaten Sigi						9
Kabupaten Banggai						10

Sumber: Data BPS; Kementan, dan TNP2K (Diolah), 2021.

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang pertanian dan perikanan, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Donggala, Parigi Moutong, Poso,
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Morowali, Tolitoli
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Sigi, Palu, Banggai.

5.2. Target Penurunan Persentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, dibutuhkan penyusunan RPKD. RPKD menjadi bagian RPJMD dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Dari itu, tujuan penanggulangan kemiskinan daerah disebutkan sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Atas tujuan penanggulangan kemiskinan daerah dimaksud, lebih lanjut diuraikan dalam Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yang memuat target persentase penurunan kemiskinan dari kabupaten dan kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah, selengkapnya disebutkan sebagai berikut.

Tabel 5.11.
Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Banggai Kepulauan	11,98	11,39	10,43	9,63	8,97	8,44
2	Banggai	6,31	6,00	5,50	5,08	4,73	4,45
3	Morowali	11,47	10,90	9,99	9,22	8,59	8,08
4	Poso	13,19	12,54	11,49	10,61	9,88	9,30
5	Donggala	14,85	14,11	12,93	11,94	11,12	10,46
6	Tolitoli	10,97	10,43	9,55	8,82	8,22	7,73
7	Buol	11,89	11,30	10,35	9,56	8,9	8,37
8	Parigi Moutong	13,53	12,86	11,78	10,88	10,13	9,53
9	Tojo Una-Una	12,94	12,30	11,27	10,41	9,70	9,12
10	Sigi	10,62	10,10	9,25	8,54	7,96	7,49
11	Banggai Laut	12,46	11,84	10,85	10,02	9,33	8,78
12	Morowali Utara	12,03	11,44	10,48	9,68	9,02	8,49
13	Palu	5,80	5,51	5,05	4,66	4,34	4,08
	Sulteng	10,6	9,91	8,39	7,65	6,85	5,92

Sumber: Data Proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, diproyeksikan target capaian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2021 sejumlah 10,6, tahun 2022 sejumlah 9,91 persen, tahun 2023 sejumlah 8,39 persen, tahun 2024 sejumlah 7,65 persen, tahun 2025 sejumlah 6,85 persen dan hingga tahun 2026 sejumlah 5,92 persen. Target capaian optimis dimaksud dapat dicapai lewat serangkaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi lintas perangkat daerah dengan melibatkan pihak terkait utamanya swasta (badan usaha) dan lembaga swadaya masyarakat, lewat wadah bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas program yang menjadi kewenangan daerah dalam dokumen penanggulangan kemiskinan daerah ini, ditentukan indikator program yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk selanjutnya disusun target (target kinerja dan target pagu anggaran) tahun 2021-2026, yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Selengkapnya matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.
Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan	100 %	497.452.410	100 %	426.268.812	100 %	310.302.367,01	100 %	339.636,10	100 %	416.236,24	100 %	490.555,16	APBD
		Anak Usia 16-18 tahun	Partisipasi warga Negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan melalui pendidikan gratis		Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA	20,99 %	-	21,04 %	-	21,09 %	-	21,14 %	-	21,19 %	-	21,24 %	-	APBD
			Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK			Angka Partisipasi Murni SMA/MA	63,58 %	-	63,70 %	-	63,92 %	-	64,13 %	-	64,36 %	-	64,92 %	-	APBD
		Ketersediaan SMA/MA/SMK	Rasio Guru per Murid SMA/MA/SMK/Paket C	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan		Angka Partisipasi Sekolah (APAS)	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	APBD
			Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK per Penduduk Usia SMA/MA/SMK			APS SMA/SMK/MA/Paket C	75,42 %	-	75,65 %	-	75,87 %	-	76,09 %	-	76,31 %	-	76,53 %	-	APBD
						Angka Putus Sekolah (APUS)	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	APBD
						APUS SMA/SMK/MA/Paket C	24,55 %	-	15,95 %	-	10,37 %	-	6,74 %	-	4,38 %	-	2,85 %	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						Angka Kelulusan	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	APBD
						AK SMA/SMK/MA/Paket C	99,08 %	-	99,26 %	-	99,44 %	-	99,62 %	-	99,80 %	-	99,98 %	-	APBD
		Tenaga pendidik dan kependidikan	Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	· Meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Capaian Pendidik dan Tenaga Pendidikan	100 %	1.008.824	100 %	864.465	100 %	629.287,23	100 %	688,78	100 %	844,12	100 %	994,84	APBD
						Rasio Guru/Murid	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	APBD
						Rasio Guru/Murid SD/MI/Paket A	87,25 %	-	87,46 %	-	87,67 %	-	87,88 %	-	88,09 %	-	88,30 %	-	APBD
						Rasio Guru/Murid SMP/MTs/ Paket B	78,03 %	-	78,35 %	-	78,68 %	-	79,00 %	-	79,32 %	-	79,64 %	-	APBD
						Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C	77,40 %	-	77,58 %	-	77,76 %	-	77,94 %	-	78,12 %	-	78,30 %	-	APBD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ibu dan Anak serta penderita penyakit menular	Derajat kesehatan ibu dan anak	· Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, gernas, dll);	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	7,97 Angka	104.741.315	7,39 Angka	89.753.221	6,81 Angka	65.585.853,97	6,23 Angka	72.012,23	5,65 Angka	87.840,81	5,07 Angka	103.289,06	APBD
						Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6,00 Angka	-	5,80 Angka	-	5,50 Angka	-	5,00 Angka	-	4,50 Angka	-	4,00 Angka	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)							
						Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	148,01	Angka	-	134,17	Angka	-	120,33	Angka	-	106,49	Angka	-	92,65	Angka	-	78,81	Angka	-	APBD
						Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,50	%	-	83,00	%	-	83,50	%	-	84,00	%	-	84,50	%	-	85,00	%	-	APBD
						Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75,50	%	-	76,00	%	-	76,50	%	-	77,00	%	-	77,50	%	-	78,00	%	-	APBD
						Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	APBD
						Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak	91,05	%	-	90,30	%	-	89,66	%	-	90,34	%	-	90,10	%	-	90,03	%	-	APBD
						Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,01	%	-	0,01	%	-	0,01	%	-	0,01	%	-	0,01	%	-	0,00	%	-	APBD
			Persentase penanganan penderita penyakit menular			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	%	-	92,00	%	-	94,00	%	-	96,00	%	-	98,00	%	-	99,00	%	-	APBD
						Tingkat kematian karena TB	2,50	%	-	2,35	%	-	2,25	%	-	2,01	%	-	2,00	%	-	2,00	%	-	APBD
						Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh	80,00	%	-	82,00	%	-	84,00	%	-	86,00	%	-	88,00	%	-	90,00	%	-	APBD

[illegible]

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)							
						Satuan Penduduk																			
						Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,23	Rasio	-	0,25	Rasio	-	0,26	Rasio	-	0,28	Rasio	-	0,29	Rasio	-	0,31	Rasio	-	APBD
						Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	2,39	Rasio	-	2,45	Rasio	-	2,51	Rasio	-	2,58	Rasio	-	2,64	Rasio	-	2,70	Rasio	-	APBD
						Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	%	-	-	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	APBD
		Balita Gizi buruk	Persentase akupan perawatan bagi Balita gizi buruk		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	0,00	1.652.709	100,00	-	1.416.212	100,00	%	1.030.931,65	100,00	%	1.128,39	100,00	-	1.382,88	100,00	-	1.629,79	APBD
		Penduduk dengan asupan kalori dibawah standar	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah standar			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita /hari)	0,48	0,00	-	0,43	-	-	0,38	-	-	0,33	-	-	0,28	-	-	0,23	-	-	APBD
						Persentase Capaian Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	%	-	100,00	-	-	100,00	-	-	APBD
		Posyandu	Persentase Posyan		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Kabupaten	100,00	%	2.231.157	100,00	%	1.911.887	100,00	%	1.391.757,73	100,00	%	1.523,32	100,00	-	1.866,89	100,00	-	2.200,22	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
			du aktif		AYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	dengan minimal 80% Posyandu Aktif													
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat miskin di sekitar ruas jalan kewenangan propinsi	Persentase keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pemeliharaan jalan kewenangan propinsi	Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	0,6200	Rasio 405.400.919	0,65	Rasio 347.389.548	0,65	Rasio 253.182.209,63	0,65	Rasio 277.187,86	0,66	Rasio 339.613,46	0,67	Rasio 399.779,98	APBD
						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	33,54	% -	37,03	% -	36,60	% -	36,52	% -	37,55	% -	38,94	% -	APBD
		Masyarakat miskin di sekitar ruas irigasi kewenangan propinsi	Persentase keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan propinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	0,00	Rasio -	0,00	Rasio -	0,00	Rasio -	0,00	Rasio -	0,00	Rasio -	0,00	Rasio -	APBD
						Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat	0,35	Rasio 3.525.779	0,41	Rasio 3.021.253	0,43	Rasio 2.199.320,86	0,45	Rasio 2.407,23	0,46	Rasio 2.950,15	0,50	Rasio 3.476,89	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						pelatihan ahli													
		Masyarakat miskin pengguna air baku	Persentase akses masyarakat miskin ke sumber air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pertanian	Pengelolaan penyediaan air baku;		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	15,73 %	3.187.524	32,58 %	2.731.401	49,44 %	1.988.323,51	66,29 %	2.176,29	83,15 %	2.667,12	100,00 %	3.143,33	APBD
						Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	63,40 %	100.894.714	74,00 %	86.457.054	77,70 %	62.936.409,62	80,60 %	68.885,96	83,20 %	84.422,22	86,60 %	99.495,79	APBD
		Masyarakat miskin dikawasan rawan bencana	Persentase luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir dan abrasi pantai			Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	57,00 %	-	62,00 %	-	64,00 %	-	68,00 %	-	73,00 %	-	80,00 %	-	APBD
						Pengguna air baku untuk kebutuhan rumah tangga	4.112,00 KK	-	7.295,00 KK	-	9.947,00 KK	-	12.600,00 KK	-	15.253,00 KK	-	17.905,00 KK	-	APBD
						Pengguna air baku untuk kebutuhan pertanian	9,00 Ha	-	14,00 Ha	-	19,00 Ha	-	24,00 Ha	-	29,00 Ha	-	34,00 Ha	-	
						Luas Kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir	130,40 Ha	-	152,60 Ha	-	189,10 Ha	-	219,40 Ha	-	229,20 Ha	-	237,50 Ha	-	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						Luas Kawasan yang terlindungi dari kawasan abrasi pantai	42,00 Ha	-	45,00 Ha	-	48,00 Ha	-	52,00 Ha	-	55,00 Ha	-	60,00 Ha	-	
		Masyarakat miskin tanpa akses air minum	Persentase akses masyarakat miskin ke sumber air minum yang layak dan terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase (%) Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten /Kota	40,00 %	16.855.380	43,00 %	14.443.438	46,00 %	10.514.100,05	49,00 %	11.508,03	53,00 %	14.103,50	57,00 %	16.621,68	APBD
						Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38 %	-	15,38 %	-	15,53 %	-	15,60 %	-	30,45 %	-	30,53 %	-	APBD
		Masyarakat tanpa akses sanitasi layak	Persentase akses masyarakat ke sanitasi layak	Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	- %	242.982	15,38 %	208.213	15,38 %	151.568,34	15,38 %	165,90	15,38 %	203,31	15,38 %	239,61	APBD
		Masyarakat korban bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	0,06 %	1.384.900	0,08 %	1.186.726	0,09 %	863.876,81	0,10 %	945,54	0,11 %	1.158,80	0,12 %	1.365,70	APBD
						Persentase Luas Daerah Genangan yang Tertangani	13,40 %	13.246.784	21,43 %	11.351.219	28,57 %	8.263.119,21	35,71 %	9.044,25	42,86 %	11.084,06	50,00 %	13.063,12	APBD
		Masyarakat dalam	Persentase akses	Penyediaan Prasarana, Sarana dan	PROGRAM KAWASAN	Persentase drainase dalam	65,00 %	-	68,00 %	-	72,00 %	-	74,00 %	-	78,00 %	-	80,00 %	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
		kawasan kumuh	masyarakat dalam kawasan kumuh terhadap prasarana dan sarana dasar lingkungan	Utilitas umum di kawasan permukiman;	PERMUKIMAN	kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (provinsi)													
		Masyarakat korban bencana dan masyarakat berada di kawasan rawan bencana	Persentase pelayanan masyarakat korban bencana dan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana	Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Infrastruktur di KSP	20,00 %	27.987.513	32,00 %	23.982.604	40,00 %	17.458.135,43	44,00 %	19.108,50	48,00 %	23.418,15	60,00 %	27.599,46	APBD
						Persentase Penduduk Berakses Air Minum di KSP	- %	-	- %	-	0,18 %	-	0,36 %	-	0,11 %	-	- %	-	APBD
						Presentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	20,36 %	60.048.418	25,36 %	51.455.711	30,20 %	37.457.183,37	35,15 %	40.998,11	40,73 %	50.244,66	45,36 %	59.215,84	APBD
						Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	16,00 %	4.294.131	18,00 %	3.679.657	20,00 %	2.678.605,88	25,00 %	2.931,82	30,00 %	3.593,05	35,00 %	4.234,59	APBD
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					Persentase warga negara korban	42,31 %	31.288.719	66,87 %	26.811.419	91,44 %	19.517.371,62	92,72 %	21.362,40	94,00 %	26.180,39	95,28 %	30.854,90	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					bencana yang memperoleh rumah layak huni.													
						Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh fasilitas rumah layak huni.	0,00 %	-	0,00 %	-	16,67 %	-	23,33 %	-	26,70 %	-	33,33 %	-	
						Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	22,00 %	29.831.028	20,60 %	25.562.319	22,66 %	18.608.088,99	24,92 %	20.367,16	27,41 %	24.960,69	30,15 %	29.417,42	
						Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1,54 %	22.007.919	1,69 %	18.858.667	1,83 %	12.728.166,18	1,98 %	13.825,93	2,18 %	18.414,81	2,38 %	21.702,78	
						Persentase capaian peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00 %	269.942	100,00 %	231.315	100,00 %	168.385,50	100,00 %	184,30	100,00 %	225,87	100,00 %	266,20	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang menerima bantuan	Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar;	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggul	25 %	2.614.381	27,00 %	2.240.273	30,00 %	1.630.806,45	35,00 %	1.784,97	38,00 %	2.187,55	40,00 %	2.578,13	APBD

[illegible]

N o	Bidang /Urusa n	Sasar an	Indik ator Sasar an	Kebijaka n	Progra m*	Indikato r Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sum ber Pend anaa n
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	Kinerja	Pagu (x1.0 00.00 0)	
						yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial													
			Persen tase bantuan sosial	Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	7.979.577	100	6.837.729	100	42.091,71	100	6.265,86	100	7.675,92	100	9.030,85	APBD
						Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		-		-		-		-		-		-	
						Persentase korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial		-		-		-		-		-		-	
						Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		-		-		-		-		-		-	
						Persentase korban	2,34	-	3,51	-	4,09	-	4,68	-	5,26	-	5,85	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar													
6	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	Angkatan kerja	Persentase angkatan kerja memperoleh pelatihan	Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kabupaten /kota yang menyusun rencana tenaga kerja	0 %	265.188	23,07 %	227.241	46,15 %	165.420,08	69,23 %	181,06	92,30 %	221,89	100 %	261,51	APBD
						Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	47,00 %	5.744.459	50,00 %	4.922.448	51,32 %	3.283.296,13	52,08 %	3.522,03	53,45 %	4.806,59	54,41 %	5.664,81	APBD
			Persentase penempatan tenaga kerja			Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah	0 %	-	25,00 %	-	26,32 %	-	27,80 %	-	28,45 %	-	29,41 %	-	APBD
				Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	9,87 %	6.041.549	10,00 %	5.177.026	10,74 %	3.368.615,62	11,48 %	3.724,87	12,20 %	5.055,18	12,90 %	5.957,78	
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme perluasan kesempatan kerja	0,030 %	-	0,033 %	-	0,037 %	-	0,040 %	-	0,042 %	-	0,045 %	-	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	65,00 %	557.221	66,00 %	477.485	68,00 %	347.584,93	73,00 %	380,44	79,00 %	466,25	82,00 %	549,49	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						melalui perjanjian bersama (PB)													
						Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54,65 %	740.760	59,88 %	634.760	63,08 %	462.073,68	68,72 %	505,75	72,27 %	619,82	79,72 %	730,49	APBD
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak dan Perempuan rentan	Persentase keterlibatan perempuan dan anak dalam pembangunan	Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	91,90 %	1.200.968	91,93 %	1.029.114	91,96 %	749.143,67	92,00 %	819,96	92,03 %	1.004,89	92,06 %	1.184,32	APBD
						Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	50 %	-	65 %	-	70 %	-	75 %	-	80 %	-	85 %	-	APBD
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76 Indeks	-	76 Indeks	-	76 Indeks	-	78 Indeks	-	80 Indeks	-	82 Indeks	-	APBD
		Perempuan korban kekerasan	Persentase korban kekerasan	Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	55 %	1.348.765	60 %	1.155.761	65 %	841.336,45	70 %	920,87	75 %	1.128,56	80 %	1.330,06	APBD
		Keluarga Prasejahtera	Persentase keluarga prasejahtera		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga prasejahtera yang ditingkatkan kualitasnya	50 %	2.413.274	50 %	2.067.944	55 %	1.505.359,53	60 %	1.647,67	70 %	2.019,27	80 %	2.379,81	APBD
		Anak-Anak	Persentase data	Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak	50 %	679.296	60 %	582.092	100 %	423.733,53	70 %	463,79	75 %	568,39	80 %	669,88	APBD

[illegible]

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target												Sumber Pendanaan				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)							
						Jumlah Protein Perkapita Tahunan	67	Gram/Kapita/Tahun	-	69	Gram/Kapita/Tahun	-	70	Gram/Kapita/Tahun	-	71	Gram/Kapita/Tahun	-	72	Gram/Kapita/Tahun	-	73	Gram/Kapita/Tahun	-	APBD
		Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah penanganan daerah rawan pangan melalui ketersediaan pangan (beras)	160,12	%	5.924.895	168	%	5.077.065	169	%	3.695.849,04	170	%	4.045,23	171	%	4.957,57	172	%	5.842,75	APBD
						Jumlah pengawasan dan pembinaan kemandirian pangan	79,5	%	384.323	81	%	329.328	82	%	239.734,16	83	%	262,40	84	%	321,58	85	%	378,99	APBD
9	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN			Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (diganti Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi	< 129523	KK	224.707	< 129523	KK	192.552	< 129523	KK	140.168,53	< 129523	KK	153,42	< 129523	KK	188,02	< 129523	KK	221,59	
				Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/ Kota.		Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi	91,97	%	-	90,91	%	-	89,29	%	-	85,71	%	-	85,50	%	-	90,86	%	-	
				Menyelesaikan sengketa dan konflik Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	11,76	%	408.922	19,61	%	350.407	23,53	%	255.078,72	27,45	%	279,19	31,37	%	342,16	35,29	%	403,25	
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIA	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya tanahnya diatas izin	88,9	%	113.689	72,57	%	97.421	76,64	%	70.917,41	79,29	%	77,62	73,49	%	95,13	69,42	%	112,11	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					N TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan													
				Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50 %	504.241	50 %	432.086	50 %	314.537,11	50 %	344,27	50 %	421,92	50 %	497,25	
10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Penyusunan dan pengendalian pelaksanaaan RPPLH;	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	286.470	60 %	245.477	70 %	178.694,82	80 %	195,59	90 %	239,70	100 %	282,50	
				Penanggula ngan dan pemulihan kerusakan lingkungan;	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79 Indkes	984.625	79 Indkes	843.728	79 Indkes	614.192,12	80 Indkes	672,25	80 Indkes	823,87	80 Indkes	970,97	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati	100 %	281.717	100 %	241.404	100 %	175.730,11	100 %	192,34	100 %	235,72	100 %	277,81	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN	Persentase Limbah B3 yang dikelola	100 %	240.558	100 %	206.135	100 %	150.055,76	100 %	164,24	100 %	201,28	100 %	237,22	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					(LIMBAH B3)														
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	26,2 %	418.893	32 %	358.951	37 %	261.298,31	41 %	286,00	45 %	350,50	48 %	413,08	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan MHA	100 %	211.102	100 %	180.894	100 %	131.681,76	100 %	144,13	100 %	176,64	100 %	208,17	
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga Lingkungan Hidup	100 %	287.571	100 %	246.421	100 %	179.382,11	100 %	196,34	100 %	240,62	100 %	283,58	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	159.052	100 %	136.292	100 %	99.213,80	100 %	108,59	100 %	133,08	100 %	156,85	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	165.271	100 %	141.621	100 %	103.093,17	100 %	112,84	100 %	138,29	100 %	162,98	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Capaian Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	41 %	447.907	42 %	383.813	43 %	279.396,61	44 %	305,81	45 %	374,78	47 %	441,70	
11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penduduk tak beridentitas	Persentase data kependudukan	Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100 %	-	100 %	316.035	100 %	230.057,59	100 %	251,81	100 %	308,60	100 %	363,70	APBD
						Persentase penyelesaian perekaman dan pencetaan KTP elektronik di Kabupaten /Kota	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	APBD
						Persentase penerbitan kartu identitas anak	30 %	-	40 %	-	50 %	-	65 %	-	75 -	-	80 %	-	APBD
						Persentase penerbitan identitas	8 %	-	11 %	-	14 %	-	17 %	-	20 -	-	25 %	-	APBD

[illegible]

[illegible]

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						Posyandu aktif (Persen)	8,66 %	-	8,66 %	-	8,65 %	-	8,65 %	-	8,65 %	-	8,65 %	-	APBD
13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Persentase Pertumbuhan penduduk		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Capaian Pengendalian Penduduk	100 %	466.596	100 %	399.828	100 %	291.054,70	100 %	318,57	100 %	390,42	100 %	460,13	APBD
						Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,326 %	-	1,264 %	-	1,202 %	-	1,14 %	-	1,078 %	-	1,016 %	-	APBD
				Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100 %	1.120.956	100 %	960.552	100 %	699.233,52	100 %	765,33	100 %	937,94	100 %	1.105,41	APBD
						Rasio akseptor KB	0,78 Nilai	-	0,78 Nilai	-	0,78 Nilai	-	0,78 Nilai	-	0,78 Nilai	-	0,78 Nilai	-	APBD
						Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,06 %	-	78,09 %	-	78,13 %	-	78,15 %	-	78,18 %	-	78,21 %	-	APBD
		Rumah Tangga Miskin	Persentase rumah tangga miskin	Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan dan Ekonomi Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	1.615.790	100 %	1.384.577	100 %	1.007.902,64	100 %	1.103,18	100 %	1.351,99	100 %	1.593,39	APBD
14	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)	Persentase UMKM	Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM);	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	21,05 %	392.454	18,42 %	336.296	13,16 %	244.806,40	13,16 %	267,95	18,42 %	328,38	21,05 %	387,01	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
	MENENGAH					Pembantu dan Kantor Kas													
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	5,77 %	294.555	5,77 %	252.405	3,85 %	183.738,39	3,85 %	201,11	5,77 %	246,46	5,77 %	290,47	APBD
						Persentase Koperasi Aktif	5,75 %	-	4,60 %	-	3,45 %	-	3,45 %	-	4,60 %	-	5,75 %	-	APBD
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	52,63 %	371.070	44,74 %	317.971	34,21 %	231.466,95	36,84 %	253,35	44,74 %	310,49	50,00 %	365,92	APBD
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah pengurus/anggota koperasi yang meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya dan bersertifikat lulus	0,67 %	1.842.307	0,58 %	1.578.680	0,42 %	1.149.200,13	0,46 %	1.257,84	0,56 %	1.541,52	0,66 %	1.816,76	APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10,00 %	422.912	8,58 %	362.395	6,22 %	263.805,45	6,83 %	288,74	8,37 %	353,87	9,87 %	417,05	APBD
						Persentase Koperasi Modern	2,30 %	-	2,30 %	-	1,15 %	-	1,15 %	-	2,30 %	-	2,30 %	-	APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	6,50 %	857.494	5,57 %	734.790	4,06 %	534.890,50	4,44 %	585,46	5,44 %	717,50	6,41 %	845,61	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					MIKRO (UMKM)														
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	0,01 %	2.669.334	0,01 %	2.287.362	0,01 %	1.665.085,35	0,01 %	1.822,49	0,01 %	2.233,53	0,01 %	2.632,32	APBD
15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda dan Atlet		Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<1.69 %	2.765.533	<1.69 %	2.369.795	<1.69 %	1.725.092,30	<1.69 %	1.888,17	<1.69 %	2.314,02	<1.69 %	2.727,19	
				Memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan;		Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	52,00 %	-	54,00 %	-	56,00 %	-	58,00 %	-	60,00 %	-	62,00 %	-	
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<0.55 %	-	<0.55 %	-	<0.55 %	-	<0.55 %	-	<0.55 %	-	<0.55 %	-	
				Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana;	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Capaian Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100,00 %	10.248.998	100,00 %	8.782.404	100,00 %	6.393.150,82	100,00 %	6.997,51	100,00 %	8.575,70	100,00 %	10.106,89	
						Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	10,00 Orang	-	15,00 Orang	-	20,00 Orang	-	25,00 Orang	-	30,00 Orang	-	35,00 Orang	-	
						Jumlah atlet berprestasi	15,00 Orang	-	20,00 Orang	-	25,00 Orang	-	30,00 Orang	-	35,00 Orang	-	40,00 Orang	-	
						Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	18,00 Gelanggang/Balai	-	20,00 Gelanggang/Balai	-	22,00 Gelanggang/Balai	-	24,00 Gelanggang/Balai	-	26,00 Gelanggang/Balai	-	28,00 Gelanggang/Balai	-	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
				Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00 %	848.390	100,00 %	726.989	100,00 %	529.211,58	100,00 %	579,24	100,00 %	709,88	100,00 %	836,63	
16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN	Masyarakat Miskin		Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Kebudayaan Gemar Membaca;	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,30 %	916.890	63,30 %	785.686	65,00 %	571.940,26	65,00 %	626,01	68,00 %	767,19	70,00 %	904,18	
		Masyarakat Miskin		Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,00 Indeks	194.523	13,00 Indeks	166.687	13,00 Indeks	121.339,94	13,00 Indeks	132,81	13,00 Indeks	162,76	13,00 Indeks	191,83	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap;	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00 %	5.810.379	100,00 %	4.978.935	100,00 %	3.624.415,59	100,00 %	3.967,04	100,00 %	4.861,75	100,00 %	5.729,82	APBD
				Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap;	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	250.454,78 Ton	35.176.510	252.189,37 Ton	30.142.881	252.693,75 Ton	21.942.509,45	253.199,14 Ton	24.016,79	253.705,54 Ton	29.433,44	254.212,95 Ton	34.688,78	APBD
						Nilai Tukar Nelayan	100,00 Nilai	-	101,00 Nilai	-	102,00 Nilai	-	103,00 Nilai	-	104,00 Nilai	-	105,00 Nilai	-	APBD
				Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.223.089,22 Ton	7.608.137	1.238.813,65 Ton	6.519.440	1.265.075,23 Ton	4.745.826,44	1.289.875,22 Ton	5.194,46	1.316.226,79 Ton	6.366,00	1.342.551,33 Ton	7.502,65	APBD
						Nilai Tukar Pembudidaya	99,00 Nilai	-	100,00 Nilai	-	100,50 Nilai	-	101,00 Nilai	-	101,51 Nilai	-	102,53 Nilai	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
			Nilai Tukar Pembedayaan	Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana	20,00 %	8.031.077	30,00 %	6.881.860	40,00 %	5.009.649,56	50,00 %	5.483,23	60,00 %	6.719,89	60,00 %	7.919,73	APBD
				Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran;	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk perikanan olahan (kg)	5.928.300,00 Kg	3.555.961	6.224.715,00 Kg	3.047.116	6.535.950,00 Kg	2.218.148,28	6.862.748,00 Kg	2.427,84	7.205.885,00 Kg	2.975,40	7.926.473,00 Kg	3.506,66	APBD
						Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank	700.000,00 Rp.Juta	-	800.000,00 Rp.Juta	-	900.000,00 Rp.Juta	-	1.100.000,00 Rp.Juta	-	1.200.000,00 Rp.Juta	-	1.300.000,00 Rp.Juta	-	APBD
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Petani dan produksi hasil pertanian	NTP dan Produktifitas hasil pertanian	Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15,00 %	46.976.214	30,00 %	40.254.092	30,00 %	29.302.964,65	35,00 %	32.073,05	35,00 %	39.306,68	100,00 %	46.324,88	APBD
						Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/hektar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,04	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal				Target												Sumber Pendanaan		
							Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja		Pagu (x1.000.000)	
						Padi	4,49	Ton/Ha	-	4,51	Ton/Ha	-	4,54	Ton/Ha	-	4,57	Ton/Ha	-	4,63	Ton/Ha	-	18,54	Ton/Ha	-	APBD
						Jagung	4,23	Ton/Ha	-	4,31	Ton/Ha	-	4,35	Ton/Ha	-	4,43	Ton/Ha	-	4,54	Ton/Ha	-	2,25	Ton/Ha	-	APBD
						Kedelai	1,25	Ton/Ha	-	1,27	Ton/Ha	-	1,30	Ton/Ha	-	1,35	Ton/Ha	-	1,40	Ton/Ha	-	4,74	Ton/Ha	-	APBD
						Kacang Tanah	1,02	Ton/Ha	-	1,15	Ton/Ha	-	1,20	Ton/Ha	-	1,25	Ton/Ha	-	1,30	Ton/Ha	-	-	Ton/Ha	-	APBD
						Kacang Hijau	0,75	Ton/Ha	-	0,77	Ton/Ha	-	0,78	Ton/Ha	-	0,79	Ton/Ha	-	0,80	Ton/Ha	-	4,51	Ton/Ha	-	APBD
						Ubi Kayu	28,22	Ton/Ha	-	29,28	Ton/Ha	-	29,35	Ton/Ha	-	29,80	Ton/Ha	-	29,85	Ton/Ha	-	4,34	Ton/Ha	-	APBD
						Ubi Jalar	17,52	Ton/Ha	-	18,75	Ton/Ha	-	18,95	Ton/Ha	-	20,09	Ton/Ha	-	20,95	Ton/Ha	-	1,12	Ton/Ha	-	APBD
						Tomat	13,17	Ton/Ha	-	14,15	Ton/Ha	-	14,25	Ton/Ha	-	14,50	Ton/Ha	-	14,75	Ton/Ha	-	0,93	Ton/Ha	-	APBD
						Cabe rawit	6,28	Ton/Ha	-	6,30	Ton/Ha	-	6,45	Ton/Ha	-	6,73	Ton/Ha	-	6,75	Ton/Ha	-	0,56	Ton/Ha	-	APBD
						Bawang merah	5,10	Ton/Ha	-	5,15	Ton/Ha	-	5,25	Ton/Ha	-	5,35	Ton/Ha	-	5,40	Ton/Ha	-	30,67	Ton/Ha	-	APBD
						Durian	1,92	Ku/Pohon	-	1,95	Ku/Pohon	-	1,97	Ku/Pohon	-	2,14	Ku/Pohon	-	2,24	Ku/Pohon	-	21,67	Ku/Pohon	-	APBD
						Cabai Besar	6,55	Ton/Ha	-	6,56	Ton/Ha	-	6,58	Ton/Ha	-	6,59	Ton/Ha	-	6,60	Ton/Ha	-	15,01	Ton/Ha	-	APBD
						Jeruk	0,76	Ku/Pohon	-	0,77	Ku/Pohon	-	0,78	Ku/Pohon	-	0,80	Ku/Pohon	-	0,81	Ku/Pohon	-	6,97	Ku/Pohon	-	APBD
						Pisang	0,79	Ku/Rumpung	-	0,80	Ku/Rumpung	-	0,81	Ku/Rumpung	-	0,82	Ku/Rumpung	-	0,83	Ku/Rumpung	-	5,28	Ku/Rumpung	-	APBD
				Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	20,00	%	75.170.485	20,00	%	64.413.867	20,00	%	46.890.071,98	20,00	%	51.322,72	20,00	%	62.897,83	20,00	%	74.128,24	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95,00	%	1.132.056	95,00	%	970.063	95,00	%	706.157,12	95,00	%	772,91	95,00	%	947,23	95,00	%	1.116,36	APBD
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Capaian Perizinan Usaha Pertanian	25,00	%	871.402	25,00	%	746.707	25,00	%	543.565,48	25,00	%	594,95	25,00	%	729,13	25,00	%	859,32	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan									
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026											
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)										
				Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	%	9.071.358	100,00	%	7.773.280	100,00	%	5.658.558,93	100,00	%	6.193,48	100,00	%	7.590,33	100,00	%	8.945,58	APBD			
				Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Menghasilkan (Ha)	-	-	50.799.719	-	-	43.530.467	-	-	31.688.001,87	100,00	-	34.683,56	-	-	42.505,94	-	-	50.095,37	APBD			
						Kelapa Dalam	164.292,00	ha	-	165.196,00	ha	-	166.104,00	ha	-	-	167.936,00	ha	-	168.860,00	ha	-	168.860,00	ha	-	APBD		
						Cengkeh	50.590,00	ha	-	51.090,00	ha	-	51.590,00	ha	-	167.018,00	ha	-	53.340,00	ha	-	54.340,00	ha	-	54.340,00	ha	-	APBD
						Kopi	4.581,00	ha	-	4.650,00	ha	-	4.719,00	ha	-	52.340,00	ha	-	4.862,00	ha	-	4.935,00	ha	-	4.935,00	ha	-	APBD
						Kakao	186.679,00	ha	-	187.164,00	ha	-	187.651,00	ha	-	4.790,00	ha	-	188.628,00	ha	-	189.118,00	ha	-	189.118,00	ha	-	APBD
						Pala	3.279,00	ha	-	3.443,00	ha	-	3.615,00	ha	-	188.139,00	ha	-	3.986,00	ha	-	4.185,00	ha	-	4.185,00	ha	-	APBD
						Kelapa Sawit	101.160,00	ha	-	101.261,00	ha	-	101.362,00	ha	-	3.796,00	ha	-	101.667,00	ha	-	101.819,00	ha	-	101.819,00	ha	-	APBD
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	
						Benih Bermutu dan Bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	
						- Kakao	300.000,00	Pohon	-	309.000,00	Pohon	-	318.270,00	Pohon	-	-	Pohon	-	337.652,64	Pohon	-	347.782,22	Pohon	-	347.782,22	Pohon	-	APBD
						- Kelapa Dalam	50.000,00	Pohon	-	51.500,00	Pohon	-	53.045,00	Pohon	-	327.818,10	Pohon	-	56.275,44	Pohon	-	57.963,70	Pohon	-	57.963,70	Pohon	-	APBD
						- Kopi	100.000,00	Pohon	-	103.000,00	Pohon	-	106.090,00	Pohon	-	54.636,35	Pohon	-	112.550,88	Pohon	-	115.927,41	Pohon	-	115.927,41	Pohon	-	APBD
						- Cengkeh	15.000,00	Pohon	-	15.450,00	Pohon	-	15.913,50	Pohon	-	109.272,70	Pohon	-	16.882,63	Pohon	-	17.389,11	Pohon	-	17.389,11	Pohon	-	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal				Target														Sumber Pendanaan
							Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		Kinerja	Pagu (x1.000.000)		
						- Pala	5.000,00	Pohon	-	5.150,00	Pohon	-	5.304,50	Pohon	-	16.390,91	Pohon	-	5.627,54	Pohon	-	5.796,37	Pohon	-	APBD
						- Lada	2.000,00	Pohon	-	2.060,00	Pohon	-	2.121,80	Pohon	-	5.463,64	Pohon	-	2.251,02	Pohon	-	2.318,55	Pohon	-	
						- Kelapa Sawit	50.000,00	Pohon	-	51.500,00	Pohon	-	53.045,00	Pohon	-	2.185,45	Pohon	-	56.275,44	Pohon	-	57.963,70	Pohon	-	
						- Kelapa Genjah	500,00	Pohon	-	515,00	Pohon	-	530,45	Pohon	-	54.636,35	Pohon	-	562,75	Pohon	-	579,64	Pohon	-	
						- Nilam	5.000,00	Pohon	-	10.000,00	Pohon	-	10.300,00	Pohon	-	546,36	Pohon	-	10.927,27	Pohon	-	11.255,09	Pohon	-	
						- Kelor	1.000,00	Pohon	-	1.030,00	Pohon	-	1.060,90	Pohon	-	10.609,00	Pohon	-	1.125,51	Pohon	-	1.159,27	Pohon	-	
						Kebuntingan Ternak Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092,73	-	-	-	-	-	-	-		
						- Hasil Inseminasi Buatan (IB)	14.000,00	Ekor	-	31.000,00	Ekor	-	33.200,00	Ekor	-	-	Ekor	-	36.520,00	Ekor	-	38.180,00	Ekor	-	
						- Hasil Kawin Alam (KA)	6.100,00	Ekor	-	6.400,00	Ekor	-	6.800,00	Ekor	-	34.860,00	Ekor	-	7.480,00	Ekor	-	7.820,00	Ekor	-	
						Kelahiran Sapi Donggala Sumber Daya Genetik Hewan	-	Ekor	-	2.880,00	Ekor	-	4.320,00	Ekor	-	7.140,00	Ekor	-	7.200,00	Ekor	-	8.640,00	Ekor	-	
				Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	-	%	27.157.320	9,90	%	23.271.208	38,86	%	16.940.275,32	60,64	%	18.541,69	81,19	%	22.723,50	100,00	%	26.780,78	
						Kemitraan Usaha Produk Hasil Perkebunan	-	Dokumen	-	2,00	Dokumen	-	2,00	Dokumen	-	2,00	Dokumen	-	2,00	Dokumen	-	2,00	Dokumen	-	
						Kemitraan Usaha Produk Hasil Peternakan	2,00	Dokumen	-	3,00	Dokumen	-	3,00	Dokumen	-	3,00	Dokumen	-	3,00	Dokumen	-	3,00	Dokumen	-	
					PROGRAM PENGEND	Persentase Status	85,00	%	2.177.552	86,00	%	1.865.952	87,00	%	1.358.319,82	88,00	%	1.486,73	89,00	%	1.822,04	90,00	%	2.147,36	

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					ALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan													
						Persentase Unit Usaha yang ASUH	6,80 %	-	9,10 %	-	11,36 %	-	13,64 %	-	15,91 %	-	18,18 %	-	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Investasi Perusahaan Perkebunan	1,00 Unit Usaha	4.407.879	3,00 Unit Usaha	3.777.128	1,00 Unit Usaha	2.749.560,17	1,00 Unit Usaha	3.009,48	1,00 Unit Usaha	3.688,23	1,00 Unit Usaha	4.346,76	
						Persentase Tingkat Serangan OPT Perkebunan	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	
						Kakao	46,12 %	-	44,00 %	-	41,04 %	-	38,08 %	-	36,02 %	-	33,06 %	-	
						Kelapa	52,38 %	-	49,00 %	-	47,17 %	-	44,57 %	-	41,97 %	-	39,37 %	-	
						Cengkeh	22,01 %	-	19,41 %	-	16,81 %	-	14,21 %	-	11,61 %	-	9,01 %	-	
						Kopi	20,00 %	-	17,40 %	-	14,80 %	-	12,20 %	-	9,60 %	-	7,00 %	-	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi	- -	385.632	- -	330.450	- -	240.550,72	- -	263,29	- -	322,67	- -	380,29	
						Kelompok Tani Perkebunan	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	
						Kelompok Tani Peternakan	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	40,00 Kelompok	-	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Masyarakat petani sekitar kawasan hutan	Persentase masyarakat pengelola hutan	Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	2245,00	2.907.137	25000	2.491.136	25000	9.524,16	25000	1.417,79	25000	1.736,84	25000	2.043,43	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,01 %	-	0,01 %	-	0,01 %	-	0,01 %	-	0,01 %	-	0,01 %	-	APBD
						Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1,00 Dok	-	1,00 Dok	-	1,00 Dok	-	1,00 Dok	-	1,00 Dok	-	1,00 Dok	-	
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai indeks efektifitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	70,00 %	853.944	71,00 %	731.747	72,00 %	532.675,51	73,00 %	583,03	74,00 %	714,53	75,00 %	842,10	
						Pemulihan ekosistem pada kawasan Taman Hutan Raya Provinsi Sulawesi Tengah	- Ha	-	8,00 Ha	-	16,00 Ha	-	16,00 Ha	-	16,00 Ha	-	16,00 Ha	-	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengolahan hutan melalui perhutanan sosial	730,00 Ha	2.907.137	25.000 Ha	2.491.136	25.000 Ha	1.813.422,52	25.000 Ha	1.984,85	25.000 Ha	2.432,51	25.000 Ha	2.866,83	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM	Rumah tangga tanpa listrik	Persentase Rumah tangga teraliri listrik	Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan;	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan, sosial dan ekonomi	2,94 %	3.762.942	8,82 %	3.224.479	17,65 %	2.347.259,55	26,47 %	2.569,15	35,29 %	3.148,59	44,12 %	3.710,77	APBD

[illegible]

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
						Produk / Komoditi													
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase fasilitasi pameran dan promosi produk dalam negeri	14,00 %	220.223	14,00 %	188.710	14,00 %	137.371,42	14,00 %	150,36	14,00 %	184,27	14,00 %	217,17	APBD
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,00 %	2.179.867	100,00 %	1.867.936	100,00 %	1.359.763,88	100,00 %	1.488,31	100,00 %	1.823,97	100,00 %	2.149,64	APBD
						Persentase Layanan IKM	100,00 %	-	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	100,00 %	-
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Capaian Pengendalian Izin Usaha Industri	100,00 %	423.919	100,00 %	363.258	100,00 %	264.433,78	100,00 %	289,43	100,00 %	354,71	100,00 %	418,04	APBD

No	Bidang /Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program	Kinerja Kondisi Awal		Target										Sumber Pendanaan
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	Kinerja	Pagu (x1.000.000)	
					PROGRAM PENGOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	85,00 %	479.420	85,00 %	410.817	85,00 %	299.053,96	85,00 %	327,32	85,00 %	401,15	85,00 %	472,77	APBD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE MIP,SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001